



BAPPENAS



# BUKU UTAMA **RENCANA** AKSI

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2007 - 2009

Badan Rehabilitasi  
& Rekonstruksi NAD - Nias  
dan  
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Agustus 2007

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007-2009

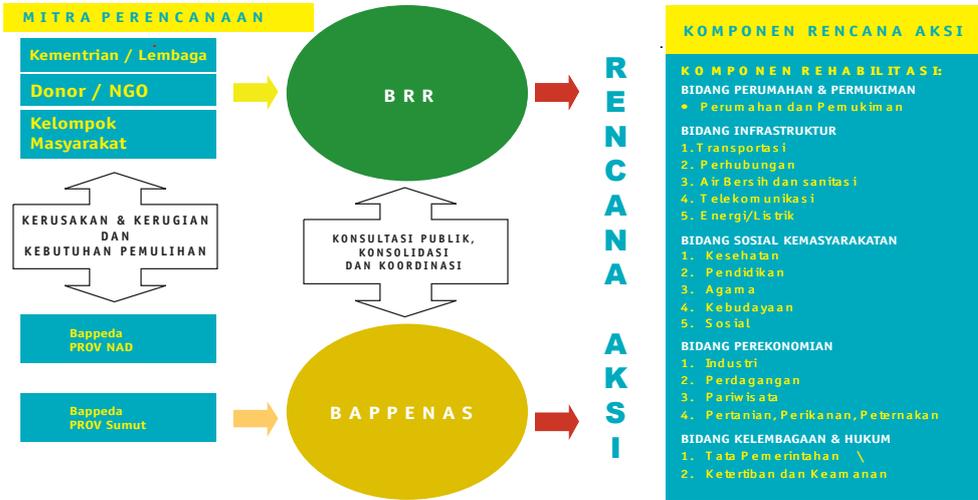
**DASAR PENYUSUNAN RENCANA AKSI.** Penyusunan Rencana Aksi ini didasarkan atas : 1) Pertimbangan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami dan gempa, dan mengacu kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana tercantum dalam Perpres No 30 tahun 2005, dengan mempertimbangkan penanganan pasca bencana, khususnya di wilayah Nias dengan mengakomodasi kerusakan dan kerugian akibat gempa 28 Maret 2005 secara menyeluruh. Dinamika yang berlangsung selama dua tahun terakhir juga diakomodasi dalam Rencana Aksi, 2) Penajaman sasaran Rencana Induk antara lain memuat penyesuaian substansi program, perubahan sasaran, proyeksi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mesti dituntaskan hingga 2009, 3) Pertimbangan masa transisi menjelang berakhirnya tugas BRR NAD-Nias.

**RUANG LINGKUP RENCANA AKSI.** Ruang lingkup penyusunan Rencana Aksi ini adalah: (1) Fokus pada pemulihan perumahan dan permukiman, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup, infrastruktur, sosial kemasyarakatan, perekonomian, serta kelembagaan dan hukum; (2) Wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

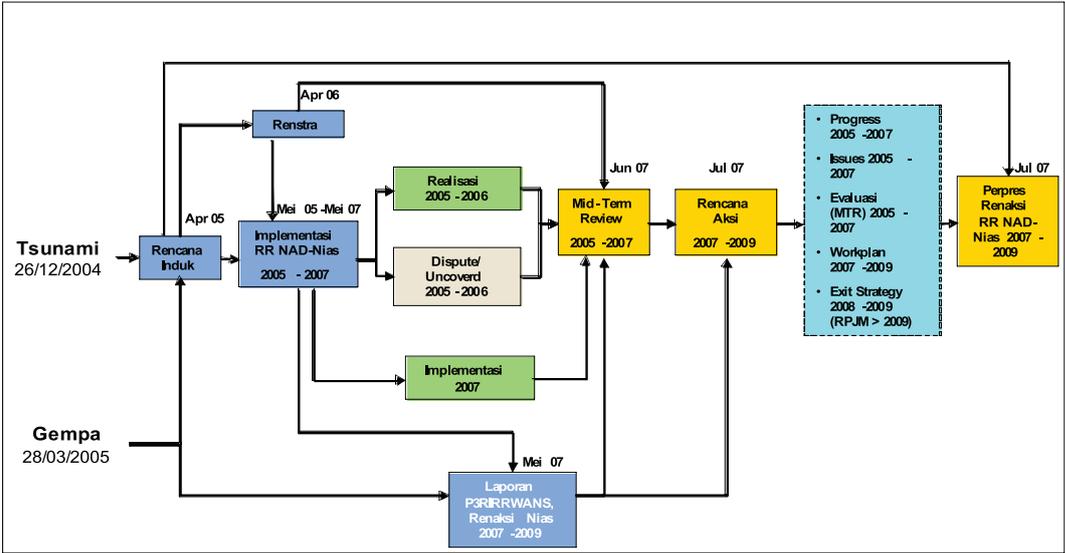
**KERANGKA WAKTU RENCANA AKSI.** Periode waktu yang dicakup dalam Rencana Aksi ini adalah 2007-2009, yakni masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersisa setelah realisasi 2 tahun. Kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 2009 dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan agar keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terjamin pasca 2009.

**METODOLOGI DAN PROSES PENYUSUNAN.** Rencana Aksi ini disusun secara bersama-sama Badan Pelaksana BRR dan Bappenas. Masukan diperoleh dari Dewan Pengarah BRR, Dewan Pengawas BRR, Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, kementerian/lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Rencana Aksi ini disusun melalui berbagai forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi unsur-unsur pemerintah, pemerintah daerah, donor, LSM/NGO, dan masyarakat sipil. Tahapan penyusunan Rencana Aksi melalui proses seperti digambarkan dalam skema berikut ini.

# KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI



# PROSES DAN RENCANA KERJA BERSAMA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2007-2009



**KEMAJUAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.** Dari sudut pembiayaan, perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber APBN melalui alokasi DIPA BRR adalah sebagai berikut;

DIPA	Anggaran	Realisasi			
		Tahun Berjalan	Luncuran/ Trust Fund*	Total	%
2005	3.966.952.500.000	414.662.762.597	2.082.482.891.058	2.497.145.653.655	62,95
2006	10.522.978.230.000	5.684.083.973.514	1.871.138.874.217	7.897.786.730.434	75,05
2007	10.737.371.614.000	1.756.175.035.393*)	-	1.756.175.035.393	16,36

\*) 31 Juli 2007

Sementara itu, dari sudut realisasi fisik dan sasaran kuantitatif capaian rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Program Utama (terlampir).

### ARAH PROGRAM 2007-2009

1. **Penyesuaian Program 2007.** Evaluasi realisasi program tahun anggaran 2005-2006 mengindikasikan adanya perubahan, baik substansi program dan kegiatan maupun perubahan sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil setelah Evaluasi Paruh Waktu (*Midterm Review*). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyesuaian program dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdapat dalam DIPA BRR tahun anggaran 2007 dianggap perlu untuk disesuaikan dengan kondisi yang berubah tersebut.
2. **Arah Kebijakan Program 2008-2009.** Prioritas program selama 2008-2009 diletakkan pada : 1) Penyelesaian pembangunan infrastruktur fisik, perumahan (khususnya untuk mendukung prasarana dan aksesibilitas perumahan dan permukiman), dan proyek-proyek fisik yang merupakan kelanjutan kegiatan yang sudah direncanakan dan dimulai sejak 2007 dan yang mendukung peningkatan ekonomi yang berdampak cepat (*quick yielding*), 2) Pembangunan infrastruktur strategis yang berbasis PHLN, yaitu penyediaan dana rupiah pendamping, 3) Pembangunan bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, agama, sosial, budaya, dan kelembagaan yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas sumberdaya manusia, dan 4) Dukungan peralihan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi secara fungsional kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.

**STRATEGI TRANSISI.** Menghadapi berakhir masa tugas BRR NAD-Nias, program-program disusun dengan mengintegrasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ke dalam program pembangunan Pemda, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan transisi dari fase rekonstruksi ke fase pembangunan berkelanjutan sedini mungkin dengan melibatkan Pemda di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Demikian pula, Pemda, K/L, serta instansi terkait diharapkan mempunyai komitmen dan kapasitas yang cukup untuk melanjutkan pembangunan, termasuk memelihara fasilitas yang dibangun selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Semua pihak juga diharapkan menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan daerah.

**RENCANA RINCI.** Mengacu pada hasil Evaluasi Paruh Waktu dan memperhatikan perkembangan pelaksanaan 2005-2006, maka dalam Rencana Aksi tahun 2007-2009 disusun program pementapan tahun 2007 dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2008-2009, yang rekapitulasinya dapat dilihat pada TABEL berikut.

**Tabel 1. REKAPITULASI PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (APBN BRR) PROPINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 - 2009**

No	BIDANG KEGIATAN	NAD 2007		NAD 2008		NAD 2009		NIAS 2007		NIAS 2008		NIAS 2009	
1	PERUMAHAN	2.877.396.800.000	2.207.993.200.000	-	-	-	-	387.094.029.000	392.087.800.000	392.087.800.000	-	-	-
2	INFRASTRUKTUR	2.245.339.311.975	3.784.307.809.000	2.801.556.581.000	2.801.556.581.000	2.801.556.581.000	2.801.556.581.000	639.151.489.170	1.080.477.441.746	1.080.477.441.746	766.154.479.600	766.154.479.600	766.154.479.600
3	SOSIAL KEMASYARAKATAN	1.074.503.793.000	677.713.602.000	-	-	-	-	325.251.322.600	375.558.800.000	375.558.800.000	39.285.000.000	39.285.000.000	39.285.000.000
4	EKONOMI	1.040.699.391.000	840.415.620.000	-	-	-	-	63.881.755.000	69.823.700.000	69.823.700.000	11.128.750.000	11.128.750.000	11.128.750.000
5	KELEMBAGAAN	661.031.876.000	154.721.961.600	-	-	-	-	58.103.560.000	77.530.750.000	77.530.750.000	11.726.250.000	11.726.250.000	11.726.250.000
	MANAJEMEN	803.974.140.000	350.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	62.925.317.000	-	-	-	-	-
	TOTAL	8.702.945.311.975	8.015.152.192.600	3.051.556.581.000	3.051.556.581.000	3.051.556.581.000	3.051.556.581.000	1.536.407.472.770	1.995.478.491.746	1.995.478.491.746	828.294.479.600	828.294.479.600	828.294.479.600
	TOTAL 2007 - 2009			19.769.654.085.575	19.769.654.085.575	19.769.654.085.575	19.769.654.085.575				4.360.180.444.116	4.360.180.444.116	4.360.180.444.116

REKAPITULASI KEBUTUHAN PENDANAAN			
TAHUN	NAD		TOTAL
	NAD	NIAS	
2007	8.702.945.311.975	1.536.407.472.770	10.239.352.784.745
2008	8.015.152.192.600	1.995.478.491.746,0	10.010.630.684.346
2009	3.051.556.581.000	828.294.479.600,00	3.879.851.060.600
Total	19.769.654.085.575	4.360.180.444.116	24.129.834.529.691
TOTAL 2008-2009	11.066.708.773.600	2.823.772.971.346	13.890.481.744.946

**Tabel 2. REKAPITULASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (MENURUT SUMBER PENDANAAN) PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN - 2007**

PROGRAM UTAMA	2007							PEMDA Prov. NAD
	BRR		Donor/NGO		NIAS	NIAS	PEMDA Prov. NAD	
	NAD	NIAS	NAD	NIAS				
<b>I. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	2.877.396.800.000	387.094.029.000	2.141.194.356.400	258.917.743.600	258.917.743.600	6.277.900.000	0	
1 Perumahan	2.637.826.800.000	360.097.379.000	1.585.763.382.000	258.917.743.600	258.917.743.600	6.277.900.000	0	
2 Tata Ruang	37.570.000.000	26.996.650.000	555.430.974.400	0	0	0	0	
3 Pertanahan	202.000.000.000	0	0	0	0	0	0	
4 Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. INFRASTRUKTUR</b>	2.245.339.311.975	639.151.489.170	4.829.641.301.200	139.809.860.800	139.809.860.800	415.918.032.700	346.444.010.500	
1 Jalan dan Transportasi	1.169.005.272.000	508.605.647.250	4.829.641.301.200	39.239.416.800	39.239.416.800	52.333.090.900	1.126.023.000	
2 Energi & Telekomunikasi	237.568.188.000	29.734.314.000	0	1.298.874.400	1.298.874.400	6.013.178.000	10.001.730.300	
3 Sumber Daya Air	320.580.561.275	75.818.127.920	0	23.883.200.000	23.883.200.000	0	0	
4 Air dan Sanitasi	179.225.803.000	24.993.400.000	0	75.388.369.600	75.388.369.600	0	0	
5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	20.866.516.000	0	0	0	0	0	0	
6 Kawasan Percontohan	75.222.499.700	0	0	0	0	0	0	
7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	84.220.472.000	0	0	0	0	0	0	
8 IREP	158.650.000.000	0	0	0	0	0	0	
<b>III. SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	1.074.503.793.000	325.251.322.600	3.904.953.044.400	276.612.692.651	276.612.692.651	1.926.253.811.000	1.926.253.811.000	
1 PKPP	945.369.755.000	315.102.863.600	3.567.686.464.400	270.025.402.491	270.025.402.491	0	0	
- Pendidikan	652.258.160.000	200.860.771.600	2.043.598.070.000	140.374.499.091	140.374.499.091	0	0	
- Kesehatan	249.850.595.000	113.328.117.000	1.290.286.678.400	129.650.903.400	129.650.903.400	0	0	
- Pemberdayaan Perempuan	43.261.000.000	913.975.000	233.801.716.000	0	0	0	0	
2 AGOSBUDPORA	129.134.038.000	10.148.459.000	337.266.580.000	6.587.290.160	6.587.290.160	1.926.253.811.000	1.926.253.811.000	
- Agama	74.291.068.000	5.999.250.000	17.806.694.800	6.587.290.160	6.587.290.160	0	0	
- Sosial	9.750.000.000	441.127.000	303.881.096.800	0	0	0	0	
- Budaya	2.600.000.000	2.178.082.000	1.000.000.000	0	0	0	0	
- Pemuda dan Olahraga	42.492.970.000	1.530.000.000	14.578.798.400	0	0	1.926.253.811.000	1.926.253.811.000	

Tabel 2. (Lanjutan)

IV. PEREKONOMIAN							1.040.699.391.000	63.881.755.000	0	153.594.929.200	1.632.767.279.500
1	Pertanian**	369.363.682.000	7.134.100.000	-	18.524.439.200	1.438.147.010.100					
	- Tanaman Pangan & Hortikultura**	170.091.413.000	535.000.000	0	-	-					
	- Perkebunan	75.541.000.000	5.905.000.000	0	-	20.027.000.000					
	- Peternakan	55.232.450.000	694.100.000	0	-	1.418.120.010.100					
	- Kehutanan	68.498.819.000	-	0	-	-					
2	Perikanan	375.410.149.000	23.695.957.000	-	76.798.416.800	-					
3	Pengembangan Usaha	295.925.560.000	33.051.698.000	-	58.272.073.200	194.620.269.400					
	- Industri	44.951.000.000	28.431.440.000	0	-	-					
	- Perdagangan	56.164.000.000	-	0	7.015.920.000	-					
	- Tenaga kerja	20.794.660.000	850.000.000	0	51.256.153.200	104.075.259.600					
	- Koperasi dan UKM	142.928.900.000	3.742.500.000	0	-	85.388.562.800					
	- Pariwisata	31.087.000.000	27.758.000	0	-	5.156.447.000					
V. KELEMBAGAAN DAN HUKUM							661.031.876.000	27.758.000	981.607.275.600	387.535.878.000	3.650.893.671.500
1	Kelembagaan Daerah	381.703.600.000	58.103.560.000	981.607.275.600	387.535.878.000	62.925.317.000					
2	Hukum	80.220.160.000	58.103.560.000	0	-	3.587.968.354.500					
3	K3M	199.108.116.000	-	0	-	0					
BIAYA MANAJEMEN							803.974.140.000	62.925.317.000	661.039.255.600	0	0
JUMLAH							8.702.945.311.975	1.536.407.472.770	12.518.435.233.200	1.216.471.104.251	7.632.110.694.700

**Tabel 3. REKAPITULASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (MENURUT SUMBER PENDANAAN) PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN - 2008**

PROGRAM UTAMA	2008							PEMDA Prov. NAD
	BRR		Donor/NGO		NIAS	NAD	NIAS	
	NAD	NIAS	NAD	NIAS				
<b>I. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>								
1 Perumahan	2.207.993.200.000	392.087.800.000	0	0	55.303.007.289	0	0	7.339.900.000
2 Tata Ruang	2.081.479.200.000	392.087.800.000	0	0	0	0	0	7.089.900.000
3 Pertanahan	20.750.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000
4 Lingkungan Hidup	80.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Lingkungan Hidup	25.764.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. INFRASTRUKTUR</b>								
1 Jalan dan Transportasi	3.784.307.809.000	1.080.477.441.746	276.000.000	0	1.514.522.977.088	276.000.000	0	1.528.809.148.800
2 Energi & Telekomunikasi	2.229.670.413.000	924.736.500.000	276.000.000	0	0	276.000.000	0	1.260.639.872.000
3 Sumber Daya Air	128.881.882.000	14.245.604.846	0	0	0	0	0	232.269.239.500
4 Air dan Sanitasi	357.215.000.000	88.995.336.900	0	0	0	0	0	1.274.350.000
5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	620.509.441.000	52.500.000.000	0	0	0	0	0	10.815.149.000
6 Kawasan Percontohan	89.400.000.000	0	0	0	0	0	0	23.810.538.300
7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0	0	0	0	0	0	0
8 IREP	215.760.079.000	0	0	0	0	0	0	0
	142.870.994.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>								
1 PKPP	677.713.602.000	375.558.800.000	757.604.265.000	0	1.219.624.815.956	757.604.265.000	0	1.249.569.384.000
- Pendidikan	210.310.800.000	320.563.800.000	644.000.000	0	0	644.000.000	0	852.532.832.000
- Kesehatan	175.954.800.000	210.847.000.000	460.000.000	0	0	460.000.000	0	0
- Pemberdayaan Perempuan	26.780.000.000	109.716.800.000	184.000.000	0	0	184.000.000	0	0
2 AGOSBUDPORA	7.576.000.000	0	0	0	0	0	0	0
- Agama	467.402.802.000	54.995.000.000	756.960.265.000	0	0	756.960.265.000	0	397.036.552.000
- Sosial	122.561.295.000	30.900.000.000	122.200.000.000	0	0	122.200.000.000	0	0
- Budaya	223.339.500.000	640.000.000	400.000.000.000	0	0	400.000.000.000	0	0
- Pemuda dan Olahraga	98.518.750.000	12.575.000.000	147.598.265.000	0	0	147.598.265.000	0	0
	22.983.257.000	10.880.000.000	87.162.000.000	0	0	87.162.000.000	0	0

Tabel 3. (Lanjutan)

IV. PEREKONOMIAN							0	492.519.546.667	2.269.851.017.300		
1	Pertanian**	84.319.560.000	69.823.700.000	31.272.750.000	-	-	-	1.602.922.155.400			
	- Tanaman Pangan & Hortikultura**	17.970.000.000	8.572.500.000	0	0	-	-				
	- Perkebunan	14.819.160.000	22.700.250.000	0	0	-	-				
	- Peternakan	47.000.000.000	-	0	0	-	-				
	- Kehutanan	4.530.400.000	-	0	0	-	-				
2	Perikanan	666.388.060.000	9.070.000.000	0	-	-	-	124.960.000.000			
3	Pengembangan Usaha	89.708.000.000	29.480.950.000	0	-	-	-	541.968.861.900			
	- Industri	9.000.000.000	-	0	0	-	-				
	- Perdagangan	4.500.000.000	-	0	0	-	-				
	- Tenaga kerja	2.500.000.000	-	0	0	-	-				
	- Koperasi dan UKM	39.808.000.000	28.480.950.000	0	0	-	-				
	- Pariwisata	33.900.000.000	1.000.000.000	0	0	-	-				
V. KELEMBAGAAN DAN HUKUM							0	0	475.662.716.600		
1	Kelembagaan Daerah	145.721.961.600	77.530.750.000	0	0	0	0	418.372.279.400			
2	Hukum	2.000.000.000	77.530.750.000	0	0	0	0	8.002.813.500			
3	K3M	7.000.000.000	0	0	0	0	0	49.287.623.700			
BIAYA MANAJEMEN							0	0	0		
JUMLAH							8.015.152.192.600	1.995.478.491.746	757.880.265.000	3.281.970.347.000	5.531.232.166.700

**Tabel 4. REKAPITULASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (MENURUT SUMBER PENDANAAN) PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN - 2009**

PROGRAM UTAMA	2009					
	BRR		NIAS	Donor/NGO		PEMDA Prov. NAD
	NAD	NIAS		NAD	NIAS	
<b>I. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>						
1 Perumahan	0	0	0	0	0	7.842.900.000
2 Tata Ruang	0	0	0	0	0	0
3 Pertanahan	0	0	0	0	0	7.562.900.000
4 Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	280.000.000
<b>II. INFRASTRUKTUR</b>						
1 Jalan dan Transportasi	2.801.556.581.000	766.154.479.600	276.000.000	276.000.000	0	2.066.586.707.500
2 Energi & Telekomunikasi	1.723.121.500.000	741.560.000.000	276.000.000	276.000.000	0	1.850.390.680.000
3 Sumber Daya Air	28.183.094.000	5.870.000.000	0	0	0	152.507.470.000
4 Air dan Sanitasi	374.111.750.000	18.724.479.600	0	0	0	1.322.759.000
5 Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	594.692.488.000	0	0	0	0	12.062.422.000
6 Kawasan Percontohan	0	0	0	0	0	50.303.376.500
7 Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0	0	0	0	0
8 IREP	81.447.749.000	0	0	0	0	0
<b>III. SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>						
1 PKPP	0	39.285.000.000	644.000.000	644.000.000	0	1.433.298.320.500
- Pendidikan	0	38.245.000.000	644.000.000	644.000.000	0	924.003.513.300
- Kesehatan	0	7.000.000.000	460.000.000	460.000.000	0	0
- Pemberdayaan Perempuan	0	31.245.000.000	184.000.000	184.000.000	0	0
<b>AGSOSBUDPORA</b>						
- Agama	0	1.040.000.000	0	0	0	509.294.807.200
- Sosial	0	640.000.000	0	0	0	0
- Budaya	0	400.000.000	0	0	0	0
- Pemuda dan Olahraga	0	0	0	0	0	0

Tabel 4. (Lanjutan)

IV. PEREKONOMIAN							0	11.128.750.000	0	2.246.404.235.300
1	Pertanian**	-	0	0	0	0	975.000.000	-	1.733.104.407.500	
	- Tanaman Pangan & Hortikultura**	0	0	0	0	0	975.000.000	0		
	- Perkebunan	0	0	0	0	0	-	0		
	- Peternakan	0	0	0	0	0	-	0		
	- Kehutanan	0	0	0	0	0	-	0		
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	119.000.000.000	
3	Pengembangan Usaha	-	-	-	-	-	10.153.750.000	-	394.299.827.800	
	- Industri	0	0	0	0	0	-	0		
	- Perdagangan	0	0	0	0	0	-	0		
	- Tenaga kerja	0	0	0	0	0	-	0		
	- Koperasi dan UKM	0	0	0	0	0	10.153.750.000	0		
	- Pariwisata	0	0	0	0	0	-	0		
V. KELEMBAGAAN DAN HUKUM							0	11.726.250.000	0	553.456.407.500
1	Kelembagaan Daerah	0	0	0	0	0	11.726.250.000	0	491.164.007.900	
2	Hukum	0	0	0	0	0		0	9.219.180.500	
3	K3M	0	0	0	0	0		0	53.073.219.100	
BIAYA MANAJEMEN							250.000.000.000	0	0	0
JUMLAH							3.051.556.581.000	828.294.479.600	920.000.000	6.307.588.570.800

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007-2009</b>	<b>I</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3 RUANG LINGKUP RENCANA AKSI .....	2
1.4 KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN RENCANA AKSI.....	3
1.5 METODOLOGI PENYUSUNAN.....	3
1.6 SISTEMATIKA BUKU RENCANA AKSI.....	5
<b>BAB 2 PERKEMBANGAN PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS 2005-2007</b>	<b>I</b>
2.1.BRR NAD-NIAS .....	1
2.1.1. Dewan Pengarah .....	1
2.1.1.1. Bidang Umum.....	3
2.1.1.2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan .....	5
2.1.1.3. Bidang Perekonomian.....	6
2.1.1.4. Bidang Kesejahteraan Rakyat .....	6
2.1.2 Dewan Pengawas BRR .....	6
2.1.2.1 Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pengawas.....	6
2.1.2.2 Mekanisme Kerja Dewan Pengawas.....	7
2.1.2.3 Temuan hasil pengawasan dan dampak .....	8
2.1.2.4. Implikasi Hasil Pengawasan .....	11
2.1.3. Badan Pelaksana BRR.....	11
2.1.3.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.....	12
2.1.3.2. Bidang Pemulihan Infrastruktur.....	16

2.1.3.3.	Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan.....	25
2.1.3.4.	Bidang Pemulihan Perekonomian.....	48
2.1.3.5.	Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum.....	58
2.1.3.6.	Realisasi APBN.....	65
2.2.	DONOR/NGO.....	69
2.2.1.	Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup.....	70
2.2.2.	Bidang Pemulihan Infrastruktur .....	72
2.2.3.	Bidang Pemulihan Sosial dan Kemasyarakatan.....	74
2.2.3.1.	Pendidikan.....	75
2.2.3.2.	Kesehatan.....	76
2.2.3.3.	Agama .....	78
2.2.3.4.	Sosial dan Budaya .....	79
2.2.4.	Bidang Pemulihan Perekonomian .....	80
2.2.4.1.	Pertanian .....	81
2.2.4.2.	Perikanan.....	82
2.2.4.3.	Pengembangan Usaha .....	83
2.2.5.	Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum .....	84
2.3.	KEMENTERIAN LEMBAGA (K/L).....	85
2.3.1.	Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan.....	85
2.3.1.	Bidang Pemulihan Perekonomian .....	90
2.4.	PEMERINTAH DAERAH .....	96
2.4.1.	Bidang Pemulihan Sosial Budaya .....	99
2.4.2.	Bidang Pemulihan Perekonomian .....	101
2.4.3.	Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum .....	105
2.5.	IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN REHABILITASI REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2005-2006 .....	106

### **BAB 3 SASARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN 2008-2009 I**

3.1	BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP .....	2
3.1.1	Perumahan dan Permukiman.....	2
3.1.2	Tata Ruang .....	4
3.1.3	Pertanahan.....	7
3.1.4	Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam .....	10
3.2	BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR.....	13
3.2.1	Jalan dan Transportasi .....	13
3.2.1.1	Transportasi Laut dan ASDP.....	13
3.2.1.2	Transportasi Udara .....	13
3.2.1.3	Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan.....	14
3.2.2	Energi dan Telekomunikasi .....	17
3.2.2.1	Energi dan Kelistrikan .....	17
3.2.2.2	Telekomunikasi.....	19
3.2.3	Infrastruktur Sumber Daya Air .....	20
3.2.4	Air Minum dan Sanitasi.....	21
3.2.5	Fasilitas dan Bangunan Publik .....	22
3.3	BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN.....	23
3.3.1	Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan .....	23
3.3.2	Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.....	38
3.4	BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN .....	51
3.4.1	Pertanian .....	51
3.4.2.	Perikanan .....	57
3.4.3	Pengembangan Usaha .....	60
3.5	BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM.....	64
3.5.1	Kelembagaan Daerah .....	64
3.5.2	Hukum.....	68
3.5.3	Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M) .....	71
3.6	PENDANAAN RENCANA AKSI NAD-NIAS 2007-2009 .....	73

## **BAB 4 PRINSIP, KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN**

### **REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS 2007 - 2009 I**

4.1.PRINSIP-PRINSIP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.....	2
4.2.KEBIJAKAN UMUM.....	2
4.3.KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKTORAL .....	4
4.3.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup .....	5
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	6
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.....	7
4.3.2. Bidang Pemulihan Infrastruktur .....	7
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	7
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.....	8
4.3.2. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan .....	9
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	9
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.....	10
4.3.4. Bidang Pemulihan Perekonomian .....	11
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	11
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.....	11
4.3.5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum .....	12
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	12
4.4.SUMBER-SUMBER PENDANAAN.....	13
Sumber Dana APBN (On Budget).....	14
Sumber Dana Non APBN (Off Budget).....	14
4.5.MEKANISME PENGELOLAAN PENDANAAN.....	14
4.2.MEKANISME PENYALURAN DANA .....	16
Multi Donor Trust Fund (MDTF) .....	18
4.7.MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA .....	18
4.8.MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI .....	20
4.8.1. Kerangka Pemantauan dan Pengendalian .....	22
4.8.2. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian.....	23
4.8.3. Kegiatan Pendukung Pemantauan dan Pengendalian .....	23

## **BAB 5 RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2007 – 2009 I**

5.1.PENYESUAIAN PROGRAM 2007 .....	I
5.1.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup .....	2
5.1.2. Bidang Pemulihan Infrastruktur .....	4
5.1.3. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan.....	7
5.1.4. Bidang Pemulihan Perekonomian .....	10
5.1.5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum .....	13
5.2.PEMANTAPAN PROGRAM TAHUN 2008 .....	14
5.2.1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup .....	15
5.2.2. Bidang Pemulihan Infrastruktur .....	16
5.2.3. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan.....	18
5.2.4. Bidang Pemulihan Perekonomian .....	20
5.2.5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum .....	22
5.3. KEBIJAKAN PENGANGGARAN BAGI KEBERLANJUTAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI .....	23
5.4 TAHAPAN TRANSISI PASCA 2009 DAN PERSIAPAN PENGAKHIRAN TUGAS .....	24
5.4.1 Persiapan Pengalihan .....	24
5.4.1.1 Pemantapan Sekretariat Bersama.....	27
5.4.1.2 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah .....	29
5.4.1.3 Pemantapan Tim Pengalihan 2008-2009 .....	30

5.4.1.4	Persiapan Penyelesaian Tugas BRR.....	30
5.4.2	Pengelolaan Pendanaan.....	30
5.4.2.1	Dana Desentralisasi Kementerian/Lembaga.....	31
5.4.2.2	Dana Dekonsentrasi.....	31
5.4.2.3	Dana Tugas Pembantuan .....	31
5.4.2.4	Dana Perimbangan (DAU dan DAK) .....	31
5.4.3	Pengalihan Peralatan dan Perangkat (Aset) .....	32
5.4.3.1	Tahap Pengalihan Aset .....	32
5.4.3.2	Jenis- Jenis pengalihan aset .....	33
	Aset Donor dan NGO .....	35
5.4.4	Pengalihan Personil (SDM).....	35
5.4.4.1.	Status Personil dan SDM BRR NAD-Nias.....	35
5.4.4.2.	Kebijakan Penyesuaian Organisasi dan Personil BRR NAD-Nias Tahun 2007-2009.....	37
5.4.5	Pengalihan Dokumen .....	38
5.4.5.1	Dokumen Administrasi .....	38
5.4.5.2	Hasil Studi.....	38
5.4.5.3	Sistem .....	39

## **BAB 6 KEBERLANJUTAN PEMULIHAN WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NAD**

### **DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA I**

6.1.	PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI NAD	
	DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA .....	2
6.1.1.	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .....	3
6.1.2.	Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.....	4
6.2.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.....	6
6.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007-2012 .....	6
6.2.1.1	VISI, MISI dan Arah Kebijakan .....	6
6.2.1.2.	Rencana Pembangunan Wilayah .....	7
6.2.1.3.	Rencana Pembangunan Sektoral.....	9
6.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah Kepulauan Nias tahun 2006- 2011 .....	13
6.2.2.1	VISI, MISI dan Arah Kebijakan .....	13
6.2.2.2.	Rencana Pembangunan Wilayah .....	14
6.2.2.3.	Rencana Pengembangan Sektoral .....	15
6.3	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB STAKEHOLDERS DALAM KEBERLANJUTAN PEMULIHAN N WILAYAH PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA .....	25

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	REKAPITULASI PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (APBN BRR) PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 - 2009	4
Tabel 2.	REKAPITULASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (MENURUT SUMBER PENDANAAN) PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN - 2007	5
Tabel 3.	REKAPITULASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (MENURUT SUMBER PENDANAAN) PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN - 2008	7
Tabel 4.	REKAPITULASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (MENURUT SUMBER PENDANAAN) PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN - 2009	9
Tabel 2.1	Realisasi Anggaran APBN BRR dan Non APBN 2005-2006	12
Tabel 2.2	Realisasi Pembangunan Perumahan	13
Tabel 2.3	Realisasi dan Program Permukiman	14
Tabel 2.4	Realisasi Program Tata Ruang	14
Tabel 2.5	Realisasi dan Program Administrasi Pertanahan	15
Tabel 2.6	Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan tahun 2005-2006 dan Program 2007 per kabupaten	15
Tabel 2.7	Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Perumahan Per Kabupaten Kota	15
Tabel 2.8	Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Non Perumahan) Per Kabupaten/ Kota	16
Tabel 2.9	Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007 Sub bidang Jalan dan Jembatan	17
Tabel 2.10	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan	17
Tabel 2.12	Realisasi Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	18
Tabel 2.13	Realisasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	19
Tabel 2.14	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pelabuhan Laut	20

Tabel 2.15	Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar Udara	20
Tabel 2.16	Realisasi Pelaksanaan RR Airstrip	21
Tabel 2.17	Realisasi Pelaksanaan RR Helipad	21
Tabel 2.18	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelistrikan dan Energi	23
Tabel 2.19	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub-Sektor Sumberdaya Air	24
Tabel 2.20	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi	25
Tabel 2.21	Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas Bangunan Umum	26
Tabel 2.22	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Anak Usia Dini)	27
Tabel 2.23	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Wajib Belajar 9 tahun)	27
Tabel 2.24	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Menengah)	29
Tabel 2.25	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi)	30
Tabel 2.26	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)	31
Tabel 2.27	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan (Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan)	32
Tabel 2.28	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan (Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah)	32
Tabel 2.29	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan (Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)	33
Tabel 2.30	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Bidang Kesehatan (Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat)	33
Tabel 2.31	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan	34
Tabel 2.32	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)	35
Tabel 2.33	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan)	35
Tabel 2.34	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan)	36
Tabel 2.35	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara)	37
Tabel 2.36	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Pelayanan Keagamaan	37
Tabel 2.37	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial)	38
Tabel 2.38	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)	38
Tabel 2.39	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS.)	39
Tabel 2.40	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)	40
Tabel 2.41	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial)	41
Tabel 2.42	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Bantuan Sosial per Kabupaten	41
Tabel 2.43	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Penguatan Kelembagaan)	42
Tabel 2.44	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan)	43
Tabel 2.45	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)	43
Tabel 2.46	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan	

	(Program Pelayanan Keluarga Berencana)	44
Tabel 2.47	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga	45
Tabel 2.48	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Budaya (Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat)	46
Tabel 2.49	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Bangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	47
Tabel 2.50	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	49
Tabel 2.51	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perkebunan	50
Tabel 2.52	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peternakan	51
Tabel 2.53	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kehutanan dan Lingkungan	52
Tabel 2.54	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perikanan	53
Tabel 2.60	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Industri	54
Tabel 2.61	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perdagangan	55
Tabel 2.62	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Koperasi dan UKM	56
Tabel 2.56	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tenaga Kerja	56
Tabel 2.57	Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata	57
Tabel 2.58	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR	58
Tabel 2.59	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda)	58
Tabel 2.60	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda)	59
Tabel 2.61	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda)	60
Tabel 2.62	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah)	60
Tabel 2.63	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR	60
Tabel 2.64	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Kejaksaan oleh BRR, Departemen Hukum dan HAM dan Pengadilan	61
Tabel 2.65	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Bapel BRR Dalam Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	63
Tabel 2.66	Penyerapan Anggaran DIPA 2005 (Dalam Rp. Juta)	65
Tabel 2.67	Penyerapan Anggaran DIPA 2006 (Dalam Rp. Juta)	67
Tabel 2.68	Persentase Penyerapan Anggaran	68
Tabel 2.69	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias bersumber dari off-budget berdasarkan sektor pemulihan	69
Tabel 2.70	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup	70
Tabel 2.71	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO ( <b>Off Budget</b> )	71
Tabel 2.72	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Infrastruktur	72
Tabel 2.73	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh Donor dan NGO	73
Tabel 2.74	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Dasar Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	74
Tabel 2.75	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan	74
Tabel 2.76	Pembiayaan Pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	75
Tabel 2.77	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	75
Tabel 2.78	Pembiayaan Kesehatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	76
Tabel 2.79	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO ( <b>Off Budget</b> )	77

Tabel 2.80	Pembiayaan Agama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	78
Tabel 2.81	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	79
Tabel 2.82	Pembiayaan Sosial Budaya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias	79
Tabel 2.83	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial dan Budaya yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	80
Tabel 2.84	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Perekonomian	80
Tabel 2.85	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO ( <b>Off Budget</b> )	81
Tabel 2.86	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kehutanan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	82
Tabel 2.87	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	82
Tabel 2.88	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO ( <b>Off Budget</b> )	83
Tabel 2.89	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO ( <b>Off Budget</b> )	83
Tabel 2.90	Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	84
Tabel 2.91	Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)	85
Tabel 2.92	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga Bidang Pemulihan Sosial Budaya	86
Tabel 2.93	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian/Lembaga Bidang Pemulihan Ekonomi	91
Tabel 2.94	Penjabaran APBD TA. 2005 yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami	97
Tabel 2.95	Penjabaran APBD TA. 2006 yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami	98
Tabel 2.96	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Sosial Budaya	100
Tabel 2.97	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ekonomi	101
Tabel 2.98	Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006	103
Tabel 2.99	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum	105
Tabel 2.100	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat	105
Tabel 3.1	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman NAD - Nias	2
Tabel 3.2	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup NAD – Nias	4
Tabel 3.3	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tata Ruang NAD - Nias	5
Tabel 3.4	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Sub Bidang Tata Ruang NAD – Nias	6
Tabel 3.5	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pertanahan NAD - Nias	7
Tabel 3.6	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut sub bidang pertanahan NAD – Nias	9
Tabel 3.7	Kebijakan dan Kegiatan Pokok Pemulihan Lingkungan Hidup dan SDA Dalam Rencana Induk	10
Tabel 3.7	Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Laut dan ASDP NAD - Nias	13
Tabel 3.8	Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Udara NAD - Nias	14
Tabel 3.9	Sasaran Rencana Aksi Sub Jalan dan Jembatan NAD - Nias	15
Tabel 3.10	Sasaran Rencana Aksi Sub Terminal Bus dan LLAJ NAD - Nias	15
Tabel 3.11	Sasaran Rencana Aksi Sub Pos dan Telematika NAD - Nias	16

Tabel 3.12	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub bidang Jalan dan Transportasi NAD – Nias	17
Tabel 3.13	Sasaran Rencana Aksi Sub Listrik NAD - Nias	18
Tabel 3.14	Sasaran Rencana Aksi Sub Energi NAD - Nias	19
Tabel 3.15	Sasaran Rencana Aksi Sub Telekomunikasi NAD - Nias	20
Tabel 3.16	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Energi dan Telekomunikasi NAD – Nias	20
Tabel 3.17	Sasaran Rencana Aksi Sub Sumber Daya Air NAD –Nias	21
Tabel 3.18	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Sub Bidang Sumber Daya Air (Irigasi, Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai).	21
Tabel 3.19	Sasaran Rencana Aksi Sub Air Minum dan Sanitasi NAD – Nias.	21
Tabel 3.20	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air (Air Minum, Sanitasi dan Drainase) NAD - Nias	22
Tabel 3.21	Sasaran Rencana Aksi Sub Fasilitas dan Bangunan Publik NAD - Nias	22
Tabel 3.22	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Fasilitas dan Bangunan NAD – Nias	23
Tabel 3.23	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD - Nias (Program Pendidikan Anak Usia Dini)	23
Tabel 3.24	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Wajar 9 tahun)	24
Tabel 3.24	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias (Program Pendidikan Menengah)	25
Tabel 3.25	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi)	26
Tabel 3.26	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)	27
Tabel 3.27	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias	29
Tabel 3.28	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias (Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan)	30
Tabel 3.29	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias (Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah)	31
Tabel 3.30	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias (Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)	31
Tabel 3.31	Program Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat	32
Tabel 3.32	Program Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana, Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.	33
Tabel 3.33	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias	34
Tabel 3.34	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Penguatan Kelembagaan)	35
Tabel 3.35	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan)	35
Tabel 3.36	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)	36
Tabel 3.37	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Pelayanan Keluarga Berencana)	37
Tabel 3.38	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD – Nias	38
Tabel 3.48	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)	39
Tabel 3.49	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan)	39
Tabel 3.50	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan)	40
Tabel 3.51	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara)	40

Tabel 3.52	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Agama NAD - Nias	41
Tabel 3.39	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial)	41
Tabel 3.40	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS)	42
Tabel 3.41	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)	43
Tabel 3.42	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)	44
Tabel 3.43	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial)	44
Tabel 3.44	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Sosial NAD - Nias	45
Tabel 3.45	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga NAD - Nias	45
Tabel 3.46	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga NAD - Nias	47
Tabel 3.47	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Budaya NAD - Nias	48
Tabel 3.53	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura NAD - Nias	51
Tabel 3.54	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perkebunan NAD - Nias	53
Tabel 3.55	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Peternakan NAD - Nias	54
Tabel 3.56	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan NAD - Nias	55
Tabel 3.57	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Pertanian NAD – Nias	57
Tabel 3.58	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perikanan, NAD - Nias	58
Tabel 3.59	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Perikanan NAD – Nias	60
Tabel 3.60	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Industrin NAD - Nias	60
Tabel 3.61	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perdagangan NAD - Nias	61
Tabel 3.62	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) NAD - Nias	62
Tabel 3.63	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Ketenagakerjaan, NAD - Nias	62
Tabel 3.64	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pariwisata, NAD - Nias	63
Tabel 3.65	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Pengembangan Usaha NAD – Nias	64
Tabel 3.66.	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA NAD - Nias	65
Tabel 3.67	Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda.	65
Tabel 3.68	Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - NAD-Nias	66
Tabel 3.69	Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda	66
Tabel 3.70	Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.	67
Tabel 3.71	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA , NAD - Nias	67
Tabel 3.72	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum Sub Bidang Kelembagaan Daerah NAD – Nias	68
Tabel 3.73	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Hukum, NAD - Nias	68
Tabel 3.74	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum, Sub Bidang Hukum NAD-Nias	70
Tabel 3.76	Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) .	71
Tabel 3.78	Kebutuhan Pendanaan BRR NAD - Nias tahun 2007-2009	74
Tabel 3.79	Total Kebutuhan Pendanaan Donor/NGO Tahun 2007-2009	74
Tabel 3.80	Total Kebutuhan Pendanaan Pemda NAD Tahun 2007-2009	77

Tabel 4.1	Keterkaitan Kebijakan Umum dengan Bidang atau Pilar Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	3
Tabel 4.3	Kerangka Pemantauan dan Indikator Evaluasi	21
Tabel 5.4	Kegiatan Pengalihan Tugas BRR	25
Tabel 5.1	Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias Tahun 2007	36
Tabel 6.1	Rencana Struktur Ruang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	8
Tabel 6.2	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi - Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012	10
Tabel 6.3	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias	17
Tabel 6.4	Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan	21
Tabel 6.5	Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias	25



# DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Bagan 2.1	Alur dan Mekanisme Koordinasi Dewan Pengarah dan Internal BRR NAD-Nias	2
Bagan 2.2		8
Bagan 5.5	Proses Seleksi Program Sekretariat Bersama	29
Bagan 5.2	Distribusi Alokasi Indikatif Tahun 2008 Menurut Kuadran	15
Gambar 2.1	Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada Tahun 2005	65
Gambar 2.2	Penyerapan Anggaran DIPA 2005 pada Tahun 2006	66
Gambar 2.3	Total Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada 2005 dan 2006	66
Gambar 2.4	Penyerapan Anggaran DIPA 2006 Pada Tahun 2006	67
Gambar 2.5	Penyerapan Anggaran DIPA 2006 dan Trust Fund 2007	68
Gambar 2.6	Jejak Penyerapan DIPA per Tahun Menurut Bidang	69
Gambar 3.1	Grafik Kebutuhan Pendanaan BRR NAD - Nias tahun 2007-2009	76
Gambar 3.2.	Grafik Kebutuhan Pendanaan Donor/NGO Tahun 2007-2009	76
Gambar 3.3	Grafik Kebutuhan Pendanaan Pemda NAD Tahun 2007-2009	78
Gambar 4.1	Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD Tahun 2005-2009	4
Gambar 4.2	Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias-Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2009.	5
Gambar 4.3	Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	16
Gambar 1.1		4
Gambar 1.2		4
Keterangan:	Analisis berdasarkan perkembangan 2 tahun BRR NAD-Nias.	4
	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi	4
	Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Dewan Pengawas BRR	8
	Proses dan Rencana Kerja Bersama	4
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias	4
	Tahun 2007 – 2009	4
Gambar 4.4	Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri	17
Gambar 4.5	Kerangka kerja logis kegiatan pemantauan dan pengendalian	22
Gambar 5.1	Kuadran Penilaian Program Tahun 2007-2009	1
Bagan 5.3	Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR	25
Bagan 5.4	Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama	28



# BAB I

# PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Sejak bulan Mei 2005 hingga Mei 2007, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang disingkat BRR NAD-Nias, sudah melaksanakan mandatnya dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam laporan Evaluasi Paruh Waktu BRR NAD-Nias, terdapat 4 (empat) kategori pelaksanaan Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pasca gempa dan tsunami, yaitu:

1. Realisasi sasaran program dan kegiatan yang melebihi dari Rencana Induk
2. Realisasi sasaran program dan kegiatan yang lebih rendah dari Rencana Induk
3. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di luar dari Rencana Induk
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Induk yang tidak dilaksanakan tetapi dilaksanakan oleh pihak lain

Di samping itu, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas. Hal itu mengakibatkan target yang tercantum dalam Rencana Induk belum dapat direalisasikan secara penuh, antara lain yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya serta permukiman. Contohnya, meskipun rumah sudah selesai dibangun tetapi belum dihuni karena kualitas bangunan serta prasarana dan sarana dasar permukiman belum memenuhi syarat.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun menjelang berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009, diperlukan suatu Rencana Aksi yang mampu mengakomodasikan kebutuhan riil di lapangan sesuai dengan ketersediaan dana dan sumberdaya manusia serta kelembagaan dan sistem kerja menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Aksi ini dilakukan dalam masa transisi menjelang proses peralihan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR kepada Pemerintah

Daerah dalam rangka keberlanjutan. Keberadaan Rencana Aksi ini merupakan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis dan Rencana Aksi yang sudah pernah dilakukan oleh BRR sebelumnya dengan mempertimbangkan dinamika serta kondisi lapangan.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi ini adalah untuk memberikan landasan yang kuat dan sistematis serta sebagai acuan bagi pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi untuk periode 2007-2009. Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi ini adalah sebagai berikut:

1. Penajaman sasaran Rencana Induk yang memuat; penyesuaian substansi program, perubahan sasaran, proyeksi kegiatan hingga 2009 dengan mempertimbangkan masa transisi menjelang berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias
2. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Mobilisasi pendanaan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).
4. Menciptakan kesinambungan dan keterpaduan dalam pembangunan kembali wilayah dan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada aspek kelembagaan, pendanaan dan SDM

## 1.3 RUANG LINGKUP RENCANA AKSI

Ruang lingkup dalam rencana aksi ini meliputi bidang-bidang pemulihan sebagai berikut:

1. Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
2. Infrastruktur
3. Sosial Kemasyarakatan
4. Perekonomian
5. Kelembagaan dan Hukum

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias tahun 2007-2009 ini disusun dengan mempertimbangkan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami pada 26 Desember 2004 dan bencana gempa 28 Maret 2005. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD mengacu kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 30 Tahun 2005, dengan penyesuaian sasaran berdasarkan kebutuhan riil. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Nias belum sepenuhnya tertampung dalam Rencana Induk.

Wilayah perencanaan dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini mencakup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan berdasarkan wilayah administratif. Pembagian wilayah pemerintahan tersebut untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 2007-2009.

## **.4 KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN RENCANA AKSI**

Kerangka waktu pelaksanaan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ini mencakup kurun waktu tahun 2007 hingga April 2009.

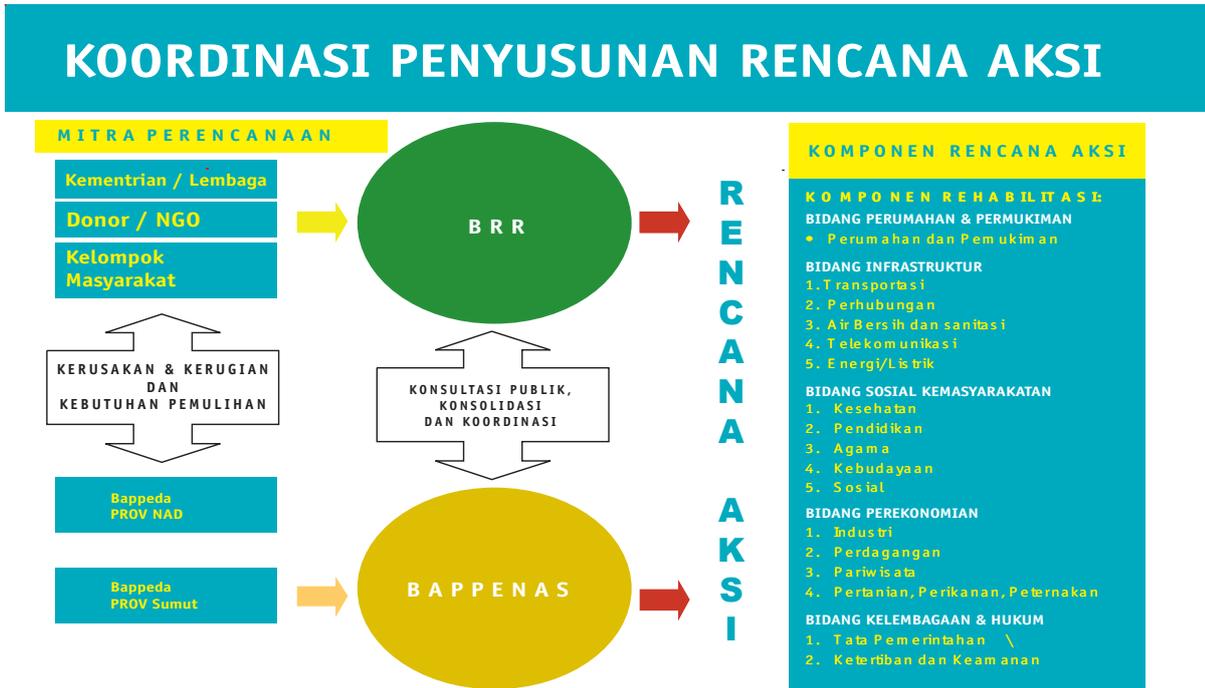
Jangka waktu ini merupakan sisa masa tugas BRR dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan mulai Mei 2009 hingga tahun 2012 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Kementerian/Lembaga. Untuk wilayah Provinsi NAD masa pembangunan jangka menengah yaitu tahun 2007 sampai dengan 2012, sedangkan untuk wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yaitu tahun 2006 sampai dengan 2011.

Terkait dengan keberlanjutan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah menjadi salah satu acuan yang memberikan arahan dalam rangka kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana. Dengan demikian proses pemulihan di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi tugas dan tanggung jawab bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.

## **1.5 METODOLOGI PENYUSUNAN**

Rencana Aksi ini disusun bersama oleh Badan Pelaksana BRR dan Bappenas yang didukung oleh Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai pemangku kepentingan. Dalam prosesnya dilakukan konsultasi dan koordinasi untuk menentukan program dan sasaran lebih lanjut melalui berbagai forum konsultasi publik. Proses koordinasi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar I.1**  
Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi



Dalam proses penyusunan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini terdiri dari beberapa alur dan kerangka proses pemikiran yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar I. 2**  
Proses dan Rencana Kerja Bersama Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias Tahun 2007 – 2009



## I.6 SISTEMATIKA BUKU RENCANA AKSI

Buku Rencana Aksi ini berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan yang mencakup antara lain: perkiraan sasaran kebutuhan baru, kebijakan, prinsip, dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi 2007-2009, dilengkapi dengan lampiran yang berisi rencana rinci kegiatan dan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan bagian tak terpisahkan dan satu kesatuan dokumen Rencana Aksi (Renaksi) ini. Kerangka pembangunan jangka menengah di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dielaborasi pada bagian akhir, yang merupakan langkah kesinambungan dan keberlanjutan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sistematika Buku Rencana Aksi ini disusun dengan kerangka sebagai berikut:

**Bab I :** Memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kerangka waktu, metodologi penyusunan serta sistematika rencana aksi.

**Bab II :** Menguraikan perkembangan pelaksanaan upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007.

**Bab III :** Menguraikan mengenai sasaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2008-2009.

**Bab IV:** Membahas prinsip, kebijakan umum, strategi dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009.

**Bab V :** Menjelaskan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009.

**Bab VI :** Menguraikan kebijakan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.



# **BAB 2**

# **PERKEMBANGAN**

# **PELAKSANAAN**

# **UPAYA PENANGANAN**

# **REHABILITASI DAN**

# **REKONSTRUKSI NAD-**

# **NIAS 2005-2007**

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias yang dievaluasi dalam kurun waktu 2005-2007, bersumber dari program dan proyek TA 2005 murni dan TA 2006 luncuran serta TA 2006, yang terdiri dari anggaran 2006 murni dan luncuran yang dikelola melalui dana 'trust fund'. Evaluasi pelaksanaan tahun 2007 dilakukan sampai bulan Mei 2007. Evaluasi yang dilakukan mencakup program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BRR NAD-Nias Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemda, Kementerian/Lembaga dan donor/NGOs serta pihak lain yang ditugasi dan/atau berperan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya disebut pemangku kepentingan. Atas dasar hal tersebut, maka uraian perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias meliputi kegiatan yang dilakukan oleh BRR NAD-Nias dan para pemangku kepentingan lainnya

## **2.1. BRR NAD-NIAS**

Sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2005, BRR terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (Bapel). Oleh karena itu, uraian tentang perkembangan upaya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas serta Bapel.

### **2.1.1. DEWAN PENGARAH**

Dewan Pengarah berperan mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimulai pada tahun 2005 dan tahun 2006. Berbagai kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Perpu No.2 tahun 2005 yang kemudian ditetapkan menjadi

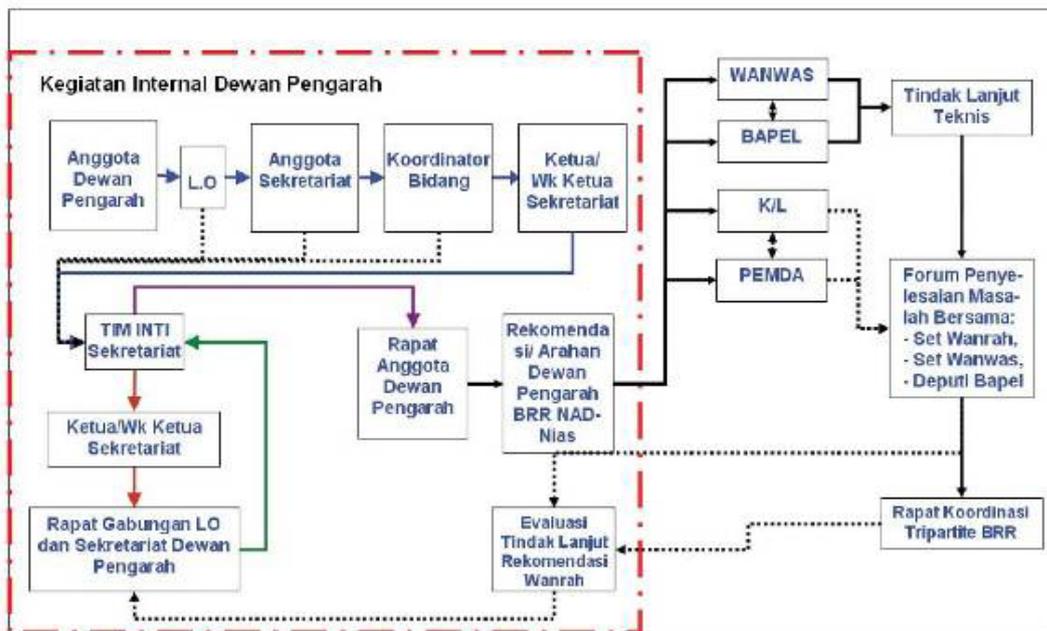
Undang-Undang No. 10 tahun 2005, yakni memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dan atau dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana.

Anggota Dewan Pengarah merupakan representasi berbagai pemangku kepentingan yang meliputi unsur masyarakat, unsur akademisi/ perguruan tinggi, unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta unsur lain yang mendukung fungsi pengarah. Anggota Dewan Pengarah bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa aspirasi berbagai pihak yang diwakilinya telah menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam perumusan arahan oleh Dewan Pengarah, para Anggota Dewan Pengarah secara rutin melaksanakan rapat dan pertemuan disertai kunjungan ke daerah yang terkena bencana guna mendapatkan berbagai masukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam mendukung kegiatan Dewan Pengarah, telah dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah yang berkedudukan di Jakarta untuk tingkat Pusat dan perwakilan di tingkat daerah, yaitu di Medan untuk wilayah Nias dan Sumatera Utara serta di Banda Aceh untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengarah terdiri dari Pejabat Penghubung, Anggota Sekretariat dan Tim Inti.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi kelembagaan Dewan Pengarah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, maka Dewan Pengarah telah menetapkan alur dan mekanisme koordinasi pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui alur dan mekanisme koordinasi pada Bagan II-1 telah dihasilkan kebijakan-kebijakan dan rekomendasi yang digunakan acuan dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan, baik oleh Bapel maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Bagan 2. 1 Alur dan Mekanisme Koordinasi Dewan Pengarah dan Internal BRR NAD-Nias**



Sumber : Dewan Pengarah, 2007

Untuk memudahkan Badan Pelaksana dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan di lapangan, Dewan Pengarah telah menyampaikan rekomendasi penyelesaian berbagai permasalahan yang dijumpai di lapangan. Rekomendasi tersebut juga dibahas dalam rapat-rapat tripartit yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pengarah, anggota Dewan Pengawas dan jajaran pimpinan Badan Pelaksana.

Beberapa isu dan permasalahan strategis serta arahan yang telah dihimpun oleh Dewan Pengarah selama tahun 2005 dan 2006 dan berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, dibagi kedalam 4 (empat) Bidang yaitu (i) Umum (ii) Politik, Hukum dan Keamanan, (iii)Perekonomian dan (iv) Kesejahteraan Rakyat.

#### 2.1.1.1. BIDANG UMUM

Secara khusus, permasalahan yang mengemuka pada bidang ini adalah minimnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan antar instansi BRR dengan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya “*Leadership Competency*” dan terhambatnya penerbitan Peraturan Perundangan khususnya dibidang Pertanahan dan Hukum. Akibatnya terjadi keterlambatan realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2005 dan 2006 yang pada gilirannya menyulitkan penyelesaian kegiatan serta tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2006. Di samping itu, adanya kebutuhan yang berkembang di lapangan dan besarnya harapan masyarakat dalam pemulihan kembali daerah yang terkena bencana, diperlukan percepatan dalam pelaksanaan revisi Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias.

Beberapa upaya, rekomendasi dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan strategis yang telah direalisasikan dan/atau sedang diproses adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Pendanaan
  - i. Untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 70/2005 tentang perubahan ke tiga atas Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahun 2006, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Dewan Pengarah, telah menyurati Presiden untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 70/2005, khusus masalah tenggat waktu pelaksanaan pengadaan perumahan sebelum 1 Juli 2006 untuk dapat diperpanjang sampai dengan Desember 2007. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 79/2006 tentang perubahan kelima tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini BAPPENAS sedang sedang memproses perubahan ketujuh atas Keppres 80/2003 sesuai dengan usulan Kepala Badan Pelaksana kepada Presiden Republik Indonesia;
  - ii. Kementerian/Lembaga diharapkan menyegerakan penentuan dan penempatan satuan kerja (satker) guna merealisasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias.
- b. Aspek Perencanaan Program
  - i. Telah dilakukan pembahasan antara Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Kementerian/ Lembaga sehingga telah disepakati mengenai lingkup tugas BRR sesuai Rencana Induk, terutama menyangkut batasan wilayah dan obyek yang ditangani agar tidak tumpang tindih dengan program Departemen/instansi;
  - ii. Dalam kaitannya dengan peningkatan dayaguna pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi selalu berkoordinasi dan mengkomunikasikan rencana kerjanya kepada Dewan Pengarah, termasuk di dalam penyusunan rencana aksi tahunan.
- c. Koordinasi BRR
  - i. Koordinasi internal BRR telah diperjelas dan ditindaklanjuti melalui forum interaksi dan komunikasi yang intensif antar seluruh komponen BRR (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana). Hal ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan

rapat tripartit yang kemudian kesepakatannya dibahas lebih lanjut pada tingkat kesekretariatan Dewan Pengarah;

- ii. Koordinasi secara eksternal antara BRR, khususnya Badan Pelaksana, dengan kementerian/lembaga dan terutama dengan pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama (SEKBER) serta Regionalisasi guna untuk memaksimalkan ; 1) koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemograman dan evaluasi, 2) pengelolaan data dan informasi, 3) memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan, 4) peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2005 dan 2006 telah ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Tim Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, Bappenas, Badan Pelaksana, Sekretariat Dewan Pengarah, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya guna menjamin dan menciptakan: (a) koordinasi antar pelaku pembangunan, (b) integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan, (c) keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta (d) penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

e. Integrasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias ke dalam Program Pembangunan Pemerintah Daerah

- i. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi diharapkan agar melakukan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Bappeda sebagai penanggung jawab dalam perumusan dan perancangan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Bappeda dan sudah dibentuk satker perencanaan yang berkedudukan di Bappeda Provinsi NAD dan Sekretariat Bersama.
- ii. Khusus pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi perwakilan Nias dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara telah menindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama.

f. Penyempurnaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias

- i. Badan Pemeriksa Keuangan telah merekomendasikan revisi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekomendasi NAD dan Nias terhadap kegiatan atau program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh-Nias pada saat sekarang, termasuk dalam merumuskan besaran kegiatan dan besaran anggaran sesuai realita pelaksanaan. Hanya saja perlu dirumuskan mekanisme dan prosedur dalam proses perubahan Rencana Induk, sehingga perubahan tersebut dapat mendorong percepatan proses pemulihan di daerah bencana;
- ii. Rencana Aksi yang disusun oleh Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota seluruh NAD pada tahun 2005-2006 perlu dievaluasi bersama, dikoordinasikan dan disesuaikan dengan Rencana Induk serta Rencana Strategis BRR, sehingga dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu kejelasan status legal dokumen perencanaannya;
- iii. Perlunya fleksibilitas dalam Rencana Induk dengan tidak melihat batas-batas wilayah namun tetap mengutamakan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana;
- iv. Menindaklanjuti keinginan Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk melakukan penyusunan kembali Rencana Induk untuk Kepulauan Nias dan kesepakatan tripartite internal BRR. Bappenas bersama-sama Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan

Kepulauan Nias serta Badan Pelaksana Perwakilan Nias telah melakukan penyusunan Rencana Aksi Kepulauan Nias pasca bencana gempa tanggal 28 Maret 2005 yang menjadi bagian dari buku Rencana Aksi ini.

- g. Pelimpahan Kewenangan Pasca Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias (Strategi Peralihan)
- i. Melibatkan secara aktif Pemerintah Daerah dan perangkat Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perencanaan dan proses pelaksanaan di lapangan;
  - ii. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan;
  - iii. Mengidentifikasi dan mempersiapkan kegiatan fisik dan non-fisik dalam arti pelimpahan aset kepada Pemerintah Daerah;
  - iv. Memberikan peran aktif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di setiap kegiatan bidang pemulihan dalam peran dan kontribusi tertentu yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya, dalam keseluruhan skenario integrasi dan keutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, dan bukan sebagai pelengkap dan penyelesaian masalah bila ada kendala saja.

#### 2.1.1.2. BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Pada bidang politik, hukum dan keamanan, permasalahan yang mendapat perhatian oleh Dewan Pengarah adalah keikutsertaan Mantan GAM pada BRR NAD dan Nias (Ref. Impres Nomor 15 tahun 2005); penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh; penyelesaian Masalah Hukum; serta Keamanan dan Ketertiban. Sesuai dengan hasil evaluasi, sebagian besar dari rekomendasi atas permasalahan yang disampaikan, pada umumnya telah dilaksanakan oleh lembaga terkait, terutama dalam hal ini oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Beberapa rekomendasi yang berimplikasi langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias diantaranya :

1. Pemerintah telah melakukan revisi Perpres Nomor 34 Tahun 2005 dengan menerbitkan Perpres 76 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan BRR NAD dan Nias. Untuk selanjutnya telah diterbitkan pula Keppres 86/M dengan menempatkan beberapa staff/pegawai baru di Badan Pelaksana yang memiliki latar belakang sebagai mantan GAM;
2. Telah dilakukan upaya bersama untuk memperjelas posisi dan keberadaan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, hubungannya dengan penerapan keadaan Tertib Sipil dan kelanjutan Operasi Terpadu di Provinsi NAD;
3. Pemerintah telah menerbitkan pengaturan perundangan dalam penanganan lembaga/orang asing melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing Dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumut;
4. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian peraturan perundangan yang tersisa, yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, Namun, Perpu tentang penyelesaian masalah hukum, pertanahan, keperdataan dan perbankan, sampai saat ini belum terbit.
5. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas mekanisme koordinasi antara Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pihak TNI & Polri dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama proyek-proyek yang dianggap vital dan strategis.

### 2.1.1.3. BIDANG PEREKONOMIAN

Untuk bidang perekonomian, masalah yang dirasakan cukup menonjol dan strategis terkait dengan upaya pemulihan ekonomi di NAD dan Nias antara lain: (i) belum optimalnya fasilitasi dalam proses revisi Qanun RTRW, sehingga berdampak pada kelancaran pembangunan perumahan untuk para pengungsi, serta pembangunan sarana dan prasarana lainnya; (ii) belum terbitnya Perpu Bidang Hukum yang antara lain mengatur pertanahan, keperdataan dan perbankan, yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian pembangunan perumahan dan menghambat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat NAD dan Nias secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan percepatan pelaksanaan revisi Qanun RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penerbitan Perpu penyelesaian masalah hukum dimaksud.

Beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Badan Pelaksana dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian kegiatan perencanaan spasial mikro yang bersumber dari pendanaan Non APBN dan non APBD di Provinsi NAD.
2. Penyelesaian masalah pertanahan melalui Village Planning yang ditindaklanjuti dengan Program RALAS (Rehabilitation of Aceh Land Administration Systems) dengan dukungan pembiayaan dari Multy Donor Fund (MDF);
3. Prioritas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman dengan mengeluarkan beberapa kebijakan penunjang diantaranya : (a) Kebijakan tentang Rekonstruksi (BPRB), (b) Kebijakan tentang Rehabilitasi (BPR), (c) Kebijakan tentang Relokasi (BPPK), (d) Kebijakan tentang Bantuan bagi Mereka yang tidak memiliki tanah dan rumah (BSBT), (e) Standar Kelayakan Bangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana kegiatan dalam Rencana Strategis.

### 2.1.1.4. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pada bidang kesejahteraan rakyat, Dewan Pengarah memberikan perhatian terhadap beberapa permasalahan, diantaranya : agama, sosial dan budaya; pengungsi; kependudukan; bantuan kemanusiaan; kesehatan; dan pendidikan. Berbagai permasalahan tersebut telah mendapat perhatian khusus oleh Badan Pelaksana maupun Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2005-2006 dan terus dimantapkan pada tahun 2007-2009 dengan program pengembangan sosial, agama dan kebudayaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan sebagaimana pola dan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2005-2009 yang telah ditentukan oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias.

## 2.1.2 DEWAN PENGAWAS BRR

### 2.1.2.1 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan pasal 1 (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (UU-10/2005), Dewan Pengawas (Wanwas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pascabencana.

Sesuai dengan pasal 13 UU-10/2005, Dewan Pengawas BRR mempunyai tugas: (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, (2) Menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya wewenang Dewan Pengawas adalah: (1) Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli, (2) Meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, (3) Memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada presiden.

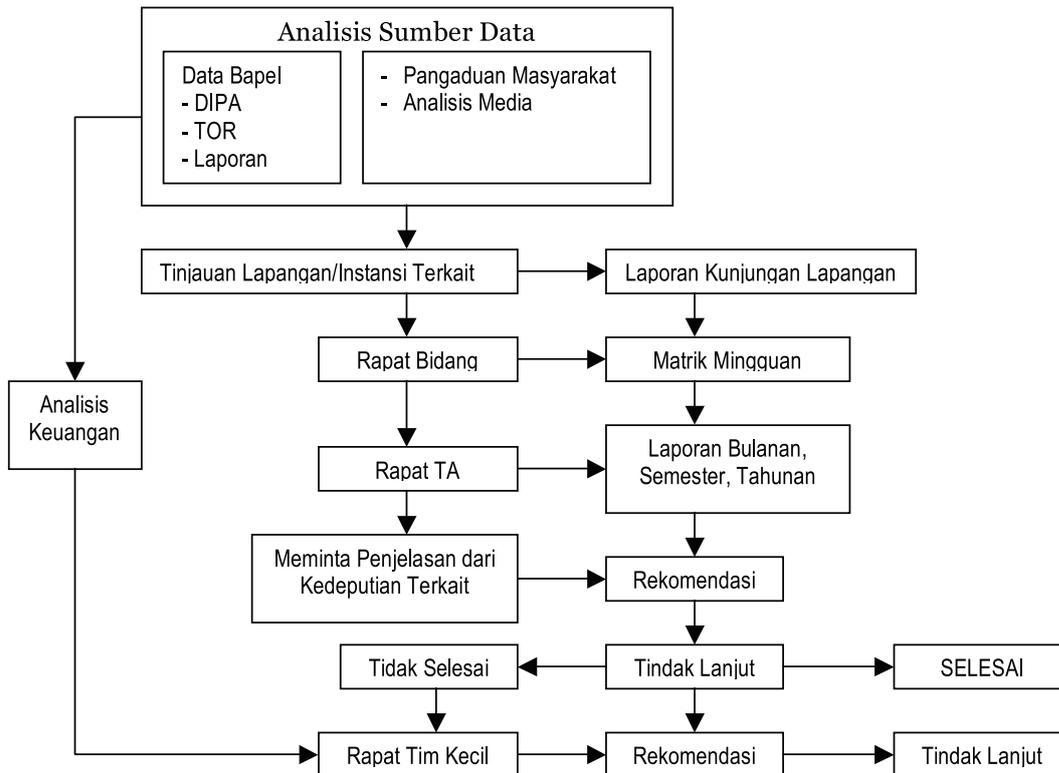
Sesuai dengan pasal 12 (1) Dewan Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas (a) seorang ketua merangkap anggota (b) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan (c) 7 (tujuh) orang anggota. Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden (pasal 12 ayat 3). Pada Pasal 12 (2) ditegaskan bahwa anggota Dewan Pengawas terdiri dari tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan.

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat (pasal 12 ayat-4). Berdasarkan SK Ketua Dewan Pengawas Nomor KEP 01/Ket/6/2005 dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan kantor di Banda Aceh dan Jakarta dengan wilayah kerja Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Sekretariat Dewan Pengawas terdiri dari para Tenaga Ahli, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi. Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas, sedangkan Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengawas adalah Kepala Sekretariat.

### 2.1.2.2 MEKANISME KERJA DEWAN PENGAWAS

Sesuai dengan perannya, Dewan Pengawas BRR melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias. Karena keterbatasan personalia, maka Dewan Pengawas merekrut Tenaga Teknis (*outsourse*) untuk membantu Tenaga Ahli Dewan Pengawas. Kegiatan pengawasan mengikuti rangkakerja (*framework*) yang telah dikembangkan oleh Dewan Pengawas BRR seperti terlihat pada bagan II.2 yaitu menganalisis *benefit* dan dampak. Untuk itu, diperlukan data outcome, output, proses dan input dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan perencanaan yang mengacu pada Rencana Induk BRR. Pengawasan keuangan dan kinerja dilaksanakan oleh Anggota Dewan Pengawas bersama SPI (Satuan Pengawas Internal) dan SAK (Satuan Anti Korupsi) serta kedeputian Bapel terkait. Anggota Dewan Pengawas membentuk Tim Kecil Dewan Pengawas bersama auditor independen dimana setiap 2 minggu melakukan pembahasan yang berhubungan dengan keuangan dan standar akuntansi, kinerja, organisasi, manajemen dan personalia, temuan pengawasan internal, dan standar kerja.

**Bagan 2. 2**  
**Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Dewan Pengawas BRR**



Sumber : Dewan Pengawas, 2007

Kegiatan Dewan Pengawas BRR sejak Mei 2005 sampai dengan Mei 2007 terdiri dari (i) kegiatan rapat Dewan Pengawas, (ii) melakukan pengawasan lapangan (iii) menerima pengaduan dan melakukan publikasi dan (iv) membuat laporan hasil pengawasan.

### 2.1.2.3 TEMUAN HASIL PENGAWASAN DAN DAMPAK

Beberapa temuan Wanwas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi periode Mei 2005 sampai dengan Mei 2007 adalah sebagai berikut:

#### BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Perencanaan dan pembangunan perumahan dan lingkungan kurang baik, rumah tidak siap huni, terlambat penyerahan karena tidak langsung diikuti dengan pembangunan prasarana sarana dasar (watsan, jalan, listrik).
- Masih didapati pembangunan rumah dengan kualitas yang rendah
- Data penerima manfaat tidak valid dan jumlah rumah tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
- Pembangunan rumah belum terpadu dengan tata ruang dan permukiman.

#### BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

- Tumpangtindih proyek antara Satker yang satu dengan Satker lain atau dinas terkait lainnya.

- Rendahnya mutu bangunan karena pelaksanaan tender dan konstruksi terlambat.
- Sebagian Konsultan Pengawas, Perencana dan Kontraktor tidak menjalankan fungsi dengan baik.
- Masalah PLTS, kualitas listrik dan air bersih, database pelaksanaan program/kegiatan BRR belum siap pakai dan belum akurat, TVRI Meureudu belum on-air, Masalah ICT/Database Tenaga Kerja belum fungsional.
- Kurang koordinasi antar instansi dan perencanaan yang belum sempurna dan tidak memperhatikan kondisi daerah.
- Peran Regional tidak Optimal dan staf regional kurang mengetahui proyek yang dikerjakan pusat/BRR Banda Aceh .

#### BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

- Lemahnya pembinaan LKM oleh AMF disebabkan karena AMF belum dapat berfungsi secara optimal.
- Program-program pelatihan oleh *Satker Life Skill* dan *Satker Tenaga Kerja* tidak disertai dengan pemberian modal usaha.
- Lemahnya perencanaan dan *need assessment* di bidang pertanian.
- Pencetakan sawah tidak tuntas, sehingga petani belum dapat memanfaatkannya.
- Kambing BLM yang didistribusikan ke peternak di seluruh Aceh banyak yang mati.
- Program di bidang perikanan ada yang belum memperhatikan wilayah dampak tsunami dan masih ada tambak yang belum direhabilitasi.

#### BIDANG PEMULIHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

- Program di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Budaya masih didominasi pada pembangunan fisik.
- Beberapa program di bidang pendidikan yang menjadi perhatian adalah lemahnya konsep program non-fisik, belum tersentuhnya program untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), lemahnya koordinasi baik dengan pihak sekolah maupun dengan Dinas.
- Pihak sekolah tidak dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga pengawasan internal terhadap kualitas bangunan tidak dapat terlaksana secara optimal.
- Program dihomogenkan untuk seluruh kabupaten disebabkan karena lemahnya *need assesment* dan penentuan bantuan yang cenderung bersifat *top down*.
- Lemahnya perencanaan menyebabkan perencanaan fisik tidak terpadu.
- Bangunan RKB, RPL dan UGB banyak yang belum fungsional, karena belum tersedia prasarana dan sarana penunjang lainnya untuk Proses Belajar Mengajar.
- Program Sekolah Alam belum memiliki konsep yang mapan dan tidak fokus terutama pada penentuan sasaran pada anak usia 3-18 tahun sebaiknya difokuskan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Lemahnya pelaksanaan program non-fisik di bidang kesehatan sehingga tidak sinergi dengan program fisik yang dikhawatirkan tidak dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- Pembangunan fisik puskesmas tidak disertai dengan perencanaan prasarana dan sarana dasar, meubelair, sarana air dan kamar mandi sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.
- Penentuan program beasiswa untuk Tenaga Kesehatan yang dikelola oleh Komite, cenderung

*top-down* sehingga program pendidikan yang dipilih ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- Bidang Peran Perempuan belum menyentuh pada program peningkatan peran perempuan secara menyeluruh namun masih bersifat stimulan dan sporadis (tidak berkelanjutan), Bale Ureng Inong belum memberi manfaat yang nyata.
- Di bidang Agama dan Budaya perlu diperhatikan masalah pendangkalan akidah dan tidak tersedia data lengkap yang akurat dan menyeluruh.
- Program di bidang agama kurang menyentuh dan belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat.
- Pengadaan buku untuk PDIA, anggaran 2006 sudah dibayar 100% tetapi pekerjaan baru 40%.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi budaya anggaran tahun 2006 banyak yang ditinggalkan oleh kontraktor dan tidak ada koordinasi dengan Dinas Kebudayaan.

#### BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

- Pembangunan fisik yang sudah selesai 100% banyak yang belum diserahkan kepada pihak penerima manfaat.
- Regional V: struktur organisasi hingga awal Mei 2007 belum sepenuhnya terisi. Lembaga Sekretariat Bersama tidak berfungsi maksimal, Koordinasi antara BRR NAD-Nias Pusat dengan BRR NAD-Nias Kantor Regional V masih lemah.
- Kantor Regional IV: Satker Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum dapat merealisasikan pembayaran kepada rekanan atas paket-paket pekerjaan fisik yang dilaksanakan tahun 2006.
- Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Singkil sangat terlambat, sehingga berkantor di gedung darurat.
- Kesadaran hukum masyarakat rata-rata masih lemah, pendokumentasian dalam bentuk digital dan mudah diakses terhadap seluruh produk hukum daerah belum ada.
- Pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat terhadap HAM masih lemah, perhatian terhadap kelompok cacat masih kurang.
- Design interior institusi peradilan (negeri dan syariah) belum sesuai dengan fungsinya.
- Komunikasi masih belum efektif, mekanisme komunikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masih lemah.

Menjawab hasil temuan Wanwas diatas maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Prioritas utama bidang perumahan adalah pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, *upgrading* pada rumah-rumah yang belum layak huni, memastikan calon pemilik (khususnya mereka yang masih tinggal di barak) terhadap rumah-rumah yang belum dihuni dan kesesuaian jumlah.
2. Bidang infrastruktur perlu dipastikan adanya DED (Detailed Engineering Design) yang baik yang didasarkan pada SID (Survey Investigation and Design) dalam pembangunan gedung, sarana transportasi dan bangunan sumber air.
3. Perlu pembinaan LKM dan AMF yang sungguh-sungguh agar programnya dapat berkelanjutan. Tidak perlu lagi adanya pembentukan lembaga serupa lainnya seperti Koperasi Terpadu dan sejenisnya. Program pelatihan lifeskill dan tenaga kerja seyogianya dipadukan dengan LKM atau program lain dalam pemberdayaan ekonomi.

4. Rehabilitasi tambak di wilayah bencana tsunami harus mendapat prioritas.
5. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk bidang pendidikan dan kesehatan khususnya untuk kegiatan non-fisik yang dapat mendongkrak peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan melalui Program Penguatan Kurikulum, PAUD, sekolah kejuruan, Program Penguatan Manajemen, Program Penguatan Kapasitas SDM sampai Perguruan Tinggi dan Penguatan Sistem Rekam Medik unit-unit pelayanan kesehatan.
6. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar unit pelayanan kesehatan agar pembangunan fisik yang telah dibangun dapat difungsikan secara optimal.
7. Pengembangan bidang Agama di Prov. NAD harus menjadi prioritas dalam upaya percepatan pelaksanaan Syari`at Islam sebagaimana yang telah diatur dalam qanun-qanun dan merumuskan qanun-qanun lainnya yang diperlukan. Perlu koordinasi secara intensif oleh BRR dengan lembaga-lembaga terkait dalam menyusun dan mengembangkan program.
8. Harus dipastikan adanya persepsi yang sama antara BRR dan Pemda NAD-Nias tentang mekanisme serah terima aset, serah terima aset tidak harus menunggu tahun 2009.
9. Perlu peningkatan anggaran untuk program peningkatan pengetahuan dan keahlian aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus, perlu peningkatan anggaran untuk program Rencana Aksi Nasional HAM daerah NAD dan perlu program digitalisasi produk hukum daerah.
10. Perlu memaksimalkan fungsi kantor regional dan keseragaman laporan kegiatan semua kantor regional.
11. Perlu program peningkatan kapasitas pemda kabupaten/kota untuk mendukung proses peralihan.

#### 2.1.2.4. IMPLIKASI HASIL PENGAWASAN

Implikasi hasil pengawasan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Kebijakan/Program: dapat memastikan apakah suatu program/proyek benar benar dibutuhkan atau tidak.
2. Terhadap pelaksanaan/implementasi kegiatan:
  - a. Memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Teridentifikasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat segera diusulkan perbaikan.

#### 2.1.3. BADAN PELAKSANA BRR

Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya, Badan Pelaksana BRR telah melakukan beragam program dan proyek yang bersumber dari pembiayaan pemerintah (APBN) maupun koordinasi donor/NGO (Non APBN). Pembiayaan dari APBN adalah pembiayaan melalui pendanaan yang alokasi penggunaan dananya tercatat dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Pembiayaan yang bersumber dari non APBN (*off budget*), diperoleh dana dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang digunakan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan tertentu tanpa melalui APBN tetapi dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias. Tabel II.1 merangkum realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2005-2006.

Sebagaimana tertera pada Tabel tersebut, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pada paruh waktu pertama telah mencapai Rp 25.273 triliun yang terdiri dari APBN sebesar Rp 10,436 triliun atau 41.29 % dari total dan sisanya sebesar Rp 14.837 triliun atau 58.71% dari realisasi kegiatan tahun 2005-2006. Realisasi kegiatan yang didanai anggaran non APBN tersebut 44.5 % dari total nilai komitmen Lembaga Donor dan NGO. Kegiatan pemulihan perumahan dan permukiman serta infrastruktur menyerap anggaran sekitar Rp 12.15 Triliun atau 48.07% dari total anggaran tahun 2005-2006

**Tabel 2.1 Realisasi Anggaran APBN BRR dan Non APBN 2005-2006**

NO	BIDANG/SUB BIDANG	JUMLAH (Rupiah)	
		On Budget 2005-2006	Off Budget 2005-2006
I	Perumahan dan Pemukiman	3,703,250,340,446	3,934,718,495,600
I	Perumahan	2,819,336,906,609	3,678,832,106,000
2	Tata ruang, PSD dan pertanahan	883,913,433,837	255,886,389,600
II	Infrastruktur	2,355,190,563,475	2,156,761,520,000
I	Perhubungan, Telekomunikasi, POS/ASDP	472,604,860,283	
2	Jalan & Jembatan/UASR	800,032,250,603	806,758,515,600
3	Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan	152,416,292,911	1,337,171,525,200
4	Energy & Listrik	301,503,644,911	5,807,785,200
5	Irigasi	216,402,840,005	7,023,694,000
6	Pengendalian Banjir & Pengaman Pantai	412,230,674,762	-
III	Ekonomi dan Usaha	968,498,929,140	1,823,313,601,200
I	Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan	299,152,067,325	595,426,741,600
2	Kelautan dan Perikanan	320,026,127,544	173,655,110,600
3	Kehutanan	32,237,729,098	86,827,555,300
4	Pengembangan Usaha	45,300,677,097	587,992,534,400
5	Industri	46,924,747,072	61,024,970,800
6	Perdagangan, Pariwisata, Investasi	24,928,925,779	6,860,541,200
7	Koperasi dan UKM	161,413,021,549	86,827,555,300
8	Tenaga Kerja	38,515,633,676	224,698,592,000
IV	Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	1,042,727,115,236	4,231,846,507,200
I	Pendidikan	400,157,959,445	1,783,247,297,600
2	Kesehatan	600,491,793,294	2,182,454,314,000
3	Peran perempuan dan anak	42,077,362,497	266,144,895,600
V	Kelembagaan dan SDM	965,907,990,203	1,334,018,501,200
I	Kelembagaan dan Pemerintahan	275,953,171,058	1,013,317,274,400
2	Kelembagaan Hukum dan Keamanan	278,726,875,934	275,413,960,000
3	Yudikatif, Legislatif, Matra-matra	411,227,943,211	45,287,266,800
VI	Sosial, Agama dan Budaya	757,660,076,317	373,258,306,000
I	Sosial & Kependudukan	124,059,418,761	64,845,767,600
2	Agama	559,234,947,433	70,127,920,000
3	Budaya	74,365,710,123	238,284,618,400
-	Perencanaan	223,116,492,278	21,123,089,600
-	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi (administrasi)	419,750,280,116	962,172,542,400
	<b>TOTAL</b>	<b>10,436,101,787,211</b>	<b>14,837,212,563,200</b>

Sumber : BRR NAD-Nias 2006-2007

### 2.1.3.1. BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemulihan perumahan dan permukiman, semula hanya terdiri dari program pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah (rehabilitasi). Dalam perkembangannya kemudian, dikenal program

Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT/renters) dan Program 'upgrading'. Bagian utama selain perumahan adalah permukiman yang mencakup kegiatan pembangunan prasarana dasar berupa jalan permukiman, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik serta adanya dukungan ketersediaan fasilitas umum lainnya. Selain itu juga dilakukan perencanaan tata ruang serta pertanahan yang lebih luas untuk mewadahi permukiman tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembahasan pada sub bab ini terbagi atas 5 bagian utama, yaitu Perumahan, Pendekatan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Sasaran Penerima Manfaat (*Beneficiaries*), Tata Ruang, Prasarana Dasar Permukiman dan Pertanahan.

### 2.1.3.1.1 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Realisasi pembangunan perumahan dari sumber pembiayaan APBN dan Non APBN seperti tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 2 Realisasi Pembangunan Perumahan**

NO	PERUMAHAN	Rencana Induk (unit)	Realisasi 05 – 06 *)		REALISASI (2005-06)	CAPAIAN (%)
			APBN (On Budget)	Non APBN (Off Budget)		
1	NAD	196.975	23.453	58.315	81.768	
	a.Rehabilitasi	119.072	8.459	4.213	12.672	10,64
	b.Rekonstruksi	77.903	14.994	54.102	69.096	88,69
2	Nias	49.021	9.040	2.412	11.452	
	a.Rehabilitasi	36.766	1.395	0	1.395	3,79
	b.Rekonstruksi	12.255	7.645	2.412	10.057	82,06
	a.Rehabilitasi NAD - Nias	155.838	9.854	4.213	14.067	9,03
	b.Rekonstruksi NAD - Nias	90.158	22.639	56.514	79.153	87,79
<b>JUMLAH NAD - Nias</b>		<b>245.996</b>	<b>32.493</b>	<b>60.727</b>	<b>93.220</b>	

\*) Data Realisasi ; Data On Budget (Kedeputan Bidang Perumahan dan Permukiman), Off Budget (Pusdatin)

Komposisi pembangunan rumah oleh Donor dan NGO atau NonAPBN berdasarkan realisasi 2005-2006 adalah sekitar 64% dari total rumah yang telah terbangun di Propinsi NAD dan Pulau Nias. Sedangkan, jumlah total rumah yang dibangun dengan dana Non APBN ini adalah 67.873 unit rumah, termasuk jumlah ini adalah sekitar 56% dari total komitmen yang tercatat dari Data Pusdatin Maret 2007, yaitu 109.433 unit rumah. Rumah yang dibangun melalui pembiayaan donor dan NGO, mulai awal 2005 sampai dengan akhir Mei 2007 adalah sebanyak 66.110 unit atau sekitar 85% dari total rumah yang telah selesai dibangun, yaitu 78.178 unit.

Komposisi pembangunan rumah berdasarkan realisasi 2005-2006 oleh BRR melalui dana APBN adalah sekitar 36% dari total jumlah rumah terbangun. Tujuan akhir pembangunan perumahan dan permukiman adalah agar rumah yang telah terbangun dapat dihuni dan memungkinkan peningkatan produktivitas penghuninya.

Menurut Data Survey lapangan yang dilakukan pada akhir November 2006 (Report Artistika, Desember 2006), hanya 44.520 rumah yang sudah ditempati (tingkat kerincian data ini adalah per Kabupaten). Apabila disandingkan dengan jumlah rumah yang dibangun pada waktu yang sama, maka tingkat hunian hanya sekitar 77,93%.

Realisasi penyediaan prasarana dasar permukiman terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu Pembangunan Baru PSD, Perbaikan PSD, Penyusunan DED kawasan/ desa, Penyusunan Rencana Detail Induk Sistem PSD (RIS PSD), serta pembangunan PSD berbasis kecamatan. Namun, karena perbandingannya adalah dengan Rencana induk, maka keseluruhannya dikaji sebagai satu kegiatan saja.

**Tabel 2.3 Realisasi dan Program Permukiman**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
I	Prasarana dan Sarana Dasar ( PSD)	pkt	420	63	151	173	41%	277	368	85%

Sumber: Artistika dan RAND (Desember 2006)

Dari total 173 PSD terbangun, 37 Unit diantaranya di Nias provinsi Sumatera Utara. Sedangkan rincian pembangunan PSD oleh Donor dan NGO (*off Budget*) adalah (i) Aceh Barat (22 unit), (ii) Aceh Besar (16 unit) dan (iii) Pidie (20 unit), sedangkan daerah lain jumlahnya sangat kecil.

### 2.1.3.1.2 TATA RUANG

Dikaitkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah propinsi NAD dan Nias kepulauan, maka diperlukan perencanaan tata ruang yaitu tata ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota, tata ruang kecamatan dan tata ruang pada tingkat dusun/kampung (*gampong*) atau lebih dikenal sebutan 'Village Planning'. Dari 730 desa yang rusak berat dan sedang, 487 Village Planning telah selesai dibuat; 98 dari APBN dan 389 dari Non APBN. Pada tahun 2007, akan diselesaikan sebanyak 108 Village Planning, sisanya diharapkan akan ditangani oleh Lembaga Donor/NGO. Secara rinci realisasi program tata ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4 Realisasi Program Tata Ruang**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
I.	Penyusunan Rencana Tata Ruang									
a	Revisi RTRW Propinsi	Prov	1	1		1	100 %	-	1	100%
b	Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Kab./ Kota	13	13		13	100%	1	14	107%
c	RDTR Kota/ Kecamatan	Kota	-	13	7	13	%	7	20	*
d	RTBL/ RTR Kawasan	Kab./ Kota	1	5		5	%	4	9	900%
e	Rencana Desa ( <i>village planning</i> )	Desa	-	94	392	486	%	56	542	*
2.	Penyusunan Pedoman:	Desa	-	5		5	%	-		*
a	Pemetaan Desa secara Partisipatif	Desa	--	1		1	%	-		*
b.	Perencanaan Desa	Desa	-	2		2	%	-		*
c.	Perencanaan Tata Ruang Kecamatan	Kec.	-	1		1	%	-		*
d.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kec./ Kaw./ Kota/ Kab.	-	1		1	%	-		*
3.	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang pada masyarakat	Kab./ Kota	-	-		-		11	11	*
4.	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (integrasi program sektoral)							8		*

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
5.	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah							14		*
6.	Studi	unit	-	2		2		-	2	

Sumber : Data Kedeputan Perumahan dan Permukiman, Mei 2007.

Keterangan: \* : kegiatan ini tidak tercantum dalam Rencana Induk namun dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### 2.1.3.1.3 PERTANAHAN.

Aspek pertanahan meliputi kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan secara khusus dan pembangunan NAD - Nias secara umum. Realisasi pencapaian kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan pada tahun anggaran 2005, bidang/persil adalah pengukuran sebesar 52.944 persil dari target 50.000 persil (telah melampaui target). Namun untuk penerbitan sertifikat, baru mencapai 13.419 persil (27%). Pada tahun anggaran 2006 sudah dilaksanakan pekerjaan pengukuran dan ajudikasi. Secara lebih terinci capaian kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan seperti pada tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5 Realisasi dan Program Administrasi Pertanahan**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyiapan Lahan/ Pembebasan Lahan	ha	2.135	2.000	44	2.000	94%	50	2.050	96
2	Sertifikasi		400.000	14.586	27	200.000	50%	85.000	285.000	71

Sumber: Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman BRR, 8 Juni 2007

**Tabel 2.6 Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan tahun 2005-2006 dan Program 2007 per kabupaten**

NO.	Kabupaten/Kota	RENCANA INDUK	TARGET	REALISASI 2005-2007**			
				SURVEY		AJUDIKASI	
				JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN
1	Banda Aceh	*	40.000	39.505	187	10.553	44
2	Aceh Besar	*	45.000	45.258	202	17.871	85
3	Aceh Jaya	*	20.000	20.973	105	14.949	75
4	Pidie	*	20.000	21.924	110	15.590	78
5	Bireuen	*	30.000	32.376	108	25.130	84
6	Lhokseumawe	*	5.000	5.163	103	3.573	71
7	Aceh Utara	*	10.000	10.546	105	8.573	86
8	Aceh Barat	*	25.000	26.417	106	15.898	64
9	Nagan raya	*	5.000	5.333	107	4.456	89
	JUMLAH		200.000	207.495	126	116.593	75

Sumber : Kedeputan Bidang Perumahan dan Permukiman/Direktorat Pemetaan dan Administrasi Pertanahan, BRR

Keterangan: \* Rencana Induk tidak mencantumkan Sasaran Kuantitatif per bidang tanah

\*\* Capaian terhadap target yang ditetapkan Direktorat Pertanahan Kedeputan PerKim

**Tabel 2.7 Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Perumahan Per Kabupaten Kota**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN (M2)			KETERANGAN
		2005	2006	2007	
1	Banda Aceh	81.685	0	0	
2	Aceh Besar	1.036.965	139.365	349.000	Rencana pembelian
3	Aceh Jaya	0	191.725	227.653	Rencana Pembelian

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN (M2)			KETERANGAN
		2005	2006	2007	
4	Pidie	83.922	0	0	
5	Bireuen	106.765	0	0	
6	Lhokseumawe	50.995	0	0	
7	Aceh Utara	35.000	5.686	0	
8	Langsa	0	111.391	63.700	Rencana pembelian
9	Aceh Barat	841.949	4.200	0	
10	Simeulue	50.000	2.400	0	
11	Aceh Barat Daya	0	41.166	0	
12	Aceh Selatan	476.041	0	0	
13	Singkil	1.162.895	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.926.217</b>	<b>495.933</b>	<b>640.353</b>	

Sumber : Kedeputan Bidang PerKim, Direktorat Pemetaan dan Administrasi Pertanahan, BRR, 2007

**Tabel 2.8 Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Non Perumahan) Per Kabupaten/ Kota**

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN (M2)		JUMLAH
		2006	2007	
1	2	3	4	5
1	Banda Aceh *)	609.619	300.000	909.619
2	Aceh Besar *)	88.751	100.000	188.751
3	Sabang	93.527	-	93.527
4	Aceh Jaya	408.635	-	408.635
5	Pidie	68.208	-	68.208
6	Bireuen	1.753	-	1.753
7	Aceh Utara	5.070	-	5.070
8	Aceh Tamiang	119.209	-	119.209
9	Langsa	8.859	-	8.859
10	Aceh Barat	52.122	-	52.122
11	Nagan Raya	390.000	-	390.000
12	Prov NAD *)	2.304.105	1350.000	3.654.105
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.149.858</b>	<b>1.750.000</b>	<b>5.899.858</b>

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Selain pokok-pokok bahasan realisasi yang terkait langsung dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman (termasuk Tata Ruang dan Pertanahan) tersebut di atas, terdapat aspek-aspek realisasi lain yang berpengaruh dan patut di pertimbangkan dalam realisasi paruh waktu kedua masa kerja BRR yaitu (i) pendekatan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan, (ii) sistem Informasi yang dimanfaatkan untuk menilai sasaran Penerima Manfaat dan sasaran dukungan Logistik) dan realisasi (iii) dukungan Logistik

### 2.1.3.2. BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

Bidang Infrastruktur terdiri dari: Jalan dan Transportasi (Udara, darat dan Laut), SAR, Pos dan Telematika, Sumber Daya Air (Irigasi, Pengamanan Pantai, Pengendalian Banjir), Energi dan Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan serta Pembinaan Bangunan Umum.

#### 2.1.3.2.1 JALAN DAN TRANSPORTASI

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.9 Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007 Sub bidang Jalan dan Jembatan**

NO	KEGIATAN	SAT.	RI		REAL 05-06				PROG 07			05-07	
			RUAS	KM	ON B	OFF B	ON-OFF	% RI	ON	OFF	ON-OFF	VOL	% RI
1	Lintas Timur NAD	Km	4	257	-		-	-	3		3	3	8%
2	Lintas Barat -NAD	Km	7	441	132	152	284	101%	179	30	209	493	175%
3	Lintas Tengah-NAD	Km	8	341	11		11	15%	0		0	11	15%
4	Lintas Lainnya -NAD	Km	46	1,455	76		76	17%	32		32	108	24%
5	Pulau Nias (Propinsi)	Km	2	256	127		127	385%	123		123	250	758%
6	Jalan Kab./Kota	Km	23 kab.	1,900	459		459	132%	371		371	830	239%
<b>TOTAL</b>				<b>4,650</b>	<b>805</b>	<b>152</b>	<b>957</b>	<b>16.5%</b>	<b>708</b>	<b>30</b>	<b>738</b>	<b>1,695</b>	<b>29%</b>

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007

Sampai dengan akhir tahun 2006, total jalan yang telah ditangani (rehabilitasi dan rekonstruksi) mencapai 957 km terdiri dari jalan Nasional sepanjang 295 km, jalan propinsi 203 km (Propinsi NAD: 76 km dan Kepulauan Nias 127 km) dan jalan kabupaten sepanjang 459 km, dengan total biaya Rp. 1.699 milyar.

Pada tahun 2007 diprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 738 km, yang terdiri dari jalan Nasional 212 km, jalan propinsi 155 km (Prop. NAD : 32 km dan Nias 123 km), dan jalan kabupaten sepanjang 371 km. Total anggaran tahun 2007 sebesar 1.609 milyar Rupiah. Sehingga sampai akhir tahun 2007 akan ditangani jalan sepanjang 1.695 km jalan dengan total biaya mencapai 3,31 trilyun Rupiah.

Untuk prasarana transportasi, sampai dengan tahun 2006 telah ditangani pelabuhan laut sebanyak 10 unit dan 5 unit pelabuhan penyeberangan. Diantaranya satu pelabuhan penyeberangan di Uleleu ditangani langsung melalui dana Non APBN. Pelabuhan udara yang telah ditangani sebanyak 6 unit. Selain itu juga telah dibangun 1 unit landasan udara/airstrip di Calang.

Pada tahun anggaran 2007 diprogramkan penanganan untuk 7 unit bandara, 3 di antaranya merupakan penanganan baru, sedangkan 4 unit merupakan lanjutan. Selain itu juga direncanakan pembangunan airstrip di Blangkejeren (Gayo Lues) dan Teluk Dalam (Nias Selatan) serta landasan heli/helipad di Pulau Rondo-Aceh Besar. Selanjutnya pelabuhan laut yang ditangani sebanyak 8 unit (5 unit penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan) dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 4 unit (1 penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan tahun 2006). Untuk lebih jelasnya penyelesaian bidang perhubungan sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 pada disajikan pada tabel berikut. Adapun perinciannya disajikan pada lampiran.

**Tabel 2.10 Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan**

NO	BANGUNAN/GEDUNG	RI	REAL 05-06		PROG '07		05-07	
			B	% KE RI	B	L	B	% KE RI
1	Pel. Laut	17	10	59%	5	3	15	88%
2	Pel. Ferry	9	7	78%	1	3	8	89%
3	Bandara	9	6	67%	3	4	9	100%
4	Airstrip	-	1	-	2		3	-
5	Helipad	-		-	1		1	-
6	Terminal Bus	29	8	28%	5		13	45%

NO	BANGUNAN/GEDUNG	RI	REAL 05-06		PROG '07		05-07	
			B	% KE RI	B	L	B	% KE RI
7	Kantor SAR	1	1	100%		1		100%
8	Kantor BMG	8	8	100%			8	100%
9	Kantor Pos	19	11	58%	5		16	84%

B= Baru, L=Lanjutan, Sumber : Deputi Infrastruktur Bapel BRR, Mei 2007.

### 2.1.3.2.1.1 FASILITAS LLAJ

Berdasarkan Rencana Induk, kebutuhan terminal dan stasiun DAMRI sebanyak 29 unit. Sampai dengan 2006, 7 unit terminal dan stasiun DAMRI sedang dalam proses pembangunan. Pada tahun 2007 dialokasikan pembangunan terminal sebanyak 6 unit.

**Tabel 2.11 Realisasi Pembangunan Terminal Bis/ APK**

NO	TERMINAL BIS/ APK	RENCANA INDUK	REAL 05-06	DIPA '07	
			BARU	BARU	LANJUT
1	Banda Aceh	4	2		2
2	Singkil	1	1		1
3	Bireun	1			
4	Lhokseumawe	1			
5	Calang	1		1	
6	BlangPidie	1	1		1
7	Kota Makmur	1			
8	Aceh Besar	1			
9	Langsa	1			
10	Aceh Utara	3	1		1
11	KebonTengah	1			
12	Aceh Timur	3		1	
13	Bakongan	1			
14	Sigli	1			
15	Kuala Simpang	1			
16	Nias	1		2	
17	Nias Selatan	1		1	
18	Simelue		1		1
19	Takengon			1	
20	Stasiun DAMRI Banda Aceh	1	1		
21	Pool DAMRI (tersebar)	2			
22	Pool DAMRI Meulaboh	1			
23	Pool DAMRI Lhokseumawe	1			
	Total	29	7	6	6
	Kumulatif		7	13	
	Kumulatif % RI		24%	45%	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Rencana Induk dibangun sejumlah 10 unit. Lokasi pembangunan gedung PKB diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Fasilitas gedung PKB mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sejumlah 2 unit, yaitu di Meulaboh dan Langsa.

**Tabel 2.12 Realisasi Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor**

No	Gedung Uji Kendaraan	RI		Real 05-06		RKA '07		
		Jumlah	Rp My	Baru	Rp My	Baru	Lanjut	Rp My
1	PKB Banda Aceh	1						
2	PKB Aceh Barat	1				1		6
3	PKB Aceh Tamiang	1						
4	PKB Aceh Utara	1						

No	Gedung Uji Kendaraan	RI		Real 05-06		RKA '07		
		Jumlah	Rp My	Baru	Rp My	Baru	Lanjut	Rp My
5	PKB Lhok Semawe	1						
6	PKB Pidie	1						
7	PKB Bireuen	1						
8	PKB Aceh Timur	1				1		6
9	PKB di Nias	1						
10	PKB di Nias Selatan	1						
Total		10	-	-	-	2	-	12
Kumul.				-	-	2		12

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pengadaan Bus Bantuan menurut Rencana Induk sebanyak 131 unit. Dari jumlah tersebut 28 unit diantaranya telah dilaksanakan pengadaannya pada tahun 2006 dan telah diserahkan serta dioperasikan oleh DAMRI sedangkan sisanya akan diadakan pada tahun 2007 dan 2008 untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan/rehabilitasi jembatan timbang sebanyak 3 unit dan pembangunan halte bus sebanyak 60 unit yang tercantum dalam Rencana Induk sampai saat ini belum dilaksanakan.

#### 2.1.3.2.1.2 PRASARANA JALAN KERETA API

Dalam Rencana Induk direncanakan pembangunan prasarana jalan kereta api sepanjang 233 km dengan biaya Rp.1,093 triliun. Pelaksanaan studi dan pembangunan jalan kereta api telah mulai dirintis Departemen Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi NAD sehingga pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya sangat besar tersebut tidak ditangani oleh BRR.

#### 2.1.3.2.1.3 ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN (ASDP)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan ditargetkan sebanyak 9 unit sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 7 unit telah ditangani pada tahun anggaran 2005-2006. Satu unit yakni pelabuhan penyeberangan Meulaboh dilaksanakan pada TA 2007. Satu unit yang belum ditangani adalah pelabuhan penyeberangan Gunung Sitoli.

**Tabel 2.13 Realisasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan**

NO	PEL. FERRY	LOKASI	RI	REAL '05 - '06		RKA '07	
				BARU	LANJUTAN	BARU	LANJUTAN
1	Ulee Lheue	Banda Aceh	1	V			V
2	Balohan	Sabang	1	V			
3	Labuhan Haji	Aceh Selatan	1	V			
4	Lamteng	Aceh Besar	1	V			
5	Sinabang	Simeulue	1	V			V
6	Meulaboh	Aceh Barat	1			v	
7	Pulau Banyak	Aceh Singkil	1	V			
8	Singkil	Aceh Singkil	1	V			V
9	Gunung Sitoli	Nias	1				
Total			9	7		1	3
Kumul.				7		8	
Kum (%) ke RI				78%		89%	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

#### 2.1.3.2.1.4 TRANSPORTASI LAUT

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan di NAD dan Nias dalam Rencana Induk ditetapkan sejumlah 17 unit. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah dan sedang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya sedangkan 8 unit (5 baru dan 3 lanjutan) diprogramkan pada tahun 2007.

Sampai akhir 2007 diperkirakan telah ditangani 15 unit pelabuhan dari Rencana Induk sebanyak 17 unit. Ada 3 unit pelabuhan dalam Rencana Induk yang belum ditangani yakni Sabang, Sibadeh, dan Sigli. Sementara itu terdapat 1 unit pelabuhan (Kuala Langsa) di luar Rencana Induk yang ditangani. Di luar itu juga dibangun dermaga di Pulau Rondo.

Tabel 2.14 merangkum perkembangan pembangunan prasarana perhubungan laut.

### 2.1.3.2.1.5 TRANSPORTASI UDARA

Rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara sesuai dengan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 9 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diantaranya telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2005 – 2006. Tiga unit lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008 kegiatan difokuskan pada pengembangan Bandara SIM dan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya. Informasi tentang perkembangan pembangunan prasarana transportasi udara dapat dilihat pada Tabel II.15

**Tabel 2.14 Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pelabuhan Laut**

No	PELABUHAN LAUT	LOKASI	RENCANA INDUK	REALISASI 2005-06		PROGRAM 2007		TOTAL
				Baru	Lanjut	Baru	Lanjut	
1	Sabang	Sabang	R					
2	Malahayati	Aceh Besar	R	R			R	I
3	Krueng Geukueh	Lhokseumawe	R			R		I
4	Kuala Langsa	Langsa				R		I
5	Meulaboh	Aceh Barat	R	R			R	I
6	Calang	Aceh Jaya	R			R		I
7	Susoh	Aceh Barat Daya	R	R				I
8	Tapak Tuan	Aceh Selatan	R	R		R		I
9	Singkil	Aceh Singkil	R				R	I
10	Sibadeh	Aceh Selatan	R					
11	Sinabang	Simeulue	R			R		I
12	Sibigo	Simeulue	R	R				I
13	Sigli	Pidie	R					
14	Gunung Sitoli	Nias	R	R				I
15	Lahewa	Nias	R	R				I
16	Sirumbu	Nias	R	R				I
17	Teluk Dalam	Nias Selatan	R	R				I
18	Tello	Nias Selatan	R	R				I
Total			17	10	0	5	3	15
Kumulatif				10		15		
(%) ke RI				59%		88%		

Sumber : Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007.

**Tabel II.15 Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar Udara**

NO	BANDAR UDARA	LANDASAN		RI		REAL 05-06		RKA '07		
		AWAL	AKHIR	Vol.	RP MY	BARU	RP MY	BARU	LANJUT	RP MY
1	Maimun Saleh	1850 m x 30 m		I	25.1	V	12.25		v	1.41
2	S. Iskandar Muda	2500 m x 45 m	2950 m x 45 m	I	474.5			v		88.38
3	Cut Nyak Dhien	1000 m x 30 m	1700 m x 30 m	I	141.6	V	20.75		v	8.85
4	Teuku Cut Ali	750 m x 23 m	1250 m x 30 m	I	21.8		0.29	v		8.08
5	Lasikin	750 m x 23 m	1500 m x 30 m	I	25.6	V	24.80		v	13.93
6	Kuala Batee	750 m x 23 m	1300 m x 30 m	I	22.0		0.29	v		19.69
7	Rembele	1200 m x 30 m		I	26.1	V	10.96		v	5.99
8	Binaka	1400 m x 30 m		I	4.6	V	16.34			
9	Lasundre	750 m x 23 m		I	3.0	V	5.59			
Total				9	744.3	6	91.27	3	4	146.33
Kumulatif						6	91.27	9		237.60
Kum (%) ke RI						67%	12.26%	100%		31.92%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pembangunan airstrip telah dilaksanakan dengan dana Off-Budget pada tahun 2005. Satu unit airstrip direncanakan dibangun di Blangkejeren pada TA 2007. Sementara helipad pada tahun 2007 direncanakan sebanyak 1 unit dan 2008 sebanyak 2 unit.

**Tabel 2.16 Realisasi Pelaksanaan RR Airstrip**

No	Landasan Udara	Lokasi	RI		Real 05-06		RKA '07		
			#	Rp My	Baru	Rp My	Baru	Lanjut	Rp My
1	Airstrip Calang	Aceh Jaya			1	0.7			
2	Airstrip Blangkejeren	Gayo Luwes					1		8.2
3	Airstrip Sibigo	Simeulue							
4	Airstrip Teluk Dalam	Nias Selatan					1		3.2
Total			0	0	1	0.70	1	0	11.4
Kumulatif					1	0.70	2		12.1

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

**Tabel 2.17 Realisasi Pelaksanaan RR Helipad**

No	Landasan Heli	Lokasi	RI		Real 05-06		RKA '07		
			Vol.	Rp My	Baru	Rp My	Baru	Lanjut	Rp My
1	Pulau Rondo	Aceh Besar					1		1.4
2	Pulau Breuh	Aceh Besar							
3	Pulau Banyak	Singkil							
Total			0	0	0	0.00	1	0	1.40
Kumulatif					0	0.00	1		1.40

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

### 2.1.3.2.1.6 PRASARANA PENYELAMATAN (SAR)

Pembangunan gedung dan sarana kantor SAR NAD telah selesai dibangun pada tahun 2006. Untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya maka dialokasikan Rp. 1,696 Milyar pada tahun 2007.

Pembangunan *rescue boat* berdasarkan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 2 unit dan BRR akan melakukan pengadaan sebanyak 2 unit pada tahun 2007 dan 2008.

Untuk mengantisipasi musibah yang sering terjadi di perairan karena Provinsi NAD berada langsung di lintasan pelayaran internasional maka perlu dilakukan pengadaan *sea rider* sebanyak 3 unit dan fasilitas-fasilitas peralatan pendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Pengadaan fasilitas tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2006 – 2007.

### 2.1.3.2.1.7 METEOROLOGI, GEOFISIKA DAN POS TELEKOMUNIKASI

#### 2.1.3.2.1.7.1 BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Enam stasiun BMG telah selesai direhabilitasi dan direkonstruksi untuk NAD (Mata ie, Blang Bintang, Indrapuri, Tapaktuan, Meulaboh, Takengon), dan 2 stasiun BMG di Nias (Onowaembo dan Binaka) sesuai Rencana Induk. Untuk perumahan dinas BMG dari target Rencana Induk sebanyak 40 unit, telah dibangun sebanyak 26 unit di NAD dan 6 Unit di Nias. Masih ada 8 unit lagi yang harus diselesaikan, saat ini masih terkendala dengan permasalahan pembebasan lahan. Target Rencana Induk 1 unit peralatan Meteorologi konvensional telah diadakan di Saree NAD dalam bentuk taman alat meteorologi untuk pertanian.

Dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas TVRI, RRI dan Dinas Infokom, pelaksanaannya ditangani langsung oleh sektor kelembagaan dan kapasitas ke deputian ILP hanya memberikan

bantuan teknis melalui Direktorat Fasilitas dan Bangunan Umum, yang bersifat evaluasi perencanaan fisik dan monitoring di lapangan.

### **2.1.3.2.1.7.2 POS DAN TELEKOMUNIKASI**

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang harus segera dipenuhi, maka BRR telah melaksanakan rehabilitasi 4.310 SST, yang merupakan capaian sampai dengan awal tahun 2007, meliputi wilayah Meulaboh, Simpang Peut, Kaway XVI. Sedangkan sisanya untuk wilayah lainnya akan ditangani oleh PT.TELKOM Tbk.

Infrastruktur ICT (VSAT & Wifi base) telah dibangun di 21 lokasi (seluruh ibukota kabupaten di Propinsi NAD) dan selesai pada tahun 2006.

Untuk prasarana pos sesuai dengan target yang dicantumkan dalam Rencana Induk ada 19 unit kantor pos yang mengalami rusak berat dan yang telah ditangani adalah 11 kantor pos selesai dibangun dan direhabilitasi untuk tahun 2005 – 2006 dan 10 unit kantor POS sedang direhabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007.

### **2.1.3.2.2 ENERGI DAN LISTRIK**

#### **2.1.3.2.2.1 LISTRIK**

Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang energi dan listrik yang dilaksanakan oleh BRR lebih difokuskan pada pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun, jaringan tegangan rendah (JTR), penggantian diesel-diesel pembangkit listrik yang rusak dan tidak fungsional dan sebagian jaringan tegangan menengah (JTM). Dari target 119.253 sambungan rumah, sampai dengan Desember 2006 telah dicapai pengadaan sebanyak 71.993 unit (60%). Pemasangan sambungan rumah terus dilaksanakan sesuai dengan progress penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana tsunami.

Pada tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah pengadaan sambungan rumah sebanyak 64.387 unit (54%). Dengan demikian secara keseluruhan, target yang telah di capai sampai dengan 2007 untuk pengadaan listrik (sambungan rumah) mencapai 136.380 unit atau melebihi target yang tercantum dalam Rencana Induk. Kelebihan alokasi ini dimaksudkan untuk memenuhi target sambungan bagi pembangunan rumah baru sebanyak 120.000 unit dan permintaan masyarakat lainnya seperti bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, bangunan publik lainnya.

Dari target sasaran 2.394 km JTR dan 1.046 km JTM, sampai Desember 2006 telah dilaksanakan sebanyak 397.8 km JTR dan 256.5 km JTM. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sepanjang 397.6 km JTR dan 212.5 km JTM. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 1.636.6 km JTR dan 577.9 km JTM. Sedangkan target sasaran 736 unit Gardu Distribusi (GD) dan 6 unit Gardu Hubung (GH), sampai Desember 2006 telah tercapai 217 GD dan 3 unit GH. Tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sebanyak 260 unit GD dan 1 unit GH. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 298 unit GD.

Pembangunan pembangkit listrik dengan target 16 unit, sampai Desember 2006 telah berhasil dicapai 11 unit pembangkit listrik. Pada tahun anggaran 2007 tidak ada pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik. Target pembangkit listrik tersebut belum termasuk target rekonstruksi pembangunan baru Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 2X42 MW. Pembangunan PLTA Peusangan akan dibiayai JBIC dengan percepatan proses pinjaman sehingga pelaksanaannya dapat dimulai akhir tahun 2007.

Sebagai tambahan dari pemenuhan target rekonstruksi tersebut, PT. PLN juga sudah memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara sebesar 2X100 MW di

kabupaten Nagan Raya. Disamping itu Departemen ESDM akan memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2X20 MW di Seulawah, kabupaten Aceh Besar.

Untuk bangunan gedung layanan umum, dari sasaran target 6 unit bangunan gedung, BRR hanya akan membangun satu gedung pelayanan masyarakat di Merduati. Masih terdapat sisa target 5 gedung kantor termasuk kantor wilayah.

Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik, BRR membiayai pengadaan 1.691 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Disamping itu Departemen ESDM melalui program Listrik Desa mengadakan 1.000 unit PLTS pada tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai 469 unit. Tahun anggaran 2008, perlu dilanjutkan pengadaan PLTS sebanyak 1.000 unit.

Berikut realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelistrikan yang dijelaskan oleh tabel dibawah ini.

**Tabel 2.18 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelistrikan dan Energi**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007		KET
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%	
1	Pengadaan generator/ PLTDiesel	Unit	7	12		12	171		12	171	
2	Perbaikan kantor PT. PLN	Pkt	5					1	1	20	
3	Pengadaan PLTD Apung baru	lokxunitxMW	2x2x6								Museum
4	PLTA Peusangan	unitxMW	4x21								PLN 2008
5	PLTM (Mini Hidro)	Unit	2								
6	PLTMH (Mikro Hidro)	Unit		1				10	11		
7	PLTS (Surya)	Unit		1.691	1.000	2.691		442	3.133		
8	PLTGU Banda Aceh	MW	2x30								
9	Jaringan tegangan menengah (SUTM dan SKTM)	Km	1.804	381		381	21	283	664	37	
10	Jaringan tegangan rendah (SKTR)	Km	2.714	518		518	19	414	932	34	
11	Sambungan Pelanggan	Unit	119.253	76.623		76.623	60	64.387	141.010	114	
12	Gardu Distribusi	Unit	883	239		239	27	318	557	63	
13	Gardu Hubung	Unit	6	3		3	50	1	4	66,7	
14	Depo BBM	Unit	3	1		1		1	1	33,3	Simeulue
15	Gedung ESDM	Unit	1	3		3			3	33,3	Dinas
16	Gedung Pemantau Gunung Api	Unit	3	3		3			3	100	

Sumber : Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007.

#### 2.1.3.2.2.2 ENERGI

Pada akhir Desember 2006, pembangunan Depo BBM Simeulue sudah mencapai 71 persen dan kontribusi BRR sebesar Rp. 10 milyar telah dibayarkan kepada kontraktor PT. Pertamina pada bulan Desember 2006. Selain penanganan masalah BBM, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006

melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung dinas, gedung dan peralatan laboratorium, gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NAD, pengadaan peralatan pertambangan rakyat dan peralatan pengeboran sumur dalam. Selain itu BRR juga membangun kembali 3 unit gedung pemantau gunung api yang hancur berikut pengadaan peralatan pemantau gunung api.

### 2.1.3.2.3 SUMBERDAYA AIR

#### 2.1.3.2.3.1 IRIGASI

Dari 118.028 ha target rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Irigasi, sampai dengan Desember 2006 telah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana Irigasi seluas 78.766 ha (125%). Tahun anggaran 2007, terdapat penambahan seluas 31.212 Ha sehingga total luas irigasi adalah 108.181 (172%).

#### 2.1.3.2.3.2 SUNGAI DAN PENGENDALIAN BANJIR

Dari target 138.796 meter sungai yang harus direhabilitasi dan direkonstruksi, sampai dengan Desember 2006 telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sungai sepanjang 78.689 meter (57%). Pada TA 2007 akan ditangani 12.163 m. Sehingga pada akhir Tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah sepanjang 90.852 meter (65%).

#### 2.1.3.2.3.3 PENGAMANAN PANTAI

Dari target 69.058 meter pantai yang harus dilindungi, pada tahun anggaran 2005-2006 telah dikerjakan bangunan pengaman pantai sepanjang 57.854 meter (84%) dan pada tahun anggaran 2007 sepanjang 23.376 meter. Target yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran 2007 adalah sebesar 81.230 meter atau 118% dari target dalam Rencana Induk.

**Tabel 2.19 Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub-Sektor Sumberdaya Air**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
1	Irigasi	Ha	118.028	78.766		78.766	67	31.212	109.978	93
2	Sungai dan Pengendalian Banjir	m	138.796	76.689	2.000	78.689	57	12.163	90.852	65
3	Pengaman Pantai	m	69.058	57.854		57.854	84	23.376	81.230	118

Sumber : Deputi Infrastruktur BRR, Mei 2007.

#### 2.1.3.2.3.4 AIR BERSIH DAN SANITASI

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penyediaan air minum dan air bersih telah berjalan sejak tahun 2005 dan tahun 2007. Sampai tahun ketiga telah teralokasi dana sebesar Rp. 309,943 miliar atau sebesar 13,54% dari target (*on budget* yang terserap dan telah dialokasikan pada tahun 2007). Komponen terbesar adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih atau sebesar 63,53% atau sebesar Rp. 196,906 miliar; untuk komponen air limbah sebesar Rp. 23,093 miliar (7,45%), komponen persampahan sebesar Rp. 50,407 miliar (16,26%), dan komponen drainase sebesar Rp. 39,536 miliar (12,76%).

##### 2.1.3.2.3.4.1 AIR BERSIH

Pada tahun 2005 kegiatan rekonstruksi diarahkan pada penanganan darurat untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih kota-kota terkena tsunami dan barak-barak pengungsian. Kemajuan secara fisik telah banyak dicapai dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub bidang air bersih. Keterlibatan bantuan masyarakat Internasional melalui Donor dan NGO (*off budget*) pada pelaksanaan penyediaan air bersih telah memberikan peran yang sangat besar, sejak masa tanggap darurat.

Pencapaian dengan anggaran APBN yang telah dibangun/dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebesar Rp. 196,906 miliar, dengan anggaran sebesar ini akan terbangun fasilitas pelayanan air bersih perpipaan dengan kapasitas sebesar 480 lt/det yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Simeulue.

#### 2.1.3.2.3.4.2 PERSAMPAHAN

Penanganan darurat persampahan sebagian besar ditangani oleh Donor dan NGO, antara lain yang cukup besar adalah oleh UNDP untuk *city wide* selama tahun 2005. Sedangkan UNICEF menangani masalah persampahan untuk lokasi-lokasi barak. Pelaksanaan pembangunan sub bidang persampahan sampai tahun 2006 lebih banyak berupa penyediaan sarana pengangkutan sampah berupa *Dump Truck* dan *Arm roll truck*. Baru pada tahun 2007 ini beberapa lokasi TPA akan dibangun, yaitu TPA di Langsa, TPA di Meulaboh, TPA di Nagan Raya, dan TPA di Aceh Singkil.

#### 2.1.3.2.3.4.3 AIR LIMBAH

Pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang air limbah sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Baru IPLT di Banda Aceh yang sudah selesai dibangun oleh UNDP. Beberapa MCK telah dibangun dengan dana APBN (*on budget*) dan juga dana bantuan Donor dan NGO (*off budget*). Sedangkan IPLT di kabupaten/kota lainnya sedang dilaksanakan pembangunannya melalui pembiayaan pada tahun anggaran 2007 berjalan ini.

#### 2.1.3.2.3.4.4 DRAINASE

Drainase lingkungan permukiman sampai saat ini baru terbangun saluran drainase sepanjang 26.595 m dari total 106.347 m atau sekitar 29%. Alokasi anggaran yang telah terserap adalah sebesar Rp. 39,536 miliar. Masih kecilnya capaian pelaksanaan pekerjaan drainase lingkungan permukiman ini adalah karena perumahan dan permukiman masih dalam proses pelaksanaan.

**Tabel 2.20 Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 – 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
a	Air Bersih	Lt/dtk	3.256	135		135	4.1	345	280	9
b	Pembuangan Limbah	Rumah	543.217	1.400		1.400	0.3	290.310	291.710	54
c	Sampah	Rumah	543.217	636		636	0.1	1.529	1665	0.3
d	Drainase	m'	106.347	16.662		16.662	15.7	9.933	26.595	29

Sumber :BRR NAD-Nias, 2007

#### 2.1.3.2.4 BANGUNAN FASILITAS UMUM

Pelaksanaan proyek bangunan umum baru diprogramkan pada tahun 2007 dan rencana 2008. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan PUSLAKAT mitigasi Tsunami, *escape building*, museum tsunami, laboratorium dan peralatan (Tabel II.21).

#### 2.1.3.3. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bidang sosial budaya meliputi kelompok kegiatan: Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Budaya dan Sumberdaya Manusia (Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Pemuda dan Olahraga).

### 2.1.3.3.1 PENDIDIKAN

Sesuai dengan Rencana Induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan berupa program pembangunan fasilitas (gedung) untuk pendidikan darurat/ sementara, program pendidikan anak usia dini, memantapkan program pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi serta penelitian dan pengembangan pendidikan di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).

Berdasarkan Rencana Induk direncanakan sejumlah 12 unit namun dalam realisasi mencapai 295 unit atau 24 kali nya (2.458%). Demikian pula dengan penyediaan materi belajar mengajar sampai dengan akhir tahun 2007 yang telah melampaui target realisasi (100.8%).

**Tabel 2.21 Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas Bangunan Umum**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
1	Pembangunan Pusat Pelatihan Mitigasi Tsunami NAD daerah bencana Banda Aceh							4		
2	Escape Hill	Unit	5							
3	Desain dan konstruksi dari Escape Building di Aceh Jaya	Unit	1					1	1	100
4	Desain dan konstruksi dari Escape Building di Aceh Barat	Unit	1					1	1	100
5	Desain dan konstruksi dari Escape Building di Lhokseumawe	Unit	1					1	1	100
6	Desain dan konstruksi dari Escape Building di Bireuen	Unit	1					1	1	100
7	Desain dan konstruksi dari Escape Building di Pidie	Unit	1					1	1	100
8	Museum Pusat Pengembangan Tsunami di Banda Aceh (Multi year ingin mulai 2007 dengan Desain & Konstruksi di 2008/9)							2		
9	Pembangunan Pusat Kualitas Struktural di Banda Aceh & Peralatan untuk lab							1		
10	Koordinasi dan Konsultasi Rencana Kerja dan Program Pemerintah NAD - NIAS – Proyek Multi year							0		

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Pada rehabilitasi dan pembangunan TK dan bantuan peralatannya, terlihat target realisasi lebih dari separuhnya sampai dengan tahun 2006. Realisasi ini terutama berasal dari pendanaan yang bersumber dari bantuan NGO dan Donor (Non APBN).

Secara terperinci, kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan akan diuraikan dan disajikan dalam beberapa Tabel berikut berdasarkan kelompok program/kegiatannya.

**Tabel 2.22 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan  
(Program Pendidikan Anak Usia Dini)**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pembangunan Gedung darurat/ sementara	Unit/ Ruang	12	49	246	295	2458%		295	2458.3%
B	Program Pendidikan Anak Usia Dini/TK									
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit	101		61	61	60.4%	2	63	62.4%
2	Perabot/Peralatan	Set	125		61	61	48.8%		106	84.8%
3	Materi belajar mengajar		125		61	61	48.8%	15	126	100.8%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007.

Program wajib belajar 9 tahun, terdiri atas pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa. Pada pendidikan Sekolah Dasar, realisasi yang mencapai 100% ke atas adalah pada program paket belajar, pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, pengembangan fasilitas/komputer sekolah, meubeler dan trauma konseling.

Keadaan serupa juga ditemukan pada program sekolah menengah pertama. Kecuali pelatihan guru (180.3%) dan pengembangan teknologi informasi (800%), realisasi Rencana Induk sampai dengan tahun 2007 bervariasi mulai dari 0% (belum ada realisasi) sampai dengan 90.5%. Selanjutnya pada program pendidikan sekolah luar biasa, rata-rata hampir seluruh program memiliki pencapaian lebih dari 50% dari Rencana Induk, kecuali program pengadaan peralatan kantor SLB (20%) dan program pemberian beasiswa SLB (0%). Secara terperinci disajikan pada **Tabel II.23**

**Tabel 2.23 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan  
(Program Wajib Belajar 9 tahun)**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Sekolah Dasar									
1	Rehabilitasi sekolah	Unit	627	85	228	313	49.9%	164	477	76.1%
2	Pembangunan USB	Unit	25	26		26	104.0%	4	30	120.0%
3	Pembangunan RKB	Ruang	12	111		111	925.0%	11	122	1016.7%
4	Pemb. Sekolah Terpadu	Unit	3				0.0%		-	0.0%
5	Pembangunan Rumah Guru	Unit		178		178			178	
6	Rehabilitasi sekolah akibat konflik	Unit	23				0.0%		23	100.0%
7	Alat Olahraga, kesenian, teknologi dasar; life skill	Set	882				0.0%		-	0.0%
8	Meubeler	Pkt	113	8	518	526	465.5%	36	562	497.3%
9	Paket Belajar	Pkt	103.599		680.357	680.357	656.7%	9.169	689.526	665.6%
10	Buku Perpustakaan	SD	1.717				0.0%		-	0.0%
11	Buku Pelajaran Pokok	Exp	284.505				0.0%		-	0.0%
12	Diklat Kep Sek, Pembina/Pengawas	Orang	3.107				0.0%		-	0.0%
13	Block grant operasional SD	pkt	129				0.0%		-	0.0%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
14	Pengembangan Telekomunikasi, Komputer dll	pkt	1				0.0%		3	300.0%
15	Trauma Conselling	Kab	2		16	16	800.0%		16	800.0%
16	Fasilitas sanitasi				55	55			60	
B	Sekolah Menengah Pertama									
1	Pembangunan gedung	skl	293	111	34	145	49.5%	1	146	49.8%
2	Pembangunan USB	Unit	84	19	39	58	69.0%	18	76	90.5%
3	Pembangunan RKB pengembangan	Ruang	1.150	273	436	709	61.7%		709	61.7%
4	Pembangunan Sekolah Binaan/ Unggul	Paket		3	3	6		27	39	
5	Pembangunan Asrama Siswa	Unit	19		4	4	21.1%		4	21.1%
6	Meubeler	Pkt	206	90		90	43.7%	30	120	58.3%
7	Beasiswa	Orang	9.009			-	0.0%		-	0.0%
8	Trauma Conselling	Kab	2			-	0.0%		-	0.0%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

**Tabel 2. 23 (Lanjutan)**

9	Investasi Mutu						-		-	
-	Pemb. Pustaka, Lab. IPA, RK	Unit	193				-	0.0%	-	0.0%
-	Pemb. Perpustakaan	unit	100				-	0.0%	-	0.0%
-	Buku Pelajaran	Eksp	1.539.000				-	0.0%	-	0.0%
-	Lab Komputer	set	100				-	0.0%	-	0.0%
-	Alat Keterampilan	set	53				-	0.0%	30	56.6%
-	Pelatihan Guru	Org	10.000	221	17.115	17.336	173.4%	693	18.029	180.3%
-	Pengembangan Mutu Sekolah	skl	90		27	27	30.0%		53	58.9%
-	Kegiatan Kesiswaan	skl	2.386				-	0.0%	210	8.8%
-	Pengembangan IT untuk SMP	pkt	1				-	0.0%	8	800.0%
-	Efisiensi dan Efektivitas (akreditasi, Kinerja, CB)	skl	239				-	0.0%	20	8.4%
C	Pendidikan Luar Biasa/SLB	UNIT								
1	Pembangunan UGB	lokasi	6		1	1	16.7%		5	83.3%
2	Rehabilitasi Gedung	Ruang	5				-	0.0%	4	80.0%
3	Bantuan Meubeler	skl	6		1	1	16.7%		5	83.3%
4	Beasiswa SLB	Org	2.900				-	0.0%	-	0.0%
5	Sarana Prasarana	lokasi	4		1	1	25.0%		5	125.0%
6	Peralatan Pendidikan	unit	10		1	1	10.0%		5	50.0%
7	Peralatan Kantor	unit	25		1	1	4.0%		5	20.0%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Pada pendidikan menengah, program diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu pendidikan SMA, SMK, dan Madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah). Pencapaian realisasi terlihat pada beberapa program baik

yang dibiayai oleh sumber pendanaan APBN maupun Non APBN. Pada pendidikan SMA, pencapaian lebih dari 100% dari Rencana Induk terlihat pada program peningkatan kapasitas manajemen sekolah (391.3%). Selanjutnya pada program lain, realisasi hampir seluruhnya mencapai di atas 50% dari Rencana Induk sampai dengan tahun 2007. Pencapaian program di bawah 50% adalah pada pembangunan fasilitas ibadah dan operasional dan pemeliharaan (0%), Laboratorium IPA dan komputer (31.4%) dan ruang serbaguna (42.0%).

Selanjutnya pada program pendidikan SMK, pencapaian target dari Rencana Induk masih di bawah 50%. Pencapaian tertinggi adalah pada program pendidikan dan pelatihan siswa (41.7%), pembangunan sekolah (33.3%) dan rehabilitasi gedung (7%). Selanjutnya pada program pembangunan RKB meubeler dan bantuan BOB belum ada realisasi dari Rencana Induk.

Program pendidikan madrasah (Departemen Agama) realisasi pembangunan RKB dan UGB masing-masing mencapai 342.4% dan 61.5% dari Rencana Induk sampai dengan tahun 2007. Selanjutnya pembangunan BKG madrasah mencapai 31 buah, namun tidak terdapat dalam Rencana Induk. Secara terperinci disajikan pada **Tabel 2.24**

Program dan kegiatan pendidikan tinggi, menitikberatkan pada kegiatan fisik dan pemberian santunan/bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada mahasiswa/dosen yang melakukan studi. Hampir seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk (pencapaian lebih dari 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum terealisasi yaitu perbaikan dan perluasan asrama mahasiswa (realisasi 0%) sampai dengan tahun 2007. Secara terperinci disajikan pada **Tabel 2.25**.

**Tabel 2.24 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Menengah)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAP		TOTAL	CAP
A	SMA	UNIT								
1	Pembangunan RKB	Paket	530	209	37	246	46.4%	23	269	50.8%
2	Pembangunan UGB Reguler & Berasrama	Unit	42	22		22	52.4%	16	40	95.2%
3	Rehab	skl	148		43	43	29.1%	21	76	51.4%
4	Meubeler	pkt	90	14		14	15.6%	59	85	94.4%
5	Buku perpustakaan	Expl	973.208	-	431.000	431.000	44.3%	21.000	487.000	50.0%
6	Lab IPA dan Komputer	pkt	140	44		44	31.4%		44	31.4%
7	Ruang Serbaguna/ RPL	pkt	100	24		24	24.0%	12	42	42.0%
8	Fasilitas Ibadah	pkt	100			-	0.0%		-	0.0%
9	Peralatan Olahraga dan Seni	pkt	100			-	0.0%		69	69.0%
10	Pengembangan sekolah bertaraf International	skl	20			-	0.0%		7	35.0%
11	Operasional dan pemeliharaan	skl	1.120			-	0.0%		-	0.0%
12	Peningkatan kapasitas manajemen sekolah	skl/org	92	120		120	130.4%		360	391.3%
B	SMK	UNIT				-			-	
1	Rehabilitasi gedung	unit	14		1	1	7.1%		1	7.1%
2	Pembangunan	unit	3		1	1	33.3%		1	33.3%
3	Pembangunan RKB	ruang	34			-	0.0%		-	0.0%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAP		TOTAL	CAP
4	Pendidikan dan pelatihan siswa	siswa	240	100		100	41.7%		100	41.7%
5	Bantuan Peralatan dan meubeler	lokasi	67			-	0.0%		-	0.0%
6	bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS)	skl	152			-	0.0%		-	0.0%
7	Vocational Training	Org			10.540	10.540		435	10.975	
C	PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)	UNIT								
1	Pembangunan RKB madrasah		85	291		291	342.4%		291	342.4%
2	Pembangunan UGB Madrasah		52	32		32	61.5%		32	61.5%
3	Pembangunan BKG Madrasah			31		31			31	

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

**Tabel 2.25 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAP		TOTAL	CAP
	PENDIDIKAN TINGGI (4 PT + swasta)	pts								
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	OB	900				0.0%		-	0.0%
2	Kompensasi SPP 2004/2005	Mhs	-						-	
3	Basiswa mahasiswa korban tsunami/kurang Mampu/ikatan dinas	Mhs	13.500	8.846	17.194	26.040	192.9%	6.782	40.746	301.8%
4	Penggantian ruang kantor dan Laboratorium	pkt	4			-	0.0%	3	4	100.0%
5	Penggantian meubeler kuliah, lab & kantor	pkt	17		12	12	70.6%	4	16	94.1%
6	Perbaikan Mess Dosen	pkt	2		2	2	100.0%		2	100.0%
7	Penggantian Meubeler asrama mahasiswa	pkt	2	1		1	50.0%	1	2	100.0%
8	Perbaikan Asrama Mahasiswa	m2	5.900			-	0.0%	1	1	0.0%
9	Penggantian/pengadaan peralatan Lab	pkt	26			-	0.0%	6	8	30.8%
10	Penambahan Luas asrama mahasiswa	pkt	1			-	0.0%		-	0.0%
11	Penggantian Kendaraan Dinas	unit	10		8	8	80.0%		8	80.0%
12	Santunan dosen/tenaga adm PT	org	213		500	500	234.7%		500	234.7%
13	Penggantian Bus kampus	unit	15			-	0.0%		-	0.0%
14	Perbaikan pagar kampus	m2	5.200			-	0.0%		-	0.0%
15	Perbaikan jalan Kampus	pkt	1		1	1	100.0%		2	200.0%
16	Basiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3	org	150	142		142	94.7%	87	369	246.0%
17	Pembangunan Rumah Dosen	pkt	1		5	5	500.0%		5	500.0%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAP		TOTAL	CAP
18	Pembuatan sumur dan jaringan air bersih	unit	3	1		1	33.3%	2	3	100.0%
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1			-	0.0%		1	100.0%
20	Meubeler Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1			-	0.0%		1	100.0%
21	Rehabilitasi gedung PGSD Unsyiah	pkt	1	1		1	100.0%	1	2	200.0%
22	Meubeler PT	pkt	1	1		1	100.0%	3	8	800.0%
23	Perbaikan gedung pendidikan PT	pkt	7		10	10	142.9%	12	23	328.6%
24	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTN & PTS	pts	3	1	1	2	66.7%	4	7	233.3%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Sampai dengan tahun 2007, realisasi kegiatan riset mencapai 144.6% dan *teaching grant* mencapai 91.1% dari Rencana Induk. Selanjutnya bantuan praktek mahasiswa, realisasi mencapai 46.5%, pengadaan buku pustaka (18.6%) serta monitoring dan pengawasan baru mencapai 4.3% dari Rencana Induk. Secara terperinci disajikan pada **Tabel II.26**.

**Tabel 2.26 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pendidikan (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAP		TOTAL	CAP
1	Teaching Grant	Keg	56	17		17	30.4%		51	91.1%
2	Riset	Keg	56	42		42	75.0%	13	81	144.6%
3	Bantuan Praktek Mahasiswa & ekstra kurikuler	OB	1.800	600		600	33.3%	79	837	46.5%
4	Akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan data base	Keg	-	29		29		5	40	
5	TOEFL dan POT dosen	Org	-	60		60			180	
6	Matrikulasi mahasiswa Undangan	Org	-	270		270			540	
7	Buku Pustaka	Pkt	59	2		2	3.4%	3	11	18.6%
8	Monitoring dan pengawasan	Keg	184	2		2	1.1%	2	8	4.3%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

### 2.1.3.3.2 KESEHATAN

Pelaksanaan Program upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, capaiannya rata-rata telah melebihi Rencana Induk. Untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, operasional dan pemeliharaan rumah sakit serta pendidikan dan pelatihan teknis realisasinya telah mencapai lebih dari 100% dan utamanya dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang sampai dengan tahun 2007 belum terealisasi sepenuhnya seperti pembangunan rumah dinas (4.8%), pengadaan kendaraan(7.2%) maupun pembangunan dan perawatan gedung kesehatan dan pendidikan. Dalam bentuk tabel disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.27 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan  
(Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan)**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAP		TO TAL	CAP
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
2	Pembangunan Rumah Negara									
-	Rumah Dinas	pkt	21	1	-	1	4.8%		1	4.8%
-	Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	pkt	42	10	-	10	23.8%		10	23.8%
3	Pembangunan dan Perawatan Gedung Kesehatan/Pendidikan	pkt								
-	Kantor Dinas Kesehatan	pkt	5	2	-	2	40.0%	-	2	40.0%
-	Rumah Sakit	pkt	9	12	4	16	177.8%	4	20	222.2%
-	Pustu	pkt	174	-	45	45	25.9%	6	51	29.3%
-	Polindes	pkt	700	-	56	56	8.0%	4	60	8.6%
-	Klinik	pkt	6	-	5	5	83.3%	-	5	83.3%
-	BBPOM	pkt	3							
-	Laboratorium Kesehatan	pkt	1							
4	Operasional Dan Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	4	12		12	300.0%		12	300.0%
5	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, Dan KB	unit	4	24		24	600.0%		24	600.0%
6	Pengadaan Kendaraan Roda4/Roda 6/Roda 10 (ambulance)	unit	69	5		5	7.2%		5	7.2%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Pada Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, terdiri dari dua kegiatan dengan capaian yang telah melebihi Rencana Induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular telah merealisasikan 2 paket dari 1 paket yang diamanatkan dalam Rencana Induk (200%) sedangkan pembangunan kantor kesehatan pelabuhan baru merealisasikan 50% dari Rencana Induk sebesar 2 paket. Dalam bentuk tabel disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.28 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan  
(Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah)**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAP		TO TAL	CAP
1	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
2	Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	pkt	2	1	-	1	50.0%		1	50.0%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Realisasi program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan seluruhnya telah mencapai lebih dari 100% dari Rencana Induk. Pengadaan peralatan medis dan pembangunan gedung farmasi/obat telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2006 dan diteruskan lagi pada tahun 2007. Demikian pula dengan program peningkatan kesehatan masyarakat. Pembangunan fasilitas puskesmas dan pelayanan kesehatan di pengungsian telah terealisasi masing-masing sebesar 148.4% dan 276.4% sampai dengan tahun 2007. Dalam bentuk tabel disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.29 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan (Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
A	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		6					-		
1	Pengadaan Peralatan Medis di Laboratorium Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan	pt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
2	Pembangunan Gudang Farmasi/Obat	pt	5	12	-	12	240.0%		12	240.0%
B	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		119	162	34	196	164.7%	51	247	207.6%
1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Puskesmas	unit	64	52	31	83	129.7%	12	95	148.4%
2	Pelayanan Kesehatan di Pengungsian/Poskeslit	unit	55	110	3	113	205.5%	39	152	276.4%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Demikian pula dengan program pengkajian dan penelitian bidang kesehatan. Realisasi telah mencapai 100% untuk seluruh kegiatannya. Bahkan pada program perbaikan gizi masyarakat, realisasi mencapai lima kali lipat dari amanat Rencana Induk (lebih dari 500%) dan telah dilaksanakan pada 21 kota/kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selanjutnya pada program pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, seluruh kegiatan telah melampaui amanat Rencana Induk (lebih dari 100%) kecuali pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan yang baru mencapai realisasi 33% (2 unit). Secara terperinci pencapaian disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.30 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Bidang Kesehatan (Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
A	Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan		2					25		
1	Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
2	Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
B	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan		8	7		7	87.5%	503	510	6375.0%
1	Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
2	Basiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	1	4	-	4	400.0%		4	400.0%
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan	pkt	6	2	-	2	33.3%		2	33.3%
C	Perbaikan Gizi Masyarakat		42	236	-	236	561.9%	21	257	611.9%
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kab/ Kota	21	118	-	118	561.9%		118	561.9%
2	Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Kab/ Kota	21	118	-	118	561.9%		118	561.9%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Pada program penyelenggaraan kebijakan & manajemen pembangunan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan dan program penyelenggaraan penyehatan lingkungan, realisasi seluruhnya telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan Rencana Induk sejak periode tahun 2005-2006. Beberapa penambahan juga dilaksanakan realisasinya pada tahun 2007. Secara terperinci pencapaian tiap program akan diperjelas melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2.31 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
A	Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		3					22		
1	Administrasi Umum	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
3	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%
B	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan		1	1	-	1	100.0%	2	3	300.0%
1	Program Promosi Kesehatan	pkt	1	1	-	1	100.0%		1	100.0%
C	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		1	2	-	2	200.0%	34	36	3600.0%
1	Peningkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasar	pkt	1	2	-	2	200.0%		2	200.0%

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

### 2.1.3.3.3 AGAMA

Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, capaiannya sudah melebihi Rencana Induk yang telah ditetapkan. Untuk program pembangunan tempat ibadah, pencapaian sebesar 91% telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan 2007 yang meliputi pembangunan masjid, meunasah, dayah, balai pengajian, gereja dan vihara.

Selanjutnya untuk pembangunan kembali KUA yang direncanakan sebanyak 68 buah (Rencana Induk), telah terealisasi pembangunannya sebanyak 50 unit pada 2005-2006 dan tambahan sebanyak 66 unit pada tahun 2007 sehingga total KUA terbangun kembali sebanyak 116 KUA (171%). Namun demikian untuk pengadaan buku nikah yang direncanakan sejumlah 30.000 eksemplar belum terealisasi hingga tahun 2007 (0%).

Sumber pendanaan berasal dari pembiayaan APBN dan non APBN. Target realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.32 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Terbangunnya kembali tempat ibadah	Unit	3.114	2.525	66	2.591	83%	239	2.830	91%
	- Masjid	Unit	1.167	1.410	50	1.460	125%	73	1.533	131%
	- Meunasah	Unit		437	16	453		35	488	
	- Dayah	Unit		145	3	148		15	163	
	- Balai Pengajian	Unit	85	196		196	231%	15	211	248%
	- Vihara	Unit	4			-	0%	2	2	50%
	- Gereja	Unit	1.943	337		337	17%	141	478	25%
2	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68	50		50	74%	66	116	171%
3	Pengadaan buku nikah	exp.	30.000				0%			0%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Untuk program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, beberapa capaian telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan tahun 2007. Sumber pembiayaan berasal dari pendanaan APBN. Rincian kegiatan meliputi terbina kembali ketenteraman bathin (berupa pembinaan dan pelatihan serta bantuan imuem meunasah sebanyak 300 orang), bantuan Al-Qur'an sebanyak 32.655 eksemplar dan pemberian beasiswa pada siswa/santri korban tsunami (7.900 orang). Target realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.33 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Terbinanya kembali ketenteraman bathin	pkt	589	176		176	30%		176	30%
2	Bantuan Qur'an, Kitab dan Buku-buku bacaan	buah	0	20.405		20.405		12.250	32.655	
3	Beasiswa Mahasiswa, Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org		7.900		7.900			7.900	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program Pengembangan Nilai Keagamaan meliputi pelatihan kader-kader agama, pemulihan kondisi mental dan spiritual, penelitian keagamaan dan penempatan guru da'i di dayah. Sumber pembiayaan terutama berasal dari APBN, namun pada beberapa kegiatan juga didanai dari sumber non APBN (seperti bantuan pembangunan dayah sebanyak 7 unit pada tahun 2005-2006). Realisasi pelatihan kader Masjid telah melatih 585 orang pada tahun 2005-2006. selanjutnya hingga tahun 2007 telah dilakukan beberapa realisasi seperti pembangunan asrama santri, bantuan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas agama, kegiatan magang, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti remaja Masjid.

Selanjutnya, program pemulihan mental dan spiritual telah merealisasikan 93 paket kegiatan, penelitian keagamaan telah merealisasikan pencetakan 10.000 eksemplar terjemahan Al-Qur'an berbahasa Aceh. Berikutnya, sejumlah 4.190 guru/da'i telah ditempatkan secara tersebar pada beberapa sekolah.

Realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.34 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPA IAN		TO TAL	CAPAI AN
1	Terlatihnya kader-kader imam Masjid, khatib, dan lain-lain	pkt	154	285		285	185%	300	585	380%
2	Pulihnya kondisi mental spiritual.	Org		93		93			93	
3	Penelitian Keagamaan	Paket		8		8			8	
4	Penempatan/Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org		3.970		3.970		220	4.190	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program lainnya di bidang agama adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. Kegiatan pembangunan gedung Kanwil Depag Provinsi NAD yang pada Rencana Induk akan dibangun 1 unit yang telah terealisasi tahun 2007. Realisasi yang telah dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi gedung Kanwil Depag pada beberapa kabupaten/kota sebanyak 9 unit (Rencana Induk 7 unit).

Rehabilitasi Gedung Dinas Syari'ah Propinsi dan Gedung Dinas Syari'ah Kab/kota yang direncanakan sejumlah 4 unit, namun dalam realisasinya telah melakukan rehabilitasi sebanyak 6 unit (150%) sampai dengan tahun 2007. Sedangkan rehabilitasi gedung untuk observasi vital dan asrama haji masing-masing telah direalisasikan sebanyak 1 unit.

Penambahan ruangan pada pembangunan beberapa gedung Baitul Mal juga telah dilaksanakan antara lain di Provinsi NAD, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Aceh Barat. Selanjutnya pengadaan meubeler dan perlengkapan gedung juga beberapa telah terealisasi seperti pengadaan meubeler asrama haji, Kantor Depag dan Syari'ah Islam Aceh Jaya.

Realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.35 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1				0%	1	1	100%
2	Gedung Kandepag Kab./kota	Unit	7	7		7	100%	2	9	129%
3	Gedung Dinas Syariat propinsi dan gedung Dinas Syariat Kab./Kota	Unit	4	6		6	150%	2	8	200%
4	Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota	Unit	4	8		8	200%	5	13	325%
5	Gedung Observasi Hilal	Unit	1	1		1	100%	1	2	200%
6	Asrama Haji	Unit	1	1		1	100%		1	100%
7	Meubeler dan Perlengkapan Gedung	Set		279		279		9	288	
8	Pengadaan Tanah untuk Kantor Pemerintah	M2								
9	Bangunan lain (rumah dinas dan Aula)	Unit	4					10	10	250%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Berdasarkan penyebaran program/kegiatan di Kabupaten/Kota maka rekapitulasi data Realisasi Sub Bidang Pelayanan keagamaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan sebaran kabupaten di Provinsi NAD dan Nias tahun 2005-2006 dan Program 2007 ditampilkan dalam Tabel berikut. Program meliputi kegiatan sosial agama, rehabilitasi mental agama, kegiatan agama dan penyediaan Al-Qur'an. Penyebaran kegiatan meliputi 21 Kabupaten di Provinsi NAD dan 2 kabupaten di Nias.

**Tabel 2.36 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Pelayanan Keagamaan**

NO	KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN SOSIAL AGAMA	REHAB. MENTAL AGAMA	KEGIATAN AGAMA	AL QUR'AN EDISI LUX
1	Aceh Barat	1	3	0	12
2	Aceh Barat Daya	1	1	0	7
3	Aceh Besar	0	4	2	31
4	Aceh Jaya	22	3	0	8
5	Aceh Selatan	4	0	1	7
6	Aceh Singkil	2	2	0	12
7	Aceh Tamiang	0	0	0	15
8	Aceh Tengah	2	0	0	15
9	Aceh Tenggara	3	2	0	7
10	Aceh Timur	2	1	0	21
11	Aceh Utara	12	2	0	35
12	Banda Aceh	67	7	8	25
13	Bener Meriah	0	0	0	10
14	Bireuen	0	1	1	35
15	Gayo Luwes	0	0	0	3
16	Kota Langsa	0	0	0	8
17	Kota Lhokseumawe	0	0	0	10
18	Nagan Raya	0	1	0	7

NO	KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN SOSIAL AGAMA	REHAB. MENTAL AGAMA	KEGIATAN AGAMA	AL QUR'AN EDISI LUX
19	Pidie	47	5	1	35
20	Sabang	1	0	1	2
21	Simeulue	1	3	0	8
Sub Total NAD		165	35	14	313
1	Nias	1	0	0	0
2	Nias Selatan	0	0	0	0
TOTAL		166	35	14	313

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

### 2.1.3.3.4 SOSIAL BUDAYA DAN SUMBERDAYA MANUSIA

#### 2.1.3.3.4.1 SOSIAL

Untuk kegiatan bidang sosial, berdasarkan Rencana Induk terdapat 5 (lima) kelompok program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu : Bantuan dan jaminan sosial; Pelayanan dan rehabilitasi sosial; Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

Program bantuan jaminan sosial sebagian besar telah selesai dilaksanakan pada masa tanggap darurat, berupa bantuan kebutuhan pokok kepada pengungsi. Selanjutnya pada program tahun 2007, masih ada bantuan kebutuhan pokok (beras, lauk pauk dan sandang) untuk pengungsi yang masih tersisa tinggal di barak untuk sekitar 1.500 pengungsi (Tabel II.39)

**Tabel 2.37 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Tanggap Darurat (Lauk, beras, sandang)	Paket	40.331	82		82	0.0%	100	100	0.2%
2	Program Bantuan Pengungsi	Org	40.331	2.127		2.127	0.0%	1500	1.500	3.7%
3	Program bantuan wanita (Org)	Paket		200	8.410	8.610		3	3	
4	Bantuan Rehabilitasi Rumah (unit)	Paket		300	546	846		1	1	
5	Pembangunan Trauma Centre.	Unit	1				0.0%			0.0%

Sumber : Data Kedeputusan Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Jika mengacu pada Rencana Induk, program pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya menyebutkan kebutuhan bantuan rehabilitasi sosial sebanyak 12 kegiatan, namun pada pelaksanaannya telah melampaui target Rencana Induk tersebut, baik dilihat dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

**Tabel 2.38 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Bantuan Panti Sosial	Keg	12	6		6	0.0%	171	171	1425.0%
2	Bantuan sarana Panti Sosial	Panti		49		49		68	68	
3	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	Unit		1		1		7	7	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
4	Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit		10		10		9	9	
5	Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket		51	178	229		4	4	
6	Bantuan Biaya fakir miskin	Org		13.366		13.366				
7	Bantuan Lokakarya Bidang Sosial	Angk.		10		10				
8	Bantuan Prasarana dan sarana penyandang cacat	Pkt		35		35				
9	Bantuan ekonomi untuk Panti	Pkt		22		22				
10	Bantuan Makan Panti	Org		10.000		10.000				
11	Peningkatan Kesra Anak (Org)	Pkt		19	139.363	139.382				
12	Bantuan anak berprestasi	Org		500		500				

Sumber : Data Kedeputusan Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Pada program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS berdasarkan Rencana Induk, yang diamanatkan hanya dua kegiatan yaitu bantuan pengungsi sebanyak 19.500 paket dan bantuan pengembangan usaha produktif untuk 10.700 desa. Realisasi pada kegiatan program ini lebih banyak ditangani melalui bantuan Internasional NGO dan Donor. Sehingga pada program tahun 2007, BRR (APBN) hanya menangani desa-desa yang belum mendapatkan bantuan (*filling gap*), yakni untuk 45 desa.

**Tabel 2.39 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS.)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006					PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	SAT.	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Usaha ekonomis produktif.	Paket							1	1	
2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Desa	10.700	300			300	0.0%	45	45	0.4%
3	Bantuan Pengungsi (Org)	Pkt	19.500	322	449,103		449,425	0.0%			0.0%
4	Kebutuhan layanan sosial	KK		300			300				
5	Pelatihan keterampilan dan pembinaan wirausaha (Org)	Keg		12	34,315		34,327				
6	Bimbingan sosial RSDK	Keg		3			3				
7	Bantuan KUBE Penyandang cacat	Pkt		6			6				
8	Rehabilitasi TMP/ Perbaikan Rumah Perintis										
9	Keluarga Rentan/Korban Konflik	Pkt		1.270			1.270		27	27	
10	Kembalinya 265 KK KAT ke lokasi.	Desa		60			60				
11	Pengembangan Pranata Sosial	Desa		60			60		45	45	

Sumber : Data Kedeputusan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Begitu juga pada program pelayanan rehabilitasi sosial, meskipun realisasi capaian pelaksanaan terhadap Rencana Induk pada beberapa kegiatan mencatat angka nol namun kenyataan di lapangan kegiatan dimaksud sudah ditangani melalui bantuan NGO dan donor, serta sebagian pekerjaan tidak diperlukan lagi. Program tahun 2007 mencatat beberapa kegiatan yang bersifat 'filling the gap'.

**Tabel 2.40 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Bantuan insentif petugas pendamping Keluarga Binaan Sosial	Pkt	25.000				0.0%			0.0%
2	Bantuan biaya peningkatan kapasitas kecerdasan sosial mahasiswa	Pkt	2.500				0.0%	4	4	0.2%
3	Pendampingan Masyarakat Desa	Desa		1.020		1.020		95	95	
4	Peningkatan Kecerdasan Sosial	Pkt								
5	Pembangunan Sistem Kesejahteraan Sosial Desa	Desa						50	50	
6	Program bantuan sosial untuk kegiatan sosial masyarakat	Pkt						39	39	
7	Program pendidikan dan pelatihan masyarakat	Keg		59		59				
8	Pendirian Pati	Unit	5				0.0%			0.0%
9	Terkumpulnya data-data permasalahan sosial di NAD	Keg								
10	Bantuan penunjang kegiatan Karang Taruna Indonesia Propinsi NAD	Pkt								
11	Program pemetaan permasalahan sosial pasca bencana	Keg								
12	Bantuan pengkajian alternative untuk membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif	Keg								
13	Program pembuatan film dokumenter sosial tentang pembangunan Aceh kembali	Pkt								

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007.

Untuk program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial hanya mencatat satu kegiatan yaitu rehabilitasi yayasan/panti, yaitu realisasi pelaksanaan sampai tahun 2007 sebesar 21 unit dan program 2007 sebesar 5 unit.

**Tabel 2.41 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
A	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial									
1	Rehabilitasi yayasan/orsos/panti masyarakat	Paket		21			5	5		
2	Rehabilitasi TMP/MPN/Perbaikan Rumah PK	Pkt	18.810				0.0%		0.0%	
B	Litbang Kesejahteraan Sosial									
1	Pelatihan PNS	Org								
2	Identifikasi Kearifan Lokal	Pkt								
3	Pemetaan Sosial Paska Bencana	Pkt								

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Tabel berikut menggambarkan penyebaran program/kegiatan di Kabupaten/Kota untuk program bantuan Sosial.

**Tabel 2.42 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Bantuan Sosial per Kabupaten**

NO	KABUPATEN/ KOTA	RENOVASI PELATIHAN ANAK CACAT	PKS I/II	PENYEBARAN BANTUAN SOSIAL	PEMBERIAN SARANA KOMPUTER	BANTUAN ANAK ASUH
1	Aceh Barat	1		18		
2	Aceh Barat Daya		2			
3	Aceh Besar		14	15	5	1,758
4	Aceh Jaya	1	2	15		
5	Aceh Selatan		2			
6	Aceh Singkil	1				
7	Aceh Tamiang					
8	Aceh Tengah	2	2			
9	Aceh Tenggara	2				
10	Aceh Timur	1	4			
11	Aceh Utara	4	6	10		58
12	Banda Aceh		10	5	5	482
13	Bener Meriah	1				
14	Bireuen	1				
15	Gayo Lues	1				
16	Kota Langsa	1				
17	Kota Lhokseumawe	1	12			140
18	Nagan Raya		2			
19	Pidie	3	6	10		814
20	Sabang	1	2		5	
21	Simeulue		2			
22	NAD*)					3252
23	DONOR/NGO	-				
	SUB TOTAL NAD	22	64	68	15	3252
1	KEPULAUAN NIAS	15	50	50	50	2000
	TOTAL NAD & SUMUT					5252

Sumber : Data Kedeputan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

### 2.1.3.3.4.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemberdayaan perempuan, yang mengacu pada Rencana Induk, terutama berkenaan dengan Program Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi NAD dan Nias kepulauan.

Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2006 terdapat program dengan capaian sesuai target Rencana Induk (100%), melebihi target Rencana Induk ( $\geq 100\%$ ) dan adapula yang belum sesuai target Rencana Induk bahkan sampai tahun 2007, seperti revitalisasi kelembagaan (5,9%), pengarusutamaan gender dan survei penaksiran kebutuhan khusus perempuan. Untuk program/kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target Rencana Induk akan dilakukan penajaman sasaran disesuaikan dengan kebutuhan riil.

**Tabel 2.43 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Penguatan Kelembagaan)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
2	Pengarusutamaan Gender	Paket Pertemuan	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
3	Assessment data dan kebutuhan khusus perempuan	Survey	17	4		4	23.5%	1	5	29.4%
4	Rehabilitasi psikologis & peningkatan keterampilan perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
5	Bea siswa bagi ulama perempuan, pelatihan dan kursus singkat bagi pemimpin perempuan	Paket	1					1	1	100.0%
6	Sosialisasi garapan kepada masyarakat desa	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
7	Pelatihan tenaga sukarela masyarakat bagi remaja desa	Paket	1							

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Realisasi program yang telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan Rencana Induk adalah pelatihan life skill dan vocational, bantuan dengan kompetensi bagi masyarakat dan workshop 'trafficking' dan 'judicial watch networking' (masing-masing pencapaian 100% hingga tahun 2007). Pencapaian tersebut terutama pada periode tahun 2005-2006. Selanjutnya program lain mencapai lebih dari 100% kecuali program fasilitasi 'woman crisis center' (19.6%) dan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (2.6%). Secara terperinci pencapaian disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.44 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Fasilitasi Pusat Penanganan Krisis pda wanita	Unit	51	10		10	19.6%		10	19.6%
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	KImpk	901	10		10	1.1%	13	23	2.6%
3	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	KImpk	850	1.800		1.800	211.8%	3.500	5.300	623.5%
4	Dukungan Hukum untuk Perempuan	Kasus	17	118		118	694.1%	100	218	1282.4%
5	Pelatihan keterampilan hidup dan vocational skill untuk perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
6	Bantuan pada kelompok pengajian	Paket	1	2.100		2.100			2.100	
7	Bantuan untuk masyarakat dengan kompetensi	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
8	Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan	Unit	50	49		49	98.0%		49	98.0%
9	Workshop gugus anti trafficking	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
10	Workshop jaringan pemerhati hukum	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

Program/kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak difokuskan pada rehabilitasi psikologis anak dan keluarga pasca bencana serta kelengkapan kebutuhan administrasi kependudukan. Hampir seluruh program telah mencapai target realisasi yang telah ditetapkan oleh Rencana Induk seperti TOT pola asuh anak, qanun perlindungan anak, penyelenggaraan kongres anak, dan pedoman dan KIE (pencapaian 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang realisasinya di bawah 100% yaitu reunifikasi keluarga (1.8%) dan fasilitasi *children center and kid conselling* (29.4%). Adapun kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Satker realisasinya baru mencapai 50%. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.45 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Fasilitasi Pusat Anak dan Konseling untuk anak	Unit	34	10		10	29.4%		10	29.4%
2	Reunifikasi Keluarga	Anak	6.800				0.0%	120	120	1.8%
3	Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak		38.386		38.386		34.837	73.223	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
4	Dukungan untuk pengembangan pola asuh anak									
5	Pedoman dan KIE	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
6	TOT bagi Pola Asuh Anak	Diklat	1				0.0%	1	1	100.0%
7	Qanun perlindungan anak (akte kelahiran bebas)	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
8	Penyelenggaraan kongres anak	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
9	Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Satker	Paket	4	1		1	25.0%	1	2	50.0%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional. Hampir seluruh program telah terealisasi pada periode tahun 2005-2006. Dari keseluruhan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk, hanya 2 program yang belum terealisasi penuh sampai dengan tahun 2007 yaitu program perlengkapan sarana kantor dan pengadaan kendaraan roda 4 yang masing-masing pencapaiannya sebesar 33.3%. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.46 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemberdayaan Perempuan (Program Pelayanan Keluarga Berencana)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
2	Penyuluhan dan penyebaran informasi	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
3	Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan kb	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
4	Pengadaan perlengkapan sarana gedung	Paket	3	1		1	33.3%		1	33.3%
5	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	271	271		271	100.0%		271	100.0%
6	Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	Unit	3	1		1	33.3%		1	33.3%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

#### 2.1.3.3.4.3 PEMUDA DAN OLAMRAGA

Realisasi bidang pemuda dan olahraga pada tahun 2005-2006 meliputi dua jenis program yaitu pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda dan rehabilitasi serta pemeliharaan bangunan gedung olahraga dan pada program tahun 2007 seluruh program bidang pemuda dan olahraga ditangani. Untuk lebih jelasnya volume dari realisasi sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.47 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
A	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda									
1	Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota)	OB	300	21		21	7%	60	81	27%
2	Penumbuhan KUPP	klmpk	125	115		115	92%	25	140	112%
3	Kelompok Pemuda sebaya	klmpk	40	83		83	208%	8	91	228%
4	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	1		1	20%	1	2	40%
5	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	org	160					32	32	20%
6	Monitoring dan Evaluasi life skills	klmpk	250					50	50	20%
7	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten / Kota	org	300					60	60	20%
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lmbg	25					5	5	20%
9	Pelatihan/seleksi SP3	org	100					20	20	20%
10	Peningkatan Sumber daya SP3	org	275					55	55	20%
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kgtn	10					2	2	20%
12	Monitoring dan Evaluasi SP3	kgtn	5					1	1	20%
B	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga									
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	org	300	326		326	109%	60	386	129%
2	Inventarisasi/ Pendataan OR daerah	kgtn	5	1		1	20%	1	2	40%
3	Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP)	kgtn	5					1	1	20%
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	org	100	420		420	420%	20	440	440%
5	Kompetisi antar klub OR Pelajar	org	1125					225	225	20%
6	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	org	125					25	25	20%
7	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	org	50					10	10	20%
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	org	330					66	66	20%
9	Pekan OR Pelajar	org	550					110	110	20%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
10	Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS	kgtn	5	5		5	100%	1	6	120%
11	Perkemahan Pelatihan Atlet Pelajar	org	400					80	80	20%
12	Pekan OR Pelajar Cacat	org	175					35	35	20%
13	Pekan OR Pedesaan	kec./ desa	15					3	3	20%
14	Peringatan HAORNAS	21 kab./ kota	105					21	21	20%
15	Dukungan admn. Pengelolaan Kegiatan (Kab./Kota)	kgtn	5	21		21	420%	1	22	440%
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									
1	Bantuan Peralatan Olahraga	pkt	5	91		91	1820%	1	92	1840%
2	Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga	kab./ kota	30	1		1	3%	6	7	23%
3	Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan	org.	90					18	18	20%
4	Menyusun model increatment dan strategi perlakuan	kgtn	5					1	1	20%
5	TOT instruktur dari masyarakat setempat	org	300					60	60	20%

Sumber : Data Kedeputusan Pendidikan dan Kesehatan BRR, Mei 2007.

#### 2.1.3.3.4 BUDAYA

Berdasarkan Rencana Induk, bidang budaya yang ditangani meliputi 3 jenis program, yaitu pengembangan nilai budaya; pengelolaan keragaman budaya dan pengelolaan budaya. Realisasi pelaksanaan dibidang budaya sampai dengan tahun 2006, telah ditangani untuk seluruh kegiatan pada masing-masing program tersebut di atas. Sedangkan pada program tahun 2007 hanya menangani 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan penguatan kebanggaan dan ikatan sosial masyarakat Aceh; dan menyediakan hiburan kepada pengungsi serta pembangunan Gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Untuk lebih jelasnya realisasi dan program dan kegiatan di atas tertera pada tabel berikut.

**Tabel 2.48 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Budaya (Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Menguatnya kebanggaan dan ikatan sosial masyarakat Aceh	Paket		10	2375			52	62	
2	Terbangunnya kembali semangat dan partisipasi semua komponen masyarakat Aceh	Paket		12	4630					

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
3	Terlestarikannya aset-aset budaya Aceh untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbasis adat dan budaya lokal	Paket		13						
5	Teridentifikasinya kondisi terakhir BCB/Situs, Museum dan Bangunan Tua Bersejarah di Seluruh Wilayah yang terkena bencana	Paket		1			69		70	
6	Tersedianya peta digital kebudayaan Aceh pasca gempa tsunami	Paket		1						
7	Terpeliharanya/lestarinya BCB/ situs, museum dan bangunan seni-budaya/adat di seluruh wilayah Aceh yang terkena bencana	Paket		56	116	172				
8	Terbangunnya sebuah Museum Tsunami yang lengkap dengan kelembagaan			1			8		9	
	Pemulihan Seluruh Industri Budaya									
1	Tersedianya hiburan kepada pengunjung (orang dewasa dan anak-anak) untuk mengurangi beban mental/trauma yang dihadapi.	Paket		10				66	76	
2	Terlaksananya pembuatan film dokumenter dan Kesenian	Paket		1						
	Pembangunan Kembali PDIA									
1	Terbangunnya Gedung Pusat Dokumentasi dan informasi Aceh	Paket		4				1	1	
2	Tersedianya kembali dokumen dan informasi sumber sejarah dan kebudayaan Aceh	Paket		2						

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang budaya berdasarkan sebaran kabupaten di Provinsi NAD dan Nias tahun 2005-2006 dan Program 2007 ditampilkan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.49 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Sub Bidang Bangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya**

NO	KABUPATEN/ KOTA	BANGUNAN BERSEJARAH, MUSEUM,	BUKU & SENI BUDAYA ACEH	KESENIAN & SANGGAR	SENI RAMPOE DAN TAMAN BACAAN	PELATIHAN IMEUM MUKMIN, & KEPEMIMPINAN	PEMBANGUNAN GEDUNG, MAKAM, SITUS
1	Banda Aceh	10	840	0	0	0	5
2	Aceh Besar	0	1680	9	25	40	5
3	Sabang	0	280	2	15	12	1

NO	KABUPATEN/ KOTA	BANGUNAN BERSEJARAH, MUSEUM,	BUKU & SENI BUDAYA ACEH	KESENIAN & SANGGAR	SENI RAMPOE DAN TAMAN BACAAN	PELATIHAN IMEUM MUKMIN, & KEPEMIMPINAN	PEMBANGUNAN GEDUNG, MAKAM, SITUS
4	Aceh Jaya	0	560	3	5	47	2
5	Pidie	0	560	4	46	49	2
6	Bireuen	0	560	9	25	69	2
7	Aceh Utara	0	840	5	46	11	6
8	Lhokseumawe	0	280	13	34	47	1
9	Aceh Tengah	0	1280	5	2	47	1
10	Bener Meriah	0	280	0	0	47	1
11	Gayo Lues	0	280	0	0	62	1
12	Aceh Timur	0	1120	2	10	48	4
13	Langsa	0	280	2	11	51	1
14	Aceh Tamiang	0	280	3	0	56	4
15	Aceh Barat	0	840	14	23	55	3
16	Nagan Raya	0	560	1	0	51	2
17	Abdya	0	560	3	20	55	2
18	Simeulue	0	280	4	76	2	2
19	Aceh Selatan	0	280	9	34	56	3
20	Aceh Singkil	0	280	1	91	42	1
21	Aceh Tenggara	0	280	1	40	68	1
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>12200</b>	<b>90</b>	<b>503</b>	<b>915</b>	<b>50</b>

Sumber : Data Kedeputan Agama, Sosial dan Budaya BRR, Mei 2007.

Pelaksanaan dalam bidang sosial pada sub bidang kependudukan dan keluarga berencana, BRR tidak lagi melaksanakan programnya karena program pendataan penduduk sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

#### 2.1.3.4. BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

##### 2.1.3.4.1 PERTANIAN

Bidang pertanian, meliputi sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub-sektor perkebunan dan sub-sektor peternakan. Kehancuran dan kerusakan di sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), mengakibatkan sekitar 300.000 petani kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, karena rusaknya lahan pertanian, yakni lahan sawah seluas 23.330 ha; lahan palawija/tegalan seluas 24.345 ha dan lahan perkebunan (tanaman keras) seluas 102.461 ha serta 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang.

##### 2.1.3.4.1.1 TANAMAN HORTIKULTURA.

Melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dan 2006, telah mampu menyediakan pekerjaan bagi petani yang kehilangan pekerjaan akibat tsunami, melalui kegiatan padat karya pada saat pelaksanaan kegiatan serta telah selesainya rehabilitasi sebagian besar lahan pertanian, baik berupa lahan sawah, lahan palawija/tegalan) dan perkebunan. Lahan pertanian (Sawah, tegalan dan perkebunan) yang sudah direhabilitasi seluas 64.009 Ha dari areal pertanian yang rusak (Rencana Induk) seluas 150.136 Ha atau 42,63%.

Selain rehabilitasi lahan pertanian untuk mengganti kerusakan lahan pertanian yang disebutkan dalam Rencana Induk (Perpres no. 30 Tahun 2005) tersebut di atas, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah menyediakan traktor, mesin dan peralatan pertanian berupa traktor roda 4 (4WD) 46 unit, Hand traktor 366 unit, Power Tresher 975 unit, dan Hand sprayer 1.395 unit, serta alat pertanian

kecil sebanyak 33.734 unit. Selanjutnya penggilingan padi (*Heuleur/Rice Milling Unit*), meliputi mesin RMU dan gudang yang telah dibangun sejumlah 82 unit.

Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2007 adalah pembangunan lining irigasi 31 km; pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) sebanyak 14 unit; gudang Alsintan sebanyak 22 unit dan gedung Balai Pertemuan Petani sebanyak 12 unit dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*) sebanyak 2 unit.

**Tabel 2.50 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG RAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Rehabilitasi lahan pertanian	Ha	150.136	20.789	43.220*	64.009	42,63%	12.508	76.517	50,97%
-	Rehabilitasi sawah	Ha	23.330	11.886	-	11.886	50,95%	2.000	13.886	59,52%
-	Rehabilitasi tegalan	Ha	24.345	2.200	-	2.200	9,04%	-	2.200	9,04%
-	Lahan Perkebunan	Ha	102.461	6.703	-	6.703	6,54%	10.508	17.211	10,26%
2	Pengembangan Pertanian (Agroinput)	Ha	-	26.050	-	26.050	-	6.193	32.243	-
-	Pengembangan Sawah/ Agroinput	Ha	-	13.015	-	13.015	-	6.144	19.159	-
-	Pengembangan tegalan	Ha	-	13.035	-	13.035	-	49	13.084	-
3	Pencetakan sawah baru	Ha	-	1.776	-	1.776	-	1.145	2.921	-
4	Penghijauan pekarangan	Batang	-	26.000	-	26.000	-	-	26.000	-
5	Lining jaringan irigasi	Km	-	0.896	103	105	-	31	136	-
6	Bantuan material jalan usaha tani	Km	-	6.200	-	6.200	-	-	6.200	-
7	Balai Benih (BBU dan BBI)	Unit	-	3	-	3	-	14	17	-
8	Alsintan	Unit	-	3.234	9.467	12.701	-	-	12.701	-
9	Pengadaan Gudang Alsintan	Unit	-	1	-	1	-	22	23	-
10	Gudang dan mesin RMU	Unit	-	82	-	82	-	2	84	-
11	Balai Pertemuan Petani	Unit	-	142	-	142	-	12	154	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007, \*) Data yang bersumber dari kegiatan off-budget yang perlu diverifikasi.

#### 2.1.3.4.1.2 PERKEBUNAN

Pada sub-sektor perkebunan Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan yang telah dilakukan pada tahun 2006 sebesar 6.703 Ha. Jika mengacu kepada data Rencana Induk, luas areal kebun yang rusak adalah sebesar 102.461 Ha. Namun berdasarkan sumber data dari Dinas Perkebunan Aceh, areal perkebunan yang rusak akibat tsunami seluas 22.000 Ha. (Data kerusakan areal perkebunan dalam Rencana Induk adalah total kerusakan lahan akibat tsunami dan konflik selama 32 tahun, karena selama konflik kebun-kebun tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar).

Selain telah merehabilitasi areal kebun seluas tersebut di atas, pada tahun 2006 telah dilakukan penyediaan bibit kelapa sawit sejumlah 685.000 batang dan penyiapan lahan (*Land clearing*) untuk perkebunan kelapa sawit 2006 seluas 3.000 Ha yang berlokasi di kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya.

Rehabilitasi dan pengembangan sub-sektor perkebunan di atas telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pencaharian bagi 1.776 keluarga petani perkebunan (KK), sejak pelaksanaan proyek, melalui program padat karya rehabilitasi kebun, pembangunan jalan produksi hingga pemeliharaan kebun hingga berproduksi.

Pada tahun 2007 diprogramkan Rehabilitasi perkebunan seluas 10.508 ha. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 akan rehabilitasi lahan perkebunan total seluas 17.211 Ha, atau baru mencapai sekitar 10% dari Rencana Induk yaitu sebesar 102,461 Ha.

Untuk penyediaan bibit kelapa sawit, pada tahun 2007 diprogramkan sebesar 1,211,500 batang.

**Tabel 2.51 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perkebunan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Rehabilitasi Perkebunan	Ha	102.461	6.703	-	6.703	6,54%	10.508	17.211	16,8%
2	Pembangunan Jalan Produksi	M	-	1.386	-	1.386	-	-	1.386	-
3	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Batang	-	685.000	-	685.000	-	1.211.500	1.896.500	-
4	bangunan kantor Layanan public	Unit	-	10	-	10	-	-	10	-
5	Diklat Fasilitator Daerah	Orang	-	90	-	90	-	165	255	-
6	Penyuluh Pendamping	Orang	-	275	-	275	-	110	385	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Sampai dengan tahun 2006 BRR telah melakukan restocking ternak besar (sapi/kerbau) sejumlah 2.650 ekor dan ternak kecil (kambing) sejumlah 13.000 ekor (Grafik). Untuk ternak jenis unggas, terutama ayam ras, restocking baru dilaksanakan sebesar 10.000 ekor. Hal ini atas pertimbangan belakangan ini sedang terjadi wabah penyakit Flu Burung yang sudah menyebar ke Aceh dapat mengancam keselamatan ternak dan manusia, sehingga untuk restocking unggas harus sangat hati-hati.

Jika dibandingkan dengan data Rencana Induk, yakni sejumlah 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang, pencapaian realisasi tersebut masih relatif kecil. Selanjutnya data dari Menteri Pertanian (Sub Dinas Peternakan) menyebutkan bahwa ternak yang hilang akibat tsunami adalah sapi 40.000 ekor; kerbau 39.000 ekor; kambing dan domba 65.000 ekor, serta unggas sejumlah 1.800.000 ekor.

Pada tahun 2007 diprogramkan restocking ternak (besar, kecil, unggas) sejumlah 5.935 ekor. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 restocking ternak (besar, kecil, unggas) sejumlah 32,617 ekor atau baru mencapai sekitar 2% dari Rencana Induk sebesar 1,904,587 ekor.

Program pendukung pengembangan peternakan pada tahun 2007 adalah pembangunan Poskeswan 7 unit; pembangunan Pasar Hewan sebanyak 1 unit; Tempat Pemotongan Hewan sebanyak 2 unit; Tempat Penjualan Daging sebanyak 1 unit; pengembangan Kawasan Peternakan di 1 lokasi, dan Tempat Penempatan Ternak sebanyak 2 unit.

**Tabel 2.52 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peternakan**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Restocking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	1.904.587	25.650	1.032	26.682	1%	5.935	32.617	2%
2	Pengendalian penyakit hewan menular	Ekor	-	25.650	-	25.650	-	5.935	31.895	-
3	Pembangunan Poskeswan	Unit	-	9	-	9	-	7	16	-
4	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	-	33.000	-	33.000	-	-	33.000	-
5	Pembangunan pasar hewan	Unit	-	1	-	1	-	1	2	-
6	Tempat Pemotongan Hewan	Unit	-	4	-	4	-	2	6	-
7	Tempat Penjualan daging	Unit	-	6	-	6	-	1	7	-
8	Peningkatan laboratorium	Paket	-	1	-	1	-	-	1	-
9	Diklat inseminator.	Orang	-	42	-	42	-	50	92	-
10	Rehabilitasi kandang ternak	m'	-	-	27.344	27.344	-	-	27.344	-
11	Pengembangan kebun HMT	Ha	-	-	-	-	-	70	70	-
12	Tempat penempatan ternak	Unit	-	-	-	-	-	2	2	-
13	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	-	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

#### 2.1.3.4.1.3 KEHUTANAN

Pada sektor kehutanan dan lingkungan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 5.113 Ha, dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 3%.

Program lain yang telah terealisasi pada tahun anggaran 2005 dan 2006 antara lain untuk rehabilitasi hutan alam seluas 820 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 130 Ha/paket; pengembangan hutan konservasi sejumlah 3 kawasan; pengukuran kawasan hutan (tata batas) sebesar 130 Km; tumpangsari hutan rakyat sebesar 2 paket; peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan sebanyak 40 kelompok; peningkatan kelembagaan lokal seluas 20 Ha; restorasi kawasan bufferzone sebesar 188 Ha; transplantasi terumbu karang sejumlah 1 paket dan rehabilitasi fasilitas kantor dinas sejumlah 1 unit.

Program tahun 2007 untuk sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 6.662 Ha dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 7%.

Untuk program tahun 2007 lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan alam seluas 961 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 36 Ha; magersari (tumpang sari di hutan) seluas 115 Ha; bantuan bibit kepada masyarakat sejumlah 20.000 batang; pengembangan hasil hutan Non Kayu sejumlah 7 Kabupaten; pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 9 Kabupaten; pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sejumlah 2 lokasi; Pawang Uteun & Inong Beuraleun sejumlah 3 paket dan Pembangunan Laboratorium. Klimatologi lapangan sejumlah 1 paket.

**Tabel 2.53 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kehutanan dan Lingkungan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Ha	164.840	4.788	325	5.113	3	6.662	11.775	7%
2	Rehabilitasi Hutan Alam	Ha	-	820	162.263*	163.083	-	961	164.044	-
3	Rehabilitasi Hutan Kota	Ha/Pkt	-	130	-	130	-	36	166	-
4	Pembinaan Konservasi	Kawasan	-	3	-	3	-	-	3	-
5	Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata batas)	Km	-	130	-	130	-	4	134	-
6	Tumpang Sari Hutan rakyat	Pkt	-	2	-	2	-	-	2	-
7	Peningkatan Usaha Masyarakat sekitar Hutan	Kelpk	-	40	-	40	-	36	76	-
8	Peningkatan Kelembagaan Lokal	Ha	-	20	-	20	-	3	23	-
9	Restorasi kawasan bufferzone	Ha	-	188	-	188	-	79	267	-
10	Transplantasi Terumbu Karang	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
11	Rehabilitasi fasilitas Kantor Dinas Kehutanan	Unit	-	1	-	1	-	-	1	-
12	Magersari (Tumpang sari di hutan)	Ha	-	-	-	-	-	115	115	-
13	Bantuan Bibit Pada masyarakat	Btg	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-
14	Pengembangan Hasil Hutan Non kayu	Kab	-	-	-	-	-	7	7	-
15	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	-	-	-	-	-	13	2	-
16	Pawang uteun & Inong Beuraleun	Pkt	-	-	-	-	-	3	3	-
17	Pemb. Lab Klimatologi lapangan	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007, \*) Data yang bersumber dari kegiatan off-budget yang perlu diverifikasi.

#### 2.1.3.4.2 PERIKANAN

Pada sub sektor perikanan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk budidaya perikanan telah merehabilitasi tambak yang rusak sejumlah 13.403 Ha dari kerusakan tambak seluas 36.597 Ha (Rencana Induk), atau mencapai 36%.

Untuk perikanan tangkap (nelayan), BRR telah menyediakan sejumlah 633 unit Kapal motor kayu ukuran (<3,5 – 8 GT) dan boat yang direhabilitasi sejumlah 50 unit dan pengadaan alat tangkap sejumlah 89 paket. Berdasarkan data Rencana Induk jumlah kapal motor kayu yang rusak adalah 21.455 unit dan 16.012 unit alat tangkap. Data lain, berdasarkan sumber dari FAO (2005) menyebutkan boat yang rusak sejumlah 10.569 unit.

Prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI/PPP) sampai dengan tahun 2006 telah berhasil direhabilitasi sejumlah 8 unit dan telah dibentuk 216 UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan bantuan agroinput (pupuk, benih ikan, obat-obatan, pakan ikan dan fasilitas produksi lainnya) untuk melayani areal tambak yang telah berhasil direhabilitasi seluas 5.304 Ha.

Berdasarkan Rencana Induk jumlah Pelabuhan Perikanan yang rusak adalah sebesar 305 unit yang rusak. Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo seluas 480 M<sup>2</sup> yang telah selesai dibangun dan difungsikan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan Rencana Induk

**Tabel 2.54 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perikanan**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Rehabilitasi Tambak	Ha	36.597	5.520	7.883*	13.403	36,62%	1.388	14.791	40,42%
2	Bantuan Agroinput	Ha	-	5.304	-	5.304	-	1.388	6.692	-
3	Pengemb. BBIP Simeulue	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
4	Hatchery skala rumah tangga	Unit	-	12	-	12	-	41	53	-
5	Keramba Jaring Apung	Unit	-	16	-	16	-	48	64	-
6	Unit/Sentra Pengolahan Ikan	Unit	-	216	-	216	-	1	217	-
7	Bagan Apung	Unit	-	50	-	50	-	-	50	-
8	Kapal Motor	Unit	21.455	633	2.748	3.381	15,76%	139	3.520	16,41%
9	Pelabuhan Perikanan Lampulo	Unit	1	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007, \*) Data yang bersumber dari kegiatan off-budget yang perlu diverifikasi.

#### 2.1.3.4.3 PENGEMBANGAN USAHA

Sub bidang Pengembangan Usaha dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

##### 2.1.3.4.3.1 INDUSTRI

Pada tahun anggaran 2005 telah direalisasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) industri untuk 5.214 orang dan peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati serta pengembangan industri garam rakyat (Pilot Proyek) dan kegiatan pendukung pengembangan industri lainnya, seperti pengembangan desa batik Aceh.

Pada tahun 2007 diprogramkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) industri untuk 67 orang, sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 sebanyak 5.281 orang.

Pemberian bantuan kepada industri batu bata di Simeulue. Di Provinsi NAD, untuk industri batu bata diberikan bantuan diberikan kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya. Jenis bantuan yang diberikan untuk industri batu bata terdiri atas bantuan pondok kerja, modal kerja, dan peralatan kerja.

Program pendukung pengembangan industri antara lain pengembangan Desa Batik Aceh sebanyak 4 paket; pengembangan industri oleh Dekranas sebanyak 1 paket dan Bantuan pengembangan ekonomi produktif di 4 Kabupaten.

**Tabel 2.60 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Industri**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	BLM Masyarakat Industri	Org	-	5.214	-	5.214	-	-	5.214	-
2	Sarana-prasarana Pelabuhan Malahayati	Unit	1	1	-	1	100	-	1	-
3	Pilot Project Industri Garam rakyat	Lokasi	6	1	-	1	17%	2	3	50%
4	Penyediaan Fasilitas Industri	Unit	-	-	105	105	-	-	105	-
5	Pengembangan Desa Batik Aceh	Pkt	-	-	-	-	-	4	4	-
6	Pengembangan Industri oleh Dekranas	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
7	Bantuan pengembangan ekonomi produktif	Kab.	-	-	-	-	-	4	4	-
8	BLM Sentra dan Non Sentra Industri	Paket	-	-	-	-	-	24	24	-
9	BLM Modal LKM	Paket	-	-	-	-	-	43	43	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007, \*) Data yang bersumber dari kegiatan off-budget yang perlu diverifikasi.

#### 2.1.3.4.3.2 PERDAGANGAN

Di sektor perdagangan, BRR pada tahun 2005 dan 2006 telah merealisasikan bantuan modal bergulir (*revolving fund*) bagi para pedagang grosir dan pedagang pasar sebanyak 12.631 unit terdiri dari 886 unit melalui APBN dan 11.745 unit melalui pembiayaan Non APBN (*Off Budget*).

Rehabilitasi pasar telah mencapai 73 unit, terdiri diantaranya rehabilitasi pasar induk sejumlah 42 unit dan sisanya merupakan pasar grosir dan pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dengan rincian sumber pembiayaan dari APBN sebesar 34 unit pasar dan Non APBN (*Off Budget*) sebesar 39 unit pasar. Untuk kota Banda Aceh, konsentrasi pasar pasca tsunami dialihkan ke pasar Lambaro yang masih terus dalam tahap pembangunan, yaitu pasar induk Lambaro yang merupakan bantuan dari JICs. Serta sedang dilakukan pembebasan lahan untuk perluasan pasar.

Berdasarkan Rencana Induk, pasar yang mengalami kerusakan sebanyak 193 unit, sehingga realisasi telah mencapai 38%. Rehabilitasi prasarana perdagangan dan bantuan modal telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 23.500 tenaga kerja.

Pada tahun 2007 diprogramkan Total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pedagang pasar (revolving) sampai dengan akhir program tahun 2007 secara kumulatif sebanyak 1.370 paket/orang

Program pendukung perdagangan antara lain Pembangunan/Rehab. Pasar sebesar 11 unit dari total akhir program tahun 2007 sebesar 124 unit; pembangunan terminal sebanyak 3 paket dan pembangunan gudang transito sebanyak 1 unit.

**Tabel 2.61 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perdagangan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	BLM Pedagang Pasar (Revolving)	Pkt/Org	-	894	11.745*	12.639	-	-	12.639	-
2	Pembangunan/ Rehabilitasi pasar	Unit	193	34	28	62	32%	11	73	38%
3	Alat dan Kemetrolgian	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
4	Pembangunan Halte Labuy	Unit	-	-	-	-	-	3	3	-
5	Pembangunan Pasar Labuy	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-
6	Pengadaan Cold Storage	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007, \*) Data yang bersumber dari kegiatan off-budget yang perlu diverifikasi.

#### 2.1.3.4.3.3 USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Pengembangan koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) direalisasikan melalui bantuan modal melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro) kepada 77.316 pedagang kecil (40.875 pedagang kecil melalui APBN dan 36.441 melalui Non APBN) dan bantuan modal untuk pemulihan aset produktif telah dilakukan kepada 22.441 orang serta pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah dibentuk sejumlah 146 Unit LKM yang tersebar di kabupaten/kota NAD. Pemberian bantuan mesin jahit sebagai peralatan kerja untuk usaha konveksi di Banda Aceh. Di Provinsi NAD, untuk usaha konveksi diberikan bantuan kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue. Jenis bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan modal kerja dan bantuan peralatan kerja

Pada tahun 2007 diprogramkan Pemberdayaan Koperasi & UKM (Usaha Kecil Menengah) sebesar 60 unit dan secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 sebesar 3654 unit atau telah melebihi Rencana Induk yakni sebesar 254 unit (157%)

Program lainnya dalam tahun 2007 adalah Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat sebanyak 19.992 orang; Pelatihan Pengelola LKM sebanyak 400 orang; Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 2.016 orang; Bantuan Teknis dan Manajemen LKM sebanyak 100 paket dan Kelembagaan Koperasi Terpadu sebanyak 1 paket.

**Tabel 2.62 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Koperasi dan UKM**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Unit	254	146	148*	294	115%	65	359	141%
2	Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat	Orang	-	40.875	36.441*	77.316	-	19.992	97.308	-
3	Aceh Micro Finance	Unit	-	11	-	11	-	11	22	-
4	Pelatihan Pengelola LKM	Orang	-	-	-	-	-	400	400	-
5	Pelatihan Kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	-	2.016	2.016	-
6	Bantuan teknis dan manajemen LKM	Paket	-	-	-	-	-	100	100	-
7	Kelembagaan koperasi terpadu	Paket	-	-	-	-	-	1	1	-
8	Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat Melalui Koperasi Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	60	60	-
9	Modal Modal UKM Integrated Trading House	Paket	-	-	-	-	-	1	1	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007, \*) Data yang bersumber dari kegiatan off-budget yang perlu diverifikasi

#### 2.1.3.4.3.4 TENAGA KERJA

Dalam rangka mendorong sektor ketenagakerjaan BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah merealisasikan pelatihan keterampilan (*vocational raining*) bagi 29.478 orang tenaga kerja, terdiri dari pembiayaan melalui APBN sebanyak 10.935 orang dan melalui kegiatan NGO (*Off Budget*) sebanyak 29.478 orang. Selanjutnya telah membangun Balai Latihan kerja sebanyak 2 (dua) unit dan peralatan BLK satu unit. Program 'cash for work' sebanyak 91.242 orang pekerja dan pendidikan dan pelatihan pegawai sebanyak 247 orang pegawai.

Pada tahun 2007 diprogramkan bagi tenaga kerja berupa Pelatihan Keterampilan untuk 77 orang dan secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 total sebanyak 40.490 orang.

Program pendukung sektor ketenagakerjaan BRR tahun 2007 berupa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 3 unit; Peralatan BLK sebesar 2 unit; Pembangunan KLK sebanyak 1 paket dan Pembangunan jalan lingkungan BLK sebesar 1 paket.

**Tabel 2.56 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tenaga Kerja**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Pelatihan Keterampilan	Orang	-	10.935	29.478	40.413	-	1.540	41.953	-
2	Balai Latihan Kerja (BLK)	Unit	6	3	-	3	50%	3	6	100%
3	Peralatan BLK	Unit	6	1	-	1	16%	2	3	50%
4	Pekerja Cash for Work	Org	-	-	91.242	91.242	-	-	91.242	-
5	Pelatihan Pegawai	Org	-	-	247	247	-	-	247	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
6	Pembangunan KLK	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
7	Pembangunan Jalan Lingkungan BLK	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
8	Informasi Bursa Kerja	Pkt	-	1	-	1	-	1	2	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007.

### 2.1.3.4.3.5 PARIWISATA

Pengembangan pariwisata merupakan kegiatan yang perlu didukung dalam rangka meningkatkan ekonomi dan usaha masyarakat Aceh dan Nias Kepulauan, selain juga melestarikan dan meningkatkan situs budaya. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BRR dalam rangka pengembangan pariwisata ini adalah pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata Kota Sabang serta perencanaan pemugaran kawasan wisata Pulau Simeulue; pulau Banyak dan Kawasan wisata Ujung Batee.

Pada tahun 2007 diprogramkan bagi pengembangan pariwisata berupa Peningkatan obyek wisata Kota Sabang sebanyak 11 paket. Dalam rangka mendukung program pengembangan pariwisata untuk tahun 2007 akan dilaksanakan program pelatihan bidang pariwisata sebanyak 9 paket; penyelenggaraan pesta rakyat sebanyak 4 paket; pengembangan usaha ekonomi pariwisata sebanyak 56 paket dan pengembangan wisata Kota Banda Aceh sebanyak 55 paket.

**Tabel 2.57 Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Pemugaran Kws. Wisata P. Sinabang	Pkt	-	1	-	1	-	-	-	-
2	Pemugaran Kws Wisata P. Banyak	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
3	Pemugaran Kws Wisata Ujung Batee	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
4	Pemugaran Kws Wisata Lampuuk	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
5	Peningk Objek Wisata Kota Sabang	Pkt	-	1	-	1	-	11	12	-
6	Pengemb Sarana & Site Plan Wisata	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
7	Pelatihan bidang Pariwisata	Pkt	-	1	-	-	-	9	9	-
8	Penyelenggaraan pesta rakyat	Pkt	-	-	-	-	-	4	4	-
9	Pengemb Usaha ekonomi pariwisata	Pkt	-	-	-	-	-	56	56	-
10	Pengemb wisata kota Banda Aceh	Pkt	-	-	-	-	-	55	55	-

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

### 2.1.3.5. BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Bidang Kelembagaan terdiri atas beberapa bagian yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemda, Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum, dan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M). Masing-masing bidang memiliki beberapa program/kegiatan yang akan disajikan dalam uraian dan Tabel berikut. Uraian berisikan tentang Rencana Induk yang telah ditetapkan dan realisasi pekerjaan oleh Bapel pada periode 2005-2006 hingga periode tahun 2007.

#### 2.1.3.5.1 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMDA

Sedikitnya hingga akhir 2006 tercatat sebanyak 489 unit bangunan pemerintah daerah telah terbangun. Kegiatan ini meliputi kantor dinas/badan, Camat, mukim, dan balai musyawarah. Selanjutnya pada 2007 direncanakan pembangunan 142 unit. Sehingga sampai akhir tahun 2007 diperkirakan akan terbangun 631 unit. Rincian pembangunannya selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.58 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Perencanaan	Dokumen	550							
2	Ktr KDH/DPRD/ Dinas/ Meuligo	Unit	76	5		5	6.6%	25	30	39.5%
3	Kantor Kecamatan	Unit	23	14		14	60.9%	6	20	87.0%
4	Rumah Dinas Camat	Unit	-	69		69		11	80	
5	Kantor Desa/Kelur.	Unit	450	283		283	62.9%	33	316	70.2%
6	Ambulan Pemda	Paket	12							
7	Pemadam Kebakaran	Paket	12							
8	Ktr Mukim/Balee	Unit		118		118		67	185	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan profesionalisme aparat Pemda memiliki beberapa kegiatan berkenaan dengan pemberdayaan aparat Pemda, penyusunan sistem, serta kepentingan administratif lainnya. Dari delapan kegiatan yang direncanakan dalam program ini, kemajuan yang dapat dipantau adalah realisasi kegiatan penyusunan rencana pengelolaan pegawai dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda. Realisasi dari Rencana Induk kedua kegiatan tersebut masing-masing mencapai 107.7% dan 53% sampai dengan tahun 2007. Kegiatan rekrutmen dan mutasi pegawai, penanganan masalah administrasi kepegawaian dan pemberdayaan dan fasilitasi aparat Pemda telah merealisasikan kegiatannya pada tahun 2007 namun belum diketahui pencapaiannya berdasarkan Rencana Induk yang telah ditetapkan. Masing-masing rincian pembangunannya selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.59 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat Pemda	Paket						3	3	
2	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket						1	1	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
3	Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS	Paket								
4	Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/ Suplemen	Paket								
5	Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan	Paket								
6	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda	Paket					5	5		
7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Pemda	13	8		8	61.5%	6	14	107.7%
8	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/k	13	7		7	53.8%		7	53.8%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda memiliki kegiatan yang berkenaan dengan penyelesaian administrasi, penyusunan rencana tata organisasi, sistem komunikasi, monev dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Beberapa pencapaian sampai saat ini telah mencapai lebih dari 100%, yaitu kegiatan penyelamatan administrasi pemerintahan (176%), penyusunan penataan organisasi Pemda (123.1%) dan BOP kecamatan/Gampong (341.6%). Program ini terutama dilaksanakan pada tahun 2006 dan sebagian kecil dilanjutkan pada tahun 2007. namun demikian beberapa pencapaian masih sedikit sampai dengan tahun 2007 seperti pada kegiatan penataan Siskom humas daerah yang pencapaiannya baru mencapai 7.7%. Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3.60 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TO TAL	CAPAIAN		TO TAL	CAPAIAN
1	Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	13	23		23	176.9%		23	176.9%
2	Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	11		11	84.6%	5	16	123.1%
3	Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13					4	4	30.8%
4	Penataan SisKom Humas daerah (media centre)		13					1	1	7.7%
5	BOP Kecamatan/ Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam)	Kab/ kota	13	23		23	176.9%		23	176.9%
		Kec.	77	263		263	341.6%		263	341.6%
6	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/ mukim/gampong	Kab/ kota	13	6		6	46.2%	1	7	
		Kec.	77	263		263	341.6%		263	341.6%
7	Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg		21		21			21	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan kapasitas keuangan Pemda memiliki dua kegiatan dan pencapaian keduanya sejak tahun 2006 telah mencapai lebih dari 100%. Selanjutnya sampai tahun 2007 terdapat beberapa

penambahan. Masing-masing adalah kegiatan peningkatan kapasitas legislatif (192.3%) dan penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (169.2%). Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.61 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TOTAL	CAPAI AN
1	Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/kota	13	21		21	161.5%	4	25	192.3%
2	Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/kota	13	21		21	161.5%	1	22	169.2%

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Program peningkatan kerjasama antar daerah juga memiliki dua kegiatan yaitu optimalisasi kerjasama antar daerah dan koordinasi penyelenggaraan pusat dan daerah. Pencapaian pada tahun 2006 masing-masing telah menyelesaikan 1 paket. Pada tahun 2007 pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemerintah daerah melaksanakan 1 paket lagi. Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.62 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR (Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket		1		1		1	2	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket		1		1			1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya, ada yang belum dikerjakan (yaitu penataan administrasi wilayah pemerintahan) dan kegiatan lainnya belum dapat dilihat kemajuannya karena belum dapat diperbandingkan dengan Rencana Induk (seperti kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masyarakat, FKK Stakeholder RR, Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD dan Harmonisasi Peraturan di Aceh). Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.63 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Pemda oleh BRR**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Dok				73			73	
2	Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Kab./kota	13				0.0%			0.0%
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Paket				1			1	
	Layanan Rehabilitasi Kessos (Trauma Centre)									
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana							1	1	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
	Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masyarakat	Paket				1		1	2	
	FKK Stakeholder RR	Paket				1		1	2	
4	Penguatan Kelembagaan Demokrasi									
	Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/k				21			21	
5	Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA)									
	Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket				1		6	7	
6	Pengelolaan SDM Aparatur									
	Fasilitasi Penyediaan Aparat Instansi Vertikal di Aceh									

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

### 2.1.3.5.2 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM

Sepanjang tahun 2005–2006 pembangunan di bidang hukum lebih menitikberatkan pada pembangunan kembali berbagai gedung perkantoran dan fasilitas di bidang hukum yang mengalami kerusakan. Penyediaan sarana dan prasarana hukum pasca bencana di Aceh ini hampir 40% sudah berhasil dikerjakan, mulai dari rehabilitasi gedung perkantoran hingga penyediaan fasilitas pendukung kerja lembaga hukum.

Bentuk pembangunan di bidang hukum yang telah dilakukan hingga tahun 2006 adalah penyediaan gedung perkantoran untuk institusi penegakan hukum di Aceh, seperti kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga pemasyarakatan. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.64 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Kejaksaan oleh BRR, Departemen Hukum dan HAM dan Pengadilan**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
A	SARPRAS KEJAKSAAN									
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1			1	0.0%		1	100.0%
	Kejari	Unit	5			6	120.0%		6	120.0%
	Rumah Dinas Jaksa	Unit	38			20	52.6%	2	22	57.9%
	Peralatan Kantor	Paket	6			79	1316.7%		79	1316.7%
	Kendaraan R2	Unit	38			17	44.7%		17	44.7%
	Kendaraan R4	Unit	15				0.0%			0.0%
	Kendaraan Tahanan	Unit	12			7	58.3%		7	58.3%
B	SARPRAS DEPKUMHAM									
	Rumah Dinas	Unit	49			20	40.8%	4	24	49.0%
	Lapas/Rutan	Unit	6			3	50.0%	6	9	150.0%
	Bapas	Unit	2			1	50.0%	1	2	100.0%
	Kanwil Depkumham	Unit	1			1	100.0%		1	100.0%
	Kantor Imigrasi	Unit	2			2	100.0%		2	100.0%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
	Kendaraan R2	Unit	8				0.0%			0.0%
	Kendaraan R4	Unit	10			6	60.0%		6	60.0%
	Peralatan Kantor	Paket	3			19	633.3%		19	633.3%
C	SARPRAS PENGADILAN									
	PT/PTUN	Unit	2				0.0%	1	1	50.0%
	Pengadilan Negeri	Unit	9			10	111.1%	5	15	166.7%
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25				0.0%			0.0%
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33				0.0%			0.0%
	Bangunan Mahkamah Syari'ah	Unit	6			1	16.7%	5	6	100.0%
	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33			12	36.4%		12	36.4%
	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18			17	94.4%		17	94.4%
	Peralatan Kantor	Unit	17			79	464.7%		79	464.7%
	Pengadilan Militer	Paket						1	1	
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket						1	1	
D	PENGEMBANGAN INSTITUSI HUKUM									
	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Paket						1	1	
	Pengembangan Hukum Adat	Paket						1	1	
	Diklat Teknis Hukum dan HAM	Paket						1	1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

Hingga akhir tahun 2006 untuk penyediaan sarana dan prasarana hukum juga telah terdata sebanyak 10 unit kantor Pengadilan Negeri, 7 unit kantor Kejaksaan Negeri, 20 unit rumah dinas Kejari, 3 unit Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, 1 unit Kanwil Depkumham, 2 unit Kanwil Imigrasi, dan 1 unit Balai Pemasyarakatan telah berhasil dibangun kembali, serta 289 unit peralatan kantor telah berhasil disumbangkan.

### 2.1.3.5.3 KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)

Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) diupayakan untuk menciptakan kembali ketertiban, keamanan dan ketahanan di dalam masyarakat. Beberapa kebijakan dalam sub bidang pemulihan di bidang K3M diterapkan melalui koordinasi di bawah satuan kerja; Deop, Delog, dan Desdm Polri NAD-Nias, Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi, Peningkatan Komitmen Persatuan Nasional, Pengembangan Pertahanan Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara NAD-Nias, dan Pengembangan Pertahanan Integratif.

Sebagian besar program Menkopolkum, Menkominfo, dan Polri telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Induk (100%), sedangkan pada program TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Matra Integratif juga telah mencapai beberapa realisasi sampai dengan tahun 2007. Kemajuan program/kegiatan secara terperinci ditampilkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.65 Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Bapel BRR Dalam Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
1	Menkopolhukam	Unit	1			1	100.0%		1	100.0%
2	Menkominfo									
	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1			2	200.0%	1	3	300.0%
	Stasiun RRI	Unit	1			3	300.0%	7	10	1000.0%
	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	6			10	166.7%	6	16	266.7%
	Gedung PWI	Unit				1		1	2	
	Rumah Dinas	Unit				1		1	2	
	Kendaraan Roda-2 dan Roda - 4	Unit				3			3	
3	POLRI									
	Pengembangan Sarana dan Prasarana							5	5	
	Penampungan Sementara	Unit	1.416			1	0.1%		1	0.1%
	Mapolda	Kompleks	1			1	100.0%	1	2	200.0%
	Brimobda	Kompleks	1			1	100.0%	1	2	200.0%
	Dit. Polair	Kompleks	1					2	2	200.0%
	Polres	Unit	5							0.0%
	Rumah Dinas (Aspol)	Komplek	26					57	57	219.2%
	Polsek	Unit	20			2	10.0%	6	8	40.0%
	Pengadaan Material (Gedung)	Unit				193			193	
	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit				434		5	439	
	Kendaraan Roda - 4	Unit				71			71	
	Gedung PUSDIK Pasukan Anjing/Kuda									
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan							5	5	
4	TNI-AD									
	Bidang ALPAL					1			1	
	- Kendaraan	Unit				8			8	
	- Alat Angkutan Air	Unit				2			2	
	- Alat Berat Zeni	Unit				27			27	
	- Alat Utama Militer (Senjata)	Unit				295			295	
	- Alpasus Zeni	Unit				39			39	
	- Alsatri dan Alsintor	Unit				4			4	
	- Peralatan Lainnya	Unit				7			7	
	- Kendaraan Roda - 2	Unit				217			217	
	- Kendaraan Roda - 4	Unit				28			28	
	Bidang Faskon	Unit				461			461	
	Bidang Alkon	Unit				1			1	
	Korem/Kodim	Unit						2	2	
	Rumah Dinas	Unit						1	1	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENC INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005 -2007	
				AP BN	NON APBN	TO TAL	CAPAI AN		TO TAL	CAPAI AN
	Kompi	Unit						2	2	
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket						1	1	
5	TNI-AL								-	
	Bidang Bekal Umum	Unit				1			1	
	Bidang ALPAL	Unit				1			1	
	- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit				1		3	4	
	- Peralatan Bengkel	Unit				4			4	
	- Peralatan Laut Komar	Unit				1			1	
	- Peralatan Khusus Komar	Unit				130			130	
	- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit				56			56	
	- Amunisi	Butir							19.769	
	- Kenderaan	Unit				6			6	
	- Peralatan Lainnya	Unit				74		2	76	
	Bidang Faskon	Unit				40			40	
	Rumah Sakit Sabang	Unit							-	
	Rumah Dinas	Unit						2	2	
	Posal Sitoli (Dermaga + Mesjid)	Unit						2	2	
	Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit						3	3	
6	TNI-AU								-	
	Bidang ALPAL	Paket							-	
	Bidang Faskon	Paket							-	
	Lanud Maimun Saleh	Unit						1	1	
	Lanud Iskandar Muda	Unit						1	1	
	Paskhas AU	Unit						1	1	
	Satrad	Unit						3	3	
7	Matra Integratif								-	
	Bidang Bekal Umum	Unit				3			3	
	Bidang ALPAL								-	
	- Kenderaan Roda-2	Unit				40			40	
	- Alat Utama Militer	Unit				958			958	
	- Alat Angkutan Air	Unit				13			13	
	- Jembatan Bailey	Unit				15			15	
	- Alat Berat	Unit				483			483	
	- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit							2.299	
	Bidang Faskon	Unit				3			3	
	Bidang Kesehatan	Unit				4			4	
	Bidang Alkon	Unit				1			1	

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

## 2.1.3.6. REALISASI APBN

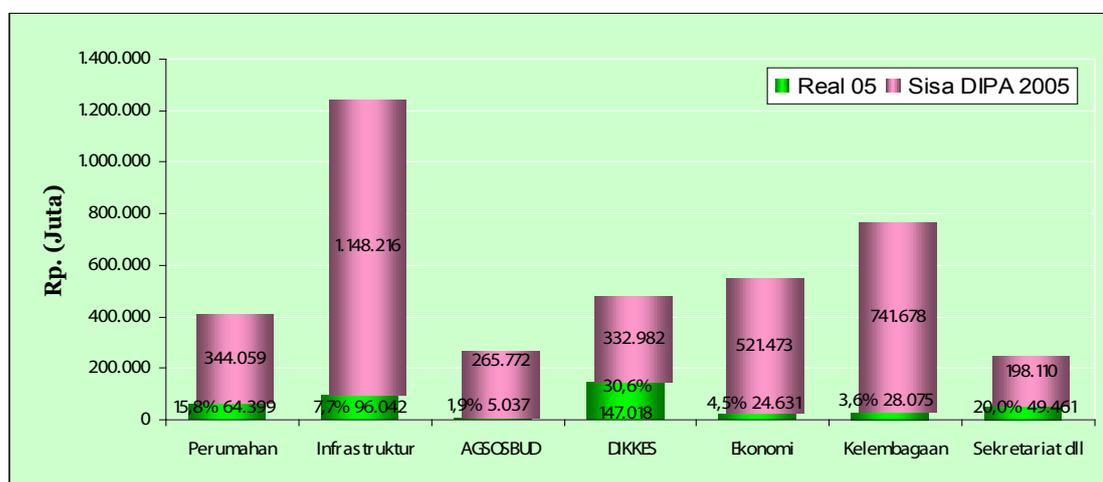
### 2.1.3.6.1 PENYERAPAN DIPA 2005

Realisasi DIPA 2005 pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 415 Milyar atau 10% dari Pagu DIPA. Penyerapan tertinggi ada pada bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar 30,6% disusul bidang Sekretariat-dll sebesar 20%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud yakni sebesar 1,9% disusul bidang Kelembagaan sebesar 3,6%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3,55 Trilyun kemudian diluncurkan pada tahun 2006. Dari luncheon DIPA 2005 pada 2006, berhasil diserap Rp. 2,06 Trilyun atau 58,1%. Penyerapan tertinggi ada pada Satker-Satker bidang Perumahan sebesar 78,6%, disusul bidang Sekretariat sebesar 77,1%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud sebesar 43,9% disusul. Total penyerapan DIPA 2005 baik yang direalisasikan pada tahun 2005 maupun tahun 2006, adalah sebesar Rp. 2,48 Trilyun, atau 62,5% dari pagu. Penyerapan tertinggi ada pada Satker-Satker bidang Perumahan sebesar 82%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud sebesar 44,6%.

**Tabel 2.66 Penyerapan Anggaran DIPA 2005 (Dalam Rp. Juta)**

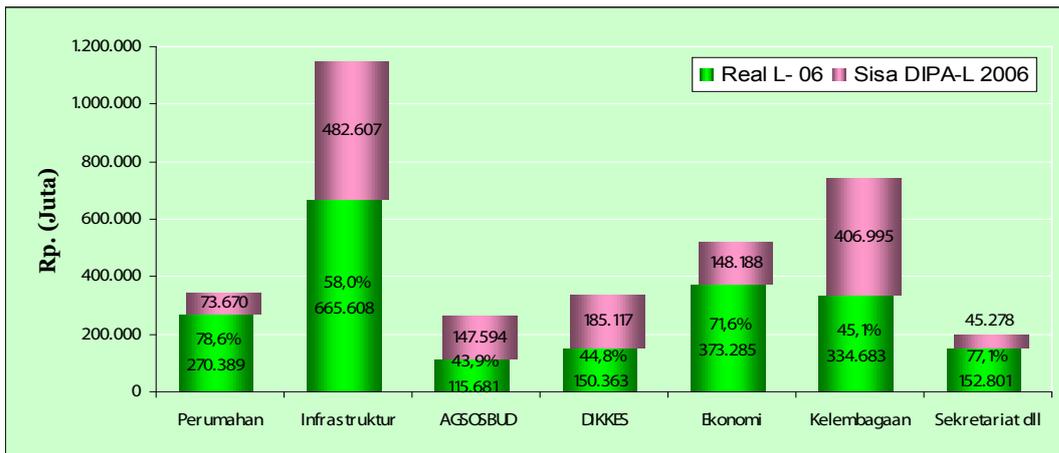
No	Bidang	DIPA 2005	DIPA-L 2006	Real 05	% Real 05	Real L-06	%Real L-06	Real 05+L	% Real 05+L
1	Perumahan	408,458	344,059	64,399	15.8%	270,389	78.6%	334,788	82.0%
2	Infrastruktur	1,244,258	1,148,215	96,042	7.7%	665,608	58.0%	761,650	61.2%
3	AGSOSBUD	270,809	263,275	5,037	1.9%	115,681	43.9%	120,718	44.6%
4	DIKKES	480,000	335,480	147,018	30.6%	150,363	44.8%	297,381	62.0%
5	Ekonomi	546,104	521,473	24,631	4.5%	373,285	71.6%	397,916	72.9%
6	Kelembagaan	769,753	741,678	28,075	3.6%	334,683	45.1%	362,758	47.1%
7	Sekretariat dll.	247,571	198,079	49,461	20.0%	152,801	77.1%	202,262	81.7%
<b>TOTAL</b>		<b>3,966,953</b>	<b>3,552,259</b>	<b>414,663</b>	<b>10.5%</b>	<b>2,062,810</b>	<b>58.1%</b>	<b>2,477,473</b>	<b>62.5%</b>

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007



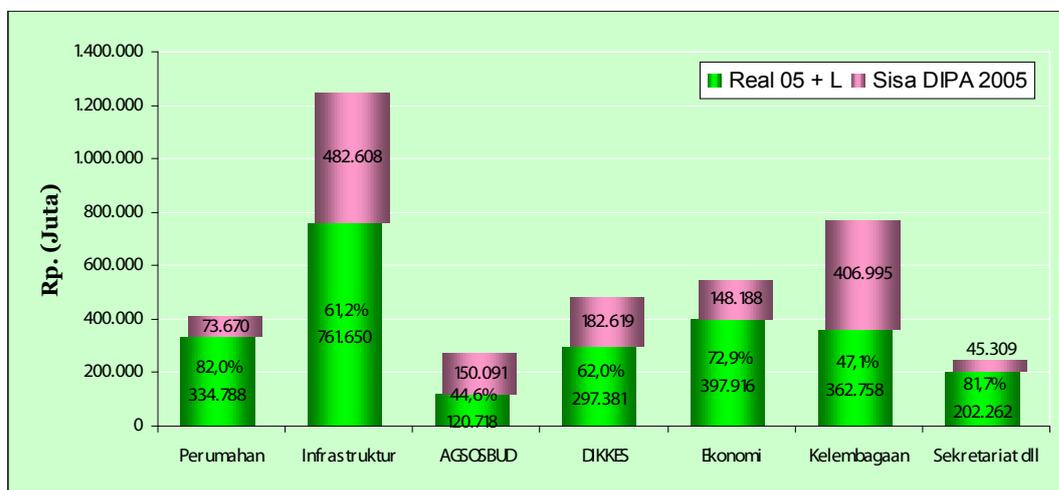
Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

**Gambar 2.1 Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada Tahun 2005**



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

**Gambar 2.2 Penyerapan Anggaran DIPA 2005 pada Tahun 2006**



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

**Gambar 2.3 Total Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada 2005 dan 2006**

#### 1.1.1.6.2 Penyerapan DIPA 2006

Realisasi DIPA 2006 pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 7.79 Trilyun atau 74% dari Pagu DIPA. Penyerapan tertinggi ada pada bidang Infrastruktur sebesar 87,4% disusul bidang Agama-Sosbud sebesar 82,4%. Penyerapan terendah ada pada bidang Kelembagaan yakni sebesar 54,9% disusul bidang Pendidikan-Kesehatan sebesar 63,8%. Khusus bidang Perumahan dan Infrastruktur, terdapat luncturan anggaran sebesar Rp. 2,2 Trilyun yang dikelola dengan mekanisme Trust Fun 2007.

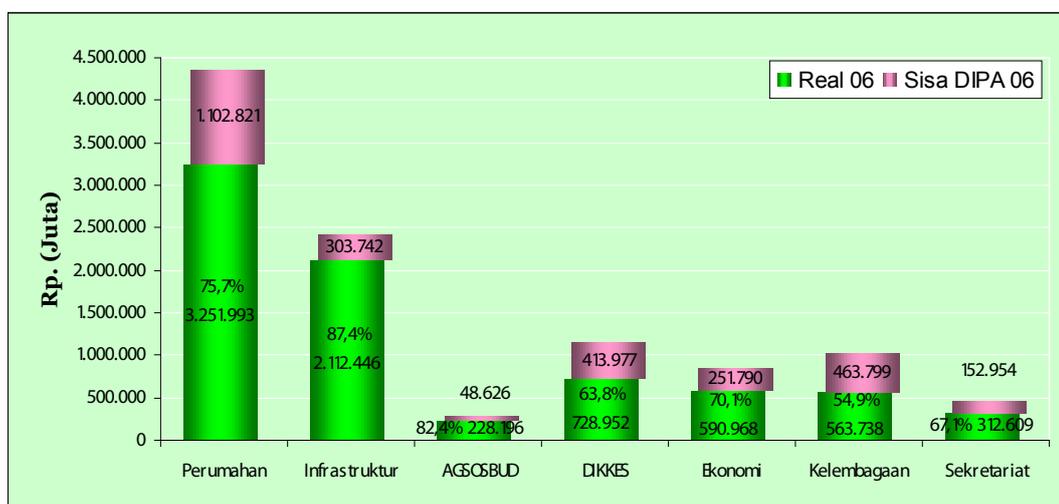
Dari luncturan DIPA 2006 pada 2007, sampai 31 Mei 2007, berhasil diserap Rp. 1,24 Trilyun atau 55,9%. Sehingga Total penyerapan DIPA 2006 baik yang direalisasikan pada tahun 2006 maupun Trust Fund tahun 2007, adalah sebesar Rp. 9,03 Trilyun, atau 79,6% dari pagu.

**Tabel 2.67 Penyerapan Anggaran DIPA 2006 (Dalam Rp. Juta)**

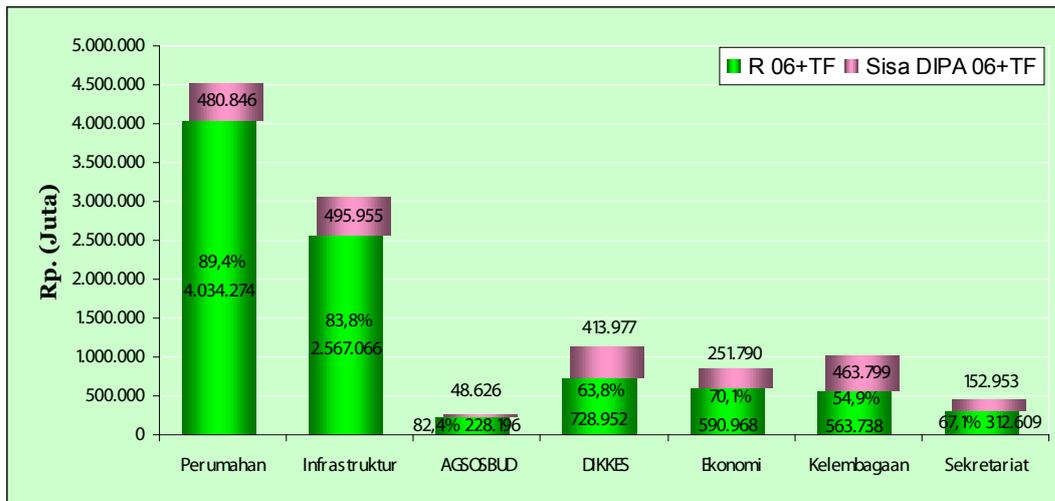
No	Bidang	DIPA 06	TF 07	D 06+TF	Real 06	% R 06	R TF 07	% R TF 07	R 06+TF	% 06+TF
		1	2	3	4	5=4/1	6	7=6/2	8=4+6	9=8/3
1	Perumahan	4,354,814	1,263,127	4,515,120	3,251,993	74.7%	782,281	61.9%	4,034,274	89.4%
2	Infrastruktur	2,416,188	950,575	3,063,021	2,112,446	87.4%	454,620	47.8%	2,567,066	83.8%
3	AGSOSBUD	276,822	-	276,822	228,196	82.4%	-	-	228,196	82.4%
4	DIKKES	1,142,929	-	1,142,929	728,952	63.8%	-	-	728,952	63.8%
5	Ekonomi	842,758	-	842,758	590,968	70.1%	-	-	590,968	70.1%
6	Kelembagaan	1,027,537	-	1,027,537	563,738	54.9%	-	-	563,738	54.9%
7	Sekretariat	465,563	-	465,562	312,609	67.1%	-	-	312,609	67.1%
<b>TOTAL</b>		<b>10,526,611</b>	<b>2,213,702</b>	<b>11,333,749</b>	<b>7,788,902</b>	<b>74.0%</b>	<b>1,236,901</b>	<b>55.9%</b>	<b>9,025,803</b>	<b>79.6%</b>

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

**Gambar 2.4 Penyerapan Anggaran DIPA 2006 Pada Tahun 2006**



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

**Gambar 2.5 Penyerapan Anggaran DIPA 2006 dan Trust Fund 2007**

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

### 2.1.3.6.3 KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN

Penyerapan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi sumber dana APBN (On Budget) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 penyerapan anggaran DIPA 2005 hanya mencapai 10,5%. Total penyerapan DIPA 2005 baik pada 2005 maupun pada 2006 mencapai 62,5%. Khusus Luncuran DIPA 2005 pada 2006 penyerapannya mencapai 58,1% anggaran.

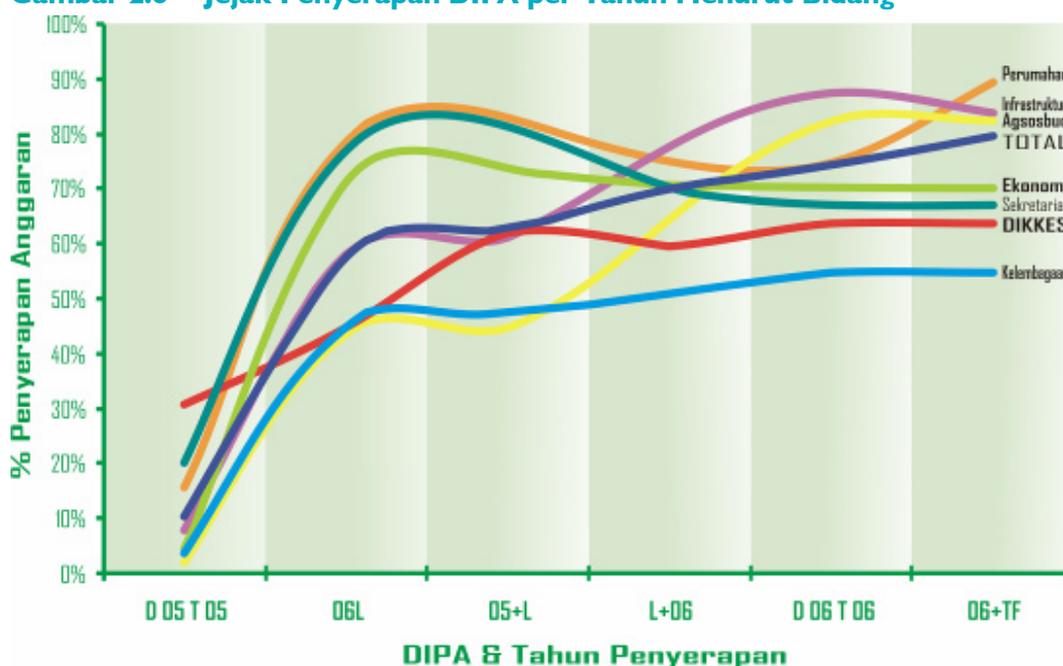
Pada tahun 2006, penyerapan DIPA meningkat menjadi 74% atau meningkat 11,5% dari penyerapan DIPA 2005 (termasuk luncuran). Peningkatan penyerapan tertinggi terdapat pada bidang Agama-Sosbud yakni meningkat 37,8% disusul bidang Infrastruktur meningkat 26,2%. Walaupun secara umum kemampuan penyerapan meningkat, namun pada beberapa bidang mengalami penurunan kemampuan penyerapan. Bidang yang mengalami penurunan kemampuan penyerapan adalah bidang Sekretariat dll terjadi penurunan sebesar 14,6% dan bidang Perumahan mengalami penurunan sebesar 7,3%.

**Tabel 2.68 Persentase Penyerapan Anggaran**

No	Bidang	D 05 T 05	06L	05+L	L+06	D 06 T 06	06+TF	Δ 06-05
1	Perumahan	15.8%	78.6%	82.0%	75.0%	74.7%	89.4%	-7.3%
2	Infrastruktur	7.7%	58.0%	61.2%	77.9%	87.4%	83.8%	26.2%
3	AGSOSBUD	1.9%	43.9%	44.6%	63.7%	82.4%	82.4%	37.9%
4	DIKES	30.6%	44.8%	62.0%	59.5%	63.8%	63.8%	1.8%
5	Ekonomi	4.5%	71.6%	72.9%	70.7%	70.1%	70.1%	-2.7%
6	Kelembagaan	3.6%	45.1%	47.1%	50.8%	54.9%	54.9%	7.7%
7	Sekretariat	20.0%	77.1%	81.7%	70.1%	67.1%	67.1%	-14.6%
<b>TOTAL</b>		<b>10.5%</b>	<b>58.1%</b>	<b>62.5%</b>	<b>70.0%</b>	<b>74.0%</b>	<b>79.6%</b>	<b>11.5%</b>

Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

**Gambar 2.6 Jejak Penyerapan DIPA per Tahun Menurut Bidang**



Sumber : BRR NAD-Nias, 2007

## 2.2. DONOR/NGO

Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari sumbangan dunia/Internasional, disebut dana Non APBN atau lebih dikenal dengan sebutan *'off budget's* karena merupakan anggaran yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Pembiayaan Non APBN ini menangani semua aspek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tabel berikut menjelaskan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias berdasarkan sektor pemulihan.

**Tabel 2.69 Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias bersumber dari off-budget berdasarkan sektor pemulihan**

No	Bidang Pemulihan	2005		2006		2007	
		Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
1	Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang, Pertanahan & Lingkungan Hidup	604,485,111	231,087,189	146,985,458	180,251,212	22,556,973	46,048,948
2	Infrastruktur	573,046,776	205,793,204	199,485,166	77,180,957	5,849,444	9,671,646
3	Sosial Kemasyarakatan	756,021,749	370,457,692	180,103,231	125,028,992	28,921,981	32,053,684
4	Perekonomian	261,000,851	136,164,460	121,195,137	67,888,236	12,670,068	13,968,858
5	Kelembagaan dan Hukum	181,062,385	107,329,082	82,415,109	35,512,339	6,639,074	10,139,874
6	Biaya Administrasi dan Biaya lainnya	28,710,662	7,808,422	7,650,651	13,678,678	1,696,531	1,285,399
7	Tidak dialokasikan	115,208,350	69,677,804	31,303,268	10,531,209	38,229	223,633

No	Bidang Pemulihan	2005		2006		2007	
		Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
8	Semua subsektor- Sektor yang didefinisikan	500,000	500,000				
9	Subsektor lain-lain	2,681,172	449,803	393,711	1,672,658		
<b>TOTAL</b>		<b>2,522,717,056</b>	<b>1,129,267,656</b>	<b>769,531,731</b>	<b>511,744,281</b>	<b>78,372,300</b>	<b>113,392,042</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Akan dijelaskan secara detil mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pada tiap bidang pemulihan baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik yang masing-masing akan dijabarkan dalam subbidang berikut dibawah ini.

### 2.2.1. BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN & LINGKUNGAN HIDUP

**Tabel 2.70 Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Perumahan, Pemukiman, Tata Ruang, Pertanian & Lingkungan Hidup**

Subbidang/Program	2005		2006		2007	
	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
Semua subbidang - Perencanaan Spasial & Perlindungan Lingkungan	17,466,853	6,216,853	2,343,813	1,666,667	697,124	4,216,014
Konservasi Sumber Daya Alam	17,292,788	1,733,955	819,034	889,319	11,483	52,227
Riset dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan	6,691,181	2,601,302	1,789,725	1,697,160	204,002	361,373
Perencanaan Spasial	12,490,576	7,607,456	1,925,278	2,371,438	0	199,419
Perencanaan Spasial dan Urusan Agraria	29,234,231	251,029	49,779	133,282	207	52,227
Subbidang lain-lain - Perencanaan Spasial & Perlindungan Lingkungan	681,140	672,256	778,697	646,239	0	41,674
Pembangunan Perumahan	494,201,914	195,076,815	137,166,816	171,452,150	21,640,969	41,041,385
Lainnya yang berkaitan dengan perumahan dan masyarakat	26,412,600	16,927,523	1,654,816	1,308,923	3,188	84,629
Riset dan Pengembangan yang berkaitan dengan Perumahan dan masyarakat	13,828	0	457,500	86,034		
<b>TOTAL</b>	<b>604,485,111</b>	<b>231,087,189</b>	<b>146,985,458</b>	<b>180,251,212</b>	<b>22,556,973</b>	<b>46,048,948</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Keterlibatan NGO dan donor pada bidang perumahan sangat dominan, semenjak masa tanggap darurat, telah menyelesaikan rumah sementara bagi para pengungsi sebanyak 13.900 unit rumah, dari komitmen 14.000 unit rumah (97%). Selanjutnya pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi sampai dengan pertengahan Juni 2007, telah menyelesaikan pembangunan rumah baru sebanyak 55.467 unit rumah, terdiri dari rumah baru 50.309 unit dan rumah relokasi sebesar 5.158 unit. Selain pembangunan rumah baru juga merehabilitasi rumah sebesar 1.635 unit rumah, terdiri dari rehabilitasi rusak berat

sebanyak 231 unit dan rehabilitasi rusak ringan sebanyak 1.404 unit. Selanjutnya, dari jumlah rumah yang telah diselesaikan pembangunannya, 18.613 unit rumah (57% dari total komitmen). telah ditempati oleh sasaran 'beneficiaries' para pengungsi korban tsunami. Sertifikasi lahan telah terealisasi sebanyak 4.505 persil dari komitmen sejumlah 4869 persil (93%).

Kegiatan Perencanaan dan Pemetaan untuk menunjang kualitas dan pelaksanaan proyek perumahan dan permukiman, antara lain survey dan pemetaan tata batas (desa/Gampong). Telah terealisasi 100% dari komitmen 416 desa. Juga pelayanan masyarakat khususnya untuk pengungsi telah terealisasi sepenuhnya (98%). Program lainnya yang capaian terhadap komitmennya masih rendah adalah pemetaan, sertifikasi lahan, layout gampong dan pelaporan, capaiannya masih di bawah 50% dari komitmen awal.

Capaian kinerja NGO dan Donor terhadap komitmennya yang masih kurang dari 50% adalah pada kegiatan penyediaan material bangunan permukiman baru, realisasinya baru sebesar 92,760 USD (1%) dari total komitmen sejumlah 11,285.760 USD

Sumbangan NGO dan Donor untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintah adalah rehabilitasi bangunan pemerintah sebanyak 63 unit dari 72 unit komitmen (88%). Untuk bangunan publik telah kemajuan realisasi sebesar 429 unit, atau 63% dari komitmen sejumlah 686 unit. Restorasi taman kota terealisasi sebesar 44% dari komitmen sejumlah 134 unit adapun untuk pelaporan studi terealisasi sebesar 45% dari komitmen sebesar 33 paket. Secara lebih terinci uraian di atas disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.71 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	PERUMAHAN				
1	Rumah rusak berat yang diperbaiki	unit	474	231	49%
2	Rumah yang dibangun	unit	80,224	50,309	63%
3	Rumah yang ditempati	unit	32,628	18,613	57%
4	Rumah rusak ringan yang diperbaiki	unit	1,590	1,404	88%
5	Pembangunan rumah yang direlokasi	unit	5,158	2,250	44%
6	Pembangunan rumah sementara	unit	14,302	13,900	97%
B	PERMUKIMAN	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	Suplai bahan bangunan (USD)	\$	11,285,760	92,760	1%
2	Fasilitas Distribusi Komunikasi yang direhabilitasi	unit	5	0	0%
3	Fasilitas Distribusi Listrik yang direhabilitasi	unit	255	107	42%
4	Gedung pemerintah yang dibangun/diperbaiki	unit	72	63	88%
5	Surat tanah yang diterbitkan	persil	4,869	4,505	93%
6	Gedung kantor yang dibangun/diperbaiki	unit	33	2	6%
7	Jumlah orang yang dipekerjakan	org	459	407	89%
8	Jumlah orang yang dilayani	org	289,219	208,889	72%
10	Gedung sarana publik yang dibangun/diperbaiki	unit	686	429	63%
11	Restorasi taman publik/umum	unit	134	59	44%
12	Laporan sebagai bahan untuk dipelajari	pkt	33	15	45%
13	Gedung pendukung lainnya yang dibangun/diperbaiki	unit	1	1	100%
14	Kemajuan fisik (%)	%	6,533	4,467	68%
C	PERENCANAAN & PEMETAAN				
1	Peta yang telah dihasilkan (persentase)	%	20,203	5,001	25%
2	Surat tanah yang diterbitkan	persil	146,565	8,103	6%
3	Jumlah orang yang dilayani	org	102,005	100,201	98%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
4	Laporan sebagai bahan untuk dipelajari	pkt	32	9	28%
5	Desa yang dilengkapi batas property	Gampong	416	415	100%
6	Desa yang dilengkapi gambar tampilan	Gampong	111	53	48%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

## 2.2.2. BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

**Tabel 2.72 Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Infrastruktur**

Subbidang/Program	2005		2006		2007	
	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
Semua subbidang - Infrastruktur, Perumahan & Tanah	38,128,289	30,845,398	51,459,950	10,199,009	4,013,167	3,320,149
Bahan Bakar dan Energi	1,303,484	234,706	1,569,621	93,614	23,800	11,821
Pengawasan Irigasi dan Banjir/ Pengamanan Pantai	3,303,548	345,555	1,502,124	417,735	44,070	0
Lampu Jalan			74,074	74,074		
Subbidang yang harus ditegaskan – Infrastruktur, Perumahan & Tanah	18,093,271	5,517,829	2,364,500	2,420,182	314,653	992,118
Transportasi	307,350,580	56,403,664	100,019,858	31,978,124	119,070	1,998,635
Pengelolaan Limbah	13,375,995	11,387,936	4,714,869	1,618,859	0	939,987
Pengelolaan Limbah Air	50,803,722	28,500,328	6,950,742	10,549,608	521,663	80,312
Penyediaan Air	140,687,887	72,557,788	30,829,428	19,829,752	813,021	2,328,624
<b>TOTAL</b>	<b>573,046,776</b>	<b>205,793,204</b>	<b>199,485,166</b>	<b>77,180,957</b>	<b>5,849,444</b>	<b>9,671,646</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Kegiatan pada bidang infrastruktur meliputi transportasi, energi dan listrik dan sumberdaya air. Pembangunan kembali/rehabilitasi landasan pacu (airstrip) dan jalan di sekitar bandara telah mencapai realisasi 100% dari komitmen (masing-masing sepanjang 6 km dan 150 meter) dan pembangunan kembali pelabuhan telah terealisasi sejumlah 13 unit dari 17 unit yang dikomitmenkan (76%).

Perbaikan jembatan telah mencapai realisasi 91% (dari komitmen 255 meter dan 186 unit). dan perbaikan fasilitas jalan mencapai realisasi sebesar 31% dari komitmen 7.802 meter. Namun demikian, masih ada realisasi yang baru mencapai 8% dari komitmen, yakni pembangunan/konstruksi jalan kampung yang baru merealisasikan 3.542 meter dari komitmen sepanjang 46.640 meter.

Pada kegiatan energi dan listrik, pengadaan generator telah dilakukan dan kapasitas sampai saat ini adalah sebesar 43.801 Kw dari komitmen awal sebesar 57.721 Kw. Selanjutnya suplai peralatan telah direalisasikan sebesar 88% dari nilai bantuan sejumlah 1.551.249 USD.

Rehabilitasi drainase telah direalisasikan mencapai 100% dengan panjang struktur outlet sepanjang 30.742 meter. Selanjutnya konstruksi drainase yang telah direhabilitasi adalah sepanjang 377.828 (85%) dari komitmen. Rehabilitasi areal irigasi telah terealisasi seluas 74 H (99%) dari komitmen seluas 75 Ha. Selanjutnya, perlindungan pantai dan pengendalian banjir baru terealisasi 22 km<sup>2</sup> dari komitmen 524 km<sup>2</sup> (4%).

Secara lebih terperinci, dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.73 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh Donor dan NGO**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	Transportasi				
1	Lapangan terbang darurat yang dibangun/ dibangun kembali (Km)	km	6	6	100%
2	Jembatan yang dibangun (m)	m	255	233	91%
3	Jalan sekitar pelabuhan yang dibangun kembali (m)	m	150	150	100%
4	Jalan sekitar perumahan/desa yang dibangun kembali (m)	m	46,640	3,542	8%
5	Jalan untuk fasilitas umum yang dibangun kembali (m)	m	7,802	2,427	31%
6	Jalan yang dibangun kembali (Km)	km	8,207	4,613	56%
7	Transportasi – Jembatan dibangun kembali	unit	186	170	91%
8	Pelabuhan yang diperluas kembali	unit	17	13	76%
B	Energi dan Listrik				
1	Tenaga Listrik yang dihasilkan (kW)	kw	57,721	43,801	76%
2	Peralatan & supali yang disediakan (nilai dalam USD)	\$	1,551,249	1,365,340	88%
C	Sumber Daya Air				
1	Area yang dilengkapi dengan Pengendali Banjir/Pengaman Pantai (Km2)	km2	524	22	4%
2	Area yang dilengkapi dengan system irigasi (Ha)	ha	75	74	99%
3	Drainase/Manajemen hujan deras – Panjang konstruksi pengaliran yang disediakan/ direhabilitasi (m)	m	446,495	377,828	85%
4	Drainase/ Manajemen hujan deras – Panjang struktur outlet yang disediakan/direhabilitasi (m)	m	30,742	30,742	100%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

Untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman, diperlukan prasarana dasar permukiman yaitu air bersih dan sanitasi lingkungan. Untuk kegiatan air bersih, beberapa kegiatan telah mencapai realisasi di atas 80% seperti penyediaan hidran yang mencapai realisasi 100% (35.051 unit), penyediaan saluran air perpipaan primer dan sekunder sepanjang 6.200 km dari 6.233 km komitmen (99%), restorasi 'water system' mencapai realisasi sebesar 93% dari rencana 2.994 unit. Kegiatan suplai air ke rumah tangga telah merealisasikan kegiatannya pada 88.927 rumah dari target awal 98.583 rumah (90%) dan purifikasi air tanah telah mencapai realisasi sebesar 88% dari rencana 8.970 unit.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor dan NGO yang capaiannya terhadap komitmen awal lebih dari 50% dari komitmen adalah kegiatan pembuatan sumur air tanah dalam (*deep well*) dan pemompaan yang masing-masing mencapai realisasi sebesar 56% dan 51%. Adapun program lainnya seperti rehabilitasi keran umum mencapai 48% dari komitmen 753 unit, dukungan logistik mencapai realisasi sebesar 15%, rehabilitasi fasilitas distribusi air bersih mencapai realisasi sebesar 8% dari komitmen 27.036 unit. Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas produksi air bersih sampai saat ini baru dapat merealisasikan 1% dari komitmen. Kapasitas air bersih yang diproduksi saat ini adalah 240 lt/det dari komitmen 40.466 lt/det. Kegiatan sanitasi lingkungan meliputi pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah padat. Dalam kegiatan ini,

hampir seluruh realisasi telah mencapai lebih 50% dari komitmen. Kegiatan pengelolaan limbah padat (TPA) dan sludge water treatment (2 unit) telah mencapai realisasi 100%. Secara terperinci, dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.74 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Dasar Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	AIR BERSIH				
1	Kapasitas fasilitas produksi air yang direkonstruksi/ direhabilitasi (lt/sec)	lt/det	40,466	240	1%
2	Panjang water mains primer dan sekunder yang direhabilitasi/disediakan (km)	km	6,233	6,200	99%
3	Sistem pengairan skala besar yang diperbaiki	unit	2,994	2,776	93%
4	Titikairan skala kecil yang direhabilitasi/ dikonstruksi	unit	9,229	8,187	89%
5	Pompa pendorong yang direhabilitasi	unit	766	389	51%
6	Sumur air dalam yang direhabilitasi/dibor	unit	2,422	1,351	56%
7	Sumur air tanah yang dimurnikan	unit	8,970	7,855	88%
8	Penyediaan rumah dilengkapi dengan air	rumah	98,583	88,927	90%
9	Hydran umum yang disediakan	unit	35,051	35,051	100%
10	Kran public yang direhabilitasi/direkonstruksi	unit	753	360	48%
11	Fasilitas distribusi air yang direhabilitasi	unit	27,036	2,151	8%
12	Pendukung logistic (nilai USD)		29,024,872	4,418,572	15%
B	SANITASI LINGKUNGAN				
-	Manajemen Limbah Manusia				
1	Rumah dilengkapi dengan pembuang kotoran&sanitasi	unit	14,372	7,839	55%
2	Fasilitas toilet umum yang dibangun/direhabilitasi	unit	1,387	921	66%
3	Skema sanitasi yang diperbaiki	unit	16,281	13,539	83%
4	Alat pengolahan air kotoran/endapan	unit	2	2	100%
5	Toilet yang dibangun/direhabilitasi	unit	11,191	8,709	78%
-	Manajemen Limbah Padat				
1	Wadah sampah yang disediakan/direhabilitasi		11,134	9,715	87%
2	Truk sampah yang disediakan /direkondisi		5	5	100%
3	Tanah tempat pembuangan sampah yang disediakan/direhabilitasi		105,000	65,049	62%
4	Transfer penampungan yang disediakan / direhabilitasi		626,001	485,452	78%
5	Manajemen limbah padat – Tempat yang disediakan dan dilandscape untuk Tempat Pembuangan Akhir/TPA (m2)		60,004	60,003	100%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

### 2.2.3. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

**Tabel 2.75 Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan**

Sector Versi Bappenas	2005		2006		2007	
	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)	Komitmen (USD)	Realisasi (USD)
Pendidikan	363,960,787	140,269,762	78,789,611	52,327,812	8,210,123	21,348,626
Kesehatan	293,811,186	171,908,558	66,353,662	53,671,790	11,599,114	7,481,103
Agama	3,982,459	2,939,950	4,805,381	4,278,730	2,156,670	1,485,008
Sosial Budaya	94,267,317	55,339,422	30,154,577	14,750,660	6,956,074	1,738,947
TOTAL Sosial Kemasyarakatan	756,021,749	370,457,692	180,103,231	125,028,992	28,921,981	32,053,684

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Sumbangan masyarakat pada rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dan budaya, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan budaya serta sumber daya manusia lainnya seperti, peranan wanita, perlindungan anak, pemuda dan olahraga serta lainnya.

### 2.2.3.1. PENDIDIKAN

**Tabel 2.76 Pembiayaan Pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov. NAD-Nias**

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSector – Pendidikan	44,525,828	17,364,615	9,616,771	3,710,200	3,358,516	2,129,660
Pegawai Pemerintah – Pendidikan	4,890,005	107,580	243,845	1,566,854	167,445	86,539
Pendidikan Non Formal dan linformal	6,689,775	3,192,079	7,164,553	2,945,874	189,797	390,992
Urusan Pendidikan Lainnya	18,910,232	4,566,021	1,423,477	1,069,453	167,445	14,611
Pendidikan Pra Primer	2,505,412	1,773,401	1,365,885	1,296,829	144,346	131,137
Pendidikan Primer	233,912,112	86,528,962	28,893,066	29,290,960	3,394,629	15,880,045
Pendidikan Riset dan pengembangan	95,556	65,659	0	8,718		
Pendidikan Agama	7,420,276	4,360,029	542,265	2,245,137	714,160	973,776
Pendidikan Sekunder	37,188,663	16,437,010	27,307,729	8,739,467	43,785	1,542,508
Subsector yang perlu ditegaskan – Pendidikan	568,000	94,788	4,167	4,167		
Pelayanan tambahan untuk pendidikan	3,916,545	2,636,596	544,207	519,079	0	3,708
Pendidikan Tersier	3,338,383	3,143,022	1,683,646	931,074	30,000	195,650
<b>TOTAL</b>	<b>363,960,787</b>	<b>140,269,762</b>	<b>78,789,611</b>	<b>52,327,812</b>	<b>8,210,123</b>	<b>21,348,626</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Kegiatan bidang pendidikan yang didanai oleh NGO/donor utamanya berkenaan dengan penyediaan fasilitas pendidikan berupa buku dan furnitur sekolah, dan peralatan lainnya. Kegiatan lainnya adalah rehabilitasi bangunan/fasilitas sekolah dasar sampai dengan universitas, pelatihan, pelayanan dan pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Hal ini ditujukan untuk memulihkan kembali aspek kualitas pendidikan di Provinsi NAD dan Nias.

Rata-rata pencapaian/realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah di atas 50% dari komitmen sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.77 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Penerima manfaat/partisipan pada pelatihan kejuruan	org	25,987	12,668	49%
2	Penyediaan buku-buku	buku	476,622	431,319	90%
3	Penyediaan ruang kelas dengan furniture	kelas	573	462	81%
4	Sekolah dasar yang dibangun/diperbaiki	unit	845	530	63%
5	Sekolah menengah pertaman yang dibangun/diperbaiki	unit	94	41	44%
6	Taman Kanak-kanak yang dibangun/diperbaiki	unit	73	61	84%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
7	Jumlah orang yang dilayani	org	944,522	846,496	90%
8	Beasiswa yang disediakan	murid	19,386	13,174	68%
9	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas sanitasi	unit	2,932	978	33%
10	Perlengkapan sekolah dengan fasilitas air	sekolah	236	34	14%
11	Sekolah Menengah Umum yang dibangun/diperbaiki	unit	88	36	41%
12	Guru yang diberi pelatihan	guru	23,613	16,260	69%
13	Sekolah sementara yang dibangun	unit	120,326	124	0%
14	Transportasi yang disediakan	unit	63	57	90%
15	Universitas yang dibangun/diperbaiki	unit	9	7	78%
16	Perlengkapan & Penyediaan Sekolah (Nilai USD)	\$	10,867,896	9,016,297	83%
17	Jumlah laporan untuk tujuan studi dan survey	Pkt	1,065	707	66%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

### 2.2.3.2. KESEHATAN

**Tabel 2.78 Pembiayaan Kesehatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov. NAD-Nias**

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSektor – Kesehatan	96,288,298	47,278,628	16,959,361	17,144,066	508,394	1,421,606
Keluarga Berencana	3,049,801	2,056,436	500,045	135,720	50,000	50,000
Pelayanan Kesehatan Perorangan	7,916,306	4,624,826	2,808,674	2,861,342	30,278	261,594
Produk Kesehatan, Peralatan dan perlengkapan	22,389,842	18,819,227	1,622,706	2,643,042	2,974,823	397,197
Urusan Kesehatan lainnya	10,018,418	5,887,061	2,526,881	2,655,849	178,047	575,137
Pelayanan Kesehatan Masyarakat	146,999,294	89,299,689	41,179,500	26,521,221	7,753,662	4,671,659
Urusan Riset dan Pengembangan Kesehatan	3,787,793	581,257	733,731	1,687,786		
SubSektor yang harus ditegaskan - Kesehatan	3,361,434	3,361,434	22,764	22,764	103,910	103,910
<b>TOTAL</b>	<b>293,811,186</b>	<b>171,908,558</b>	<b>66,353,662</b>	<b>53,671,790</b>	<b>11,599,114</b>	<b>7,481,103</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Sumbangan NGO dan Donor pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan meliputi delapan kelompok kegiatan yaitu tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pelayanan CDC, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan dan pelatihan bidang kesehatan. Realisasi kegiatan pada saat tanggap darurat berkenaan dengan penyediaan dan distribusi peralatan medis dan obat-obatan, peralatan medis, penyediaan komunikasi dan informasi serta penataan kelembagaan. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, kegiatan berupa pembangunan/rehabilitasi klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, laboratorium, rumah sakit, polindes dan posyandu kegiatan lainnya adalah pelatihan bidang kesehatan dan penataan kelembagaan kesehatan. Pelayanan CDC meliputi penanganan terhadap wabah penyakit seperti diare, malaria, TBC maupun program lainnya.

Selanjutnya dalam kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dan promosi pelayanan kesehatan, kegiatan realisasi berupa program pengelolaan limbah/sampah serta kampanye dan sosialisasi bidang kesehatan. Kegiatan lainnya berupa pelatihan dan pelayanan dibidang kesehatan seperti kesehatan anak dan orang tua, reproduksi, kesehatan mental, nutrisi dan lain sebagainya. Rata-rata pencapaian sampai dengan tahun 2007 adalah lebih dari 50%. (lihat tabel di bawah)

**Tabel 2.79 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	Perlengkapan dan Peralatan				
1	Aktivient penilaian (angka)	Keg	68,957	61,297	89%
2	Program Peningkatan Kapasitas & Lain-lain (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	168,520	34,715	21%
3	Perlengkapan & Peralatan – Non Kesehatan – TEknologi Informasi & Komunikasi (Nilai USD)	\$	348,586	347,704	100%
4	Perlengkapan & Peralatan- Kesehatan –Yang dapat dikonsumsi	\$	4,157,163	3,094,785	74%
5	Perlengkapan & Peralatan- Kesehatan –Yang tidak dapat dikonsumsi	\$	9,253,158	5,212,822	56%
6	Perlengkapan & Peralatan- Non Kesehatan –Transportasi	\$	14,206,766	3,406,766	24%
7	Perlengkapan & Peralatan- Lain-lain (nilai USD)	\$	1,527,308	465,509	30%
8	Jumlah peralatan kesehatanyang didistribusi	Unit	15,496	15,496	100%
9	Jumlah orang yang dilayani	Org	3,581,622	2,995,449	84%
B	Rehabilitasi & Rekonstruksi				
1	Klinik (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	89	87	98%
2	Kantor distrik kesehatan (Jumlah yang dibangun/ diperbaiki)	Unit	1	1	100%
3	Lembaga pendidikan (Jumlah yang dibangun/ diperbaiki)	Unit	7	3	43%
4	Pusat Pelatihan Kesehatan(Jumlah yang dibangun/ diperbaiki)	Unit	1	1	100%
5	Laboratorium (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	1	1	100%
6	Gudang Farmasi (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	2	0	0%
7	Posyandu (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	57	56	98%
8	Rumah Sakit (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	25	12	48%
9	Lain-lain (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	372	340	91%
10	Polindes (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	510	135	26%
11	Puskesmas (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	90	72	80%
12	Pustu (Jumlah yang dibangun/diperbaiki)	Unit	151	88	58%
13	Satellite Health Posts (Jumlah yang disediakan)	Unit	40	40	100%
C	Pelayanan/Jasa CDC				
1	Program Diare (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	240,417	130,417	54%
2	Program Pengawasan Penyakit (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	37,559	37,549	100%
3	Program EPI (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	240,502	74,471	31%
4	Program Malaria (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	2,812,627	810,673	29%
5	Program lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	10,410	10,395	100%
6	Program TBC (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	4,672	4,672	100%
D	Pelayanan Kesehatan Lingkungan				
1	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Limbah (Jumlah Penerima Manfaat)	org/kk	227,942	25,158	11%
2	Program Lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	37,470	35,159	94%
E	Promosi Pelayanan Kesehatan				
	Program Promosi Kesehatan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	2,484,083	586,548	24%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
F	Pelayanan				
1	Program Anak & Remaja (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	540,970	535,017	99%
2	Program Reproduksi Kesehatan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	42,639	27,736	65%
3	Program Kesehatan Mental (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	254,314	56,709	22%
4	Program Nutrisi (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	1,803,999	870,576	48%
5	Program Pencegahan (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	201,846	149,857	74%
6	Program Lainnya (Jumlah Penerima Manfaat)	Org	1,516,148	1,515,023	100%
G	Pelatihan				
1	Pelayanan CDC (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	33,357	31,359	94%
2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	9,121	8,701	95%
3	Promosi Kesehatan (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	53,887	38,265	71%
4	Pelayanan MCH (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	11,322	10,532	93%
5	Pelayanan Kesehatan Mental (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	7,354	7,063	96%
6	Pelayanan Nutrisi (Jumlah Orang yang dilatih)	Org	8,099	6,897	85%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

### 2.2.3.3. AGAMA

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi bidang agama adalah untuk mengembalikan situasi kehidupan beragama pasca tsunami di provinsi NAD dan Nias. Implikasinya berupa pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah, penyediaan fasilitas keagamaan, pelayanan masyarakat serta pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui bidang keagamaan. Pembiayaan bidang agama dari sumber dana Non APBN ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.80 Pembiayaan Agama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov. NAD-Nias**

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Kemajuan Kehidupan Beragama	1,758,058	806,240	1,622,783	1,321,294	1,470,000	735,713
Semua SubSektor - Agama	677,137	619,812	1,177,087	1,223,769		
Keselarasn dalam kehidupan Beragama			470,137	448,137		
Urusan Pelayanan Keagamaan Lainnya	666,014	632,648	1,003,374	879,086		
Urusan Riset dan pengembangan Keagamaan	481,250	481,250	94,500	56,444	68,750	68,750
SubSektor lain-lain - Keagamaan	400,000	400,000	437,500	350,000	617,920	680,545
<b>TOTAL</b>	<b>3,982,459</b>	<b>2,939,950</b>	<b>4,805,381</b>	<b>4,278,730</b>	<b>2,156,670</b>	<b>1,485,008</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Selanjutnya pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah berupa pembangunan/ rehabilitasi gereja, masjid, pesantren, dan vihara disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.81 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
	KPI untuk ditegaskan		440,000	308,000	70%
	Perlengkapan & peralatan yang disediakan (nilai USD)	\$	1,479,306	1,330,654	90%
1	Gereja yang dibangun/diperbaiki	Unit	3	2	67%
2	Pelajar Dayah yang menerima pelatihan keterampilan hidup	santri	165	11	7%
3	Meunasah (aula ibadah) yang dibangun/diperbaiki	Unit	17,947	15	0%
4	Mesjid yang dibangun/diperbaiki	Unit	75	60	80%
5	Jumlah orang yang dilayani	Org	15,367	15,367	100%
6	Pesantren (sekolah keagamaan) yang dibangun/diperbaiki	Unit	9	5	56%
7	Laporan untuk tujuan studi/survey	Pkt	32,000	7	0%
8	Guru/pemimpin dayah yang dilatih	Org	600	600	100%
9	Kuil yang dibangun kembali/diperbaiki	Unit	1	1	100%
10	Kemajuan Fisik (%)		1,400	1,210	86%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

#### 2.2.3.4. SOSIAL DAN BUDAYA

**Tabel 2.82 Pembiayaan Sosial Budaya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias**

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSektor - Sosial	16,983,769	8,501,188	1,951,186	3,018,559	142,200	0
Pemberdayaan Perempuan	9,040,118	3,585,790	3,067,897	4,465,921	294,310	186,488
Bantuan Perumahan	7,371,415	6,881,789	0	159,982	3,000,000	150,000
Pedoman Informasi dan Sosial	3,036,717	1,767,922	3,674,864	1,933,761	1,325,324	40,257
Pelayanan dan Proteksi Penduduk Usia Lanjut	9,176	4,118	477,281	479,457	637,130	338,952
Jasa Perlindungan dan Sosial bagi Anak-anak dan Keluarga	40,471,774	20,489,479	7,488,282	2,983,605	1,252,270	908,649
Proteksi Riset dan Pengembangan Sosial	535,238	116,721	167,594	302,594	102,411	21,779
Pelayanan dan Perlindungan Orang Sakit dan Cacat	166,858	166,858	152,229	4,029		
Bantuan Pengamanan Sosial	2,598,497	2,402,304	9,025	54,634		
SubSektor yang harus ditegaskan - Sosial	10,687,014	9,143,653	13,151,562	893,416		
Pemuda dan olahraga	3,366,741	2,279,600	14,657	454,702	202,429	92,822
<b>TOTAL</b>	<b>94,267,317</b>	<b>55,339,422</b>	<b>30,154,577</b>	<b>14,750,660</b>	<b>6,956,074</b>	<b>1,738,947</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Sumbangan Donor dan NGO pada aspek sosial berkenaan dengan pembangunan/rehabilitasi fasilitas sosial, penanganan masalah anak, kaum perempuan, pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dan lain sebagainya. Realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.83 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial dan Budaya yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
	KPI belum terdefinisi		19,968	6,653	33%
	Perlengkapan & peralatan yang disediakan (nilai USD)	\$	3,667,465	2,966,513	81%
1	Pusat sosial yang dibentuk/dibangun	Unit	40	37	93%
2	Organisasi anak-anak atau panti asuhan	Anak	1,778	1,101	62%
3	Program Penerimaan Komunitas Psikososial Wanita dan Anak- anak	Org	386,354	377,464	98%
4	Jumlah anak yang menerima bantuan penuh (makanan, pendidikan, dan program psikososial)	Org	139,363	132,479	95%
5	Jumlah anak yang kembali ke keluarganya	Org	62	62	100%
6	Mendirikan grup diskusi komunitas awal	Kel	510,691	479,103	94%
7	Balai desa yang dibangun	Unit	546	335	61%
8	Pertunjukan kebudayaan yang diadakan	Keg	2,375	2,269	96%
9	Workshop/Pelatihan Kebudayaan	Keg	4,630	4,259	92%
10	Asrama baru/ yang dibangun	Unit	91	55	60%
11	Komunitas gabungan berdasar pusat pembangunan wanita	Kel	34	20	59%
12	Museum, perpustakaan, dan fasilitas kebudayaan lainnya yang dibangun/diperbaiki	Unit	116	114	98%
13	Jumlah orang yang dilayani	Org	449,103	443,253	99%
14	Jumlah orang yang dilatih (contoh kepemimpinan masyarakat, pendidikan perdamaian, penelitian sosial, metodologi penelitian sosial)	Org	34,315	6,143	18%
15	Proposal yang diimplementasikan untuk memperingati tsunami	Pkt	12	12	100%
16	Taman bacaan umum yang dibangun	Unit	13	8	62%
17	Fasilitas olahraga yang direhabilitasi	Unit	44	39	89%
18	Pemberdayaan staf untuk proyek	Org	8	8	100%
19	Laporan untuk tujuan studi dan survey	Pkt	113	37	33%
20	Bantuan hukum untuk wanita	Org	546	532	97%
21	Pelatihan Kapasitas Bermata Pencaharian untuk wanita	Org	8,519	5,173	61%
22	Pelatihan yang diterima oleh wanita	Org	2,705	2,642	98%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

## 2.2.4. BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

Aspek pemulihan (recovery) perekonomian masyarakat prop. NAD dan Nias kepulauan, yang langsung menyangkut dengan pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat, meliputi sektor primer (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan), sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan, koperasi dan UKM) serta aspek ketenagakerjaan. Tabel di bawah ini mengilustrasikan pembiayaan Non APBN di bidang pemulihan perekonomian.

**Tabel 2.84 Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Perekonomian**

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	80,204,779	38,410,705	42,178,973	27,339,159	3,379,052	3,638,972
Semua SubSector – Pembangunan Ekonomit	26,922,125	17,631,487	1,731,218	3,036,163	1,469,863	1,083,964

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Pengembangan Bisnis	97,251,768	47,330,743	42,096,074	19,789,007	2,436,571	6,444,984
Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan	670,256	649,539	398,800	20,172	831,248	43,600
Industri dan Konstruksi	5,117,226	2,176,340	3,339,051	4,541,014	1,347,789	30,134
Ketenagakerjaan	26,339,768	18,855,312	2,016,392	5,841,010	365,326	678,376
Urusan Ekonomi Lainnya	13,784,336	9,417,998	20,492,525	5,464,863	553,773	1,633,998
Urusan Perlindungan Lingkungan Lainnya	1,050,020	23,693	1,351,989	116,230	1,072,132	9,435
Urusan Kepariwisata dan Kebudayaan Lainnya	27,000	0	257,500	16,000		
Pelayanan Publikasi dan Penyiaran			506,198	0		
Urusan Riset dan Pengembangan Ekonomi	156,710	0	4,741	4,510	420,702	1,746
Riset dan Pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan	11,000	0			418,612	0
SubSektor yang harus ditegaskan – Pengembangan Ekonomi	9,465,863	1,668,643	6,821,676	1,720,108	375,000	403,649
<b>TOTAL</b>	<b>261,000,851</b>	<b>136,164,460</b>	<b>121,195,137</b>	<b>67,888,236</b>	<b>12,670,068</b>	<b>13,968,858</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

#### 2.2.4.1. PERTANIAN

##### 2.2.4.1.1 PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Sektor pertanian mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan (lahan kering dan sawah), perkebunan dan peternakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian, perkebunan dan Peternakan mencakup pembangunan kembali areal pertanian (sawah, ladang/kebun dan perkebunan) yang rusak sebagai akibat dari bencana tsunami. Kegiatan bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat di Provinsi NAD dan Nias, karena secara statistik sektor pertanian, perkebunan dan peternakan ini merupakan sektor terbesar yang menyumbang perekonomian wilayah NAS dan Nias Kepulauan, terutama bagi masyarakat pedesaan (*rural*) .

Realisasi yang telah dicapai oleh Donor dan NGO adalah sebesar 71% untuk kegiatan rehabilitasi areal pertanian, 92% untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kanal baru untuk irigasi, 62% untuk kegiatan bantuan bibit dan pupuk, 99% untuk bantuan peralatan pertanian, 100% untuk kegiatan rehabilitasi *area of cages* dan 14% bagi kegiatan bantuan penyediaan ternak. Secara terperinci, realisasi kegiatan ini disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.85 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Area tanah pertanian yang direhabilitasi (Hektar)		61,033	43,220	71%
2	Panjang kanal irigasi yang baru/direhabilitasi (meter)		112,534	103,658	92%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
3	Jumlah bibit dan penyubur yang disediakan (Kg)		3,882,089	2,410,371	62%
4	Mesin pertanian yang disediakan		9,548	9,467	99%
5	Area kandang yang dibangun kembali/direhabilitasi (Sq meters)		27,344	27,344	100%
6	Peternakan yang disediakan		7,454	1,032	14%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

### 2.2.4.1.2 KEHUTANAN

Hampir sama dengan Kegiatan Pertanian dan Peternakan, Kegiatan Kehutanan dan perkebunan bertujuan untuk merehabilitasi areal hutan dan kebun masyarakat yang rusak di Provinsi NAD dan Nias. Secara terperinci masing-masing realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 12% untuk kegiatan rehabilitasi dan perlindungan areal hutan dan 15% untuk kegiatan restorasi areal hutan mangrove. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.86 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kehutanan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Area kehutanan yang dilindungi/direhabilitasi (Hektar)		1,383,769	162,263	12%
2	Area hutan bakau yang direstorasi (Hektare)		2,156	325	15%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

### 2.2.4.2. PERIKANAN

Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang mengalami kerugian paling besar akibat bencana alam tsunami. Sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan dan kelautan ini mendapat perhatian yang utama dengan tujuan untuk membangun kembali dan dalam upaya mewujudkan normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pada golongan nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya.

Beberapa kegiatan perikanan dan kelautan yang menggunakan pendanaan donor/NGO realisasinya mencapai lebih dari 50% untuk semua kegiatan kecuali pembangunan dan rehabilitasi tempat pelelangan ikan (TPI) yang baru mencapai realisasi sebesar 44% pada tahun 2007. Secara terperinci, ilustrasinya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.87 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Area tambak yang diperbaiki	Hektar	9,181	7,883	86%
2	Fasilitas bangunan perahu yang dilengkapi	Unit	68	67	99%
3	Area Pantai yang direstorasi	Hektar	621	241	39%
4	Peralatan perikanan (FAD) yang disediakan	Unit	120	120	100%
5	Fasilitas pendaratan ikan (TPI) yang direhabilitasi	Unit	9	4	44%
6	Pendukung operasional koperasi perikanan Fisheries	Pkt	29	25	86%
7	Kapal ikan yang diganti/disediakan	Unit	4,048	2,748	68%
8	Kumpulan perlengkapan pemrosesan ikan yang disediakan	Pkt	597	318	53%
9	Kegiatan perikanan lain yang dibangun	Pkt	1,305	952	73%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

### 2.2.4.3. PENGEMBANGAN USAHA

#### 2.2.4.3.1 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Donor dan NGO memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi mengkonsentrasikan pada 10 item yang berkenaan dengan penyediaan/pembangunan kembali pabrik, pemberian pinjaman lunak, pengembangan usaha skala kecil dan menengah, pengembangan kemitraan, lembaga keuangan mikro, penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional. Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah sekitar 50% dari komitmen. Pencapaian yang tinggi (94%) adalah pada penyediaan fasilitas industri, sedangkan realisasi terendah (2%) adalah pada bantuan pinjaman skala menengah (pinjaman lebih dari 50 juta Rupiah). Adapun bantuan berupa support terhadap industri kecil dan bantuan lembaga keuangan mikro realisasinya cukup baik mencapai di atas 60%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.88 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Pabrik es yang disediakan/dibangun (unit)	Unit	12	6	50%
2	Pinjaman yang disediakan untuk usaha menengah (pinjaman > IDR 50 Million)	Pkt	3,272	71	2%
3	Pinjaman yang disediakan untuk usaha kecil (pinjaman < 5 million)	Pkt	17,923	8,873	50%
4	Pinjaman yang disediakan untuk usaha kecil (pinjaman IDR 5-50 million)	Pkt	4,501	2,801	62%
5	Usaha Kecil yang diperluas	Unit	67,827	36,441	54%
6	Kemitraan yang dibangun	Pkt	216	16	7%
7	Perluasan usaha	Unit	39,380	28,212	72%
8	Lembaga keuangan mikro yang dibangun/didukung	Unit	224	148	66%
9	Penyediaan fasilitas industri (unit)	Unit	112	105	94%
10	Pembangunan pasar tradisional	Unit	75	28	37%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

#### 2.2.4.3.2 TENAGA KERJA

Kegiatan Bidang Pelatihan dan Tenaga Kerja Donor dan NGO menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan pada masyarakat, pegawai pemerintah, workshop, pemantapan organisasi dan pemberian hibah. Kegiatan lain dengan pendanaan berasal dari donor/NGO adalah program implementasi tenaga kerja, penyediaan peralatan dan bantuan material, pelayanan masyarakat, laboratorium/pusat penelitian dan berupa kajian/survei. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel II.89 Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Peserta pelatihan kejuruan		50,089	29,478	59%
2	Program pembangunan, perluasan, pelatihan, informasi dan pengujian		11,992	2,192	18%
3	Pegawai negeri pemerintah yang berpartisipasi pada pelatihan		510	247	48%
4	Pelatihan Kejuruan yang diselenggarakan (seangkatan)		3,272	1,189	36%
5	Pekerja untuk program modal kerja		108,326	91,242	84%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
6	Lokakarya yang telah selesai		185	86	46%
7	Pendirian organisasi pengembangan masyarakat		253	237	94%
8	Hibah yang diterima wirausaha		9,200	5,138	56%
9	Program penyediaan lapangan kerja yang dilaksanakan (Jumlah penerima manfaat)		41,389	35,559	86%
10	Perlengkapan dan peralatan yang disediakan (nilai USD)		5,385,906,177	1,619,448,038	30%
11	Jumlah orang yang dilayani		133,429	99,911	75%
12	Pusat penelitian/laboratorium yang disediakan		2	2	100%
13	Laporan untuk tujuan studi dan survey		147	110	75%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan : \*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

## 2.2.5. BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

**Tabel 2.90 Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum**

SubSector/Program	2005		2006		2007	
	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)	Committed (USD)	Disbursed (USD)
Semua SubSector – Pengembangan Aparatur	25,492,944	9,865,549	14,298,017	15,508,737	0	7,940
Pengembangan Aparatur	37,359,799	19,767,042	1,884,297		0	8,056,726
Pengembangan dan Penelitian Dasar Ilmu dan Teknologi	260,136	166,318	752,067	110,875	0	2,404
Pengembangan Masyarakat	44,380,908	24,484,978	7,029,456	5,509,122	1,870,132	127,763
Penanganan Bencana	11,461,552	9,728,387	15,446,032	1,155,899	6,100	57,144
Bantuan Luar Negeri	937,289	0	1,984,297	100,000		
Pelayanan Umum	5,080,922	3,700,187	6,784,805	2,947,169	1,500,000	711,219
Yudikasi	4,334,279		50,000	1,639,083		
Urusan Hukum	15,428,884	15,266,884	5,474,437	204,500		
Urusan Pertahanan Lainnya	300,000	0				
Pelayanan Publik Lainnya oleh Pemerintah	5,517,479	1,744,190	9,481,069	4,733,643	10,733	1,093,845
Urusan Hukum Lainnya, Keinginan dan Keamanan Masyarakat	20,733,891	20,733,891	498,509	303,899	0	44,957
Pelayanan Polisi	20,000	0				
Pelayanan Riset dan Pengembangan Pemerintah Publik	3,009,795	161,328	16,166,816	1,446,062		
Pengembangan Regional	2,146,572	306,231	2,241,797	256,008	3,252,109	37,876
SubSector untuk ditegaskan – Pengembangan Aparatur	4,597,935	1,404,097	323,510	1,597,342		
<b>TOTAL</b>	<b>181,062,385</b>	<b>107,329,082</b>	<b>82,415,109</b>	<b>35,512,339</b>	<b>6,639,074</b>	<b>10,139,874</b>

Sumber: Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007

Bidang Kelembagaan yang ditangani melalui sumbangan NGO dan Donor terutama yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan bahan dan peralatan, pengembangan kapasitas, pelatihan, penyediaan tenaga ahli dan fasilitator, pembangunan dan perbaikan gedung pemerintahan, dan pelayanan pada masyarakat. Secara terperinci,realisasi kegiatan ini disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.9I Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Perlengkapan & Peralatan yang disediakan (nilai dalam USD)	\$	1,288,098,850	1,274,200,963	99%
2	KPI yang harus didefinisikan		1	1	100%
3	Penyesuaian/studi/penelitian pengembangan institusi	Pkt	28,392	28,381	100%
4	Pengembangan Kapasitas (seminar/workshop/training/mentoring/konsultasi/pelatihan&pendidikan) berperan sebagai perwakilan	Keg.	2,383	458	19%
5	Pengembangan Kapasitas (seminar/workshop/training/mentoring/konsultasi/pelatihan&pendidikan) berperan sebagai pemerintah	Keg.	314	287	91%
6	Kursus / Pelatihan Pegawai negeri yang disesuaikan dan diperkuat	Org	5,955	1,937	33%
7	Pegawai Negeri yang telah menerima pelatihan	Org	8,999	6,077	68%
8	Panduan pemenuhan yang dikembangkan		473,148	472,463	100%
9	Tenaga Ahli yang disediakan	Org	30	6	20%
10	Fasilitator yang direkrut untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Org	4,548	3,843	84%
11	Gedung Pemerintah yang dibangun/diperbaiki	Unit	209	8	4%
12	Pengujian Hukum yang diuji berdasar perjanjian pembentukan kembali hukum	Pkt	5	2	40%
13	Penyusunan jadwal monitoring untuk penekanan tambahan yang relevan dengan standar dan panduan	Keg.	1,463	384	26%
14	Pegawai pemerintah yang menerima pengembangan kapasitas	Org	603	529	88%
15	Organisasi (CSO/CBO/NGO) yang menerima pengembangan kapasitas	Kel/	1,582	270	17%
16	Masyarakat yang dilayani	Org	726,087	683,904	94%
17	Sosialisasi/diseminasi/publikasi yang diterbitkan	Keg.	32	20	63%

Sumber : Data RANdatabase, Juni 2007.

Catatan :\*) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.

## 2.3. KEMENTERIAN LEMBAGA (K/L)

### 2.3.1. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian berikut ini akan menguraikan bidang pemulihan sosial budaya oleh pembiayaan yang bersumber dari Kementerian/lembaga. Sumber pembiayaan Kementerian/lembaga berasal dari APBN, pinjaman luar negeri dan bantuan donor. Kementerian/lembaga tersebut meliputi Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Biro Pusat Statistik, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Secara umum, pada pemulihan sosial budaya lebih diprioritaskan pada aspek fisik, peningkatan skill Sumber Daya Manusia, serta pengembangan sistem, terutama yang terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat penting dan urgen dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah bencana baik di NAD maupun di Kepulauan Nias.

Kegiatan Departemen Pendidikan Nasional meliputi pendidikan sekolah dan luar sekolah sejak usia dini, pelatihan, pendirian sekolah dan bantuan perlengkapan sekolah, pemberian beasiswa, pembangunan pusat informasi dan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN sebesar Rp. 70 Milyar.

Departemen kesehatan melakukan kegiatan berupa pemulihan sarana kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan dan bantuan tenaga kesehatan. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN 2005 sebesar Rp. 35.840.293.juta, PHLN 2005 sebesar Rp. 62.418.549 juta, dana Bencana 62 sebesar Rp. 95 juta dan Hibah JICS sebesar Rp. 95 juta

Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahap rehabilitasi melakukan kegiatan berupa pengiriman instrument dan tenaga, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta rekrutmen pegawai baru. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi mengadakan renovasi laboratorium, pengadaan alat, revitalisasi kegiatan pengawasan dan rekrutmen pegawai baru. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN 2005 sebesar Rp. 5 milyar dan APBN TA 2006 sebesar Rp. 8 Miliar)

Departemen sosial pada tahap rehabilitasi melakukan penyiapan barak dan penyediaan tenda darurat, program peningkatan skill sumberdaya manusia, antara lain berupa pelatihan siaga bencana, dan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kapal pada nelayan di Provinsi NAD. Sedangkan pada Kabupaten Nias program Departemen Sosial adalah peningkatan skill sumberdaya manusia berupa pelatihan siaga bencana dan bantuan rehabilitasi berupa bantuan bahan bangunan rumah. Sumber pembiayaan berasal dari bantuan donor yang langsung kepada masyarakat.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan kegiatan perlindungan yang berkenaan dengan perlindungan perempuan anak. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN.

Biro Pusat Statistik melaksanakan sensus dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari pendanaan UNFPA, CIDA, AusAID, NZAID sebagai mitra donor sebesar Rp.20.422.634.000.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan kegiatan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat serta melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Sumber pendanaan berasal dari APBN sebesar Rp.29.486 Miliar.

Secara terperinci, dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Pemulihan Sosial Budaya oleh Kementerian/Lembaga disajikan dalam Tabel Berikut ini.

**Tabel 2.92 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga Bidang Pemulihan Sosial Budaya**

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
I	Departemen Pendidikan Nasional (Sumber dana dari APBN sebesar Rp. 70 Milyar)	<p>a. Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>b. Pendidikan keterampilan hidup (pendidikan Luar Sekolah)</p> <p>c. Pendirian sekolah tenda darurat</p> <p>d. Pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan sekolah yang berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ Peralatan sekolah</li> <li>§ Pakaian dan makanan</li> <li>§ Peralatan Olahraga</li> </ul> <p>e. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, melaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ Pelatihan di NAD peserta 5.010 orang</li> <li>§ Pelatihan di Nias dengan peserta 290 orang</li> <li>§ Pelatihan di Kab. Bireuen dengan peserta 300 orang</li> <li>§ Pendampingan oleh BPPLSP peserta 50 orang</li> <li>§ Pengumpulan dan analisa data di 23 lokasi</li> </ul> <p>f. Pemberian beasiswa untuk siswa, guru, mahasiswa, dan Dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ Beasiswa untuk 25.000 siswa SMP dan SMA</li> <li>§ Magang 1.786 siswa SMK Aceh ke Jawa selama 3 bulan</li> <li>§ Program beasiswa D3 dan D4 untuk 200 mahasiswa</li> <li>§ Pendidikan calon guru kejuruan tingkat D3 di Unsyiah</li> <li>§ Pelatihan keterampilan bagi pejuang perdamaian (Eks-GAM) untuk 200 orang</li> <li>§ Bantuan beasiswa BKM untuk 162.743 siswa SD/MI, SMP/MTS, dan SMA MA/SMK.</li> <li>§ Beasiswa mahasiswa Unsyiah</li> <li>§ Beasiswa Universitas Iskandar Muda</li> </ul> <p>g. Pembangunan sistem Informasi Manajemen Pembangunan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ Pemetaan pendidikan sebelum dan sesudah bencana di NAD dan Nias</li> <li>§ Pembentukan Jaringan Team EMIS di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh NAD dan Nias</li> <li>§ Membangun jaringan komunikasi dan informasi Depdiknas dengan Team EMIS Kabupaten/Kota untuk penggalangan data dan informasi pendidikan di NAD dan Nias</li> <li>§ Membangun website <a href="http://www.eduforaceh.org">www.eduforaceh.org</a> bekerjasama dengan Unicef, sebagai media komunikasi dan informasi pendidikan, yang telah dikunjungi oleh lebih dari 1.000 orang per hari dari berbagai penjuru dunia diantaranya US Commercial, Indonesia, Germany, US Educational, Malaysia, Switzerland, United Kingdom, France, Singapore, Sweden, Australia, Netherlands, Mexico, Croatia (Hrvatska), Poland, Seychelles, Thailand, Denmark, Portugal.</li> </ul> <p>h. Rehabilitasi bangunan sekolah yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ SD/MIN 10 unit di NAD</li> <li>§ SMP/MTS 7 unit di NAD</li> </ul>

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
2	Departemen Kesehatan (Sumber dana dari : 1. APBN 2005 sebesar Rp. 35.840.293.juta 2. PHLN 2005 sebesar Rp. 62.418.549.juta 3. Dana Bencana 62 sebesar Rp. 95.juta 4. Hibah JICS sebesar Rp. 95 juta	a. Pemulihan Sarana Kesehatan di NAD 1.Merehabilitasi 147 unit sarana kesehatan yang rusak dari total 1186 yang meliputi: § 8 unit gedung administrasi dari total 25 unit § 7 unit Rumah Sakit dari total 17 unit § 44 unit Puskesmas dari total 274 unit § 78 unit Puskesmas Pembantu dari total 830 unit 6 unit GFK dari total 16 unit § 4 unit pendidikan tenaga Kesehatan dari total 24 unit  2. Pembangunan baru sarana kesehatan yang meliputi :  § 1 unit rumah sakit § 18 unit Puskesmas § 17 unit puskesmas pembantu § 3 unit GFK  2. Pemenuhan Tenaga Kesehatan  § Penempatan secara definitif per Rumah sakit di Provinsi NAD § Rekrutmen terpadu melalui Poskeslit sebanyak 768 tenaga kesehatan dari total 818 tenaga kesehatan yang hilang akibat Tsunami § Penugasan khusus Dokter Spesialis untuk memperkuat pelayanan rujukan di Nias § Penugasan Dokter, Dokter Gigi dan tenaga kesehatan lain untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Barak Pengungsi § Insentif khusus/kesehatan gabungan
3	Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) (Sumber dana dari : 1.APBN TA 2005 sebesar Rp 5 milyar 2.APBN TA 2006 sebesar Rp 8 Miliar)	a. Tahap Rehabilitasi § Pembinaan dan pendampingan terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran serta kepegawaian § Pengiriman instrumen/alat lab (Urgent Needed) § Rekrutmen pegawai baru § Pengiriman tenaga untuk mengikuti pelatihan –pelatihan teknis § Pengadaan kendaraan operasional § Rehabilitasi laboratorium § Pengadaan sarana prasarana pendukung kerja  b. Tahap Rekonstruksi  § Renovasi laboratorium § Pengadaan alat laboratorium secara bertahap § Revitalisasi program/kegiatan pengawasan § Rekrutmen pegawai baru

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
4	Departemen Sosial (Sumber dana berasal dari Bantuan langsung lembaga donor/NGO kepada masyarakat)	<p>Tahap Rehabilitasi</p> <p>A. Prov NAD</p> <p>1. Pemukiman Di setiap titik pengungsi disediakan tenda darurat yang sifatnya sementara sambil disiapkan barak penampungan sementara yang lebih kondusif. Pembangunan barak-barak yang dikerjakan bersama-sama dengan pengungsi yang akan ditempati diberi upah sehingga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>2. Peningkatan SDM Peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana alam melalui pelatihan taruna siaga bencana (Tagana) dengan peserta karang taruna dari 21 Kab/Kota sebanyak 100 orang</p> <p>3. Pemberdayaan Memberikan bantuan untuk mendorong perekonomian nelayan di 10 Kabupaten pantai Barat dan Timur. Bantuan yang diberikan berupa Kapal/Boat penangkap ikan ukuran besar dan sedang sebanyak 1.320 unit kepada 4.350 KK atau sekitar 20.000 Jiwa)</p> <p>B. Provinsi Sumatera Utara</p> <p>a. Bantuan Rehabilitasi Pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah sebanyak 5.171 KK dengan indeks sebesar Rp. 5.000.000/KK dan disesuaikan dengan kebutuhan material yang diperlukan</p> <p>b. Peningkatan SDM Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan taruna Siaga bencana (Tagana) di Sumatera Utara peserta dari beberapa kabupaten termasuk Nias sebanyak 100 orang.</p>
5	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Sumber APBN)	<p>Tahap Rehabilitasi</p> <p>§ Perlindungan anak</p> <p>§ Peningkatan ketahanan mental</p> <p>§ Pembentukan gugus tugas penanggulangan anak korban bencana</p> <p>§ Menyusun KIE bagi anak korban bencana</p> <p>§ Menyusun strategi jangka panjang</p> <p>§ Revitalisasi kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</p> <p>Tahap Rekonstruksi</p> <p>§ Perlindungan anak</p> <p>§ Pemberdayaan perempuan</p> <p>§ Program dan kegiatan pemulihan dan peningkatan KPA dan perempuan NAD-Nias</p> <p>§ Program penguatan kelembagaan PUG dan anak</p> <p>§ Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dari perlindungan perempuan</p>
6	Badan Pusat Statistik (Sumber dana berasal dari UNFPA, CIDA, AusAID, Nzaid sebagai mitra donor) sebesar Rp.20.422.634.000	<p>Sensus penduduk NAD di NAS</p> <p>Sensus penduduk Nias di Nias</p>
7	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (sumber dana berasal dari APBN sebesar Rp.29.486 miliar)	<p>§ Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat</p> <p>§ Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana</p>

Sumber : Paparan Kementerian lembaga pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 21 Juni 2006 di Jakarta

### 2.3.1. BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

Pelaksanaan kegiatan bidang pemulihan ekonomi oleh Kementerian/lembaga meliputi tujuh Kementerian/lembaga yakni Departemen Kelautan dan perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Perum Bulog dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan beberapa program/kegiatan yang berkenaan dengan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan, pengolahan perikanan skala kecil, pemberian bantuan alat tangkap dan budidaya, rehabilitasi tambak dan prasarana perikanan lainnya (seperti PPI/TPI), perbaikan fasilitas pesisir yang rusak serta perencanaan kawasan pemukiman masyarakat pesisir. Harapannya adalah dapat meningkatkan denyut ekonomi dan usaha masyarakat secara luas. Sumber pendanaan berasal dari dana donor/NGO seperti JICs, GTZ dan ADB berupa dana hibah dan loan, APBN dengan total dana sejumlah Rp. 271.608.000.000,-.

Program/kegiatan Departemen Pertanian berupa beberapa kegiatan pemberian bantuan sarana produksi seperti bibit, benih, pupuk dan peralatan serta perlengkapan pertanian. Juga dilakukan survei potensi pengembangan budidaya, pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, bantuan modal ekonomi usaha kecil, rehabilitasi areal pertanian yang rusak, pencetakan sawah baru dan koordinasi. Sumber dana Departemen Pertanian berasal dari APBN, hibah ADB, dan bantuan dana dari donor/NGO seperti ADB, FAO dengan total dana sejumlah Rp. 64.480.000.000,-.

Departemen Koperasi dan UKM memiliki kegiatan berupa bantuan penguatan modal usaha kepada koperasi/UKM, membantu jaringan pemasaran, pengembangan KSP/USP serta pelatihan dan bantuan komputer. Total dana yang dikelola oleh Departemen UKM dan Koperasi adalah sejumlah Rp. 43.923.000.000,-.

Departemen Perdagangan utamanya melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasar tradisional dan pembangunan toko/kios sebagai tempat usaha masyarakat. Kegiatan ini menggunakan pendanaan bersumber dari APBN 2005 sejumlah Rp. 39.220.000.000.000,-.

Departemen Perindustrian menitikberatkan kegiatan pada peningkatan kemampuan teknologi industri yang berkenaan dengan penyediaan peralatan operasional dan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat melalui balai latihan kerja. Anggaran yang dipergunakan sebesar Rp. 2.299.504.000.000,-.

PERUM BULOG melakukan kegiatan berupa penyediaan bantuan bahan pangan/bahan pokok berupa penyaluran beras bagi penduduk yang terkena dampak tsunami dan gempa. Anggaran yang dipergunakan sejumlah Rp. 27.485.000.000,-.

Departemen Tenaga kerja melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi BLK, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Sumber pendanaan Departemen Tenaga Kerja berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 30.739.900.000.000,-.

Secara terperinci, dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Pemulihan Ekonomi oleh Kementerian/Lembaga disajikan dalam Tabel Berikut ini.

**Tabel 2.93 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian/Lembaga Bidang Pemulihan Ekonomi**

NO	KEMENTERIAN / LEMABGA	PROGRAM	KEGIATAN
I	Departemen Kelautan dan Perikanan (Sumber dana dari donor/ NGO seperti JICs, GTZ dan ADB berupa dana hibah dan loan, APBN dengan total dana sejumlah Rp. 271.608.000.000,-)	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengolahan ikan skala kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi sarana kecil pengolahan ikan</li> <li>• Pengadaan mobile mini ice plant</li> <li>• Pembangunan tempat pengepakan ikan</li> <li>• Peningkatan mutu, nilai tambah hasil perikanan</li> <li>• Pengadaan sarana pengolahan ikan</li> <li>• Pembangunan sarana pengeringan ikan 5 unit</li> </ul>
		Rehabilitasi & Bantuan Alat Penangkap ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan kapal dan peralatan penangkapan ikan</li> <li>• Purse Seine, Gill Net, Beach Seine, Hook Line (trolling)</li> <li>• Pengadaan Lampu</li> </ul>
		Rehabilitasi & Bantuan Pengadaan Kapal Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 6.000 unit</li> <li>• Pengadaan kapal 3-5GT 138 unit</li> <li>• Pembangunan sarana pengisian bahan bakar nelayan (SPBN)</li> </ul>
		Rehabilitasi tambak & Sarana Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan perikanan dan pemberian bantuan agroinput</li> <li>• Penanaman mangrove: pengadaan benih rumput laut, modal usaha tambak, mesin dan peralatan, pembangunan infrastruktur tambak, tempat pengumpul</li> <li>• Sarana budidaya tambak/pompa</li> <li>• Genset untuk pembenihan</li> <li>• Root blower untuk pembenihan</li> <li>• Bak induk fiber</li> <li>• Pembangunan sarana prasarana tambak</li> <li>• Bantuan agroinput tambak udang</li> <li>• Rehabilitasi tambak dan salurannya seluas 9.258 hektar</li> <li>• Rehabilitasi hatchery</li> </ul>
		Rehabilitasi Tambak & Bantuan Agroinput	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan bibit rumput laut</li> <li>• Pembangunan budidaya tambak</li> </ul>
		Rehabilitasi dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi ekosistem pantai</li> </ul>
		Rehabilitasi Prasarana PPP/PPI sebanyak 6 unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan PPI Peudada</li> <li>• Rehabilitasi PPP Lampulo, Lambada, Calang</li> <li>• Rehabilitasi PPI Kuala Peukan Baro, Krueng Raya</li> <li>• Rehabilitasi dermaga perikanan Kab Simeulue dan Nias 2 unit</li> </ul>

NO	KEMENTERIAN / LEMABGA	PROGRAM	KEGIATAN
		Perencanaan Tata Ruang Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun rencana detail tata ruang kawasan pemukiman tingkat desa</li> <li>• Masterplan perikanan tangkap</li> </ul>
		Detail Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi tambak dan salurannya</li> <li>• Pembangunan kembali budidaya laut</li> </ul>
		Rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas rusak RBADC di Neuheun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan generator, fasilitas air bersih, peralatan laboratorium, excavator, fasilitas pendukung</li> </ul>
2	Departemen Pertanian (Sumber dana dari hibah ADB, dana APBN, juga bantuan dana dari donor/NGO seperti ADB, FAO dengan total dana sejumlah Rp. 64.480.000.000,-)	Pengadaan Peralatan Karantina Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan alat dan bahan laboratorium</li> <li>• Identifikasi dan diagnosis media pembawa HPI</li> </ul>
		Alokasi DAK Non-DR, Sektor Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan kebutuhan setempat bagi korban bencana tsunami</li> </ul>
		Survey Kelautan dan Kedirgantaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey potensi pengembangan budidaya rumput laut</li> </ul>
		Identifikasi Sumber Daya Ikan Pelagis dan Demersal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji lokasi sebaran potensi sumber daya perikanan pelagis di perairan Barat NAD</li> </ul>
		Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana produksi pupuk dan benih, pengadaan obat-obatan dan alat pertanian</li> <li>• Pengadaan sarana traktor, mesin, hand tractor bajak, pompa air, mesin pembuat pupuk, pencetakan sawah, dan pengadaan perlengkapan kantor dan kendaraan tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>• Rehabilitasi kakao, dan penanaman kelapa, rehabilitasi kelapa sawit, perlindungan tanaman perkebunan. Rehabilitasi bangunan/kantor lingkup perkebunan, pengadaan kendaraan</li> </ul>

NO	KEMENTERIAN / LEMABGA	PROGRAM	KEGIATAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan dari FAO melalui proyek OSRO/INS/501/BEL Emergency Provision of Essential Inputs for The Rapid Re-start of Small-scale Food Crops Production and Fisheries Activities with Tsunami Affected Communities “ berupa hand traktor sebanyak 695 unit, thresher sebanyak 100 unit, 245 ton pupuk dan pelatihan penggunaan hand tractor bagi 147 petani (Besarnya bantuan US\$ 1,9 juta).</li> <li>Bantuan Pemerintah Jepang melalui FAO OSRO/INS/503/JPN Japan/Fao Joint Emergency Assistance to Tsunami-Affected Rural Communities in Indonesia “, berupa benih padi dan pupuk untuk 8.700 petani (Besarnya bantuan US\$ 584,6 ribu).</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Uni Eropa melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/509/EC “Emergency Assistance for the restoration of Food Security and Sustainable Livelihood Among Tsunami Affected “, berupa benih padi, tanaman palawija, tanaman tahunan, pupuk, alat dan mesin pertanian untuk 12.500 petani. Besarnya bantuan EUROS 5,5 juta atau US\$ 7,1 juta.</li> <li>Bantuan Pemerintah Belgia melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/513/BEL “ Support to Farmers in Tsunami Affected Areas Through The Provision of Agricultural and Livestock Inputs”, berupa input pertanian; pengadaan ternak. Besarnya bantuan US\$ 1,2 juta.</li> <li>Rehabilitasi areal tanaman kelapa 1.845 ha, tanaman pala 726 ha, penyediaan bibit kelapa sawit untuk 2.000 ha, bibit kelapa untuk 1.500 ha.</li> <li>Bantuan dari lembaga penelitian Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC), berupa bantuan benih sayuran 12.500 paket, 40 ton pupuk dan 12.500 mata cangkul.</li> <li>Bantuan dari Center for International Potato (CIP), berupa bibit ubi jalar sebanyak 48.000 cutting untuk disemaikan di lokasi percobaan Universitas Syah Kuala dan Kebun percobaan PLPP Saree, NAD</li> <li>Pencetakan sawah dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Pemerintah Australia/AIPRD melalui kerjasama dengan lembaga penelitian ACIAR telah melakukan pelatihan dalam bidang analisis tanah dan pengelolaan lahan dan tanaman, menginisiasi proyek dalam management kesuburan lahan untuk penanaman kembali di wilayah yang terkena dampak tsunami.</li> <li>ACIAR melalui proyek nomor LWR/2005/118 akan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Tanah dan Agroklimat dan BPTP propinsi NAD serta Dinas Pertanian dan NGO.</li> <li>Bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif (Bantuan Langsung masyarakat/BLM) yang mendukung peningkatan ketahanan pangan bersumber dari dana APBN Dep. Pertanian.</li> </ul>

NO	KEMENTERIAN / LEMABGA	PROGRAM	KEGIATAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan kelompok mandiri (Self-Help Group) sebanyak 410 SHG serta bantuan modal berupa grant untuk usaha ekonomi produktif. Dananya bersumber dari realokasi loan ADB dan IFAD yang terdapat pada proyek P4K atau Rural Income Generating (RIG) 1583-INO/AD dan 458-ID/IFAD (besarnya dana dari ADB US\$ 2,95 juta (ADB) dan IFAD US\$ 2,4 juta)</li> <li>Bantuan alat pertanian dari dana hibah ADB melalui ETESP 0002-INO</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan alat pengolahan hasil perkebunan dan peralatan perkebunan bersumber dari dana realokasi loan ADB pada proyek IPM-SECP 1469-INO.</li> <li>Pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi petugas pertanian dan pemberdayaan petani serta operasionalisasi sekolah tinggi penyuluhan pertanian dari dana APBN Departemen Pertanian.</li> <li>Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO</li> <li>Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan, Monev pembangunan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO</li> <li>Pengintegrasian teknis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO</li> </ul>
3	Departemen UKM dan Koperasi (total dana sejumlah Rp. 43.923.000.000,-)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Perkuatan Modal Usaha kepada Koperasi/ UKM di 21 Kab/Kota</li> <li>Bantuan Perkuatan Modal Usaha Jaringan Pemasaran pada Koperasi Pasar di 11 Kab/Kota</li> <li>Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Sarana Produksi di 14 Kab/Kota</li> <li>Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan UKM di sentra-sentra di 12 Kab/ Kota</li> <li>Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan KSP/USP-Kop di 21 Kab/Kota</li> <li>Pengadaan Komputer 25 unit dan Pelatihan KUKM di 22 Kab/Kota</li> </ul>
4	Departemen Perdagangan (Sumber dana dari APBN 2005 sejumlah Rp. 39.220.000.000.000)	Masa Tanggap Darurat : Tenda Pasar Darurat Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang)</li> <li>Pembangunan kembali pasar tradisional permanen</li> <li>Pembangunan Pasar Grosir Induk di Lambaro</li> <li>Kemetrologian dan Koordinasi Posko di NAD</li> </ul>

NO	KEMENTERIAN / LEMABGA	PROGRAM	KEGIATAN
5	Departemen Perindustrian (anggaran sebesar Rp. 2.299.504.000.000,-)	Peningkatan kemampuan teknologi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawatan gedung kantor (4 paket)</li> <li>• Pengadaan alat laboratorium (2 paket)</li> <li>• Pengadaan kantor perlengkapan/sarana (8 pkt)</li> <li>• Pengadaan alat pendukung operasional (4 paket)</li> </ul>
		Penyelenggaraan pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan alat laboratorium</li> <li>• Pengadaan alat bengkel/keterampilan</li> <li>• Penyelenggaraan laboratorium (2 paket)</li> <li>• Rehabilitasi bangunan gedung</li> <li>• Pemeliharaan peralatan dan mesin</li> <li>• Pengadaan Bahan kimia</li> </ul>
6	PERUM BULOG (anggaran sebesar Rp. 27.485.000.000)	Penyediaan Bantuan Pangan Pokok (Beras)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran bantuan beras bagi penduduk yang terkena dampak Gempa dan Tsunami di NAD dan Nias sebanyak 7.866,35</li> </ul>
7	Departemen Tenaga kerja (sumber dana berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 30.739.900.000.000,-)	Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sebanyak 13 mobile training unit (MTU)</li> <li>• Pengadaan peralatan pelatihan di BLK Lhok Seumawe, Meulaboh, Langsa, Sabang dan Banda Aceh</li> <li>• Rehabilitasi &amp; Rekonstruksi BLK Banda Aceh</li> </ul>
		Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui TKMT 40 org</li> <li>• Wirausaha Baru 30 org &amp; PK/SPK 50 rg.</li> <li>• Penempatan TK Aksus sebanyak 20 org</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket</li> <li>• Terapan teknologi tepat guna 170 orang</li> <li>• Pemberdayaan PKSPK 137 orang</li> <li>• Pendayagunaan TKPMP 20 orang</li> <li>• TKS 150 orang</li> <li>• Pengadaan alat pengolah data 1 Paket</li> <li>• Promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian 20 orang</li> <li>• Promosi potensi sumber daya daerah 20 orang</li> </ul> <p>NIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan WUB 10 orang</li> <li>• TTG/TPK 15 orang</li> <li>• Pemberdayaan AKAD/AKL 200 orang</li> <li>• Pemberdayaan PKSPK 87 orang</li> <li>• Informasi pasar kerja 1 paket</li> <li>• Pengadaan peralatan mesin 1 paket</li> </ul>

NO	KEMENTERIAN / LEMABGA	PROGRAM	KEGIATAN
		Peningkatan kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan keterampilan/institutional dengan berbagai kejuruan 384 orang.</li> <li>• Pelatihan produktivitas 300 orang</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket</li> <li>• Peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia 388 orang</li> <li>• Penyebaran Informasi tentang regulasi dibidang pelatihan dan produktivitas 8 paket</li> <li>• Pelaksanaan rapat koordinasi daerah dibidang pelatihan dan produktivitas 1 paket</li> <li>• Pengembangan kelembagaan lembaga latihan swasta secara kesisteman maupun SDM 5 paket (100 orang)</li> <li>• Penyediaan data pelatihan dan produktivitas 1 paket</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana kediklatan 1 paket</li> </ul>
		Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan &amp; Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan</li> <li>• Komunikasi, Informasi &amp; Edukasi (KIE) PHI meliputi sosialisasi HI 40 org, Penyuluhan pada 12 perusahaan, diklat/seminar 40 org dan 7 kab.</li> <li>• Pengembangan Lembaga HI meliputi SP/SB 20 lbg, Tripartit 50 lbg.</li> <li>• Pemberdayaan LK Tripartit 54 orang</li> <li>• Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 40 prsh.</li> <li>• UMP 100 buku</li> <li>• Pencegahan dan penyelesaian Kasus PHI/PHK melalui sosialisasi 90 org, deteksi dini 10 prsh &amp; pegawai pengantar 80 org.</li> <li>• Penyelesaian Kasus oleh P4D melalui Bimtek 40 kasus, dan LKS 40 kasus.</li> <li>• Penyelesaian kasus PHI/PHK 200 Kasus</li> <li>• Sos. UU No.2 Tahun 2004 1 Paket</li> <li>• Pengadaan alat pengolah data 1 unit</li> <li>• Pembinaan dan pengaturan Satker 60 orang</li> <li>• Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan</li> <li>• Pengawasan dan pemeriksaan norma kerja 3 prsh dan jamsostek 12 perusahaan.</li> <li>• Sosialisasi pengawasan ketenagakerjaan 20 org</li> <li>• Pengembangan lembaga pengawasan dan perlindungan tenaga kerja pada 100 perusahaan</li> </ul>

Sumber : Laporan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias

## 2.4. PEMERINTAH DAERAH

Tabel-tabel di bawah ini masing-masing menggambarkan penjabaran APBD TA 2005 dan 2006 yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami.

**Tabel 2.94 Penjabaran APBD TA. 2005 yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami**

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program>Nama Kegiatan (2005)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Umum Pemerintahan	Biro Kepegawaian	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	15.886.500.000	Pemberian bantuan kepada korban gempa bumi dan gelombang tsunami
	Administrasi Umum Pemerintahan	Biro Kepegawaian	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	1.844.220.000	Penyusunan Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami
	Administrasi Umum Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	173.000.000	Penyusunan naskah buku peristiwa tsunami
2	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	1.963.894.400	Bantuan sarana produksi padi bagi korban bencana alam tsunami
	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	141.108.000	Bantuan sarana produksi hortikultura bagi korban bencana alam tsunami
	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	1.360.000.000	Bantuan alat mesin pertanian bagi korban bencana alam tsunami
	Bidang Pertanian Dan Peternakan	Dinas Peternakan	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Usaha Pertanian	515.000.000	Bantuan ternak untuk masyarakat korban Bencana Alam (Gempa Bumi dan Tsunami)
3	Bidang Perikanan dan Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan	2.000.000.000	Optimalisasi tambak rakyat pasca tsunami
4	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Perkebunan	Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur	50.000.000	Pengadaan sarana perkantoran akibat tsunami
5	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Koordinasi dan Sinkronisasi pembangunan pendidikan-subdin bina program	2.500.000.000	Bantuan untuk kegiatan pasca gempa dan tsunami, organisasi kependidikan dan yayasan
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Pembangunan pendidikan Subdin Tendik	3.000.000.000	Bantuan santunan untuk tenaga kependidikan korban gempa bumi dan gelombang tsunami
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Sinkronisasi pembangunan dan pendidikan	136.504.000	Melaksanakan seminar pendidikan rekonstruksi pendidikan provinsi NAD pasca tsunami
6.	Bidang Sosial	Dinas Sosial	Penanggulangan korban bencana	13.156.813.000	Bantuan sosial korban bencana

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program>Nama Kegiatan (2005)	Jumlah (Rp)	Keterangan
7.	Bidang Permukiman	Dinas Perkotaan dan Permukiman	Pengembangan Perumahan	202.461.800	Penunangan kegiatan pengadaan tanah untuk pertapakan rumah korban gempa dan gelombang tsunami
	Bidang Permukiman	Dinas Perkotaan dan Permukiman	Pengembangan Perumahan	29.000.000.000	Pengadaan tanah untuk pertapakan rumah korban gempa dan gelombang tsunami
8.	Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Prasarana Wilayah	Pengulangan bencana alam	688.356.600	Penanggulan darurat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam
9.	Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	Transportasi	175.000.000	Inventarisasi kerusakan sarana dan prasarana perhubungan akibat gempa dan tsunami
	Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peningkatan kelembagaan aparatur	455.754.000	Kegiatan tanggap darurat & rehabilitasi bencana alam tsunami
10.	Bidang Lingkungan Hidup	Badan pengendalian dampak lingkungan daerah/ Bapedalda	Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam	48.840.540	Evaluasi pencemaran dan kerusakan lingkungan (tanah dan lahan) pasca tsunami.
11.	Bidang Pertanahan	Badan Pertanahan Nasional	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	2.880.190.000	Penerbitan sertifikat tanah pasca tsunami

**Tabel 2.95 Penjabaran APBD TA. 2006 yang berkaitan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov.NAD-Nias Pasca Gempa Bumi dan Tsunami**

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program>Nama Kegiatan (2006)	Jumlah (Rp)	Keterangan
I	Administrasi Umum Pemerintahan	Biro Pembangunan dan Tata Ruang	Koordinasi, Inventarisasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sarana/Prasarana Serta Infrastruktur Lainnya	103.635.200	Digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas
		Biro Kepegawaian	Pemberian Bantuan kepada Keluarga korban Dan Gelombang Tsunami (Luncuran 2005)	2.005.800.000	Digunakan untuk belanja barang dan jasa
		Badan Kesbang dan Linmas Prov. NAD	Koordinasi Penanggulangan Bencana	74.673.400	Digunakan untuk Belanja Pegawai/ Personalia, Barang dan jasa, Perjalanan dinas dan Pemeliharaan
		Badan Kesbang dan Linmas Prov. NAD	Penyuluhan Bimbingan Kewaspadaan Bencana	304.135.000	Digunakan untuk Belanja Pegawai/ Personalia, Barang dan jasa dan Perjalanan dinas

No	Bidang	Perangkat Daerah	Program>Nama Kegiatan (2006)	Jumlah (Rp)	Keterangan
2	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Prov. NAD + UPTD	Rehabilitasi Sekolah Terbakar Dan Bencana Alam TK/RA, SD/MI, SLTP/MTS Dan SMU/MA (Dana Pendidikan)	5.125.402.256	Digunakan untuk biaya pemeliharaan bangunan gedung
		Dinas Pendidikan Prov. NAD + UPTD	Rehabilitasi Sekolah Terbakar Dan Bencana Alam TK/RA, SD/MI, SLTP/MTS Dan SMU/MA serta Pembuatan Mobilier	1.189.179.000	Digunakan untuk belanja barang dan jasa (Biaya Jasa Pihak Ketiga lainnya)
		Dinas Kebudayaan Prov. NAD + UPTD	Penelitian dan Penulisan Buku-buku Tentang Aceh Dan Tsunami	4.200.000.000	Digunakan untuk Belanja Pegawai/ Personalia, Barang dan jasa dan Perjalanan dinas
		Dinas Sosial Prov. NAD + UPTD	Penanggulangan Korban Bencana : Bantuan Sosial Korban Bencana	3.095.340.000	Digunakan untuk Belanja Barang dan jasa, Perjalanan dinas dan Pemeliharaan
3	Pemukiman	Dinas Perkotaan dan Pemukiman Prov. NAD	Pembangunan Rumah Penduduk Sederhana Type 36 Untuk Korban Kerusakan Dan Bencana Alam	30.473.250.000	Digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
			Penanggulangan Darurat Kerusakan Jalan Dan Jembatan Akibat Bencana Alam	692.443.000	Digunakan untuk Belanja Barang dan jasa, Perjalanan dinas dan Pemeliharaan
4	Perhubungan	Dinas Perhubungan Prov. NAD	Tanggap Darurat Dan Rehabilitasi Bencana Dan Tsunami NAD (Luncuran 2005)	55.000.000	Digunakan untuk Belanja Barang dan jasa

### 2.4.1. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL BUDAYA

Bidang Pemulihan Sosial Budaya yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Syari'ah Islam dan Dinas Kesehatan. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tersebut berasal dari APBD dan bantuan donor.

Secara umum, pemulihan sosial budaya oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan lebih diprioritaskan pada aspek nonfisik yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bentuk kegiatan seperti peningkatan pendidikan anak sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah, pendidikan nonformal, wajib belajar 9 tahun, peningkatan kualitas guru serta peningkatan sistem manajemen pendidikan Islami.

Dinas Syari'ah Islam menitikberatkan kegiatan pada pertemuan dan musyawarah pemimpin umat beragama, penyuluhan hukum Islam pada masyarakat dan bantuan Balee Seumebeut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama pada masyarakat.

Pada Dinas Kesehatan, pelaksanaan program dikonsentrasikan pada kegiatan fisik dan non fisik antara lain berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penyediaan tenaga medis, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, sanitasi lingkungan peningkatan sistem informasi bidang kesehatan.

Dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Pemulihan Sosial Budaya oleh Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel Berikut ini.

**Tabel 2.96 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Sosial Budaya**

NO	PEMERINTAH DAERAH NAD	PELAKSANAAN
1	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>• Pengembangan kurikulum dan Pembelajaran</li> <li>• Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>• Pengembangan sistem pendidikan Islami</li> <li>• Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan</li> <li>• Manajemen pelayanan pendidikan</li> <li>• wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</li> <li>• Pendidikan menengah</li> <li>• Pendidikan Non formal</li> <li>• Pengembangan dayah dan Balee Seumeubeut</li> </ul>
2	Dinas Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan antar pemimpin umat beragama</li> <li>• Bantuan Balee Seumeubeut</li> <li>• Penyuluhan Hukum Islam</li> </ul>
3	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat korban gempa dan tsunami</li> <li>• Rekrutmen tenaga medis akibat korban tsunami</li> <li>• Pelaksanaan pengendalian penyakit menular</li> <li>• Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi</li> <li>• Perbaikan gizi dilakukan program perbaikan gizi di beberapa Kab./kota bekerja sama dengan Unicef, Who, Save the Children, Plan, Care melalui :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Gizi &amp; Anak Sekolah</li> <li>• Pemberian Makanan Tambahan di beberapa Kab./Kota dengan bantuan WHO, Unicef, WFP, CARE.</li> <li>• Survey kesehatan &amp; nutrisi di 21 Kab./Kota (Unicef &amp; CARE).</li> <li>• Pelatihan Teknis dan Training Of Trainer untuk petugas kesehatan.</li> <li>• Penatalaksanaan kasus Gizi Buruk di RS &amp; Puskesmas</li> <li>b. Program Keswa masyarakat (WHO, UNFPA)</li> <li>c. Pelatihan CMHN (Community Mental Health Ners) di 11 Kab./Kota.</li> <li>d. Dukungan Psikososial di beberapa kab./kota</li> <li>e. Penyediaan obat-obatan Psikofarma bantuan UNFPA</li> </ul> </li> <li>Sanitasi dan Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan dan Program pengelolaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• limbah unit pelayanan medis kabupaten, Puskesmas</li> </ul> </li> <li>b. Kaporisasi, WC/jamban/tempat wudhuk di beberapa Kab./Kota kerjasama</li> </ul> </li> <li>System Informasi Kesehatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan kembali system informasi kesehatan dan pengadaan perangkat/ komputer kerjasama dengan WHO.</li> <li>b. Sosialisasi</li> </ul> </li> </ul>

Sumber : Paparan diskusi Focus Group Discussion Pokja Sosial Budaya tanggal 27 November 2006, di Banda Aceh

## 2.4.2. BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

Pada bidang pemulihan ekonomi, Dinas berperan sebagai pelaksana yang mewakili pemerintah daerah yang berperan sebagai koordinator dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami. Dinas terkait dalam bidang pemulihan ekonomi ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan.

Pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan NAD lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan tangkap maupun budidaya. Selanjutnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan NAD mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Adapun Dinas Koperasi dan UKM NAD menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan NAD menekankan pada pembangunan pasar sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Dinas Perkebunan melaksanakan program pemulihan tanaman (khususnya padi dan bakau) serta pembangunan sarana kantor dan pengadaan kendaraan. Dalam bentuk Tabel, bidang pemulihan ekonomi pemerintah daerah disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.97 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ekonomi**

NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan peralatan pengolahan ikan (fish Nugget)</li> <li>• Penyediaan alat penangkap ikan</li> <li>• Rehabilitasi saluran tambak</li> <li>• Pengadaan sarana alat pengolahan ikan</li> <li>• Optimalisasi tambak masyarakat pasca tsunami dan penguatan institusi pembenihan</li> <li>• Pengadaan alat penangkapan ikan skala kecil</li> <li>• Penyediaan bantuan agroinput perikanan</li> <li>• Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap</li> </ul>
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NAD (di 10 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simeulue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Penarikan/Penyerapan Dana 2006 Hibah ADB No. 0002 – INO Juli 2006 Rp. 32.205.986.418,- atau sebesar 44,70% (dari pagu anggaran Rp. 72.050.000.000,-) dengan sisa dana Rp. 39.84.013.582,- atau sebesar 55,30% terdiri dari:</li> <li>• Administrasi Umum, Pengadaan Sarana Produksi</li> <li>• Pembangunan Gedung Kantor</li> <li>• Pembangunan Prasarana dan sarana lingkungan gedung</li> <li>• Pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan meubeler Pengadaan alat pertanian, pengadaan alat pengolah data, Pengadaan kendaraan</li> <li>• Pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan</li> <li>• Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian</li> </ul>

NO	PEMERINTAH DAERAH	• KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Penarikan/Penyerapan Dana 2006 Hibah ADB No. 0002 – INO Juli 2006 Rp. 32.205.986.418,- atau sebesar 44,70% (dari pagu anggaran Rp. 72.050.000.000,-) dengan sisa dana Rp. 39.84.013.582,- atau sebesar 55,30% terdiri dari:</li> <li>• Administrasi Umum, Pengadaan Sarana Produksi</li> <li>• Pembangunan Gedung Kantor</li> <li>• Pembangunan Prasarana dan sarana lingkungan gedung</li> <li>• Pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan meubeler Pengadaan alat pertanian, pengadaan alat pengolah data, Pengadaan kendaraan</li> <li>• Pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan</li> <li>• Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian</li> <li>• Rehabilitasi Gedung Negara</li> <li>• Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian</li> <li>• Pengintegrasian Teknis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja</li> <li>• Sedangkan Komitmen dan Realisasi Keuangan CMU Coordination dan Monitoring Unit) Dana Hibah ADB No.0002-INO-Juli 2006 sebesar Rp. 822.297.000,- atau sebesar 100%.</li> </ul>
3	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan program pembinaan koperasi dan UKM</li> <li>• Penataan dan Perkuatan kelembagaan koperasi dan UKM</li> <li>• Monitoring dan evaluasi perkoperasian</li> <li>• Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan</li> <li>• Perkuatan modal usaha sarana bagi UKI</li> <li>• Bimbingan teknis KSP/USP Koperasi Pola Syari'ah</li> <li>• Analisis diklat bagi Koperasi dan UKM</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM</li> </ul>
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Leaflet/Poster</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Teknis</li> <li>• Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa dan Statistik</li> <li>• Penyusunan Program dan Rencana Teknis</li> <li>• Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi</li> <li>• Bantuan Usaha Ekonomi Produktif</li> <li>• Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah</li> <li>• Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival</li> <li>• Pemberian Status Badan Hukum</li> <li>• Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2</li> <li>• Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4</li> </ul>
5	Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil</li> <li>• Pembuatan Kebun Cabe di Sabang</li> <li>• Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Saluran Irigasi di Aceh Besar</li> <li>• Perbaikan sarana publik, rehabilitasi jalan di Banda Aceh</li> </ul>

NO	PEMERINTAH DAERAH	• KEGIATAN
6	Dinas Perkebunan Provinsi NAD	• Pemulihan tanaman padi dan bakau juga ditambah adanya pembangunan sarana kantor, pengadaan kendaraan di NAD

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Khusus untuk pembangunan dan rehabilitasi pasar yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD pada tahun 2005 dan 2006, Tabel berikut menyajikan penyebaran pembangunan dan rehabilitasi pasar pada 18 Kabupaten/Kota dengan berbagai bantuan sumber pendanaan.

**Tabel 2.98 Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006**

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Banda Aceh	Kuta Alam Baiturrahman	1 1	CHF CHF	Pasar Ikan Peunayong Rehabilitasi Pasar Kp. Baro
2	Aceh Besar	Seulimun Lembah Selawah Lhoong Pulo Aceh Lhoknga Krueng Raya Ingin Jaya Lhoong Kuta Baro (Pekan ateuK) Lhoknga (Lampuuk) Baitussalan (Kajhu)	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR JICs JICs JICs JICs CHF CHF CHF CHF	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar Induk Rehab. Pasar sayur Rehabilitasi Pasar Ikan dan sayur Pasar tradisional Pasar tradisional
3	Pidie	Panteraja Panteraja Meuredu Jangka Buya Muara tiga Simpang Tiga Glumpang Baro Muara Tiga Padang Tiji Batee Kota Sigli	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	BRR CHF CHF CHF CHF APBNP APBNP APBNP APBNP APBNP JICs	Pasar tradisional Rehabilitasi Pasar Ikan Rehabilitasi Pasar Ikan Rehabilitasi Pasar Ikan Rehabilitasi Pasar Ikan Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar Penunjang
4	Bireun	Kota Juang Peudada Simpang Mamplam Peulimbang Simpang Mamplam Juli Nibong	1 1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR BRR APBNP APBNP APBNP	Pasar Grosir Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
5	Aceh Utara	Baktiya Meurah Mulia Muara Batu Cot Girek Syamtalira Bayu Seunedon Nibong	1 1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR BRR APBNP APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
6	Lhokseumawe	Blang Mangat Banda Sakti	1 1	BRR BRR	Pasar tradisional Pasar tradisional
7	Aceh Timur	Banda Alam Darul Aman Idi rayek	1 1 1	BRR APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
8	Aceh Tamiang	Kota Kuala Simpang Seureuwey	1 2	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
9	Bener Meriah	Pintu Rime Gayo Permata	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
10	Aceh tengah	Jagong Jeget Batu Lintang	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
11	Gayo Lues	Pantan Cuaca Pantan Cuaca	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
12	Aceh Tenggara	Seumadam Lawe Alas	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
13	Aceh Singkil	Singkil Singkil	2 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
14	Aceh Selatan	Meukek Kluet Tengah Trumon Timur Trumon Timur Pasi Raja Labuhan Haji	1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR APBNP APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
15	Abdya	Tangan-tangan Manggeng Susoh	1 1 1	BRR APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
16	Nagan Raya	Darul Makmur Kuala	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
17	Aceh Barat	Sungai Mas Pante cermen Woyla Barat Woyla Bubon Arongan Lambalek	1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR APBNP APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
18	Aceh Jaya	Sampolnit Krueng Sabee Krueng Sabee Teunom Panga Sampolnit Krueng Sabee Setia Bakti Sampoinet Teunom Jaya	1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1	BRR BRR APBNP APBNP APBNP APBNP CHF CHF CHF CHF CHF	Pasar tradisional Pasar tradisional
19	Simeulue	Simeulue Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
20	Sabang	Sabang	1	APBNP	Pasar tradisional

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD, 2006

### 2.4.3. BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Pelaksanaan program bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada data yang diperoleh dari Badan Kesbang dan Linmas Tahun 2005 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 2.99 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum**

NO	PEMERINTAH DAERAH NAD	KEGIATAN
I	Badan Kesbang dan Linmas Prov NAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan Teknis Pemantapan Bagi Aparatur Kesbang dan Linmas Kab./ Kota</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pageu Gampong</li> </ul>

Sumber : Badan Kesbang dan Linmas, 2005

Dari Tabel di atas diketahui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan pada Badan Kesbang dan Linmas yaitu berupa bimbingan teknis pemantapan bagi aparatur Kesbang dan Linmas Kabupaten/Kota serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pageu Gampong.

Sedangkan pelaksanaan Badan Kesbang dan Linmas yang terkait dengan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat menekankan pada aspek pemberian bantuan serta pelatihan-pelatihan yang diorientasikan pada pemberian penyadaran dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.100 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat**

No	Pemerintah Daerah NAD	Kegiatan
I	Badan Kesbang Linmas Prov NAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran bantuan korban konflik Pola Diyat</li> <li>Pemantapan wawasan kebangsaan bagi aparatur Kab/Kota</li> <li>Pembauran bangsa bagi generasi muda dan pramuka</li> <li>Pelatihan Wanra Wilayah I</li> <li>Pelatihan Wanra wilayah II</li> <li>Sosialisasi wawasan kebangsaan</li> <li>Sosialisasi pemantapan budaya politik bagi pengurus Parpol, Ormas, dan LAM</li> <li>Penanganan masalah-masalah strategis</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

## 2.5. IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN REHABILITASI REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2005-2006

Secara umum isu dan permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi antara lain:

1. Belum terselesaikannya secara keseluruhan penanganan korban bencana;
2. Belum berjalan dengan baik program pemberdayaan masyarakat korban bencana; masih rendahnya kualitas pelayanan publik;
3. Belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah pascabencana;
4. Belum terselesaikannya secara keseluruhan masalah penataan ruang dan hukum serta perangkat peraturan lainnya terkait dengan masalah pertanahan.

Disamping itu, menyangkut permasalahan yang dihadapi pada tatanan kelembagaan internal Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, teridentifikasi antara lain :

1. Koordinasi yang cukup kompleks antar pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan maupun kegiatan.
2. BRR merupakan badan yang baru dibentuk sebagai lembaga yang belum pernah ada sebelumnya dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, BRR yang baru memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana setelah satu tahun berlalu.
3. Sistem rekrutmen staff pendukung operasional BRR tidak dapat dilakukan sekaligus sementara kebutuhan staff sangat mendesak.
4. Adanya dinamika dan tuntutan yang cukup tinggi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi mengakibatkan perlunya reorganisasi BRR dari waktu ke waktu sehingga sampai batas tertentu dapat menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

# BAB 3

# SASARAN

# REHABILITASI DAN

# REKONSTRUKSI

# TAHUN 2008-2009

Bab III membahas sasaran program dan kegiatan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan pada paruh waktu kedua masa kerja BRR (2008-2009). Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias mempunyai arahan yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Struktur penyajian dalam bab ini dikelompokkan ke dalam lima bidang pemulihan, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
2. Bidang Pemulihan Infrastruktur
3. Bidang Pemulihan Perekonomian
4. Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan
5. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum

Pembahasan di masing-masing bidang dan sub bidang akan menguraikan sasaran 2008-2009 yang merupakan selisih dari Rencana Induk atau Kebutuhan Riil di masing-masing program kegiatan dengan realisasi pelaksanaan yang dihitung hingga akhir tahun 2007. Selain itu, akan diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang diperlukan. Pada bagian akhir akan diuraikan kebutuhan pendanaan yang diperlukan pada tahun 2008-2009 guna mengejar target dan menuntaskan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

### 3.1 BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Rencana Induk untuk pelaksanaan kegiatan bidang pemulihan ini perlu disesuaikan dengan kenyataan lapangan dan kebutuhan masyarakat yang dikenal sebagai pihak penerima manfaat (beneficiaries). Hasil verifikasi penerima manfaat ini mengubah sasaran Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanian, dan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dalam rencana induk.

Berdasarkan evaluasi paruh waktu bahwa tidak semua yang tertera dalam rencana induk dapat dilaksanakan seluruhnya oleh BRR dan masih adanya rumah yang sudah selesai dibangun tetapi pengungsi di barak tidak mau menempatinnya, maka dalam menyusun rencana aksi BRR NAD-Nias tahun 2007-2008, perlu adanya suatu model percontohan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola secara bersama oleh Tripartite BRR bekerjasama dengan Pemerintah Kab./Kota di NAD. Model percontohan ini pada akhir mandat BRR tahun 2009 selanjutnya akan diserahkan kepada Pemda setempat guna dijadikan model percontohan bagi daerah lainnya dan dikelola sesuai dengan UU no 11 tentang Pemerintahan Aceh dan UU no 32 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 3.1.1 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pembangunan perumahan tidak hanya terdiri dari program pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah (rehabilitasi). Dalam perkembangannya, kemudian dikenal program Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT/renters) dan Program 'upgrading'. Upgrading adalah program yang terpaksa dilakukan dikarenakan berbagai kondisi pembangunan rumah yang telah dinyatakan selesai atau sedang dikerjakan, namun bermasalah. Persoalan ini bisa diakibatkan oleh ketidaksesuaian mutu rumah terbangun (dengan berbagai kondisi dan variasi), atau pekerjaan pembangunan rumah yang ditinggalkan kontraktor, atau berbagai persoalan lain yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pembangunan rumah, sambil tetap menjalankan proses penyelesaian hukumnya (bila diperlukan).

Bagian utama selain perumahan adalah Permukiman (gampong). Pembangunan permukiman ini mencakup pembangunan prasarana dasar permukiman berupa jalan pemukiman, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik serta adanya dukungan ketersediaan fasilitas umum lainnya.

**Tabel 3.1 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1.	Rumah Baru (Bangun Baru)	Unit	90.158	162.341	144,134	18.207
2.	Perbaikan Rumah (Perbaikan)	Unit	155.838	101.084	23,885	77,199
3.	Prasarana Dasar	Pkt	420	**	368	52
-	Pembangunan baru PSD	Pkt	*	***	***	***
-	Perbaikan PSD	Pkt	*	***	***	***
-	Penyusunan DED kawasan	Pkt	*	***	***	***
-	Penyusunan Rencana Detail Induk Sistem PSD	Pkt	*	***	***	***

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
- Pembangunan PSD berbasis kecamatan	Pkt	*	***	***	***
4. Rumah bagi penyewa (BSBT-Tinggal/ Renters)	Unit	*	8.898	87	8.811

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Tergabung dalam Program Prasarana Dasar

Berdasarkan Rencana Induk, jumlah kebutuhan rumah untuk seluruh propinsi NAD dan pulau Nias adalah 246.096 unit rumah, terdiri dari rehabilitasi rumah 155.838 unit dan rumah baru 90.158 unit serta 420 paket prasarana dasar. Namun demikian ternyata kebutuhan Riil di bidang perumahan dan permukiman jauh lebih besar dari sasaran Rencana Induk. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan riil rumah baru adalah 130.837 unit dan Perbaikan Rumah adalah 79.784 unit. Adapun secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Realisasi rekonstruksi rumah diproyeksikan sampai Akhir 2007 sejumlah 100.557 unit, rehabilitasi rumah sebesar 11.316 unit dan 368 paket PSD sehingga Sasaran Kegiatan 2008-2009 untuk rekonstruksi rumah baru sebanyak 30.280 unit, rehabilitasi rumah sebanyak 64.468 unit dan pembangunan 52 paket PSD. Kebutuhan riil rumah untuk Bantuan Sosial Bertempat Tinggal sebesar 8.898 unit, dengan proyeksi realisasi (akhir Desember) 87 unit maka sasaran kegiatan 2008-2009 menjadi 8.811 unit.

Masalah dan tantangan pada pelaksanaan di bidang perumahan adalah masalah harga, Harga satuan rumah menurut Rencana Induk ditetapkan Rp.28, 5 juta/unit, namun kenyataan di lapangan, harga rumah menjadi sekitar Rp.60 juta-Rp.80 juta/unit. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kesulitan memperoleh material lokal yang *sustainable*, alur distribusi dan suplai material yang panjang dan di beberapa tempat susah dijangkau karena memang tidak ada prasarana dan sarana pendukung, di lain pihak permintaan di lapangan sangat tinggi. Ditambah lagi dengan banyaknya pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang melakukan kegiatan pembangunan perumahan dalam waktu yang relatif bersamaan sehingga menyerap semua *resources* berkualitas yang ada, dan menyisakan *resources* yang kurang berkualitas, dan bahkan tidak punya pengalaman dalam pembangunan, sehingga *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan, dan justru menimbulkan masalah baru di bidang perumahan dan permukiman, yaitu rumah-rumah *sub-standard*, masalah lingkungan, dan bahkan masalah sosial. Kontribusi yang sama juga bersumber dari minimnya tingkat pemahaman masyarakat korban terhadap lingkungan dan partisipasi dalam pembangunan.

**Tabel 3.2 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup NAD – Nias**

Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan 18.207 unit rumah baru di tahun 2008-2009.</li> <li>• Perbaikan rumah sebanyak 77.199 unit di tahun 2008-2009</li> <li>• Pembangunan dan perbaikan prasarana dasar sebanyak 52 paket.</li> <li>• Para beneficiaries tidak menempati rumah yang telah dibangun karena perumahan dan permukiman masih mengalami kekurangan Prasarana Sarana Dasar (listrik, pembuangan air limbah, drainase, jalan akses, dan air bersih) dan kelengkapan fasilitas lainnya seperti tempat ibadah pasar/jauh dari tempat bekerja dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.</li> <li>• Ada sebagian beneficiaries yang tidak mendapat bantuan rumah atau ada yang mendapat rumah double.</li> <li>• Rendahnya kualitas rumah terbangun sehingga banyak rumah yang tidak ditempati oleh penerima bantuan.</li> <li>• Kontraktor mengalami hambatan fisik lokasi, hambatan non fisik lokasi, hambatan calon penerima bantuan (beneficiaries), internal kontraktor dan kontraktor mengalami over cash flow sehingga tidak melakukan penagihan tiap termin melainkan menunggu hingga termin terakhir.</li> <li>• Kurangnya koordinasi internal serta koordinasi eksternal dalam Bapel BRR yang terkait dengan peran kelembagaan donor / NGO.</li> <li>• Kebijakan dan strategi mengenai rumah tahan gempa yang ditetapkan dalam Rencana Induk Bidang Perumahan tidak ditetapkan dalam rencana strategis BRR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan perumahan didasarkan pada kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat lokal serta memberdayakan masyarakat setempat seoptimal mungkin.</li> <li>• Pemanfaatan material lokal dan memenuhi persyaratan building code setempat;</li> <li>• Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota, dan</li> <li>• Penetapan tipe rumah inti (core houses) merupakan tipe T-36 dengan luas bangunan 36m<sup>2</sup>.</li> <li>• Pusat permukiman/kota-kota di Pantai Barat tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar wilayah (Barat-Timur) dan wilayah Tengah serta didukung pusat-pusat pertumbuhan skala lebih kecil adalah Sigli, Bireuen, Singkil, Tapak Tuan, Blangpidie, Calang di wilayah pesisir; dan Blangkejeren dan Jantho di wilayah pedalaman.</li> <li>• Kota-kota tepi air dikembangkan dengan memperhatikan juga aspek-aspek lokal terutama keterkaitannya dengan rawan gempa dan tsunami dengan kawasan konservasi dan penyangga yang berfungsi lindung.</li> <li>• Kawasan permukiman diupayakan tidak berada di kawasan lindung, seperti wilayah kehidupan gajah yang semakin langka populasinya, antara lain di Desa Pucok, Alue Raya, Blang Dalam &amp; Lhok Kuala, Lamje, Kr. Batee Mirah, Kr. Alue Ceulouloup, Kr. Buerieng, Can. Kaking Ungoh Batee, perbatasan Tutut, Kawasan Uteun Cut, Panga, Panga-Teunom, dan Lageun.</li> </ul>

Sumber: Bapel BRR, 2007

### 3.1.2 TATA RUANG

Berdasarkan Rencana Induk, kegiatan penyusunan Tata Ruang perlu diikuti oleh berbagai kegiatan lain sebagai pendukung dan kelanjutannya. Selama 2005-2007, sebagian besar upaya tindak lanjut belum dilaksanakan. Rencana Tata Ruang ini yang diharapkan akan menjadi acuan bagi seluruh kegiatan rehab/rekon seharusnya menjadi tugas Pemda, namun karena dalam kondisi pasca bencana dimana semua bidang dan sub bidang pemulihan harus segera dapat dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar, maka semua kegiatan termasuk perencanaan tata ruang di semua tingkatan dilakukan secara paralel dengan kegiatan fisik itu sendiri.

*Village planning* merupakan kegiatan penunjang untuk perumahan/permukiman, sehingga akan terbangun sebuah pemukiman yang terencana dan tertata dengan baik sesuai dengan harapan pemukimnya, karena direncanakan secara bersama-sama dengan masyarakat pemukim di kampung tersebut. Meskipun *village planning* tidak secara eksplisit tertuang dalam rencana induk namun pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah *community based approach*. Oleh karena itu, dalam

hal perencanaan pun sebanyak mungkin menyerap aspirasi dari masyarakat korban itu sendiri yang disertai dengan petunjuk mengenai pengurangan resiko bencana dan wawasan lingkungan.

Sasaran utama rencana aksi sub bidang Tata Ruang 2008-2009 antara lain : perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota, Action Plan Kecamatan, dan Village Planning, yang secara rinci disajikan pada Tabel III.3. Kemudian permasalahan dan rencana tindak lanjut Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Tata Ruang NAD – Nias disajikan pada Tabel III.4.

**Tabel 3.3 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tata Ruang NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
I.	Penyusunan Rencana Tata Ruang					
a	Penyusunan RTRW Provinsi NAD	propinsi	1	1	1	0
b	Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias)	Kabupaten/Kota	13	14	13	1
c	Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota	Kota	8	27	15	12
d	RTBL/RTRK	Kabupaten/Kota	13	**	16	3
	i. Penyusunan Rencana Tsunami Heritage and Living Museum		*	1	***	***
	ii. Penyusunan Rencana Water front City (Banda Aceh)		*	1	***	***
	iii. Perencanaan Kawasan lainnya		*	10	***	***
2.	Penyusunan SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman)	Propinsi	1	2	0	2
		Kabupaten/Kota	13			
3.	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang	Propinsi	1	2	0	2
		Kabupaten/Kota	13			
4.	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Program Integrasi Sektoral)	Propinsi	1	1	2	0
		Kabupaten/Kota	13			
5.	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang	Propinsi	1	1	3	0
		Kabupaten/Kota	13			
6	Rencana Tindak Manajemen Bencana	Kabupaten/Kota	13	-	2	11
7	Perencanaan Bottom Up Planning	Unit	*	**	**	**
a	Kecamatan Action Plan	Unit	*	148	0	148
b	Village Planning	Unit	*	812	368	444
8	Studi	Unit	*	6	0	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Terhubung dalam Program/Kegiatan Penyusunan RTBL/RTRK

**Tabel 3.4 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Sub Bidang Tata Ruang NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias) sebanyak 1 paket.</li> <li>• Kebutuhan Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota sebanyak 1 paket.</li> <li>• Penyusunan Rencana Tsunami Heritage and Living Museum sebanyak 1 unit.</li> <li>• Penyusunan Rencana Water front City (Banda Aceh) sebanyak 1 unit.</li> <li>• Kebutuhan Perencanaan Kawasan lainnya sebanyak 10 unit.</li> <li>• Penyusunan SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman) 2 sasaran.</li> <li>• Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang, 2 sasaran.</li> <li>• Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Program Integrasi Sektoral) 2 sasaran.</li> <li>• Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang, 3 sasaran.</li> <li>• Rencana Tindak Manajemen Bencana, 2 sasaran.</li> <li>• Kebutuhan untuk Kecamatan Action Plan sebanyak 148 unit.</li> <li>• Kebutuhan Village Planning, sebanyak 444 unit.</li> <li>• Kebutuhan untuk Studi, sebesar 6 unit.</li> <li>• Konsep village planning yang direncanakan dan tengah dilaksanakan BRR, merupakan konsep yang dikembangkan di luar perencanaan tata ruang yang ditetapkan dalam rencana induk.</li> <li>• Kebijakan dan Strategi Rencana Induk (membangun Aceh yang baru dengan tata ruang yang bisa mengantisipasi bencana tsunami jika kembali terjadi) tidak terlihat dalam kebijakan, strategi maupun pelaksanaan tata ruang makro BRR yang disebabkan karena kondisi sosial masyarakat setempat dalam rangka mempertahankan hak-hak kepemilikan tanah dan juga ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lokasi lahan baru. Sebagai contoh kebijakan dan strategi Rencana Induk adalah membangun area permukiman yang jauh dari pesisir pantai, namun pada kenyataannya cukup banyak perumahan dibangun di area pantai.</li> <li>• Tertundanya legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikarenakan mengacu kepada RPJMD yang baru.</li> <li>• RTRW yang ada saat ini terkesan tumpang tindih dan belum memperhatikan kesesuaian (interface) dengan rencana penyusunan village planning oleh masyarakat dan RTRW Kota, Kabupaten dan Provinsi.</li> <li>• Penyusunan village planning oleh masyarakat berjalan lambat dan belum optimal dalam melibatkan peran serta masyarakat.</li> <li>• Peranan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum optimal dalam memfasilitasi penyusunan revisi Qanun RTRW, sehingga revisi Qanun RTRW dalam rangka menampung perubahan struktur tata ruang yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD dan Nias belum berjalan lancar.</li> <li>• Belum adanya proses legalisasi tata ruang yang baru, sebagai contoh : pembebasan lahan, seringkali tidak dapat sejalan dengan arahan tata ruang ( akibat masalah pemilikan dan kesediaan pemilik lahan ).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan bukit penyelamatan (escape hill) di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5, 10, 20 menit;</li> <li>• Mendesain akses untuk evakuasi (evacuation/ escape routes) dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal;</li> <li>• Melakukan sosialisasi dan penyadaran publik yang berkelanjutan mengenai jalur-jalur evakuasi dan bukit penyelamatan;</li> <li>• Mendesain dan merekonstruksi bangunan tahan gempa/tsunami;</li> <li>• Menciptakan jalur hijau (green belt/forested town) sejajar garis pantai dari pohon kelapa, cemara, dan pohon lainnya yang sesuai tingkatannya sehingga membentuk city belt, district belt, neighborhood belt.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.1.3 PERTANAHAN

Aspek pertanahan merupakan kegiatan yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan khususnya dan pembangunan NAD -Nias secara umum.

Kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan dimaksudkan untuk:

1. Menyiapkan infrastruktur pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Mewujudkan rekonstruksi pemilikan hak atas tanah.
3. Menyediakan lahan yang memenuhi syarat kelayakan untuk *resettlement* (program relokasi) korban tsunami serta kebutuhan rehabilitasi-rekonstruksi lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas pelayanan, mengembangkan sistem penanganan sengketa serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

Terdapat 9 program kegiatan pada sub bidang pertanahan yang direncanakan dalam rencana induk seperti yang disajikan pada Tabel III.5. Dari 9 program dan kegiatan tersebut hanya 1 (satu) yang sudah terealisasi yakni Program Pembuatan Sertifikat Pengganti, sedangkan program-program lainnya belum.

Dari 400.000 sertifikat pengganti yang merupakan kebutuhan riil telah terealisasi sebanyak 285.000 bidang sertifikat sehingga sasaran yang harus diselesaikan pada 2008-2009 adalah sebanyak 115.000 bidang sertifikat. Sedangkan Sasaran 2008-2009 untuk program lainnya masing-masing dilaksanakan 1 unit pada tingkat propinsi dan 13 unit pada tingkat Kab./Kota. Kemudian permasalahan dan rencana tindak lanjut Bidang Pemulihan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup sub bidang Pertanahan NAD – Nias disajikan pada Tabel III.6.

**Tabel 3.5 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pertanahan NAD - Nias**

	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEB. RIIL 2005-2009	PROYEKSI CAPAIAN KUMULATIF 2005- 2007	SASARAN 2008-2009
1	Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
2	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**	0	1
		Kab./Kota	13	**	0	13
3	Pembangunan fisik kadastral 2005-2006	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
4	Penyusunan rencana tata guna tanah 2005	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
5	Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan database digital 2005-2006	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13
6	Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006	Propinsi	1	400.000 Bidang Sertifikat	285.000 Bidang Sertifikat	115.000 Bidang Sertifikat
		Kab/Kota	13			
7	Konsolidasi tanah 2005-2009	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13

PROGRAM/ KEGIATAN		SATUAN	RENCANA INDUK 2005-2009	KEB. RIIL 2005-2009	PROYEKSI CAPAIAN KUMULATIF 2005- 2007	SASARAN 2008-2009
8	Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008	Propinsi	1	**	0	1
		Kab./Kota	13	**	0	13
9	Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan	Propinsi	1	**	0	1
		Kab/Kota	13	**	0	13

Sumber : Bapel BRR, 2007

\*\* : Data belum tersedia

**Tabel 3.6 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut sub bidang pertanian NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006 untuk kebutuhan Propinsi, 1 sasaran.</li> <li>• Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006 untuk kebutuhan kab/kota, 13 sasaran.</li> <li>• Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008 di Propinsi, 1 sasaran.</li> <li>• Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008 di kab./kota, 13 sasaran.</li> <li>• Kebutuhan Pembangunan fisik kadastral 2005-2006 di Propinsi sebanyak 1 unit.</li> <li>• Kebutuhan Pembangunan fisik kadastral 2005-2006 di kab/kota sebanyak 13 unit.</li> <li>• Penyusunan rencana tata guna tanah 2005 di Propinsi, 1 paket.</li> <li>• Penyusunan rencana tata guna tanah 2005 di kab/kota, 13 paket.</li> <li>• Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> 2005-2006 di Propinsi, 1 unit.</li> <li>• Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan <i>database digital</i> 2005-2006 di Kab/Kota, 13 unit.</li> <li>• Kebutuhan Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006 sebanyak 115.000 bidang sertifikat.</li> <li>• Konsolidasi tanah 2005-2009 untuk Propinsi, 1 sasaran.</li> <li>• Konsolidasi tanah 2005-2009 untuk Kab/Kota, 13 sasaran.</li> <li>• Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008 di Propinsi, 1 sasaran.</li> <li>• Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008 di Kab./Kota, 13 sasaran.</li> <li>• Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan di Propinsi, 1 sasaran.</li> <li>• Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan</li> <li>• Upaya penataan kembali hak atas tanah perorangan di daerah yang terkena bencana terkesan lamban.</li> <li>• Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan dalam pengurusan hak atas tanah.</li> <li>• Keterlambatan dalam penerbitan PERPU yang dapat dijadikan dasar dalam menata kembali hak atas tanah perorangan.</li> <li>• Pemerintah daerah mengalami kesulitan dana dalam penyediaan lahan (ditambah peran Bapel yang tidak optimal) yang akan digunakan untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana.</li> <li>• Masalah pembebasan lahan, banyak anggaran pembangunan fasilitas umum dengan bantuan luar negeri yang belum dapat diserap karena terhambat masalah pembebasan tanah.</li> <li>• Tidak adanya PERPU terkait hukum dan pertanahan.</li> <li>• Adanya ketidakpastian menyangkut kepemilikan tanah yang disebabkan oleh spekulasi tanah, kepemilikan penguasaan tanah yang tidak sah karena hilangnya data dan informasi tentang tanah dan konflik horizontal dalam masyarakat.</li> <li>• Terhambatnya proses penerbitan sertifikat oleh RALAS karena sertifikat yang lama masih aktif sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dengan Kementerian / lembaga terkait guna mempercepat penerbitan peraturan perundangan tentang penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah perorangan</li> <li>• Mempercepat penyelesaian masalah penataan hak atas tanah perorangan bagi warga masyarakat di NAD dan Nias dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemda Kabupaten / Kota dalam pemanfaatan dana untuk pembebasan tanah bagi permukiman dan infrastruktur lainnya</li> <li>• Mencairkan dan memanfaatkan seoptimal mungkin dana bantuan MDF untuk mempercepat penyelesaian proyek penataan hak atas tanah dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi terkait</li> <li>• Mencari solusi dan optimalisasi pemanfaatan dana APBN dan dana dari Multilateral Donor Fund (MDF)</li> <li>• Melaksanakan Village Planning melalui Program RALAS ( Rehabilitation of Aceh Land Administration System ) dengan dukungan pembiayaan MDF.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.1.4 LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

Subbidang ini merupakan lintas sektoral sehingga beberapa program dan kegiatannya telah diakomodasi dalam program kegiatan bidang-bidang lainnya, seperti bidang perumahan dan permukiman, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi.

Berdasarkan Rencana Induk telah ditetapkan 4 kebijakan utama yang menjadi acuan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu: 1) Memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan mengantisipasi ancaman bencana alam, 2) Memulihkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, 3) Melibatkan masyarakat dan menggunakan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan dan 4) memulihkan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

**Tabel 3.7 Kebijakan dan Kegiatan Pokok Pemulihan Lingkungan Hidup dan SDA Dalam Rencana Induk**

NO	KEBIJAKAN		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
I	Pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana alam	1	Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan	Survei Berkala parameter pencemar, Penetapan status keamanan lingkungan dari suatu wilayah, dan Sosialisasi kualitas lingkungan dan ancaman bahaya gempa
		2	Melakukan pembersihan wilayah bencana	Pembuangan limbah padat tsunami, Penataan kembali sistem persampahan kota, Menata ulang sistem drainase perkotaan, Membangun sistem pengolahan limbah cair.
		3	Merehabilitasi tanah	Penelitian kualitas tanah, termasuk kegiatan survei, pengklasifikasian status tanah, evaluasi dan rekomendasi penanganan serta rehabilitasi tanah.
		4	Merehabilitasi terumbu karang	Pendataan kembali terumbu karang, penanaman kembali terumbu karang dan penyusunan mekanisme kelembagaan
		5	Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (green belt), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai	Rehabilitasi Mangrove dan Rehabilitasi Vegetasi Pelindung kawasan pantai lainnya; rehabilitasi kawasan tambak; dan pembangunan hutan kota
		6	Mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting	Mengamankan Taman Nasional Lueser dari Pembangunan R3WANS dan Mengamankan fungsi kawasan lindung lainnya, yang berada di NAD dan Nias, maupun propinsi lainnya yang berdekatan
		7	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pengelolaan lahan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), melindungi dan mengembangkan sumber-sumber air; pengelolaan vegetasi untuk perlindungan tanah dan tata air dan pembinaan kesadaran dan kemampuan sumber daya manusia.

NO	KEBIJAKAN		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
2	Pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam	1	Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian	Rehabilitasi/ pembangunan saluran air dan irigasi tersier dan kuarter (menurut skema dan tipe); rehabilitasi jalan usaha tani/ produksi; pembangunan unit pembibitan/ pembenihan; pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian; pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan); penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna; Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; pengembangan pertanian terpadu, penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian; bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan bantuan kios sarana produksi serta peningkatan usaha ekonomi masyarakat khususnya di daerah penyangga kawasan konservasi (taman wisata, cagar alam dan suaka margasatwa).
		2	Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan	Mengembalikan kegiatan perikanan tangkap, Merehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budidaya lainnya dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
		3	Menyediakan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak mengancam kelestarian lingkungan	Penyediaan kayu dan Penyediaan bahan dan material bangunan konstruksi lainnya, Pengembangan alternatif bahan bangunan dari kayu kelapa, Pembinaan dan pengendalian perusahaan hutan serta pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi NAD dan Sumut.
3	Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan	1	Membangun Sistem Peringatan Dini secara terintegrasi	Menyusun Standar, operasi dan prosedur (SOP) untuk respon darurat bencana, Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi pemerintah, dan Membangun prasarana dan sarana sistem peringatan dini
		2	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana	Memanfaatkan nilai kearifan lokal sebagai bagian yang melengkapi sistem peringatan dini, Memberdayakan peran masyarakat dalam mekanisme penanganan bencana, Mengembangkan Pendidikan tentang kebencanaan
		3	Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bidang SDA dan LH	Memberdayakan pranata sosial dan lembaga adat yang ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta membangun mekanisme pengawasan sesuai dengan nilai sosial, budaya dan aspirasi masyarakat setempat

NO	KEBIJAKAN		PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK
4	Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	1	Melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung)	Melakukan kajian kelembagaan yang responsif terhadap visi pembangunan di masa yang akan datang, melakukan rekrutmen pegawai baru dan meningkatkan kapasitas aparat di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
		2	Memulihkan sarana dan prasarana pemerintahan bidang sumber daya alam dan lingkungan daerah	Melakukan pembangunan dan rehabilitasi kantor dan sarana pendukung kegiatan operasional instansi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

**Sumber : Lampiran III Rencana Induk**

## 3.2 BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

### 3.2.1 JALAN DAN TRANSPORTASI

#### 3.2.1.1 TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP

Prasarana transportasi laut dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) sebagian besar mengalami kerusakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan di NAD serta Nias dalam rencana induk ditetapkan sejumlah 17 unit, namun setelah dilakukan inventarisasi ternyata kebutuhan di lapangan adalah 16 unit (Tabel III.7). Hal ini karena dibutuhkannya beberapa dermaga darurat untuk keperluan pendaratan logistik menggunakan LCT pada daerah-daerah tertentu seperti Calang, Pulo Aceh dan Nias. Dari jumlah tersebut, 15 unit telah dan sedang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi serta rekonstruksinya. Dengan demikian sasaran 2008-2009 adalah melanjutkan pembangunan pelabuhan laut yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Disamping pembangunan fisik, disediakan pula berbagai fasilitas peralatan bongkar-muat di beberapa pelabuhan utama di Prov. NAD-Nias. Pada akhir tahun 2008 diharapkan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan dapat diselesaikan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan (Pelabuhan Ferry) ditargetkan sebanyak 9 unit, sebagaimana tertuang dalam rencana induk. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 8 unit telah selesai dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2005-2006. Sisa pekerjaan (1 unit) akan dilaksanakan pada TA 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2008.

**Tabel 3.7 Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Laut dan ASDP NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1   Pelabuhan Laut	unit	17	16	15	1
2   Pelabuhan Ferry	unit	9	8	8	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

#### 3.2.1.2 TRANSPORTASI UDARA

Rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara sesuai dengan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 9 unit (Tabel III.8). Dari hasil verifikasi lapangan, kebutuhan yang perlu dilaksanakan adalah 9 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diantaranya telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2005-2006 sedangkan 3 unit lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008 kegiatan difokuskan pada pengembangan Bandara SIM dan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya. Disamping melaksanakan pembangunan fisik, maka bandara-bandara yang belum memiliki master plan juga disiapkan oleh BRR yang akan dipergunakan sebagai arah pembangunan masa depan. berbagai fasilitas navigasi, keselamatan penerbangan serta PKP-PK (pemadam kebakaran) juga dilengkapi.

Pembangunan airstrip dan helipad tidak terdapat dalam Rencana Induk, namun melihat kondisi medan yang terpisah secara geografis serta topografi yang sulit dicapai, maka di beberapa lokasi perlu dibangun airstrip dan helipad yang dipergunakan khususnya pada keadaan darurat untuk evakuasi bencana. Pembangunan airstrip tahap I dilakukan pada TA 2007 sementara helipad pada tahun 2007 sebanyak 1 unit.

**Tabel 3.8 Sasaran Rencana Aksi Sub Transportasi Udara NAD - Nias**

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
Bandar Udara					
Rehabilitasi-rekonstruksi Bandara	Unit	9	9	9	0
Airstrip	Unit	*	4	3	1
Helipad	Unit	*	3	1	2

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

### 3.2.1.3 TRANSPORTASI DARAT, JALAN DAN JEMBATAN

#### BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

- Tingkat kerusakan aset prasarana jalan nasional dan provinsi dengan total panjang mencapai 3.484,6 km mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi prasarana jalan nasional dan provinsi sebelum bencana gempa bumi dan tsunami, 32,7 persen dalam keadaan baik, 35,8 persen rusak ringan, dan 31,5 persen rusak berat. Setelah bencana gempa bumi dan tsunami, kondisi tersebut memburuk menjadi hanya sekitar 28,4 persen dalam keadaan baik, sedangkan sisanya sebesar 71,6 persen dalam keadaan rusak (35,7 persen rusak ringan dan 35,9 persen rusak berat). Kenaikan tingkat kerusakan prasarana jalan tersebut digambarkan pada Tabel 2.1. Kerusakan jembatan diperkirakan mencapai 25 persen dari total jembatan nasional sepanjang 21.340 m dan jembatan provinsi sepanjang 14.015 m.
- Setelah gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dan gempa bumi yang terjadi tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias telah mengakibatkan kerusakan berbagai sarana dan prasarana di kedua wilayah tersebut. Beberapa lokasi yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana, antara lain; di Pulau Simeuleu, sebagian Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil juga mengalami kerusakan. Jalan provinsi di Pulau Nias mencapai 426 km di mana 15 persen mengalami rusak ringan dan 45 persen dalam kondisi rusak berat. Sedangkan di Pulau Simeuleu jalan yang mengalami kerusakan berat sekitar 15 persen dan kerusakan ringan sekitar 5 persen. Jalan dari Tapak Tuan (Aceh Selatan) ke batas Sumut (Aceh Singkil) juga mengalami kerusakan sekitar 10 persen.
- Pada sub Jalan dan Jembatan, Sasaran 2008-2009 untuk Lintas Timur NAD (Jalan Nasional) telah terselesaikan, Lintas Barat NAD (Jalan Nasional) sebesar 35 km, Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional) 164 km, Lintas Lainnya (Jalan Propinsi) 165 km, Jalan Propinsi P.Nias 219 km, dan Jalan Kabupaten NAD dan Nias 2569 km.
- Pada tahun 2007 diprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 778 km, yang terdiri dari jalan Nasional 252 km, jalan propinsi 155 km (Prop. NAD : 32 km dan Nias 123 km). Sehingga sampai akhir tahun 2007 akan ditangani jalan sepanjang 1.735 km.

Dalam Rencana Induk direncanakan pembangunan prasarana jalan kereta api sepanjang 233 km dengan biaya Rp.1,093 triliun. Namun demikian, Pelaksanaan studi dan pembangunan jalan kereta api telah mulai dirintis Departemen Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi NAD sehingga pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya sangat besar tersebut tidak ditangani oleh BRR.

**Tabel 3.9 Sasaran Rencana Aksi Sub Jalan dan Jembatan NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Lintas Timur NAD (Jalan Nasional)	km	257	80	80	0
2	Lintas Barat NAD (Jalan Nasional)	km	441	702	667	35
3	Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional)	km	341	191	27	164
4	Lintas Lainnya (Jalan Propinsi)	km	1.455	313	148	165
5	Jalan Propinsi P. Nias	km	256	469	250	219
6	Jalan Kabupaten NAD dan Nias	km	1.900	3.511	942	2.569
	TOTAL	km	4.650	5.266	2.114	3.152

Sumber : Bapel BRR, 2007

### TERMINAL BUS

Sebagian besar terminal bus di tiga kota besar yaitu Banda Aceh, Meulaboh, dan Lhokseumawe mengalami kerusakan berat, sedangkan di Sigli, Langsa, Bireun, dan Gunung Sitoli mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang; demikian juga untuk prasarana jembatan timbang, pemeriksaan kendaraan bermotor (PKB), dan operasi kedaruratan. Adapun prasarana PKB yang mengalami kerusakan berat yaitu: Unit Pelaksana Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Bayu di Aceh Utara, UPPKB Lamno di Aceh Barat, PKB Banda Aceh, PKB Aceh Besar, PKB Aceh Timur, PKB Aceh Utara, PKB Lhokseumawe, dan PKB Aceh Barat. Gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 telah menyebabkan kerusakan yang cukup berat pada bangunan khususnya fasilitas LLAJ di Pulau Nias dan Simeulue.

Berdasarkan Rencana Induk, kebutuhan terminal dan stasiun DAMRI sebanyak 29 unit, namun dari hasil inventarisasi di lapangan, jumlah kebutuhan yang teridentifikasi turun menjadi 13 unit. Hal ini disebabkan karena pada beberapa daerah, fasilitas terminal existing masih dalam kondisi baik dan operasional. Prioritas pembangunan dilakukan pada ibukota/kabupaten yang belum memiliki fasilitas terminal dan beberapa ibu kota kecamatan yang sudah memenuhi persyaratan memiliki terminal. Sampai dengan April 2007, 8 unit terminal sedang dalam proses pembangunan. Sasaran 2008-2009 sebesar 8 unit terminal.

**Tabel 3.10 Sasaran Rencana Aksi Sub Terminal Bus dan LLAJ NAD - Nias**

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
Pembangunan Terminal dan stasiun/Pool Damri	unit	29	26	13	13
Rehab dan rekon sarana keselamatan LLAJ (rambu, traffic-light, pagar, patok, lampu)	unit	622.416	325	**	**
Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	unit	10	2	2	0
Rehab jembatan timbang	unit	3	2	0	2
Pengadaan bus bantuan	unit	131	36	28	***
Pembangunan halte bus	unit	60	60	0	***

Sumber : Bapel BRR, 2007

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Dilaksanakan oleh Pemda

Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas keselamatan LLAJ (rambu, *traffic light*, pagar, patok, lampu) direncanakan sebanyak 62.2416 unit. Dari hasil inventarisasi di lapangan, prioritas kebutuhan adalah sebanyak 4.002 unit. Berkurangnya jumlah rencana penanganan disebabkan karena diprioritaskan pada lokasi-lokasi tertentu yang sangat rawan terhadap kecelakaan. Disamping itu, pendanaan untuk kegiatan tersebut juga ikut dianggarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaannya dilakukan secara *sharing*. Pembangunan sarana fasilitas keselamatan LLAJ mulai dilaksanakan pada TA 2007 mengingat pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak jalan-jalan yang rusak dan belum representatif. Pada tahun 2007 dianggarkan dana sebesar 4.874.230.000 untuk pemasangan sebanyak 325 unit sarana keselamatan lalu lintas sedangkan sisanya dilaksanakan pada tahun 2008.

Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Rencana Induk dibangun sejumlah 10 unit. Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, kebutuhan terhadap prasarana tersebut berjumlah 4 unit. Lokasi pembangunan gedung PKB diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Fasilitas gedung PKB mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sejumlah 2 unit, yaitu di Meulaboh dan Langsa.

Pengadaan Bus Bantuan menurut Rencana Induk sebanyak 131 unit namun kebutuhan di lapangan adalah sebanyak 48 unit. Dari jumlah tersebut 28 unit diantaranya telah dilaksanakan pengadaannya pada tahun 2006 dan telah diserahkan serta dioperasikan oleh DAMRI sedangkan sisanya akan diadakan pada tahun 2007 dan 2008 untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembangunan/rehabilitasi jembatan timbang berdasarkan Rencana Induk sebanyak 3 unit, sementara kebutuhan di lapangan hanya dibutuhkan 2 unit untuk wilayah pantai Barat dan Selatan Propinsi NAD. Pembangunan 2 unit jembatan timbang tersebut direncanakan pada tahun 2008. Pembangunan halte bus sebanyak 60 unit yang tercantum dalam rencana induk tidak dilaksanakan karena tidak merupakan prioritas. Pembangunan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

### POS DAN TELEMATIKA

Pembangunan Kantor SAR dan BMG dalam rencana induk ditargetkan 1 unit dan 8 unit dimana sasaran tersebut diharapkan telah terselesaikan pada akhir tahun 2007. Dari 19 unit Kantor Pos yang merupakan sasaran rencana induk 16 unit telah terealisasi sehingga masih 3 unit Kantor Pos yang dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2008-2009.

Dalam kurun waktu 2005-2006, berbagai kegiatan untuk memfungsikan kembali prasarana transportasi dan telekomunikasi telah dilaksanakan untuk dapat memperlancar distribusi logistik, mobilisasi peralatan dan tenaga manusia bagi keperluan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri, sambil melakukan investigasi terhadap kebutuhan riil di lapangan. Bersamaan dengan itu, selanjutnya dipersiapkan pula studi-studi yang terkait dengan Master Plan dan Detailed Engineering Design untuk pengembangan berbagai sarana dan prasarana perhubungan.

**Tabel 3.11 Sasaran Rencana Aksi Sub Pos dan Telematika NAD - Nias**

Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
Kantor SAR	unit	1	1	1	0
Meteorologi dan Geofisika	unit	8	8	8	0
Pos dan Telematika	unit	19	27	21	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Permasalahan dan rencana tindak lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Jalan dan Transportasi pada intinya adalah mengembalikan dan memfungsikan transportasi darat, pelabuhan dan bandar udara yang telah rusak.

**Tabel 3.12 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub bidang Jalan dan Transportasi NAD – Nias**

Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan jalan Lintas Barat NAD (Jalan Nasional) sepanjang 35 km.</li> <li>• Pembuatan jalan Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional) sepanjang 164 km.</li> <li>• Pembuatan jalan Lintas Lainnya (Jalan Propinsi) sepanjang 165 km.</li> <li>• Pembuatan Jalan Propinsi P. Nias sepanjang 219 km.</li> <li>• Pembuatan jalan Kabupaten NAD dan Nias sepanjang 2.569 km.</li> <li>• Pembangunan Terminal dan stasiun/pool Damri sebanyak 13 unit.</li> <li>• Rehab dan rekon sarana keselamatan LLAJ (rambu, traffic-light, pagar, patok, lampu) sebanyak 325 unit.</li> <li>• Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sebanyak 2 unit.</li> <li>• Pengadaan bus bantuan sebanyak 8 unit.</li> <li>• Pembangunan Kantor Pos sebanyak 6 unit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembalikan dan memfungsikan jaringan transportasi darat dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan arteri nasional dan provinsi di NAD dan Nias, serta mengembangkan sistem jaringan transportasi darat untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana.</li> <li>• Mengembalikan dan memfungsikan pelabuhan dan bandar udara yang rusak, membuka dan memfungsikan kembali pelabuhan Lhokseumawe, Meulaboh untuk wilayah Barat dan Krueing (Malahayati), mengembangkan kapasitas Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Bandara Udara Cut Nyak Dhien di Meulaboh, serta meningkatkan kapasitas beberapa pelabuhan laut, merelokasi Pelabuhan Meulaboh dan Ulee Lheue.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

## 3.2.2 ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI

### 3.2.2.1 ENERGI DAN KELISTRIKAN

Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang energi dan listrik yang dilaksanakan oleh BRR lebih difokuskan pada pelayanan sambungan rumah, lebih khusus lagi untuk rumah-rumah yang baru selesai dibangun, rehabilitasi jaringan tegangan rendah (JTR), penggantian diesel-diesel pembangkit listrik yang rusak dan tidak fungsional dan sebagian jaringan tegangan menengah (JTM). Dari target 119.253 sambungan rumah, sampai dengan Desember 2006 telah dicapai 71.993 unit sambungan rumah /SR (48.1%). Pemasangan sambungan rumah terus dilaksanakan sejalan dengan progress penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana tsunami. Pada tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah pengadaan sambungan rumah sebanyak 61.927 unit SR (51.9%). Dengan demikian secara keseluruhan, target yang akan di capai sampai dengan 2007 untuk pengadaan listrik (sambungan rumah) mencapai 133.920 unit atau melebihi target yang tercantum dalam Rencana Induk. Kelebihan alokasi ini dimaksudkan untuk memenuhi target sambungan bagi pembangunan rumah baru sebanyak 120.000 unit dan permintaan masyarakat lainnya seperti bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, bangunan publik lainnya. Sebagai catatan: Kebijakan BRR selama ini adalah bahwa masyarakat korban tsunami dan gempa harus dibebaskan dari membayar Biaya Penyambungan (BP).

Dari target sasaran 2.394 km JTR dan 1.046 km JTM, sampai Desember 2006 telah dilaksanakan

sebanyak 570 km JTR dan 357,75 km JTM. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sepanjang 384,38 km JTR dan 217,81 km JTM. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 954,38 km JTR dan 470,44 km JTM. Sedangkan target sasaran 736 unit Gardu Distribusi (GD) dan 6 unit Gardu Hubung (GH), sampai Desember 2006 telah tercapai 278 GD dan 5 unit GH. Tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sebanyak 260 unit GD dan 1 unit GH. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 198 unit GD.

Pembangunan pembangkit listrik dengan target 16 unit, sampai Desember 2006 telah berhasil dicapai 11 unit pembangkit listrik. Pada tahun anggaran 2007 tidak ada pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik. Target pembangkit listrik tersebut belum termasuk target rekonstruksi pembangunan baru Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 2 x 42 MW. Pembangunan PLTA Peusangan akan dibiayai JBIC dengan percepatan proses pinjaman sehingga pelaksanaannya dapat dimulai akhir tahun 2007. Sebagai tambahan dari pemenuhan target rekonstruksi tersebut, PT. PLN juga sudah memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara sebesar 2X100 MW di kabupaten Nagan Raya. Disamping itu Departemen ESDM akan memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2X20 MW di Seulawah, kabupaten Aceh Besar. Untuk bangunan gedung layanan umum, dari sasaran target 6 unit bangunan gedung, BRR hanya akan membangun satu gedung pelayanan masyarakat di Merduati. Masih terdapat sisa target 5 gedung kantor termasuk kantor wilayah.

Pembangunan kembali gedung kantor wilayah NAD harus dibiayai oleh PT. PLN. Demikian juga pembiayaan pembangunan gedung-gedung lainnya. Rehabilitasi sebagian JTM dan JTR untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan. Sebagian perluasan rekonstruksi JTR dan JTM juga dibiayai dana APBN Departemen ESDM melalui program listrik desa.

Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik, BRR membiayai pengadaan 1.691 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 unit Pembangkit Listrik Mikro Hydro (PLTMH). Disamping itu Departemen ESDM melalui program Listrik Desa mengadakan 1.000 unit PLTS pada tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai 469 unit. Tahun anggaran 2008, perlu dilanjutkan pengadaan PLTS sebanyak 1.000 unit.

**Tabel 3.13 Sasaran Rencana Aksi Sub Listrik NAD - Nias**

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1	Pengadaan generator/PLTD	pkt	7	12	12	0
2	Perbaikan kantor PT. PLN	pkt	5	1	1	***
3	Pengadaan PLTD Apung baru	unit	2	-	-	-
4	Pembangunan PLTA Peusangan	UnitxMW	4x21	-	-	***-
5	Pembangunan PLTM (Mini Hidro)	Unit	2	-	-	-
6	Pembangunan PLTMH (Mikro Hidro)	Unit	-			
7	Pembangunan PLTS	Unit	**	3.133	3.133	-
8	Pembangunan PLTGU Banda Aceh	MW	2x30	-	-	-
9	Trasmission lines (SUTM dan SKTM)	Km	1.805	664	664	-
10	Distribution lines (SKTR)	Km	2.714	956	932	24
11	Stasiun Distribusi	Unit		557	557	-
12	Sambungan Pelanggan	Unit	119.253	141.010	141.010	-
13	Gardu Distribusi	Unit	883	557	557	-

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Dilaksanakan oleh PLN

## B. ENERGI

Sebagian besar rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan oleh PT. Pertamina dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyaluran BBM. Khusus untuk pembangunan Depo BBM di pulau Simeulue, BRR menggantikan peran Pemerintah Provinsi yang sedang lumpuh dalam kewajiban berkontribusi pembiayaan pembangunan Depo BBM di pulau tersebut. BRR membantu sepertiga (atau senilai Rp. 10 milyar) dari biaya pembangunan Depo BBM di Simeulue. Pada akhir Desember 2006, pembangunan Depo BBM Simeulue saat sudah mencapai 71 persen dan kontribusi BRR sebesar Rp. 10 milyar telah dibayarkan kepada kontraktor PT. Pertamina pada bulan Desember 2006.

Selain penanganan masalah BBM, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung dinas, gedung dan peralatan laboratorium, gedung balai latihan kerja (BLK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NAD, pengadaan peralatan pertambangan rakyat dan peralatan pengeboran sumur dalam. Selain itu BRR juga membangun kembali 3 unit gedung pemantau gunung api yang hancur berikut pengadaan peralatan pemantau gunung api.

**Tabel 3.14 Sasaran Rencana Aksi Sub Energi NAD - Nias**

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Depo BBM	Unit	3	1	1	-
2	Gedung ESDM	Unit	1	3	3	-
3	Pemantau Gunung Api	Unit	3	3	3	-

Sumber : Bapel BRR, 2007

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Dilaksanakan oleh KL / Pertamina

Program kegiatan pada sub bidang energi berdasarkan data realisasi belum dilaksanakan sehingga Sasaran Kegiatan 2008-2009 pada masing-masing kegiatan seperti yang tercantum pada rencana induk.

### 3.2.2.2 TELEKOMUNIKASI

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang, maka BRR telah melaksanakan rehab 4.310 SST, yang merupakan capaian sampai dengan awal tahun 2007, meliputi wilayah Meulaboh, Simpang Peut, Kaway XVI. Sedangkan sisanya untuk wilayah yang lain akan ditangani oleh PT.TELKOM tbk.

Infrastruktur ICT (VSAT & Wifi base) telah dibangun di 21 lokasi (seluruh ibukota kabupaten di Propinsi NAD) dan selesai pada tahun 2006, sehingga sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, rencana ke depan akan dilakukan migrasi dari Wifi ke Wimax karena dilandasi dasar pemikiran awal bahwa NAD adalah propinsi Cyber pertama di Indonesia. Hal ini merupakan sasaran baru untuk terciptanya pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan distribusi informasi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, bisnis, pegawai, dan departemen lainnya serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri (target e-government dan e-community). Migrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Sasaran kegiatan 2008-2009 sub bidang telekomunikasi yaitu Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio sejumlah 143 unit, BMF UPT Postel sejumlah 1 unit, PS RRI-TVRI 9 unit, Radio Broadcast EWS 1

unit, dan Fasilitas Telematika 8 unit.

**Tabel 3.15 Sasaran Rencana Aksi Sub Telekomunikasi NAD - Nias**

No	Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
	Pos dan Telekomunikasi					
1	Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio	unit	143	**	**	**
2	Rehab/Rekonstruksi BMF UPT Postel	unit	1	**	**	**
3	Rehab/rekonstruksi PS RRI-TVRI	paket	9	**	**	**
4	Radio Broadcast EWS	paket	1	**	**	**
5	Fasilitas Telematika		*	12	4	8
6	Pemb Infrastruktura WIMAX Prov. NAD dan P Nias		*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

**Tabel 3.16 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Energi dan Telekomunikasi NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi sebanyak 12 paket.</li> <li>Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan sebanyak 13 paket.</li> <li>Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi, sasaran tersebar.</li> <li>Pengadaan generator sebanyak 7 paket.</li> <li>Perbaikan kantor PT. PLN sebanyak 5 paket.</li> <li>Pengadaan PLTD Apung baru sebanyak 2 paket.</li> <li>Pengembangan Sistem Ketenagalistrikan NAD, sasaran tersebar.</li> <li>Pembangunan jaringan transmisi sasaran tersebar.</li> <li>Pembangunan PLTA / PLTM / PLTMH sebanyak .</li> <li>Pembangunan PLTG sebanyak 2 unit.</li> <li>Pembangunan Transmission lines (SUTM dan SKTM).</li> <li>Pembangunan Distribution lines (SKTR).</li> <li>Pembangunan Fastel Desa PFS-PASTI dan Radio : 143 unit.</li> <li>Rehab/Rekonstruksi BMF UPT Postel sebanyak 1 unit.</li> <li>Rehab/rekonstruksi PS RRI-TVRI sebanyak 9 paket.</li> <li>Pengadaan Radio Broadcast EWS sebanyak 1 paket.</li> <li>Pengadaan Fasilitas Telematika sebanyak 8 paket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pembangunan jaringan telekomunikasi menggunakan teknologi wireless line</li> <li>rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada</li> <li>pemanfaatan teknologi nirkabel untuk fasilitas komunikasi baru</li> <li>memberikan kemudahan akses telekomunikasi</li> <li>menjadikan Stasiun RRI dan TVRI Stasiun Banda Aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam</li> <li>mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos</li> <li>pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai</li> <li>mengupayakan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan</li> <li>mengupayakan diversifikasi sumber energi listrik dari PLTD ke PLTA dan PLTG termasuk mengoperasikan kembali PLTG Arun (60 MW).</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.2.3 INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Sasaran Kegiatan 2008-2009 Bidang Sumber Daya Air yaitu dari 121.884 ha kebutuhan riil rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Irigasi, sampai dengan akhir 2007 diperkirakan akan terealisasi 109.978

ha sehingga sasaran penyelesaian rehabilitasi rekonstruksi sebesar 11.906 ha. Dari 132.938 m kebutuhan riil rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Pengendalian Banjir, sampai dengan akhir 2007 diperkirakan akan terealisasi 90.852 m sehingga sasaran penyelesaian rehabilitasi rekonstruksi sebesar 42.086 m. Dari 139.745 m kebutuhan riil rehabilitasi dan rekonstruksi sub Bidang Pengaman Pantai, sampai dengan akhir 2007 diperkirakan akan terealisasi 81.230 m sehingga sasaran penyelesaian rehabilitasi rekonstruksi sebesar 58.515 m.

Selanjutnya Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air (Irigasi, Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai).

**Tabel 3.17 Sasaran Rencana Aksi Sub Sumber Daya Air NAD –Nias**

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk	Kebutuhan Riil	Proyeksi	Sasaran
			2005-2009	2005-2009	2005- 07	2008-09
1	Irigasi	ha	118.028	121.884	109.978	11.906
2	Pengendalian Banjir	m'	138.795	132.938	90.852	42.086
3	Pengaman Pantai	m'	69.057	139.745	81.230	58.515

Sumber : Bapel BRR, 2007

**Tabel 3.18 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Sub Bidang Sumber Daya Air (Irigasi, Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai).**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian rehab rekons Irigasi 11.906 ha.</li> <li>Penyelesaian rehab rekons Pengendalian Banjir 42.086 m</li> <li>Penyelesaian rehab rekons Pengaman Pantai 58.515 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritas penanganan prasarana pengendalian banjir yang diarahkan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman serta menjaga keterpaduan fungsi dengan sistem drainase kota</li> <li>Mengarahkan irigasi untuk mendukung pulihnya kegiatan usaha tani dalam arti luas</li> <li>memprioritaskan daerah irigasi yang bersifat quick yielding</li> <li>Melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi</li> <li>menyelaraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif</li> <li>memprioritaskan dukungan penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan-lahan pertanian pada wilayah pantai Barat.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.2.4 AIR MINUM DAN SANITASI

Sasaran Rekonstruksi 2008-2009 yaitu Prasarana Air Bersih dengan kapasitas 2.976 Lt/dtk, Rekonstruksi Prasarana Pembuangan Limbah untuk 251.507 Rumah, Rekonstruksi Prasarana persampahan untuk 541.552 rumah, dan Drainase sepanjang 79.752m (Tabel III.19). Selanjutnya permasalahan dan rencana tindak lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air disajikan pada Tabel III.20.

**Tabel 3.19 Sasaran Rencana Aksi Sub Air Minum dan Sanitasi NAD – Nias.**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
a Air Bersih	Lt/dtk	3.256	1.467	480	2.976
b Pembuangan Limbah	Rumah	543.217	365.243	291.710	251.507
c Sampah	Rumah	543.217	**	**	**
d Drainase	m'	106.347	27.563	26.202	79.752

Sumber : Bapel BRR, 2007

\*\* : Data belum tersedia

**Tabel 3.20 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Sumber Daya Air (Air Minum, Sanitasi dan Drainase) NAD - Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Rekons prasarana Air Bersih dengan kapasitas 2.976 Lt/dtk.</li> <li>• Penyelesaian Rekons prasarana Pembuangan Limbah untuk 251.507 rumah.</li> <li>• Penyelesaian Rekons prasarana persampahan untuk 541.552 rumah.</li> <li>• Penyelesaian Rekons prasarana Drainase sepanjang 79.752 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di perkotaan rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama dan terpenuhinya kebutuhan air minum minimal untuk lokasi-lokasi pengungsian yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan perbaikan/pembangunan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar</li> <li>• di daerah pedesaan yang skala pekerjaannya lebih kecil dan terpisah (<i>scattered</i>), didorong untuk menggunakan teknologi sederhana berdasarkan pendekatan masyarakat.</li> <li>• rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana air limbah meliputi penanganan air limbah untuk daerah-daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) yang dilakukan dengan pendekatan <i>best practice</i></li> <li>• Di daerah perkotaan, kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual.</li> <li>• memfungsikan saluran primer maupun saluran sekunder dan menjaga keterpaduan antara pembangunan prasarana drainase kota dengan prasarana pengendali banjir lainnya</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.2.5 FASILITAS DAN BANGUNAN PUBLIK

Sasaran 2008-2009 yang masih harus dilanjutkan pada sub bidang Fasilitas dan Bangunan Publik adalah Pembangunan Escape Hill sebanyak 5 unit, dan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi program dan Proyek Infrastruktur NAD-Nias sebanyak 1 unit (Tabel III.21). Selanjutnya Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Fasilitas dan Bangunan NAD – Nias (Tabel III.22).

**Tabel 3.21 Sasaran Rencana Aksi Sub Fasilitas dan Bangunan Publik NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Pusat Pelatihan Mitigasi Bencana Banda Aceh	unit	*	1	4	0
2 Escape Hill	unit	5	0	0	5
3 Escape Building	unit	*	5	5	0
4 Museum Tsunami Banda Aceh	unit	*	1	2	0
5 Pusat Kualitas Struktur dan Lab	unit	*	1	1	0
6 Koordinasi dan Konsultasi program dan Proyek Infrastruktur NAD-Nias	pkt	*	1	0	1
7 Bangunan Pemerintah	pkt	*	1	**	**
8 Pasar	pkt	1	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

**Tabel 3.22 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Infrastruktur Sub Bidang Fasilitas dan Bangunan NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Escape Hill sebanyak 5 unit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan fasilitas umum yang diamanatkan perlu dibangun adalah berupa fasilitas yang terkait dengan fasilitas umum penyelamatan jiwa manusia, jika terjadi lagi bencana tsunami, yaitu bukit penyelamat ('Escape Hills') dan Bangunan penyelamat ('Escape Buildings') serta bangunan museum tsunami, yang akan dibangun di beberapa tempat sesuai dengan potensi kesesuaian untuk tujuan dimaksud.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.3 BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bidang Sosial Kemasyarakatan meliputi beberapa kelompok kegiatan yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Budaya dan Sumberdaya Manusia (Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Pemuda dan Olahraga). Bidang ini ditangani dalam 2 ke deputian, yaitu Ke deputian PKPP (Pendidikan Kesehatan dan Peranan Perempuan) yang juga menangani isu Keluarga Berencana, serta Ke deputian Agama, Sosial dan Budaya, yang juga menangani isu Pemuda dan Olahraga.

#### 3.3.1 PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

##### SUB BIDANG PENDIDIKAN

Sesuai dengan rencana induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan berupa program pembangunan fasilitas (gedung) untuk pendidikan darurat/ sementara, program pendidikan anak usia dini, memantapkan program pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi serta penelitian dan pengembangan pendidikan di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).

Berikut uraian kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan.

**Tabel 3.23 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD - Nias (Program Pendidikan Anak Usia Dini)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
A	Pembangunan Gedung darurat/ sementara	Unit/ Ruang	12	295	295	0
B	Program Pendidikan Anak Usia Dini/TK					
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit TK	101	76	63	13
2	Perabot/ Peralatan	Set/ paket	125	106 set dan 2 paket	106	2 paket
3	Materi belajar mengajar		125	126	126	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

Kebutuhan riil pada gedung darurat ternyata lebih besar dari yang tercantum pada Rencana Induk. Sedangkan Program kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ternyata tidak sebanyak yang disebutkan dalam Rencana Induk. Pada rehabilitasi dan pembangunan TK dan bantuan peralatannya, terlihat target realisasi lebih dari separuhnya sampai dengan tahun 2006. Realisasi ini terutama berasal dari pendanaan yang bersumber dari bantuan NGO dan Donor (non APBN). Sasaran 2008-2009 Program Pendidikan Anak Usia Dini yang masih harus dilanjutkan yaitu Rehabilitasi dan pembangunan TK 13 unit, dengan 12 unit melalui pembiayaan NGO. Perabot/ Peralatan 2 paket, yaitu 1 paket di Nias dan 1 paket di Nias Selatan.

Program wajib belajar 9 tahun, terdiri atas pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa. Kebutuhan riil rehabilitasi gedung pendidikan Sekolah Dasar tidak sebanyak yang dicantumkan pada Rencana Induk, namun pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) yang lebih diperlukan. Begitu pula program paket belajar, pembangunan unit sekolah baru, pengembangan fasilitas/komputer sekolah, meubelair dan trauma konseling. Keadaan serupa juga ditemukan pada program sekolah menengah pertama.

**Tabel 3.24 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Wajib 9 tahun)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
<b>A</b> Sekolah Dasar					
Rehabilitasi sekolah	SD	1.093	664	629	35
Pembangunan USB	SD	25	30	30	0
Pembangunan RKB	Ruang	12	122	122	0
Pembangunan Rumah Guru	Unit	TD		178	
Rehabilitasi sekolah akibat konflik	SD	111		23	
Meubelair	Sekolah/ pkt	143 sekolah		562	
Paket Belajar	pkt	207.196		689.526	
Pengembangan Telekomunikasi, Komputer dll	pkt	1	3	3	0
Trauma Conseling	Kab	2	16	16	0
Fasilitas sanitasi	Unit SD	TD	60	60	0
<b>B</b> Sekolah Menengah Pertama					
Rehabilitasi berat, rehabilitasi ringan dan Pembangunan kembali sekolah yang hancur	SMP	387	1427	146	457
Pembangunan USB	Unit	84		76	
Pembangunan RKB pengembangan	Ruang	1.150		709	
Pembangunan Sekolah Binaan/ Unggul	Paket	TD	39	39	
Pembangunan Asrama Siswa	Unit	75		4	
Meubelair	Pkt	377		120	
Investasi Mutu				-	
Alat Ketrampilan	set	53	53	30	23
Pelatihan Guru	Org	40.000	18.029	18.029	0
Pengembangan Mutu Sekolah	skl	90	90	53	37
Kegiatan Kesiswaan	skl	2.386	210	210	0
Pengembangan IT untuk SMP	pkt	1	8	8	0
Akreditasi Sekolah	SMP	239	20	20	0

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
C Pendidikan Luar Biasa/SLB					
Pembangunan UGB	lokasi	6	5	5	0
Rehabilitasi Gedung	Ruang	11	4	4	0
Bantuan Meubelair	skl	6	5	5	0
Sarana Prasarana	lokasi	20	5	5	0
Peralatan Pendidikan	unit	22	5	5	0
Peralatan Kantor	unit	27	5	5	0

Sumber: Bapel BRR, 2007

Catatan : Dalam hal sampai dengan Program tahun 2008-2009 belum mencapai sasaran kebutuhan riil melalui dana APBN-BRR, maka sebagian kegiatan ditangani oleh Pemda (APBD) dan atau Donor/ NGO

Keterangan :

TD : Tidak Disebutkan (dalam Rencana Induk)

\* : Sama seperti Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

Pada pendidikan menengah, program diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu pendidikan SMA, SMK, dan Madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah).

**Tabel 3.24 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias (Program Pendidikan Menengah)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
A SMU					
1 Pembangunan RKB	Paket	530	530	269	261
2 Pembangunan UGB Reguler dan Berasrama	Unit	43	42	40	2
3 Rehabilitasi	skl	167	148	76	72
4 Meubelair	pkt	5	90	85	5
5 Buku perpustakaan	Expl	973.308	973.208	487.000	486.208
6 Laboratorium IPA (Kimia, Fisika dan Biologi) dan Komputer	pkt	458	140	44	96
7 Ruang Serbaguna/ RPL	pkt	100	100	42	58
8 Fasilitas Ibadah	pkt	100	100	0	100
9 Peralatan Olahraga dan Seni	pkt	100	100	69	31
10 Pengembangan sekolah bertaraf International	skl	20	20	7	13
11 Operasional dan pemeliharaan	skl	1.120	1.120	0	1.120
12 Peningkatan kapasitas manajemen sekolah	skl/org	92	360	360	0
B SMK					
1 Rehabilitasi gedung (berat dan sedang)	unit	22	14	1	13
2 Pembangunan/ Rekonstruksi	unit	2	3	1	2
3 Pembangunan RKB	ruang	34	34	**	34
4 Pendidikan dan pelatihan siswa (untuk 24 TC/CC)	siswa	2.400	240	100	140
5 Bantuan Peralatan dan meubeler	lokasi	67	67	0	67

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
6	Bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS)	skl	152	152	0	152
7	Vocational Training	Org	TD	**	10.975	**
C	PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)	UNIT				
1	Pembangunan RKB madrasah		TD	291	291	0
2	Pembangunan UGB Madrasah		TD	52	32	20
3	Pembangunan BKG Madrasah		TD	31	31	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

TD : Tidak Disebutkan (dalam Rencana Induk)

\* : Sama seperti Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

Sasaran 2008-2009 Program-Program Pendidikan Menengah yang masih harus dilanjutkan yaitu:

1. SMA. Pembangunan RKB 261 unit, Pembangunan UGB Reguler dan Berasrama 2 unit, Rehab 72 sekolah, Meubelair 5 paket, Buku perpustakaan 486.208 unit, Laboratorium IPA dan Komputer 96 unit, Ruang Serbaguna/RPL 58 unit, Fasilitas Ibadah 100 unit, Peralatan Olahraga dan Seni 31 unit, Pengembangan sekolah bertaraf International 13 unit, Operasional dan pemeliharaan 1.120 sekolah.
2. SMK. Rehab gedung 13 unit, Pembangunan 2 unit, Pembangunan RKB 34 ruang, Pendidikan dan pelatihan siswa 140 orang, Bantuan Peralatan dan meubelair 67 lokasi, bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS) 152 sekolah.
3. Madrasah. Pembangunan UGB Madrasah 20 unit

Program dan kegiatan pendidikan tinggi, menitikberatkan pada kegiatan fisik dan pemberian santunan/ bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada mahasiswa/ dosen yang melakukan studi. Hampir seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan dalam rencana induk (pencapaian lebih dari 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum terealisasi yaitu perbaikan dan perluasan asrama mahasiswa (realisasi 0%) sampai dengan tahun 2007.

**Tabel 3.25 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
PENDIDIKAN TINGGI (4 PT + swasta)						
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	OB	900	900	0	900
2	Kompensasi SPP 2004/2005	Mhs	-	-	0	0
3	Beasiswa mahasiswa korban tsunami/ kurang ampu/ ikatan dinas	Mhs	13.500	43.753	40.746	3.027
4	Penggantian ruang kantor dan Laboratorium	pkt	4	4	4	0
5	Penggantian meubelair kuliah, laboratorium dan kantor	pkt	17	17	16	1
6	Perbaikan Mess Dosen	pkt	2	2	2	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
7	Penggantian meubelair asrama mahasiswa	pkt	2	2	2	0
8	Perbaikan Asrama Mahasiswa	m2	5.900	5.900	0	5.900
9	Penggantian/pengadaan peralatan Laboratorium	pkt	26	26	8	18
10	Penambahan Luas asrama mahasiswa	pkt	1	1	0	1
11	Penggantian Kendaraan Dinas	unit	10	10	8	2
12	Santunan dosen/tenaga adm PT	org	213	500	500	0
13	Penggantian Bus kampus	unit	15	15	0	15
14	Perbaikan pagar kampus	m	5.200	5.200	0	5.200
15	Perbaikan jalan Kampus	pkt	1	2	2	0
16	Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3	org	150	369	229	140
17	Pembangunan Rumah Dosen	pkt	1	5	5	0
18	Pembuatan sumur dan jaringan air bersih	unit	3	3	3	0
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1	1	1	0
20	Meubelair Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1	1	1	0
21	Rehabilitasi gedung PGSD Unsyiah	pkt	1	2	2	0
22	Meubelair PT	pkt	1	8	8	0
23	Perbaikan gedung pendidikan PT	pkt	7	23	23	0
24	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTN & PTS	pts	3	7	7	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Sama seperti Rencana Induk

0 : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Pendidikan Tinggi yang masih harus dilanjutkan yaitu: Penyediaan dosen bantu 6 bulan 900 orang, Penggantian meubelair kuliah, laboratorium dan kantor 1 paket, Perbaikan Asrama Mahasiswa 5.900 m<sup>2</sup>, Penggantian/ pengadaan peralatan Lab 18 pkt, Penambahan Luas asrama mahasiswa 1 pkt, penggantian Kendaraan Dinas 2, Penggantian Bus kampus 15 unit.

**Tabel 3.26 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Teaching Grant	Keg	56	56	51	5
2	Riset	Keg	56	81	81	0
3	Bantuan Praktek Mahasiswa dan ekstra kurikuler	OB	1.800	1800	837	963
4	Akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan data base	Keg	TD	40	40	0
5	TOEFL dan POT dosen	Org	TD	180	180	0
6	Matrikulasi mahasiswa Undangan	Org	TD	540	540	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
7	Buku Pustaka	Pkt	59	59	11	48
8	Monitoring dan pengawasan	Keg	184	184	8	176

Sumber : Bapel BRR, 2007

TD : Tidak Disebutkan

0 : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan yang masih harus dilanjutkan yaitu: *Teaching Grant* 5 keg, bantuan praktek mahasiswa dan ekstra kurikuler 963 org, Buku Pustaka 48 pkt, Monitoring dan pengawasan 176 keg.

Selanjutnya Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias disajikan pada Tabel III.27.

**Tabel 3.27 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial  
Kemasyarakatan Sub Bidang Pendidikan NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<p><b>TK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan pembangunan TK sebanyak 13 unit.</li> <li>• Pengadaan Perabot/Peralatan sebanyak 19 set.</li> </ul> <p><b>SMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan RKB 261 unit.</li> <li>• Pembangunan UGB Reguler dan Berasrama 2 unit.</li> <li>• Rehabilitasi 72 paket.</li> <li>• Penyediaan Meubelair, sebanyak 5 paket.</li> <li>• Pengadaan Buku perpustakaan sebanyak 486.208 eksemplar</li> <li>• Laboratorium IPA dan Komputer sebanyak 96 pkt</li> <li>• Ruang Serbaguna/RPL sebanyak 58 pkt</li> <li>• Pengadaan Fasilitas Ibadah 100 pkt</li> <li>• Penyediaan Peralatan Olahraga dan Seni 31 pkt</li> <li>• Pengembangan sekolah bertaraf international 13 skl</li> <li>• Operasional dan pemeliharaan 1.120 skl</li> </ul> <p><b>SMK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi gedung 13 unit</li> <li>• Pembangunan 2 unit</li> <li>• Pembangunan RKB sebanyak 34 ruang</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan siswa sebanyak 140 orang</li> <li>• Bantuan Peralatan dan meubeler sebanyak 67 set</li> <li>• Penyediaan bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS sebanyak 152 paket.</li> </ul> <p><b>PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan UGB sebanyak 20 unit.</li> </ul> <p><b>PENDIDIKAN TINGGI (4 PT + swasta)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dosen bantu 6 bulan sebanyak 900 OB</li> <li>• Penggantian meubeler kuliah, laboratorium dan kantor sebanyak 1 PAKET</li> <li>• Perbaikan Asrama Mahasiswa seluas 5.900 m<sup>2</sup></li> <li>• Penggantian/pengadaan peralatan Laboratorium sebanyak 18 paket</li> <li>• Penambahan Luas asrama mahasiswa sebanyak 1 paket</li> <li>• Penggantian Kendaraan Dinas sebanyak 2 unit</li> <li>• Penggantian Bus kampus sebanyak 15 unit</li> <li>• Perbaikan pagar kampus seluas 5.200 m.</li> </ul> <p><b>LITBANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teaching Grant sebanyak 5 KEG</li> <li>• Bantuan Praktek Mahasiswa dan ekstra kurikuler sebanyak 963 ob</li> <li>• Kebutuhan Buku Pustaka sebanyak 48 pkt</li> <li>• Kebutuhan Monitoring dan pengawasan sebanyak 176 keg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah.</li> <li>• Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik khususnya untuk penyandang cacat</li> <li>• Perekrutan tenaga pendidik untuk mengganti tenaga didik yang meninggal akibat bencana</li> <li>• Penampungan peserta didik yang tidak mempunyai orang tua lagi di panti asuhan</li> <li>• Mobilisasi sumberdaya dan pemberdayaan semua potensi pemerintah, masyarakat dan swasta</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### SUB BIDANG KESEHATAN

Berdasarkan Rencana Induk pemulihan bidang Kesehatan memuat tentang beberapa kegiatan yang meliputi upaya pengelolaan, pemeliharaan, pemulihan, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan masyarakat, kefarmasian, peralatan, perbaikan gizi, penelitian, kebijakan dan lain-lain.

Utamanya untuk program yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dilaksanakan pada periode tahun 2005-2006, sedangkan perbaikan manajemen dan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pada umumnya dilaksanakan pada tahun 2007. Rata-rata pencapaian realisasi hingga tahun 2007 telah melampaui amanat rencana induk (100%) untuk hampir seluruh program.

Pelaksanaan Program upaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, capaiannya rata-rata telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, operasional dan pemeliharaan rumah sakit serta pendidikan dan pelatihan teknis realisasinya telah mencapai lebih dari 100% dan utamanya dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang sampai dengan tahun 2007 belum terealisasi sepenuhnya seperti pembangunan rumah dinas (4.8%), pengadaan kendaraan(7.2%) maupun pembangunan dan perawatan gedung kesehatan dan pendidikan.

**Tabel 3.28 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias (Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	250	250	0
2 Pembangunan Rumah Negara					
- Rumah Dinas	pkt	21	21	1	20
- Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	pkt	42	149	117	32
3 Pembangunan atau Rehabilitasi dan Perawatan Gedung Kesehatan/ Pendidikan	pkt				
- Kantor Dinas Kesehatan	pkt	5	15	5	0
- Rumah Sakit	pkt	9	31	7	6
- Pustu	pkt	174	174	124	50
- Polindes	pkt	700	700	236	464
- Klinik	pkt	6	6	5	1
- BBPOM	pkt	3	1	1	0
- Laboratorium Kesehatan	pkt	1	1	1	0
4 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	4	12	12	0
5 Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB	unit	4	43	43	0
6 Pengadaan Kendaraan Roda 4/ Roda 6/Roda 10 (ambulance)	unit	69	69	5	64

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan yang masih harus dilanjutkan yaitu: Rumah Dinas 20 pkt, Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas 32 pkt, Kantor Dinas Kesehatan 3 pkt, Pustu 123 pkt, Polindes 640 pkt, Klinik 1 pkt, Pengadaan Kendaraan (*ambulance*) 64 unit.

Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, terdiri dari dua kegiatan dengan capaian yang telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan riil.

**Tabel 3.29 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias  
(Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	pkt	1	24	24	0
2	Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	pkt	2	3	3	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah telah terlaksana semua.

Realisasi program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan seluruhnya telah mencapai lebih dari 100% dari rencana induk. Pengadaan peralatan medis dan pembangunan gedung farmasi/obat telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2006 dan diteruskan lagi pada tahun 2007. Demikian pula dengan program peningkatan kesehatan masyarakat.

**Tabel 3.30 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias  
(Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
A	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		6	21	21	0
1	Pengadaan Peralatan Medis di Laboratorium Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan	pt	1	2	2	0
2	Pembangunan Gudang Farmasi/ Obat	pt	5	19	19	0
B	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		119	298	298	0
1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Puskesmas	unit	64	136	136	0
2	Pelayanan Kesehatan di Pengungsian/ Poskeslit	unit	55	162	162	0

Sumber : Bapel BRR, 2007; Ket : 0 : Sudah terlaksana

Sasaran Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat telah terealisasi semua.

Demikian pula dengan program pengkajian dan penelitian bidang kesehatan. Realisasi telah mencapai 100% untuk seluruh kegiatannya. Bahkan pada program perbaikan gizi masyarakat, realisasi mencapai lima kali lipat dari amanat rencana induk (lebih dari 500%) dan telah dilaksanakan pada 21 kota/ kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selanjutnya pada program pengembangan pendidikan

tenaga kesehatan, seluruh kegiatan telah melampaui amanat rencana induk (lebih dari 100%) kecuali pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan yang baru mencapai realisasi 33% (2 unit) dari amanat rencana induk.

Sasaran 2008-2009 Program Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat telah cukup memadai.

**Tabel 3.31 Program Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
A	Pengkajian dan Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan					
1	Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	pkt	1	1	1	0
2	Penelitian, Pengkajian Dan Pelaksanaan Terapan	pkt	1	1	2	0
B	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan					
1	Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	pkt	1	1	1	0
2	Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	1	1	4	0
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan	pkt	6	14	14	0
C	Perbaikan Gizi Masyarakat					
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kab/Kota	21	21	21	0
2	Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Kab/Kota	21	21	21	1 paket

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Program pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat menjadi sasaran tahun 2008 dalam 1 paket kegiatan penanganan kasus gizi buruk tingkat kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya pada program penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan dan program penyelenggaraan penyehatan lingkungan, realisasi seluruhnya telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk sejak periode tahun 2005-2006. Selanjutnya beberapa penambahan juga dilaksanakan realisasinya pada tahun 2007.

**Tabel 3.32 Program Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana, Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan.**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
A	Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan					
I	Administrasi Umum	pkt	1	1	1	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	3	3	0
3	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan	pkt	1	24	24	0
B	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan					
I	Program Promosi Kesehatan	pkt	1	1	2	0
C	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan					
I	Peningkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasar	pkt	1	72	72	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Program Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan telah terealisasi semua.

**Tabel 3.33 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial  
Kemasyarakatan Sub Bidang Kesehatan NAD - Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<p>Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan Rumah Dinas: 20 unit</li> <li>• Kebutuhan Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas: 32 unit</li> <li>• Kebutuhan Kantor Dinas Kesehatan: 3 pkt</li> <li>• Lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi RSUD Sigli, RSUD Idi, RSUD Peurlak dan RSUD Gayo Lues</li> <li>• Rehabilitasi RSUD St Lukas dan RSUD Meureudu</li> <li>• Kebutuhan Pustu: 50 paket</li> <li>• Kebutuhan Polindes: 464 paket</li> <li>• Kebutuhan Klinik, 1 paket</li> <li>• Kebutuhan BBPOM: 1 paket</li> <li>• Kebutuhan Laboratorium Kesehatan, 1 paket</li> <li>• Pengadaan Kendaraan Roda4/Roda 6/Roda 10 (ambulance): 64 unit</li> </ul> <p>Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), 1 pkt</li> <li>• Program Pengkajian &amp; Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan &amp; Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>• Identifikasi dan evaluasi penanganan gizi buruk: 1 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain dan menempatkan serta mengangkat tenaga kesehatan baru</li> <li>• Melatih tenaga kesehatan</li> <li>• Merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak</li> <li>• Memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>• Melakukan imunisasi</li> <li>• Vector control</li> <li>• Disinfeksi dan penyediaan air minum</li> <li>• Memperkuat surveillance epidemiologi</li> <li>• Memperbaiki paket penyuluhan gizi.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### **SUB BIDANG PERANAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN ANAK DAN KB**

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang pemberdayaan perempuan, yang mengacu pada rencana induk, terutama berkenaan dengan Program Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi NAD dan Nias kepulauan.

Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2006 terdapat program dengan capaian sesuai target rencana induk (100%), melebihi target rencana induk ( $\geq 100\%$ ) dan adapula yang belum sesuai target rencana induk bahkan sampai tahun 2007, seperti revitalisasi kelembagaan (5,9%), pengarusutamaan gender dan survey *assessment* kebutuhan khusus perempuan. Untuk program/ kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target rencana induk akan dilakukan penajaman sasaran disesuaikan dengan kebutuhan riil.

Program rehabilitasi psikologis dan peningkatan keterampilan perempuan, pemberian beasiswa kepada ulama perempuan dan sosialisasi kepada masyarakat desa telah mencapai target sasaran rencana induk (100%). Selanjutnya untuk *assessment* daya dan kebutuhan khusus perempuan pencapaiannya sebesar 29.4%. adapun revitalisasi kelembagaan dan pengarusutamaan gender masing-masing pencapaiannya baru mencapai 5.9%.

**Tabel 3.34 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Penguatan Kelembagaan)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENG-ARUS-UTAMA-AN					
	GENDER DAN ANAK					
a	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	55	3	3	0
b	Peng-arus-utama-an Gender	Paket	57	3	3	0
c	Assessment data dan kebutuhan	survai	19	5	5	0
	Rehabilitasi Psikologis dan Peningkatan Keterampilan Perempuan	Paket	*	1	1	0
	Beasiswa Bagi Ulama Perempuan, Pelatihan dan Kursus Singkat Bagi Pemimpin Perempuan	Paket	*	1	1	0
	Sosialisasi Garapan Kepada Masyarakat Desa	Paket	*	1	1	0
	Community Volunteer Training Bagi Remaja Desa	Paket	*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Kegiatan Pada Program Penguatan Kelembagaan telah terealisasi semua. Selanjutnya pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan memiliki beberapa kegiatan yang berkenan dengan fasilitasi program, *workshop*, pemberdayaan ekonomi, sosial dan hukum bagi perempuan, pelatihan dan penyediaan sarana publik bagi kaum perempuan.

Realisasi program yang telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk adalah pelatihan *life skill* dan *vocational*, bantuan dengan kompetensi bagi masyarakat dan *workshop 'trafficking'* dan *'judicial watch networking'* (masing-masing pencapaian 100% hingga tahun 2007). Pencapaian tersebut terutama pada periode tahun 2005-2006. Selanjutnya program lain mencapai lebih dari 100% kecuali program fasilitasi 'woman crisis center' (19.6%) dan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (2.6%). Untuk program dan kegiatan yang realisasi pencapaiannya rendah dan belum merupakan prioritas untuk ditangani, akan dilakukan evaluasi untuk menetapkan kebutuhan riil.

**Tabel 3.35 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
a	Fasilitasi Women Crisis Center	Unit	57	10	10	0
b	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Kelompok	6	23	23	0

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
c PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN	Kelompok	1.951	5300	5.300	0
d Dukungan Hukum untuk Perempuan	Paket	17	218	218	0
e Training lifeskill dan vocational skill untuk perempuan	Paket	TD	1	1	0
f Bantuan pada kelompok pengajian	Paket	TD	2100	2.100	0
g Bantuan untuk masyarakat dengan kompetensi	Paket	TD	1	1	0
h Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan	Unit	TD	49	49	0
i Workshop gugus anti trafficking	Paket	TD	1	1	0
j Workshop judicial watch networking	Paket	TD	1	1	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

TD : Tidak Dicantumkan (dalam Rencana Induk)

0 : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan yang masih harus dilanjutkan yaitu Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan 1 pkt.

Pada program/ kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, mengkonsentrasikan pada rehabilitasi psikologis anak dan keluarga pasca bencana serta kelengkapan kebutuhan administrasi kependudukan. Hampir seluruh program telah mencapai target realisasi yang telah ditetapkan oleh rencana induk seperti TOT pola asuh anak, qanun perlindungan anak, penyelenggaraan kongres anak, dan pedoman dan KIE (pencapaian 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang realisasinya di bawah 100% yaitu reunifikasi keluarga (1.8%) dan fasilitasi *children center and kid counseling* (29.4%). Adapun kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Satker realisasinya baru mencapai 50%.

**Tabel 3.36 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
a Fasilitasi Children Center dan Kid Line Counseling	Unit	38	34	10	24
b Reunifikasi keluarga	Anak	3.600	6.800	120	6.680
c Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak	3.600	73.223	73.223	0
d Dukungan untuk pengembangan pola asuh anak:					
1. Pedoman dan KIE	Paket	8	1	1	0

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005-2007	Sasaran 2008-2009
2. TOT bagi pola asuh anak	Diklat	19	1	1	0
e Qanun Perlindungan Anak (Akte Kelahiran Bebas)	Paket	*	1	1	0
f Penyelenggaraan Kongres Anak	Paket	*	1	1	0
g Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kegiatan Satker	Paket	*	2	2	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

0 : Sudah terlaksana

Sasaran 2008-2009 Program-Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang masih harus dilanjutkan yaitu Fasilitasi *Children Center* dan *Kid Counseling* 24 unit, Reunifikasi Keluarga 6.680 anak.

**Tabel 3.37 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD - Nias (Program Pelayanan Keluarga Berencana)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1. Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Paket	190	290	190	100
2. Penyuluhan dan penyebaran informasi	Paket	190	290	190	100
3. Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan kb	Paket	190	290	190	100
4. Program Perlengkapan Sarana Gedung	Paket	3	3	1	2
5. Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	271	271	271	0
6. Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	Unit	3	3	1	2

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/ perlengkapan operasional. Hampir seluruh program telah terealisasi pada periode tahun 2005-2006. dari keseluruhan program yang telah ditetapkan dalam rencana induk, terdapat 5 program yang belum terealisasi penuh sampai dengan tahun 2007 yaitu program perlengkapan sarana kantor dan pengadaan kendaraan roda 4 yang masing-masing pencapaiannya sebesar 33.3%, dan pendidikan pelatihan masyarakat, penyuluhan penyebaran informasi serta pelayanan kesehatan perbaikan gizi ibu/anak dan Keluarga Berencana.

Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD – Nias disajikan pada Tabel III.38.

**Tabel 3.38 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial  
Kemasyarakatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan NAD  
– Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<p>Program Penguatan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi Kelembagaan sebanyak 48 unit</li> <li>• Pengarusutamaan Gender, sebanyak 48 pkt pertemuan</li> <li>• Assessment data dan kebutuhan khusus perempuan sebanyak 12 survey</li> <li>• Community volunteer training bagi remaja desa sebanyak 1 paket</li> </ul> <p>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Woman Crisis Center 41 unit</li> <li>• Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan sebanyak 878 kelompok</li> <li>• Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan, sebanyak 1 unit</li> </ul> <p>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Children Center dan Kid Conselling, sebanyak 24 unit</li> <li>• Reunifikasi Keluarga: 6.680 anak</li> <li>• Fasilitas Children Center dan Kid Counseling, sebanyak 2 paket</li> </ul> <p>Program Pelayanan Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Keluarga Berencana, sebanyak 2 paket</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan masyarakat</li> <li>• Penyuluhan dan penyebaran informasi</li> <li>• Pelayanan kesehatan/perbaikan gizi ibu/anak dan KB</li> <li>• Program Perlengkapan Sarana Gedung</li> <li>• Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya serta pelestarian budaya masyarakat</li> <li>• melakukan pendataan penduduk khusus perempuan dan anak</li> <li>• mengembangkan dan memfungsikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan (P2TP2)</li> <li>• memfasilitasi Women Crisis Center</li> <li>• memfasilitasi reunifikasi keluarga</li> <li>• bantuan hukum dan dukungan untuk pengasuhan anak</li> <li>• memberdayakan kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi</li> <li>• Melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap;</li> <li>• Merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga</li> <li>• berencana, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga</li> <li>• Menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.3.2 AGAMA, SOSIAL, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

#### AGAMA

Pada kegiatan bidang keagamaan rencana induk yang tertuang memuat tentang empat program yang terdiri dari Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).

Selanjutnya untuk pembangunan kembali KUA yang direncanakan sebanyak 68 buah (rencana induk), telah terealisasi pembangunannya sebanyak 81 unit pada 2005-2006 dan memiliki sasaran program yang akan ditetapkan sebanyak 62 unit pada tahun 2007. Namun demikian untuk pengadaan buku nikah yang direncanakan sejumlah 30.000 eksemplar belum terealisasi hingga tahun 2007 (0%).

**Tabel 3.48 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1.	<b>Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama</b>					
-	Program Bantuan Tempat Ibadah:	Unit	3.114	2.830	**	**
-	Masjid	Unit	1.167	1.533	724	809
-	Meunasah	Unit	*	1.062	518	544
-	Dayah	Unit	*	252	**	**
-	Balai Pengajian	Unit	85	211	**	**
-	Vihara	Unit	4	2	2	0
-	Gereja	Unit	1.943	478	478	0
-	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68	143	81	62
-	Pengadaan buku nikah	exp.	30.000	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Untuk program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, beberapa capaian telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan tahun 2007. Sumber pembiayaan berasal dari pendanaan APBN. Rincian kegiatan meliputi terbinanya kembali ketenteraman bathin (berupa pembinaan dan pelatihan serta bantuan imam meunasah sebanyak 104 orang), bantuan Al-Qur'an sebanyak 32.655 eksemplar dan pemberian beasiswa pada siswa/santri korban tsunami (7.900 orang). Target realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007

Program Pengembangan Nilai Keagamaan meliputi pelatihan kader-kader agama, pemulihan kondisi mental dan spiritual, penelitian keagamaan dan penempatan guru da'i di dayah. Sumber pembiayaan terutama berasal dari APBN, namun pada beberapa kegiatan juga didanai dari sumber non APBN (seperti bantuan pembangunan dayah sebanyak 7 unit pada tahun 2005-2006). Realisasi pelatihan kader Masjid telah melatih 585 orang pada tahun 2005-2006. selanjutnya hingga tahun 2007 telah dilakukan beberapa realisasi seperti pembangunan asrama santri, bantuan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas agama, kegiatan magang, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti remaja Masjid.

**Tabel 3.49 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1.	<b>Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan</b>					
-	Terbinanya kembali ketenteraman bathin	Pkt	589	589	104	485
-	Bantuan Qur'an dan Kitab	Buah	*	32.655	2.230	30.425
2.	Beasiswa Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org	*	9.000	7.900	1.100

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama untuk Program pengembangan Nilai – nilai Agama 2008-2009 yaitu Terbinanya kembali ketenteraman bathin 485 pkt, Bantuan Qur'an dan Kitab 30.425 buah, serta Beasiswa Siswa dan Santri Korban Tsunami sebanyak 1.100 orang.

**Tabel 3.50 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Realisasi 2005-2007	Sasaran 2008-2009
1.	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan					
-	Pelatihan Imam Masjid dsb.	Pkt	154	585	68	517
-	Pulihnya kondisi mental spiritual.	Org	*	150	**	**
2.	Penelitian Keagamaan	Paket	*	8	8	0
-	Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org	*	6000	3755	2245

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Program lainnya di bidang agama adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. Realisasi yang telah dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi gedung Kanwil Depag pada beberapa kabupaten/kota sebanyak 9 unit (rencana induk 7 unit).

Rehabilitasi Gedung Dinas Syari'ah Propinsi dan gedung Dinas Syari'ah Kab./kota yang direncanakan sejumlah 4 unit, namun dalam realisasinya telah melakukan rehabilitasi sebanyak 6 unit (150%) sampai dengan tahun 2007. Sedangkan rehabilitasi gedung untuk observasi vital dan asrama haji masing-masing telah direalisasikan sebanyak 1 unit.

Penambahan ruangan pada beberapa gedung baitul mal juga telah dilaksanakan antara lain di Provinsi NAD, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Aceh Barat. Selanjutnya pengadaan meubeler dan perlengkapan gedung juga beberapa telah terealisasi seperti pengadaan meubeler asrama haji, Kantor Depag dan Syari'ah Islam Aceh Jaya.

**Tabel 3.51 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama NAD - Nias (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1.	Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1	1	**	**
-	Gedung Kandepag Kab./kota	Unit	7	9	8	1
-	Gedung Dinas Syari'at propinsi dan gedung Dinas Syari'at Kab./ Kota	Unit	4	8	5	3
2.	Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota	Unit	4	13	5	8
-	Gedung Observasi Hilal*	Unit	1	1	1	0
-	Asrama Haji	Unit	1	2	1	1
3.	Gedung Baitul Mal	Unit	*	24	5	19
-	Mobil operasional haji dan ambulance	Unit	*	**	3	**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
-	Bangunan lain (rumah dinas dan Aula)	Unit	4	10	2	8

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Agama untuk Program peningkatan sarana dan prasarana gedung aparatur negara 2008-2009 yaitu gedung Kanwil Depag, gedung MPU Propinsi dan gedung Baitul Mal.

**Tabel 3.52 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Agama NAD - Nias**

Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya kembali tempat ibadah, sebanyak 284 unit</li> <li>• Pembangunan Vihara, sebanyak 2 unit</li> <li>• Kebutuhan Gereja, sebanyak 1.450 unit</li> <li>• Pengadaan buku nikah, sebesar 30.000 exp</li> </ul> Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbinanya kembali ketenteraman bathin, 433 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan ketenteraman rohani</li> <li>• Merekrut tenaga pelayanan keagamaan menggantikan yang meninggal dan rehabilitasi simbol-simbol agama</li> <li>• Memberikan bimbingan dan konseling keagamaan</li> <li>• Menggiatkan pengajian majelis taklim</li> <li>• Mendidik dan melatih tenaga pengganti untuk imam Masjid, khatib, da'i dan guru pengajian.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

## SOSIAL

Untuk kegiatan bidang sosial, berdasarkan rencana induk terdapat 5 (lima) kelompok program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu: Bantuan dan jaminan sosial, Pelayanan dan rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

Program bantuan jaminan sosial sebagian besar telah selesai dilaksanakan pada masa tanggap darurat, berupa bantuan kebutuhan pokok kepada pengungsi. Selanjutnya pada program tahun 2007, masih ada bantuan kebutuhan pokok (beras, lauk pauk dan sandang) untuk pengungsi yang masih tersisa tinggal di barak.

**Tabel 3.39 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial)**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1.	Bantuan Lauk Pauk	Jiwa	391.550	**	**	**
2.	Bantuan Beras	Jiwa	391.550	**	**	**
3.	Bantuan Sandang	Jiwa	391.550	**	**	**
4.	Bantuan Peralatan Dapur	Kk	103.550	200.000	150.000	50.000

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
5. Bantuan Bahan Bangunan Rumah	Kk	35.000	**	**	**
6. Pemberian Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jaminan Sosial	Kk	1.120	**	**	**
7. Bantuan Pemberdayaan Korban Bencana Alam	Kk	5.000	**	**	**
8. Pembangunan Pusat trauma Center	Unit	1	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\*\* : Data tersedia pada Dinas Sosial NAD

Sasaran 2008-2009 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang masih harus dilanjutkan yaitu Pembangunan *Trauma Centre*. Pada program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS berdasarkan rencana induk, yang diamanatkan hanya dua kegiatan yaitu bantuan pengungsi sebanyak 19.500 paket dan bantuan pengembangan usaha produktif untuk 15.659 desa. Realisasi pada kegiatan program ini lebih banyak ditangani melalui bantuan Internasional NGO/ Donor. Sehingga program tahun 2007, BRR (APBN) hanya menangani desa-desa yang belum mendapatkan bantuan (*filling gap*), yakni untuk 45 desa.

**Tabel 3.40 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1. Bantuan usaha ekonomis produktif	KK	15.660	20.000	6.300	13.700
2. Pengembangan usaha ekonomis produktif	KK	9.500	10.000	332	9.678
3. Rehabilitasi sosial daerah kumuh	KK	20.000	1.000	300	700
4. Pendampingan sosial dan monitoring evaluasi	kegiatan	19	500	105	385
5. Pemberdayaan Kat	KK	546	**	**	**
6. Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga	KK	33.600	**	**	**
7. Panti Masyarakat	Panti	14	14	42	**
8. Rehabilitasi TMP/ MPN	TMP/MPN	4 TMP +2 MPN	4 TMP + 2 MPN	4 TMP + 2 MPN	**
9. Perbaikan Rumah Perintis Kemerdekaan	RPK	9	9	9	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\*\* : Program yang telah atau akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial NAD

Sasaran 2008-2009 Program-Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS yang masih harus dilanjutkan yaitu seluruh program yang ada dalam program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan MKS dikarenakan data yang belum tersedia.

**Tabel 3.4I Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1. Bantuan biaya percepatan pembangunan panti baru	Unit	*	6	6	**
2. Bantuan biaya perencanaan rehabilitasi panti	Unit	*	42	42	**
3. Bantuan sarana panti sosial	Unit	*	49	49	**
4. Bantuan untuk rehabilitasi panti sosial	Unit	5	42	42	**
5. Bantuan untuk pembangunan dan renovasi gedung khusus (Loka Bina Karya)	Unit	*	13	13	**
6. Bantuan sarana dan fasilitas loka bina karya penyandang cacat	paket	*	10	10	**
7. Program penampungan anak yatim piatu di masyarakat dan Pemda	Kegiatan	*	51	51	**
8. Bantuan biaya uang saku untuk kesejahteraan anak di dalam panti	Orang	*	13.366	13.366	**
9. Bantuan pembinaan loka bina karya penyandang cacat	Orang	*	150	150	**
10. Pelayanan panti jompo dan penyandang cacat	Paket	*	35	35	**
11. Bantuan usaha ekonomis produktif untuk panti penyantunan	Paket	*	42	22	20
12. Bantuan beasiswa untuk anak, biaya kesehatan untuk janda dan lansia	Orang	*	1.300	1.300	**
13. Bantuan alat Bantu penyandang cacat	Paket	*	1	1	**
14. Bantuan fasilitas panti/ dayah yang menampung anak terlantar/ yatim/ piatu	Paket	*	50	50	**
15. Bantuan biaya subsidi makanan anak di dalam panti	Orang	*	10.000	10.000	**
16. Bantuan sarana belajar anak pengungsi dalam rangka kegiatan children center	Paket	*	19	19	**
17. Bantuan biaya pembinaan untuk anak berprestasi	Orang	*	500	500	**
18. Bantuan subsidi anak asuh di luar panti (huntara dan keluarga rentan)	Orang	*	2.000	2.000	**
19. Bantuan sarana kantor Children Center permanen dalam rangka pelayanan anak korban tsunami di luar panti	Kegiatan	*	2	2	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Program/ Kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada TA 2008-2009

Jika mengacu pada Rencana Induk, program pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya menyebutkan kebutuhan bantuan rehabilitasi sosial sebanyak 12 kegiatan, baik dilihat dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Sasaran 2008-2009 pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial harus terealisasi semua.

Begitupula pada program pelayanan rehabilitasi sosial, meskipun realisasi capaian pelaksanaan terhadap rencana induk pada beberapa kegiatan mencatat angka nol namun kenyataan di lapangan kegiatan dimaksud sudah ditangani melalui bantuan NGO dan donor, serta sebagian pekerjaan tidak diperlukan lagi. Program tahun 2007 mencatat beberapa kegiatan yang juga sifatnya 'filling gap'.

**Tabel 3.42 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1. Bantuan Panti Sosial	Keg	12	50	50	**
2. Bantuan sarana Panti Sosial	Panti	*	49	49	**
3. Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	Unit	*	1	1	**
4. Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit	*	10	10	**
5. Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket	*	229	229	**
6. Bantuan Biaya fakir miskin	Org	*	13.360	13.360	**
7. Bantuan Lokakarya Bidang Sosial	Angk.	*	10	10	**
8. Bantuan Prasarana dan sarana penyandang cacat	Pkt	*	35	35	**
9. Bantuan ekonomi untuk Panti	Pkt	*	42	42	**
10. Bantuan Makan Panti	Org	*	10.000	10.000	**
11. Peningkatan Kesra Anak (Org)	Pkt	*	139.382	139.382	**
12. Bantuan anak berprestasi	Org	*	500	500	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Program/ Kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada TA 2008-2009

Seluruh Sasaran 2008-2009 Program-Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial masih harus dilanjutkan dikarenakan adanya data yang belum tersedia yang belum dimasukkan kedalam tabel.

Untuk program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yaitu meliputi pemugaran taman makam pahlawan, bantuan penunjang kegiatan karang taruna, bantuan operasional dalam mendukung kegiatan trauma center serta bantuan insentif bagi petugas KBS, seluruh program ini tidak ada dalam rencana induk namun kenyataan di lapangan kegiatan tersebut harus segera direalisasikan untuk sasaran 2008-2009.

**Tabel 3.43 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sosial NAD - Nias (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial)**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1. Bantuan penunjang kegiatan Karang Taruna Indonesia Propinsi NAD	Keg	*	1	1	**
2. Bantuan operasional FK-PSM Prov. NAD dalam mendukung kegiatan Trauma Center	Paket	*	1	1	**
3. Bantuan Insentif bagi petugas KBS (keluarga Binaan Sosial)		*	1	1	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Program tersebut tidak dianggarkan pada TA 2008-2009

Sasaran dan rencana tindak lanjut 2008-2009 untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat di dalam Tabel III.44.

**Tabel 3.44 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial Kemasyarakatan Sub Bidang Sosial NAD - Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Trauma Centre sebanyak 5 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengasuhan anak yatim piatu</li> <li>• Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat korban bencana</li> <li>• Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana</li> <li>• Membangun dan memfungsikan trauma center</li> <li>• Memberdayakan anggota rumah tangga dan keluarga pengungsi dan korban bencana</li> </ul>
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, MKS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif, sebanyak 10.655 desa</li> <li>• Bantuan Pengungsi (Org), sebanyak 19.500 paket</li> </ul>	
Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan insentif petugas pendamping Keluarga Binaan Sosial sebanyak 25.000 paket</li> <li>• Pendirian Pati, 5 unit</li> </ul>	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab TMP/MPN/Perbaikan Rumah PK: 18.810 paket</li> </ul>	

Sumber : Bapel BRR, 2007

### PEMUDA DAN OLAHRAGA

Realisasi bidang pemuda dan olahraga pada tahun 2005-2006 meliputi dua jenis program yaitu pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda dan rehabilitasi serta pemeliharaan bangunan gedung olahraga dan pada program tahun 2007 seluruh program bidang pemuda dan olahraga ditangani. Untuk lebih jelasnya volume dari realisasi sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 .

**Tabel 3.45 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
A	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda					
1	Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./ Kota)	OB	300	81	60	21
2	Penumbuhan KUPP	kelompok	125	140	25	115
3	Kelompok Pemuda sebaya	kelompok	40	91	8	83
4	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	2	1	1
5	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	orang	160	32	32	0
6	Monitoring dan Evaluasi life skills	kelompok	250	50	50	0
7	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/Kota	orang	300	60	60	0
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	25	5	5	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
9	Pelatihan/seleksi SP3	orang	100	20	20	0
10	Peningkatan Sumber daya SP3	orang	275	55	55	0
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kegiatan	10	2	2	0
12	Monitoring dan Evaluasi SP3	kegiatan	5	1	1	0
B	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga					
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	orang	300	386	60	326
2	Inventarisasi/Pendataan OR daerah	kegiatan	5	2	1	1
3	Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP)	kegiatan	5	1	1	0
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	100	440	20	420
5	Kompetisi antar klub OR Pelajar	orang	1125	225	225	0
6	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	orang	125	25	25	0
7	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	orang	50	10	10	0
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	orang	330	66	66	0
9	Pekan OR Pelajar	orang	550	110	110	0
10	Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS	kegiatan	5	6	1	5
11	Training Camp Atlet Pelajar	orang	400	80	80	0
12	Pekan OR Pelajar Cacat	orang	175	35	35	0
13	Pekan OR Pedesaan	kec./desa	15	3	3	0
14	Peringatan HAORNAS	21 kab./ kota	105	21	21	0
15	Dukungan administrasi Pengelolaan Kegiatan (Kabupaten/ Kota)	kegiatan	5	22	1	21
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga					
1	Bantuan Peralatan Olahraga	paket	5	92	1	91
2	Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga	kab./kota	30	7	6	1

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
3	Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan	organisasi	90	18	18	0
4	Menyusun model increment dan strategi perlakuan	kegiatan	5	1	1	0
5	TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	300	60	60	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

**Tabel 3.46 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Sosial  
Kemasyarakatan Sub Bidang Pemuda dan Olah Raga NAD - Nias**

Isu dan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
<p>Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota), sebanyak 219 ob</li> <li>• Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda, sebanyak 3 lokasi</li> <li>• Pertukaran Pemuda antar Propinsi, sebanyak 128 orang</li> <li>• Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten / Kota, sebanyak 240 orang</li> <li>• Bantuan untuk lembaga kepemudaan, 20 lembaga</li> <li>• Pelatihan/seleksi SP3, sebanyak 80 orang</li> <li>• Peningkatan Sumber daya SP3, sebesar 220 orang</li> <li>• Sosialisasi dan sinkronisasi SP3, 8 kegiatan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi SP3, 4 kegiatan</li> </ul> <p>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi/Pendataan OR daerah, 3 kegiatan</li> <li>• Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP), sebanyak 4 kegiatan</li> <li>• Kompetisi antar klub OR Pelajar, sebanyak 900 orang</li> <li>• Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat, sebanyak 100 orang</li> <li>• Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat, sebanyak 40 orang</li> <li>• Pekan OR Pelajar, 440 orang</li> <li>• Training Camp Atlet Pelajar, 320 orang</li> <li>• Pekan OR Pelajar Cacat, 140 orang</li> <li>• Pekan OR Pedesaan, 12 kec./desa</li> <li>• Peringatan HAORNAS, sebanyak 84 kab./kota</li> </ul> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga, sebanyak 23 kab/kota</li> <li>• Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan, sebanyak 72 organisasi</li> <li>• Menyusun model increment dan strategi perlakuan, sebanyak 4 kegiatan</li> <li>• TOT instruktur dari masyarakat setempat: sebesar 240 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaannya; dan</li> <li>• Mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

## BUDAYA

Berdasarkan rencana induk, bidang budaya yang ditangani meliputi 3 jenis program, yaitu pengembangan nilai budaya; pengelolaan keragaman budaya dan pengelolaan kekayaan budaya. Realisasi pelaksanaan dibidang budaya sampai dengan tahun 2006, telah ditangani untuk seluruh kegiatan pada masing-masing program tersebut di atas.

**Tabel 3.47 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Budaya NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1. Pengembangan Nilai Budaya					
(1) Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami	Paket	2	2	**	**
(2) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan					
(a) Penyusunan Materi Penguatan Tradisi	Naskah	2	2	**	**
(b) Penyebarluasan materi penguatan tradisi ke masyarakat	Paket	2	2	**	**
(3) Reinventarisasi potensi budaya dan penyelamatan warisan budaya yang terkena bencana	Paket	2	2	I	I
(4) Pemulihan sumberdaya budaya yang rusak terkena bencana.	Paket	2	2	**	**
(5) Penyusunan modul dan sosialisasi nilai budaya Aceh melalui media elektronik	Paket	2	2	**	**
(6) Pagelaran budaya Aceh	Kali	2	2	**	**
(7) Pedoman penanganan berwawasan budaya pasca bencana					
(a) Penyusunan dan penerbitan buku	Paket	1	1	**	**
(b) Penggandaan dan penyebaran	Paket	1	1	**	**
2. Pengelolaan Keragaman Budaya					
(1) Wawasan Budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara		*	**	**	**
(a) Workshop	Kali	2	2	**	**
(b) Sosialisasi	Paket	5	5	**	**
(2) Membangun sistem jaringan informasi kebudayaan	Paket	1	1	**	**
(3) Penyusunan peta budaya	Paket	5	5	I	4
(4) Museum Peringatan Bencana Kemanusiaan Tsunami					

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
(a) Pembuatan Rancangan	Paket	1	1	**	**
(b) Pendirian	Paket	2	2	**	**
(5) Museum Budaya dan Sejarah Purbakala Nias	Paket	1	1	**	**
(6) Menghimpun informasi kebudayaan (NAD dan Nias-Sumut)	Paket	2	2	1	1
(7) Mendukung rehabilitasi bangunan bersejarah (Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia) dan sejumlah bangunan purbakala yang rusak (20 buah di NAD dan 6 di Nias-Sumut)	Paket	26	26	20	6
(8) Rehabilitasi Gedung Kantor BKSNT dan BP3 Banda Aceh	Paket	2	3	3	0
(9) Pengembangan SDM Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	Paket	1	3	**	**
(10) Bantuan rehabilitasi lingkungan, gedung, dan fasilitas Taman Budaya serta Museum Negeri NAD	Paket	6	5	4	2
(11) Pemugaran dan konservasi objek budaya	Paket	5	5	2	3
3. Pengelolaan Kekayaan Budaya					
(1) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan					
(a) Pelatihan seni grafis budaya Aceh	Kali	2	2	**	**
(b) Pemulihan norma-norma budaya melalui seni tutor	Kali	5	5	**	**
(c) Pembuatan, penggandaan dan sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya	Paket	1	1	**	**
(d) Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	5	1	4
Pencetakan dan penyebarluasan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	5	**	**
Penyusunan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Judul	1	1	**	**
Penyebarluasan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Paket	1	2	**	**
Pembuatan kembali instrumen seni		*	*	*	*

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
Pembuatan	Paket	1	1	**	**
Pemberian bantuan alat-alat seni	Paket	5	5	5	0
Pembangunan Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA)		*	*	*	*
Penelusuran dan pengumpulan koleksi	Paket	4	4	**	**
Pembangunan gedung	Paket	2	2	1	1

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

## 3.4 BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

### 3.4.1 PERTANIAN

Kehancuran dan kerusakan di sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), mengakibatkan sekitar 300.000 petani kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, karena rusaknya lahan pertanian. Menurut Rencana Induk lahan pertanian yang seluas 150.136 Ha yang meliputi : lahan sawah seluas 23.330 ha; lahan palawija/tegalan seluas 24.345 ha dan lahan perkebunan (tanaman keras) seluas 102.461 ha. Selanjutnya ternak yang hilang (ternak besar, kecil dan unggas) sebanyak 1.904.587 ekor.

Lahan pertanian (Sawah, tegalan dan perkebunan) yang sudah direhabilitasi Tahun 2005-2006 seluas 64.009 Ha dari areal pertanian yang rusak (Rencana Induk) seluas 150.136 Ha atau 42,63%. Kemudian penyediaan traktor roda 4 (4WD) 46 unit, Hand traktor 366 unit, Power Thresher 975 unit, dan Hand sprayer 1395 unit, serta alat pertanian kecil sebanyak 33.734 unit. Selanjutnya penggilingan padi (*Huller/Rice Milling Unit*), meliputi mesin RMU dan gudang yang telah dibangun sejumlah 82 unit.

Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2007 adalah pembangunan lining irigasi 31 km; pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) sebanyak 14 unit; gudang Alsintan sebanyak 22 unit dan gedung Balai Pertemuan Petani sebanyak 12 unit dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*) sebanyak 2 unit.

Proyeksi capaian kumulatif (2005-2007) untuk rehabilitasi lahan pertanian seluas 76.517 ha, sehingga tahun 2008 sasaran rehabilitasinya seluas 17.270 ha. Sasaran utama lainnya adalah pengembangan kawasan tanaman dan hortikultura dan terminal agribisnis untuk tahun 2008 (Tabel III.54).

**Tabel 3.53 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
1	Pembangunan lining jaringan irigasi tingkat usaha tani	M	1.182.840	228.054	135.554	92.500
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	M	*	361.993	41.993	320.000
3	Rehabilitasi Lahan Pertanian	Ha	150.136	93.787	76.517	17.270
	- Rehabilitasi Lahan Sawah	Ha	23.330	16.356	13.886	2.470
	- Rehabilitasi Lahan Tegalan	Ha	24.345	2.200	2.200	0
	- Lahan Perkebunan	Ha	102.461	32.011	17.211	14.800
4	Agroinput Lahan Pertanian	Ha	*	40.083	32.243	7.840
	- Pengembangan Padi Sawah (Agroinput)	Ha	*	25.259	19.159	6.100
	- Pengembangan Lahan Tegalan (Agroinput)	Ha	*	14.824	13.084	1.740
5	Pencetakan sawah baru	Ha	*	2.921	2.921	0
6	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Utama (BBU), Balai Benih Induk (BBI) dan BPP Plus	Unit	*	19	17	2

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
7	Pembangunan Gudang dan Mesin RMU	Unit	*	92	84	8
8	Pembangunan Balai Pertemuan Petani	Unit	*	154	154	0
9	Pembangunan Gedung Kantor Karantina Tumbuhan	Unit	1	1	**	1
10	Pengadaan alat mesin pertanian	Unit	*	12.701	12.701	0
11	Pengadaan Gudang Alsintan dan Saprotan	Unit	*	24	23	1
12	Pendidikan dan pelatihan penyuluh pendamping	Orang	*	814	634	180
13	Penataan/Penguatan kelembagaan petani	Paket	*	264	264	0
14	Bantuan Pembiayaan Pertanian Melalui LKM	Paket	*	32	32	0
15	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket	*	1	**	1
16	Pengembangan Terminal Agribisnis	Unit	*	3	1	2
17	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kwsn	*	5	**	5
18	Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Rusak Ringan	Paket	1	1	**	1

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Pada sub-sektor perkebunan rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan yang telah dilakukan pada tahun 2006 sebesar 6.703 Ha. Jika mengacu kepada data Rencana Induk, luas areal kebun yang rusak adalah sebesar 102.461 Ha. Namun berdasarkan sumber data dari Dinas Perkebunan Aceh, areal perkebunan yang rusak akibat tsunami seluas 22.000 Ha. Pada tahun 2006 telah dilakukan penyediaan bibit kelapa sawit sejumlah 685.000 batang dan penyiapan lahan (*Land clearing*) untuk perkebunan kelapa sawit 2006 seluas 3.000 Ha yang berlokasi di kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya.

Pada tahun 2007 diprogramkan Rehabilitasi perkebunan seluas 10.508 ha. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 akan rehabilitasi lahan perkebunan total seluas 17.211 Ha, atau baru mencapai sekitar 10% dari Rencana Induk yaitu sebesar 102,461 Ha.

**Tabel 3.54 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang PerkebunanNAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Pembangunan jalan produksi	M	*	30.386	1.386	29.000
2	Rehabilitasi Kantor	Unit	*	10	10	0
3	Rehabilitasi, intensifikasi, penanaman, perawatan dan pengembangan tanaman perkebunan (kelapa sawit, kakao, kelapa, karet)	Ha	102.461	32.011	17.211	14.800
4	Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit	Ha	*	5.700	**	5.700
5	Penyediaan bibit tanaman (kelapa sawit dan Kakao)	Batang	*	1.896.500	1.896.500	0
6	Pendidikan, pelatihan fasilitator dan penyuluh pendamping	Orang	*	535	385	150
7	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Orang	*	405	255	150
8	Peralatan Pengolahan Hasil Kebun Rakyat	Paket	*	28	1	27
9	Pembangunan Gedung Lab Analisa Kualitas Hasil Produksi	Paket	*	2	2	0
10	Kantor Operasional Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Sawit (100 M2)	Unit	*	4	4	0
11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket	*	1	**	1
12	Pembangunan Experimental Farm	Unit	*	2	**	2
13	Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi bidang Perkebunan (Revolving)	Paket	*	100	**	100

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Melebihi target

0 : Sudah terlaksana

Sampai dengan tahun 2006 BRR telah melakukan restocking ternak besar (sapi/kerbau) sejumlah 2.650 ekor dan ternak kecil (kambing) sejumlah 13.000 ekor. Untuk ternak jenis unggas, terutama ayam ras, restocking baru dilaksanakan sebesar 10.000 ekor. Hal ini atas pertimbangan belakangan ini sedang terjadi wabah penyakit Flu Burung yang sudah menyebar ke Aceh dapat mengancam keselamatan ternak dan manusia, sehingga untuk restocking unggas harus sangat hati-hati.

Jika dibandingkan dengan data Rencana Induk, yakni sejumlah 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang, pencapaian realisasi tersebut masih relatif kecil. Selanjutnya data dari Menteri Pertanian (Sub Dinas Peternakan) menyebutkan bahwa ternak yang hilang akibat tsunami adalah sapi = 40.000 ekor; kerbau = 39.000 ekor; kambing dan domba = 65.000 ekor, serta unggas sejumlah 1.800.000 ekor.

Pada tahun 2007 diprogramkan Restocking ternak (Besar, Kecil, unggas) sejumlah 5.935 ekor. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 restocking ternak (Besar, Kecil, unggas) sejumlah 32,617 ekor atau baru mencapai sekitar 2% dari Rencana Induk sebesar 1,904,587 ekor.

Program pendukung pengembangan peternakan pada tahun 2007 adalah pembangunan Poskeswan 7 unit; pembangunan Pasar Hewan sebanyak 1 unit; Tempat Pemotongan Hewan sebanyak 2 unit; Tempat Penjualan Daging sebanyak 1 unit; pengembangan Kebun HMT sebesar 70 Ha dan Tempat Penempatan Ternak sebanyak 2 unit. Selanjutnya program utama tahun 2008 antara lain pengembangan kawasan peternakan dan pembinaan breeding center

**Tabel 3.55 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Peternakan NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Restocking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	1.887.260	36.817	32.617	4.200
2 Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	Ekor	*	35.785	31.895	3.890
3 Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	*	53.270	33.000	20.270
4 Pembangunan Poskeswan dan gudang fasilitas IB	Unit	*	30	16	14
5 Pembangunan pasar hewan	Unit	*	7	2	5
6 Tempat Penjualan daging	Unit	*	7	7	0
7 Pembangunan tempat/Rumah pemotongan ternak	Unit	*	15	6	9
8 Pembangunan BPP, gedung karantina hewan dan laboratorium	Unit	*	2	2	0
9 Pembangunan Rumah Paramedis	Unit	*	6	6	0
10 Pembangunan Kandang Isolasi, penggemukan Ternak dan kandang produksi ternak unggas	Unit	*	11	11	0
11 Pembangunan Kandang Isolasi, penggemukan Ternak dan kandang produksi ternak unggas	Unit	*	11	11	0
12 Pengadaan Storage N2 Cair Lengkap	Paket	*	1	1	0
13 Peningkatan kegiatan laboratorium dan obat-obatan poskeswan	Paket	*	8	1	7
14 BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket	*	22	22	0
15 Pelatihan penyuluh dan petugas inseminator	Orang	*	212	92	20
16 BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket	*	22	**	22
17 Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	*	6	1	5
18 Pembinaan Breeding Center	Paket	*	1	**	1
19 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan	Paket	*	1	**	1
20 Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi bidang Peternakan (Bantuan Revolving Melalui LKM)	Paket	*	150	**	150

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Pada sektor kehutanan dan lingkungan, realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 5.113 Ha, dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 3%.

Sedangkan program lain yang telah terealisasi pada tahun anggaran 2005 dan 2006 antara lain untuk rehabilitasi hutan alam seluas 820 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 130 Ha/paket; pengembangan hutan konservasi sejumlah 3 kawasan; pengukuran kawasan hutan (tata batas) sebesar 130 Km; tumpangsari hutan rakyat sebesar 2 paket; peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan sebanyak 40 kelompok; peningkatan kelembagaan lokal seluas 20 Ha; restorasi kawasan bufferzone sebesar 188 Ha; transplantasi terumbu karang sejumlah 1 paket dan rehabilitasi fasilitas kantor dinas sejumlah 1 unit.

Program tahun 2007 untuk sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 6.662 Ha dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 7%.

Untuk program tahun 2007 lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan alam seluas 961 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 36 Ha; magersari (tumpangsari di hutan) seluas 115 Ha; bantuan bibit kepada masyarakat sejumlah 20.000 batang; pengembangan hasil hutan Non Kayo sejumlah 7 Kabupaten; pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 9 Kabupaten; pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sejumlah 2 lokasi; Pawang Uteun & Inong Beuraleun sejumlah 3 paket dan Pembangunan Laboratorium Klimatologi lapangan sejumlah 1 paket.

**Tabel 3.56 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Rehabilitasi fasilitas kantor dinas kehutanan provinsi	Unit	*	1	1	0
2 Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata Batas, Rekonstruksi, orientasi dan Pemeliharaan batas)	Km	*	134	134	0
3 Pengembangan Database Kehutanan dan Pelatihan Sistem Informasi Kehutanan	Paket	*	3	3	0
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan	Ha	*	164.044	164.044	0
5 Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan	Klp	*	76	76	0
6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Pantai dan Mangrove	Ha	164.840	16.775	11.775	5.000
7 Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal	Paket	*	23	23	0
8 Rehabilitasi Hutan kota	Ha	*	166	166	0
9 Restorasi kawasan bufferzone	Ha	*	267	267	0
10 Transplantasi terumbu karang	Paket	*	1	1	0
11 Bantuan Pembangunan Laboratorium Klimatologi Lapangan	Paket	*	1	1	0
12 Perbaikan dan Pengembangan fasilitas Ekowisata (Wilayah Wisata)	Paket	*	3	3	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
13	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Kab	*	7	7	0
14	Penghijauan Reservoir Waduk Alue Baroh Desa Klip	Paket	*	1	7	0
15	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	*	13	13	0
16	Pengembangan Hutan Rakyat	Ha	*	1.513	**	1.513
17	Pengembangan Hutan Pendidikan STIK (Belanja Sosial)	Pkt	*	1	**	1
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Petugas Kehutanan	Org	*	150	**	150
19	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Sekitar Hutan	Org	*	160	**	160
20	Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Alam di sekitar kawasan hutan	Org	*	250	**	250

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

1 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang kehutanan dan lingkungan 2008-2009 yaitu pengembangan hutan rakyat, pendidikan pelatihan teknis dan pemulihan kembali kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

**Tabel 3.57 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Pertanian NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<p>Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terehabilitasinya Lahan sawah seluas 2.470 ha</li> <li>• Terbangunnya BBU dan BBI skala besar sebanyak 2 Unit</li> <li>• Pembangunan gudang RMU skala besar sebanyak 8 unit</li> <li>• Terbangunnya terminal agribisnis 2 unit .</li> <li>• Terbangunnya kawasan Tanaman Pangan Hortikultura sebanyak 5 kawasan</li> </ul> <p>Sub Bidang Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi lahan perkebunan seluas 14.800 Ha</li> <li>• Lanjutan pemeliharaan tanaman perkebunan 5.700 Ha</li> </ul> <p>Sub Bidang Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restocking ternak (besar, kecil, unggas)</li> <li>• Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular</li> <li>• Pelayanan Inseminasi Buatan</li> <li>• Pengembangan kawasan peternakan 5 kawasan.</li> <li>• Pengembangan breeding center</li> <li>• Pengembangan stasiun research peternakan.</li> </ul> <p>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab Hutan Mangrove, seluas 162.815 ha.</li> <li>• Pemulihan kembali perekonomian masyarakat yang bersumber dari sumberdaya alam.</li> <li>• Pemulihan sistem lembaga pemerintahan (Departemen kehutanan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui perbaikan aset masyarakat yang rusak seperti rehabilitasi lahan pertanian (sawah, tegalan dan kebun) dan penyediaan ternak yang hilang.</li> <li>• Memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui perbaikan fasilitas umum (aset Publik) seperti rehabilitasi jaringan tingkat usaha tani, pembangunan BBU dan BBI, gudang RMU.</li> <li>• Meletakkan pondasi ekonomi masyarakat dan regional melalui pengembangan kawasan berdasarkan komoditi unggulan wilayah seperti: pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura dan Terminal agribisnis, pengembangan kawasan peternakan dan breeding center, dan pengembangan stasiun research peternakan.</li> <li>• Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;</li> <li>• Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan.</li> <li>• Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (green belt), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakteristik pantai.</li> <li>• Pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, dengan strategi menyediakan material dasar pembangunan lainnya yang dapat mengantisipasi penebangan hutan yang terjadi.</li> <li>• Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam pelestarian hutan lindung dan pengendalian pemanfaatan hutan lainnya</li> <li>• Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan terutama Departemen Kehutanan</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.4.2. PERIKANAN

Sub Bidang Perikanan terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan dan fasilitas penunjang lainnya. Pada sub sektor perikanan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk budidaya perikanan telah merehabilitasi tambak yang rusak sejumlah 13.403 Ha dari kerusakan tambak seluas 36.597 Ha (Rencana Induk), atau mencapai 36%.

Sedangkan untuk perikanan tangkap (nelayan), BRR telah menyediakan sejumlah 633 unit Kapal motor kayu ukuran (<3,5 – 8 GT) dan boat yang direhabilitasi sejumlah 50 unit dan pengadaan alat tangkap sejumlah 89 paket. Berdasarkan data Rencana Induk jumlah kapal motor kayu yang rusak adalah 21.455 unit dan 16.012 unit alat tangkap. Data lain, berdasarkan sumber dari FAO (2005) menyebutkan boat yang rusak sejumlah 10.569 unit.

Prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI/PPP) sampai dengan tahun 2006 telah berhasil direhab sejumlah 8 unit dan telah dibentuk 216 UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan bantuan agroinput (pupuk, benih ikan, obat-obatan, pakan ikan dan fasilitas produksi lainnya) untuk melayani areal tambak yang telah berhasil direhabilitasi seluas 5.304 Ha.

Berdasarkan Rencana Induk jumlah Pelabuhan Perikanan yang rusak adalah sebesar 305 unit yang rusak. Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo seluas 480 M<sup>2</sup> yang telah selesai dibangun dan difungsikan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan Rencana Induk.

**Tabel 3.58 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perikanan, NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
A Perikanan Tangkap					
1 Pembuatan Boat Nelayan	Unit	21.455	3.532	3.520	12
2 Pengadaan Alat Tangkap	Unit	16.012	3.532	3.520	12
3 Pelabuhan Perikanan					
- Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo	Unit	1	1	1	1 (lanjutan)
- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Unit	49	18	12	6(lanjutan)
- Pelabuhan Perikanan lebih kecil dari PPI	Unit	253	13	**	13
4 Galangan Kapal	Paket	*	67	67	0
5 Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	Unit	*	4	4	0
6 Pengadaan GPS dan Fish finder	Unit	*	72	**	72
7 Pembuatan Rumpon	Paket	*	26	26	0
8 Bagan Apung	Unit	*	59	50	9
B Perikanan Budidaya					
1 Rehabilitasi Tambak	Ha	36.597	18.631	14.791	3.840
2 Agroinput Tambak	Ha	*	10.532	6.692	3.840
3 Bantuan Hatchery	Unit	*	**	53	**
4 Pembangunan Keramba Jaring Apung	Unit	*	485	64	121
C Pengolahan Ikan					
1 Pabrik Es	Unit	*	64	56	8
2 Pengadaan Cold Storage	Paket	*	7	**	7
3 Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan (SPI)	Paket	*	229	217	12
4 Pembangunan Laboratorium Perikanan	Paket	*	1	**	1
D Fasilitas Penunjang Lainnya					
1 Fasilitas Lab SUPM Ladong	Paket	1	1	**	1
2 Fasilitas Lab GIS Marine Centre (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Paket	*	1	1	0
3 Pembangunan Pasar Ikan	Paket	*	7	**	7
4 Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bidang Perikanan	Paket	*	100	**	100

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan	Paket	*	2	**	2
6	Pengembangan Kelembagaan	Paket	*	94	88	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

**Tabel 3.59 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Perikanan NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<p>Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pelabuhan perikanan Lampulo 1 unit (Lanjutan).</li> <li>Pembangunan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) 6 unit (Lanjutan).</li> <li>Pembuatan boat nelayan 12 unit (ukuran 30 GT).</li> <li>Pembuatan bagan apung 9 unit.</li> </ul> <p>Perikanan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi tambak 3.840 Ha</li> <li>Pembangunan KJA (Keramba Jaring Apung) 121 Unit.</li> </ul> <p>Pengolahan Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) 6 unit (Lanjutan).</li> <li>Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan (SPI)/Unit Pengolahan Ikan 12 Unit.</li> <li>Pembangunan pabrik es 8 unit.</li> </ul> <p>Fasilitas Penunjang Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Pasar Ikan 7 Unit.</li> <li>Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan 2 pkt</li> <li>Pengembangan kelembagaan 6 paket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memulihkan kegiatan masyarakat melalui rehabilitasi aset nelayan yang rusak seperti : rehabilitasi tambak, rehabilitasi/pembuatan boat, KJA, dan Bagan Apung.</li> <li>Memulihkan kegiatan masyarakat melalui rehabilitasi aset publik yang rusak seperti : pemulihan pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, dan pembangunan pabrik es.</li> <li>Meletakkan pondasi ekonomi berkelanjutan bidang perikanan melalui pengembangan sentra pengolahan ikan dan perbaikan sistem pemasaran, pencegahan dan penanggulangan masalah perikanan, pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur perikanan, pengembangan teknologi perikanan dan kelautan serta pengembangan kelembagaan perikanan.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.4.3 PENGEMBANGAN USAHA

Sub bidang Pengembangan Usaha dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang industri tahun 2008-2009 yaitu meliputi BLM modal LKM, pengembangan sarana pengolahan komoditi, dan pengembangan sentra industri dan sentra non industri yang difokuskan kepada pemberdayaan industri kerakyatan (home industri).

**Tabel 3.60 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Industrin NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Bantuan Langsung Masyarakat Industri	Orang	92.000	5.214	5.214	0
2 Peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati	Unit	*	1	1	0
3 Pilot Project Pengembangan Industri Garam Rakyat	Lokasi	*	3	3	0
4 Fasilitas Pendukung industri	Unit	*	105	105	0

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
5	Pengadaan peralatan Pendukung Alat Produksi dan penyelesaian bangunan gedung batik Aceh serta pengembangan desa batik Aceh	Paket	*	3	3	0
6	Peningkatan Kualitas Produk pada Sentra Industri dan Pengembangan Kerajinan Aceh Besar	Paket	*	1	1	0
7	BLM Penguatan Perajin Sentra Dan Non Sentra Industri	Paket	*	29	24	5
8	BLM Modal LKM	Unit	*	138	43	105
9	Bantuan Pengembangan Industri Oleh Dekranas	Paket	*	1	1	0
10	Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif	Kab	*	4	4	0
11	Pembangunan Pabrik Es	Paket	*	3	3	0
12	Pengembangan Sarana Pengolahan Komoditi	Unit	*	6	**	6

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang perdagangan tahun 2008-2009 yaitu meliputi bantuan modal bergulir, dan pengadaan pasar induk serta penyempurnaan pasar induk yang telah dibangun.

**Tabel 3.61 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Perdagangan NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Bantuan Modal Bergulir Bagi Grosir Dan Pedagang Pasar	Unit	*	13.779	12.639	1.140
2	Pengadaan Cold Storage & Truck Cold Storage	Unit	*	1	1	0
3	Pasar Induk/Grosir/tradisional	Unit	195	89	70	19
4	Rehabilitasi/Pembangunan Gudang Transito	Paket	*	1	1	0
5	Pembangunan Pasar dan Pertokoan di Labui	Paket	*	1	1	0
6	Pembangunan Halte di Labui	Unit	*	3	3	0

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang UKM tahun 2008-2009 yaitu meliputi pemberdayaan koperasi, pengembangan AMF center, pengembangan pusat pasar ekspor, penguatan IOO (*investor outreach office*), penguatan klinik kemasan dan merek UKM serta penyehatan LKM dan penegakan hukum.

**Tabel 3.62 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Pemberdayaan Koperasi dan UKM Melalui LKM di setiap kecamatan	Unit	*	444	359	85
2	Bantuan Modal LKM untuk Usaha Masyarakat dan BLM aset produktif	Orang	*	77.316	77.316	0
3	Penguatan Kelembagaan Aceh Micro Finance	Unit	*	2	1	1
4	Pengembangan AMF Center dan perwakilannya di Kab./Kota	Unit	*	43	22	21
5	Bantuan Teknis dan manajemen LKM	Paket	*	100	100	0
6	Bantuan Modal Usaha Penghuni Huntara	Paket	*	1	1	0
7	Pendirian Kelembagaan Koperasi Terpadu	Paket	*	1	1	0
8	Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Koperasi	Unit	*	60	60	0
9	Penyelenggaraan Program Pelatihan	Orang	*	2.016	2.016	0
10	Pelatihan LKM	Orang	*	410	400	10
11	Penyehatan LKM dan Penegakan Hukum	Paket	*	91	**	91
12	Pengembangan Pusat Distribusi Koperasi (UKM Trading House)	Paket	*	2	**	2
13	Pengembangan Pusat Pasar Ekspor	Paket	*	2	1	1
14	Penguatan IOO (Investor outreach Office)	Paket	*	2	1	1
15	Penguatan Klinik Kemasan dan Merk UKM	Paket	*	2	1	1

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Melebihi target

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang ketenagakerjaan tahun 2008-2009 yaitu meliputi rehabilitasi BLK, peralatan BLK, dan bantuan modal bagi tenaga kerja terlatih, pada Tabel berikut.

**Tabel 3.63 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Ketenagakerjaan, NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Jasa Pelatihan	Orang	600.000	41.953	41.953	0
2	Pembangunan/Rehab Balai Latihan Kerja	Unit	5	10	6	4
3	Peralatan Balai Latihan Kerja	Paket	5	10	6	4

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
4	Pekerja Cash for Work	Orang	*	91.242	91.242	0
5	Pelatihan Pegawai	Orang	*	247	247	0
6	Pembangunan Jalan di Lingkungan BLK	Paket	*	1	1	0
7	Informasi Bursa Kerja	Paket	*	1	1	0
8	Bantuan Modal Bagi Tenaga Kerja Terlatih melalui LKM	Orang	*	750	**	750
9	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Paket	*	5	**	5

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang pariwisata tahun 2008-2009 yaitu meliputi pemugaran kawasan wisata, pengembangan wisata dan peningkatan kualitas SDM pariwisata.

**Tabel 3.64 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Pariwisata, NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/Prasarana Objek Wisata	Paket	*	25	19	6
2	Pelatihan Bidang Pariwisata	Paket	*	11	11	0
3	Penyelenggaraan Pesta Rakyat	Paket	*	4	4	0
4	Pengembangan dan studi pengembangan wisata	Paket	*	57	**	57
5	Pengembangan Usaha Ekonomi Pariwisata	Paket	*	156	156	0
6	Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata (Belanja Lembaga Sosial Lainnya)	Orang	*	100	**	120

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Selanjutnya Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Pengembangan Usaha NAD – Nias disajikan pada Tabel III.66. Pada intinya rencana tindak lanjut adalah melanjutkan program yang sudah dilakukan agar output yang dihasilkan menjadi fungsional.

**Tabel 3.65 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Ekonomi Sub Bidang Pengembangan Usaha NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<p><b>INDUSTRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Perajin Sentra dan Non Sentra Industri</li> </ul> <p><b>PERDAGANGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pasar grosir (lanjutan)</li> </ul> <p><b>KOPERASI DAN UKM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan koperasi dan UKM.</li> <li>• Pengembangan AMF Center</li> <li>• Pengembangan IOO (investor outreach office) I pkt (lanjutan).</li> <li>• Pengembangan Pusat Pasar ekspor I pkt.</li> <li>• Penguatan Klinik Kemasan dan Merk UKM I pkt.</li> </ul> <p><b>KETENAGAKERJAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/Rehab dan Penyediaan Peralatan BLK, sebanyak 2 unit.</li> <li>• Pemberdayaan Tenaga Kerja yang Sudah Dilatih Tahun 2006-2007.</li> </ul> <p><b>PARIWISATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/ Prasarana Objek Wisata</li> <li>• Pengembangan dan studi pengembangan wisata</li> <li>• Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata (Belanja Lembaga Sosial Lainnya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyempurnaan berbagai perluasan kesempatan kerja;</li> <li>• Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja;</li> <li>• Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi;</li> <li>• Pengembangan Sentra Industri dan Non Sentra Industri.</li> <li>• Pembangunan pasar grosir</li> <li>• Penyediaan investasi padat karya untuk pembangunan infrastruktur;</li> <li>• Langkah-langkah untuk menyempurnakan fasilitas pasar yang telah dibangun.</li> <li>• Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UKM.</li> <li>• Langkah-langkah untuk penguatan LKM, AMF, IOO, Pusat Pasar Ekspor, dan Klinik Kemasan dan Merk.</li> <li>• Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana;</li> <li>• Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat.</li> <li>• Langkah-langkah meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata melalui peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• Langkah-langkah untuk memperbaiki kawasan pariwisata.</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

## 3.5 BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Bidang pemulihan kelembagaan dan hukum dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemda, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum, dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M).

### 3.5.1 KELEMBAGAAN DAERAH

Pembangunan Sarana dan Prasarana terbagi atas beberapa program/kegiatan prioritas yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pemda, Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA, Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Penataan Administrasi Kependudukan, dan Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah. Masing-masing program/kegiatan akan diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.66.****Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA NAD - Nias**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Perencanaan	Dokumen	550	**	**	**
2	Ktr KDH/DPRD/Dinas/Meuligo	Unit	76	11	30	***
3	Kantor Kecamatan	Unit	23	69	20	49
4	Rumah Dinas Camat	Unit	*	106	80	26
5	Kantor Desa/Kelurahan	Unit	450	1119	316	803
6	Ambulans Pemda	Paket	12	**	**	**
7	Pemadam Kebakaran	Paket	12	**	**	**
8	Kantor Mukim/Balee	Unit	*	419	185	234

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Target terlampaui

Pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pemda oleh BRR, diperkirakan perlu melanjutkan pelaksanaan pembangunan Kantor KDH/DPRD/Dinas/Meuligo sebanyak 46 unit, Kantor Kecamatan 3 unit, Kantor Desa/Kelurahan 13 unit, Ambulans Pemda 12 unit, Pemadam Kebakaran 12 unit, dan kantor mukim (Kep. Nias) sebanyak 573 unit. Pembangun Rumah Dinas Camat melebihi target Rencana induk sebanyak 80 unit dan kantor mukim /Balee melebihi target Rencana induk 185 unit. Adapun Sasaran Program dan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (hingga Mei 2007) dapat dilihat lebih detail pada Tabel berikut.

**Tabel 3.67 Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda.**

Program/ Kegiatan		Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat PEMDA	Paket	*	**	3	**
2	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket	*	**	1	**
3	Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS	Paket	*	**	**	**
4	Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/ Suplemen	Paket	*	**	**	**
5	Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan	Paket	*	**	**	**
6	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda	Paket	*	**	5	**
7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Pemda	13	**	14	**
8	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/k	13	**	7	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

Pada Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda, kegiatan Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat Pemda melebihi target Rencana induk sebanyak 3 paket, Penanganan masalah administrasi Kepegawaian melebihi target Rencana induk sebanyak 1 paket, Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS belum terealisasi, Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/Suplemen belum terealisasi, Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan belum terealisasi, Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda melebihi target Rencana induk sebanyak 5 paket, Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai melebihi target Rencana induk sebanyak 1 paket, dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda perlu dilanjutkan sebanyak 6 paket.

**Tabel 3.68 Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - NAD-Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	13	**	23	**
2 Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	**	16	**
3 Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	**	4	**
4 Penataan SisKom Humas daerah (media centre)		13	**	1	**
5 BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam)	Kab/k	13	**	23	**
	Kec.	77	**	263	**
6 Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/mukim/gampong	Kab/k	13	**	7	**
	Kec.	77	**	263	**
7 Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg	*	**	21	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda memiliki kegiatan yang berkenaan dengan penyelesaian administrasi, penyusunan rencana tata organisasi, sistem komunikasi, monev dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Beberapa pencapaian sampai saat ini telah mencapai lebih dari 100%, yaitu kegiatan penyelamatan administrasi pemerintahan (176%), penyusunan penataan organisasi Pemda (123.1%) dan BOP kecamatan/Gampong (341.6%). Program ini terutama dilaksanakan pada tahun 2006 dan sebagian dilanjutkan pada tahun 2007. namun demikian beberapa pencapaian sampai dengan tahun 2007 seperti pada kegiatan penataan siskom humas daerah yang pencapaiannya baru mencapai 7.7%.

**Tabel 3.69 Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/k	13	**	25	**
2 Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/k	13	**	22	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Program peningkatan kapasitas keuangan Pemda memiliki dua kegiatan dan pencapaian keduanya sejak tahun 2006 telah mencapai lebih dari 100%. Selanjutnya sampai tahun 2007 terdapat beberapa penambahan. Masing-masing adalah kegiatan peningkatan kapasitas legislatif (192.3%) dan penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (169.2%).

**Tabel 3.70 Sasaran Rencana Aksi Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket	*	**	2	**
2 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket	*	**	1	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

Program peningkatan kerjasama antar daerah juga memiliki dua kegiatan yaitu optimalisasi kerjasama antar daerah dan koordinasi penyelenggaraan pusat dan daerah. Pencapaian pada tahun 2006 masing-masing telah menyelesaikan 1 paket. Pada tahun 2007 pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemerintah daerah melaksanakan 1 paket lagi.

**Tabel 3.71 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Sarana Prasarana PEMDA , NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
1 Penataan Administrasi Kependudukan	Dok	*	**	73	**
2 Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Kab./kota	13	**	**	**
3 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Paket	*	**	1	**
Layanan Rehab Kessos (Trauma Centre)		*	**	**	**
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		*	**	1	**
Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masy.	Paket	*	**	2	**
FKK Stakeholder RR	Paket	*	**	2	**
4 Penguatan Kelembagaan Demokrasi		*	**	**	**
Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/k	*	**	21	**
5 Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA)		*	**	**	**
Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket	*	**	7	**
6 Pengelolaan SDM Aparatur		*	**	**	**
Fasilitasi Penyediaan Aparat Instansi Vertikal di Aceh		*	**	**	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya, ada yang belum dikerjakan (yaitu penataan administrasi wilayah pemerintahan) dan kegiatan lainnya belum dapat dilihat kemajuannya karena belum dapat diperbandingkan dengan rencana induk (seperti kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Penguatan dan Fasilitas Lembaga Masyarakat, FKK Stakeholder RR, Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD dan Harmonisasi Peraturan di Aceh).

**Tabel 3.72 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum Sub Bidang Kelembagaan Daerah NAD – Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ktr KDH/DPRD/Dinas/ Meuligo, sebanyak 46 unit</li> <li>• Kebutuhan Kantor Kecamatan, sebanyak 3 unit</li> <li>• Rehab gedung KPPN Gunung Sitoli</li> <li>• Pembangunan Kantor Desa/Kelurahan, sebanyak 134 unit</li> <li>• Pengadaan Ambulans Pemda, sebanyak 12 paket</li> <li>• Pengadaan Pemadam Kebakaran, sebanyak 12 paket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (DED);</li> <li>• Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik</li> <li>• Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR 2007

### 3.5.2 HUKUM

Realisasi tahun 2005-2006 pembangunan di bidang hukum lebih menitikberatkan pada pembangunan kembali berbagai gedung perkantoran dan fasilitas di bidang hukum yang mengalami kerusakan. Penyediaan sarana dan prasarana hukum pasca bencana telah mencapai hampir 40%, mulai dari rehabilitasi gedung perkantoran hingga penyediaan fasilitas pendukung kerja lembaga hukum. Penyediaan sarana dan prasarana hukum menjadi jawaban terhadap lumpuhnya sebagian besar kegiatan penegakan hukum pasca bencana. Ketiadaan sarana dan prasarana hukum di membuat banyak kasus-kasus hukum tidak bisa dilanjutkan dan diputuskan.

Realisasi pembangunan di bidang hukum yang telah dilakukan hingga tahun 2006 adalah penyediaan gedung perkantoran untuk institusi penegakan hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Syar'iyah, dan lembaga pemasyarakatan.

**Tabel 3.73 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Hukum, NAD - Nias**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
A	SARPRAS KEJAKSAAN				
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1	1	0
	Kejari	Unit	5	6	***
	Rumah Dinas Jaksa	Unit	38	**	17
	Peralatan Kantor	Paket	6	**	***
	Kendaraan R2	Unit	38	**	21
	Kendaraan R4	Unit	15	**	**
	Kendaraan Tahanan	Unit	12	**	5

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
<b>B</b>	<b>SARPRAS DEPKUMHAM</b>					
	Rumah Dinas	Unit	49	**	22	27
	Lapas/Rutan	Unit	6	4	5	***
	Bapas	Unit	2	1	2	***
	Kanwil Depkumham	Unit	1	1	1	0
	Kantor Imigrasi	Unit	2	2	2	0
	Kendaraan R2	Unit	8	**	**	**
	Kendaraan R4	Unit	10	**	6	4
	Peralatan Kantor	Paket	3	**	19	**
<b>C</b>	<b>SARPRAS PENGADILAN</b>					
	PT/PTUN	Unit	2	1	1	0
	Pengadilan Negeri	Unit	9	10	15	***
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25	**	**	**
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33	**	**	**
	Bangunan Mahkamah Syari'ah	Unit	6	13	3	10
	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33	**	12	21
	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18	**	17	1
	Peralatan Kantor	Unit	17	**	79	***
	Pengadilan Militer	Paket	*	1	1	0
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket	*	**	1	**

Sumber : Bapel BRR, 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

\*\*\* : Target terlampaui

0 : Sudah terlaksana

Dukungan terhadap Mahkamah Syar'iyah menjadi salah satu program penting untuk pembangunan di bidang hukum pasca bencana. Lembaga Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga yang cukup istimewa di Aceh sebagai bagian dari penerapan legal formal Syariat Islam secara menyeluruh. Mahkamah Syar'iyah memegang peranan cukup dominan dalam penegakan hukum di Aceh, sehingga perlu mendapat dukungan yang lebih maksimal. Kedeputan Kelembagaan dan Pengembangan SDM BRR NAD-Nias menjadikan penguatan lembaga Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu sasaran pokok.

Berbagai sarana dan prasarana lembaga Mahkamah Syar'iyah berhasil dibangun hingga tahun 2006, terdata 2 (dua) unit kantor Mahkamah Syar'iyah, 23 unit rumah dinas untuk hakim Mahkamah Syar'iyah, serta 29 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 telah berhasil dibangun. Hal ini ditujukan untuk mendukung kinerja penegakan hukum di Aceh.

Untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan hukum oleh Mahkamah Syar'iyah, direktorat hukum juga telah mendukung penciptaan sebuah jaringan komunikasi (information technology -IT)

Mahkamah Syar'iyah. Dengan adanya jaringan IT ini akan lebih mendorong terciptanya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan.

Hingga akhir tahun 2006 untuk penyediaan sarana dan prasarana hukum juga telah terdata sebanyak 10 unit kantor Pengadilan Negeri, 7 unit kantor Kejaksaan Negeri, 20 unit rumah dinas Kejari, 3 unit Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, 1 unit Kanwil Dephukham, 2 unit Kanwil Imigrasi, dan 1 unit Balai Pemasyarakatan telah berhasil dibangun kembali, serta 289 unit peralatan kantor telah berhasil disumbangkan.

Untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Aceh (yang menurut Rencana Induk hanya di rehabilitasi), dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pentingnya fasilitas kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Aceh. Pembangunan sarana yang lebih baik adalah salah satu langkah dalam rangka menumbuhkan sistem kerja lebih efektif dan produktif.

Hal penting lainnya yang telah dilakukan dalam pembangunan di bidang hukum adalah menginisiasi lahirnya Pusat Klinik Hukum. Nantinya Pusat Klinik Hukum ini akan menjadi sebuah pusat lembaga pembinaan dan pelatihan untuk para aparatur penegak hukum serta sebagai tempat untuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Aceh.

Untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Aceh (yang menurut Rencana Induk hanya di rehabilitasi), dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pentingnya fasilitas kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Aceh. Pembangunan sarana yang lebih baik adalah salah satu langkah dalam rangka menumbuhkan sistem kerja lebih efektif dan produktif.

Hal penting lainnya yang telah dilakukan dalam pembangunan di bidang hukum adalah menginisiasi lahirnya Pusat Klinik Hukum. Nantinya Pusat Klinik Hukum ini akan menjadi sebuah pusat lembaga pembinaan dan pelatihan untuk para aparatur penegak hukum serta sebagai tempat untuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Aceh.

Selanjutnya Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum Sub Bidang Hukum NAD-Nias disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.74 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum, Sub Bidang Hukum NAD-Nias**

ISU DAN MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT
<p><b>SARPRAS KEJAKSAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Rumah Dinas Jaksa, sebanyak 16 unit</li> <li>• Kebutuhan Kendaraan R2, sebanyak 21 unit</li> </ul> <p><b>SARPRAS DEPKUMHAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Rumah Dinas, 25 unit</li> <li>• Kebutuhan Kendaraan R2, 8 unit</li> <li>• Kebutuhan Kendaraan R4, 4 unit</li> </ul> <p><b>SARPRAS PENGADILAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan PT/PTUN, 1 unit</li> <li>• Kebutuhan Kendaraan R2 Pengadilan, 25 unit</li> <li>• Kebutuhan Kendaraan R4 Pengadilan, 33 unit</li> <li>• Kebutuhan Kendaraan R2 Mahkamah Syari'ah, 21 unit</li> <li>• Kebutuhan Kendaraan R4 Mah. Syari'ah, 1 unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM, melalui strategi pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya, pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik, pemberian kembali dokumen identitas, pemberian status hukum Baitul Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD</li> <li>• Mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hukum, adalah melalui strategi mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta Jaksa dari daerah lain, merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya,</li> <li>• Kebijakan terakhir adalah menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender, melalui strategi menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang: Pertanahan dan tata ruang; Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan Hukum</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR, 2007

### 3.5.3 KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)

Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) diupayakan untuk menciptakan kembali ketertiban, keamanan dan ketahanan di dalam masyarakat.

Beberapa kebijakan dalam sub bidang pemulihan di bidang K3M diterapkan melalui koordinasi di bawah satuan kerja: Deop, Delog, dan Desdm Polri NAD-Nias, Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan informasi, Peningkatan Komitmen Persatuan Nasional, Pengembangan Pertahanan Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara NAD-Nias, dan Pengembangan Pertahanan Integratif. Sasaran Rencana Aksi sub Bidang Keamanan dan Ketahanan Masyarakat dapat dilihat dalam Tabel berikut.

**Tabel 3.76 Sasaran Rencana Aksi Sub Bidang Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) .**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009	
1	Menkopolhukam	unit	1	**	1	**
2	Menkominfo					
	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1	**	1	0
	Stasiun RRI	Unit	1	**	2	***
	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	6	**	7	***
	Gedung PWI	Unit	*	**	2	**
	Rumah Dinas	Unit	*	**	5	**
	Kendaraan Roda-2 dan Roda 4	Unit	*	**	3	**
3	POLRI					
	Pengembangan Sarana dan Prasarana		*	**	5	**
	Penampungan Sementara	Unit	1.416	**	1	1.415
	Mapolda	Kompleks	1	**	2	***
	Brimobda	Kompleks	1	**	2	***
	Dit. Polair	Kompleks	1	**	2	***
	Polres	Unit	5	**	**	**
	Rumah Dinas (Aspol)	Komplek	26	**	57	***
	Polsek	Unit	20	**	8	12
	Pengadaan Material (Gedung)	Unit	*	**	193	***
	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit	*	**	439	**
	Kendaraan Roda - 4	Unit	*	**	71	**
	Gedung PUSDIK Pasukan Anjing/ Kuda		*	**	**	**
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan		*	**	5	**
4	TNI-AD					
	Bidang ALPAL		*	**	1	**

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
- Kendaraan	Unit	*	**	8	**
- Alat Angkutan Air	Unit	*	**	2	**
- Alat Berat Zeni	Unit	*	**	27	**
- Alat Utama Militer (Senjata)	Unit	*	**	295	**
- Alpasus Zeni	Unit	*	**	39	**
- Alsatri dan Alsintor	Unit	*	**	4	**
- Peralatan Lainnya	Unit	*	**	7	**
- Kendaraan Roda - 2	Unit	*	**	217	**
- Kendaraan Roda - 4	Unit	*	**	28	**
Bidang Faskon	Unit	*	**	461	**
Bidang Alkon	Unit	*	**	1	**
Korem/Kodim	Unit	*	**	2	**
Rumah Dinas	Unit	*	**	1	**
Kompi	Unit	*	**	2	**
Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket	*	**	1	**
5 TNI-AL					
Bidang Bekal Umum	Unit	*	**	1	**
Bidang ALPAL	Unit	*	**	1	**
- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit	*	**	4	**
- Peralatan Bengkel	Unit	*	**	4	**
- Peralatan Laut Komar	Unit	*	**	1	**
- Peralatan Khusus Komar	Unit	*	**	130	**
- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit	*	**	56	**
- Amunisi	Butir	*	**	19.769	**
- Kenderaan	Unit	*	**	6	**
- Peralatan Lainnya	Unit	*	**	76	**
Bidang Faskon	Unit	*	**	40	**
Rumah Sakit Sabang	Unit	*	**	-	**
Rumah Dinas	Unit	*	**	2	**
Posal Sitoli (Dermaga + Masjid)	Unit	*	**	2	**
Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit	*	**	3	**
6 TNI-AU					

Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Induk 2005-2009	Kebutuhan Riil 2005-2009	Proyeksi Capaian Kumulatif 2005- 2007	Sasaran 2008-2009
Bidang ALPAL	Paket	*	**	**	**
Bidang Faskon	Paket	*	**	**	**
Lanud Maimun Saleh	Unit	*	**	1	**
Lanud Iskandar Muda	Unit	*	**	1	**
Paskhas AU	Unit	*	**	1	**
Satrad	Unit	*	**	3	**
7 Matra Integratif				-	
Bidang Bekal Umum	Unit	*	**	3	**
Bidang ALPAL		*	**	**	**
- Kendaraan Roda-2	Unit	*	**	40	**
- Alat Utama Militer	Unit	*	**	958	**
- Alat Angkutan Air	Unit	*	**	13	**
- Jembatan Bailey	Unit	*	**	15	**
- Alat Berat	Unit	*	**	483	**
- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit	*	**	2.299	**
Bidang Faskon	Unit	*	**	3	**
Bidang Kesehatan	Unit	*	**	4	**
Bidang Alkon	Unit	*	**	1	**

Sumber : Bapel BRR 2007

\* : Tidak terinci / tercantum dalam Rencana Induk

\*\* : Data belum tersedia

0 : Sudah terlaksana

Catatan : Seluruh data pada tabel diatas, jika sampai dengan Program tahun 2008-2009 belum mencapai sasaran kebutuhan riil melalui dana APBN-BRR, maka sebagian kegiatan akan ditangani oleh Pemda (APBD) dan atau Donor/ NGO. Sebagai mana tercantum pada lampiran Rencana Rinci.

### 3.6 PENDANAAN RENCANA AKSI NAD-NIAS 2007-2009

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara telah berlangsung selama dua tahun (2005-2006). Badan Pelaksana BRR NAD-Nias telah melaksanakan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi lima bidang pemulihan. Namun demikian, masih banyak yang belum terselesaikan dalam rangka pemulihan di kedua wilayah bencana tersebut.

Kebutuhan pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias tahun 2007 yang sedang berjalan dibutuhkan dana sebesar Rp 10,9 triliun yang bersumber dari on budget (DIPA BRR). Pada tahun 2008 dan 2009 dibutuhkan dana on budget (DIPA BRR) sebesar Rp 13,89 triliun. Pendanaan yang berasal dari off budget (Donor/NGO) untuk 2007-2009 dibutuhkan sebesar Rp. 17,78 triliun.

Adapun rincian on budget (DIPA BRR) dan off budget (Donor/NGO) untuk tahun 2007 – 2009 dapat dilihat lebih detil pada Tabel III.78 dan Tabel III.79.

**Tabel 3.78 Kebutuhan Pendanaan BRR NAD - Nias tahun 2007-2009**

BIDANG/ PROGRAM		2007	2008	2009
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3.264.490.829.000	2.600.081.000.000	0
1	Perumahan	2.997.924.179.000	2.473.567.000.000	0
2	Tata Ruang	64.566.650.000	20.750.000.000	0
3	Pertanahan	202.000.000.000	80.000.000.000	0
4	Lingkungan Hidup	0	25.764.000.000	0
INFRASTRUKTUR		2.884.490.801.145	4.864.785.250.746	3.567.711.060.600
1	Jalan dan Transportasi	1.677.610.919.250	3.154.406.913.000	2.464.681.500.000
2	Energi & Telekomunikasi	267.302.502.000	143.127.486.846	34.053.094.000
3	Sumber Daya Air	396.398.689.195	446.210.336.900	392.836.229.600
4	Air dan Sanitasi	204.219.203.000	673.009.441.000	594.692.488.000
5	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	20.866.516.000	89.400.000.000	0
6	Kawasan Percontohan	75.222.499.700	0	0
7	Bangunan Gedung Negara dan Rumah	84.220.472.000	215.760.079.000	0
8	IREP	158.650.000.000	142.870.994.000	81.447.749.000
SOSIAL KEMASYARAKATAN		1.399.755.115.600	1.053.272.402.000	39.285.000.000
1	PKPP	1.260.472.618.600	530.874.600.000	38.245.000.000
	- Pendidikan	853.118.931.600	386.801.800.000	7.000.000.000
	- Kesehatan	363.178.712.000	136.496.800.000	31.245.000.000
	- Pemberdayaan Perempuan	44.174.975.000	7.576.000.000	0
2	AGSOSBUDPORA	139.282.497.000	522.397.802.000	1.040.000.000
	- Agama	80.290.318.000	153.461.295.000	0
	- Sosial	10.191.127.000	223.979.500.000	640.000.000
	- Budaya	4.778.082.000	111.093.750.000	400.000.000
	- Pemuda dan Olahraga	44.022.970.000	33.863.257.000	0
PEREKONOMIAN		1.104.581.146.000	910.239.320.000	11.128.750.000
1	Pertanian**	376.497.782.000	115.592.310.000	975.000.000
2	Perikanan	399.106.106.000	675.458.060.000	0
3	Pengembangan Usaha	328.977.258.000	119.188.950.000	10.153.750.000
KELEMBAGAAN DAN HUKUM		719.135.436.000	232.252.711.600	11.726.250.000
1	Kelembagaan Daerah	439.807.160.000	223.252.711.600	11.726.250.000
2	Hukum	80.220.160.000	2.000.000.000	0
3	K3M	199.108.116.000	7.000.000.000	0
BIAYA MANAJEMEN		866.899.457.000	350.000.000.000	250.000.000.000
JUMLAH		10.239.352.784.745	10.010.630.684.346	3.879.851.060.600

Sumber: BRR NAD-Nias, 2007

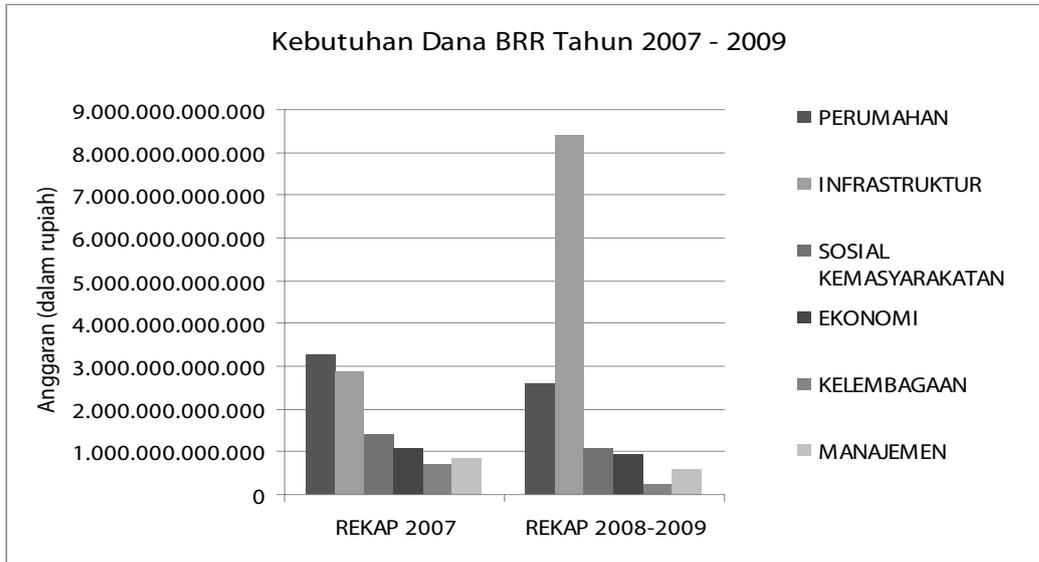
**Tabel 3.79 Total Kebutuhan Pendanaan Donor/NGO Tahun 2007-2009**

BIDANG/ PROGRAM		2007-2009
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2.455.415.107.289
1	Perumahan	1.844.681.125.600
2	Tata Ruang	555.430.974.400
3	Pertanahan	0
4	Lingkungan Hidup	0

<b>INFRASTRUKTUR</b>		<b>6.484.526.139.088</b>
1	Jalan dan Transportasi	4.869.432.718.000
2	Energi & Telekomunikasi	1.298.874.400
3	Sumber Daya Air	23.883.200.000
4	Air dan Sanitasi	75.388.369.600
5	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	0
6	Kawasan Percontohan	0
7	Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0
8	IREP	0
<b>SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>		<b>6.159.438.818.007</b>
1	PKPP	3.838.999.866.891
	- Pendidikan	2.184.892.569.091
	- Kesehatan	1.420.305.581.800
	- Pemberdayaan Perempuan	233.801.716.000
2	AGSOSBUDPORA	1.100.814.135.160
	- Agama	146.593.974.960
	- Sosial	703.881.096.800
	- Budaya	148.598.265.000
	- Pemuda dan Olahraga	101.740.798.400
<b>PEREKONOMIAN</b>		<b>646.114.475.867</b>
1	Pertanian**	18.524.439.200
2	Perikanan	76.798.416.800
3	Pengembangan Usaha	58.272.073.200
<b>KELEMBAGAAN DAN HUKUM</b>		<b>1.369.143.153.600</b>
1	Kelembagaan Daerah	1.369.143.153.600
2	Hukum	0
3	K3M	0
<b>BIAYA MANAJEMEN</b>		<b>661.039.255.600</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>17.775.676.949.451</b>

Sumber: BRR NAD-Nias, 2007

**Gambar 3.1 Grafik Kebutuhan Pendanaan BRR NAD - Nias tahun 2007-2009**



**Gambar 3.2. Grafik Kebutuhan Pendanaan Donor/NGO Tahun 2007-2009**



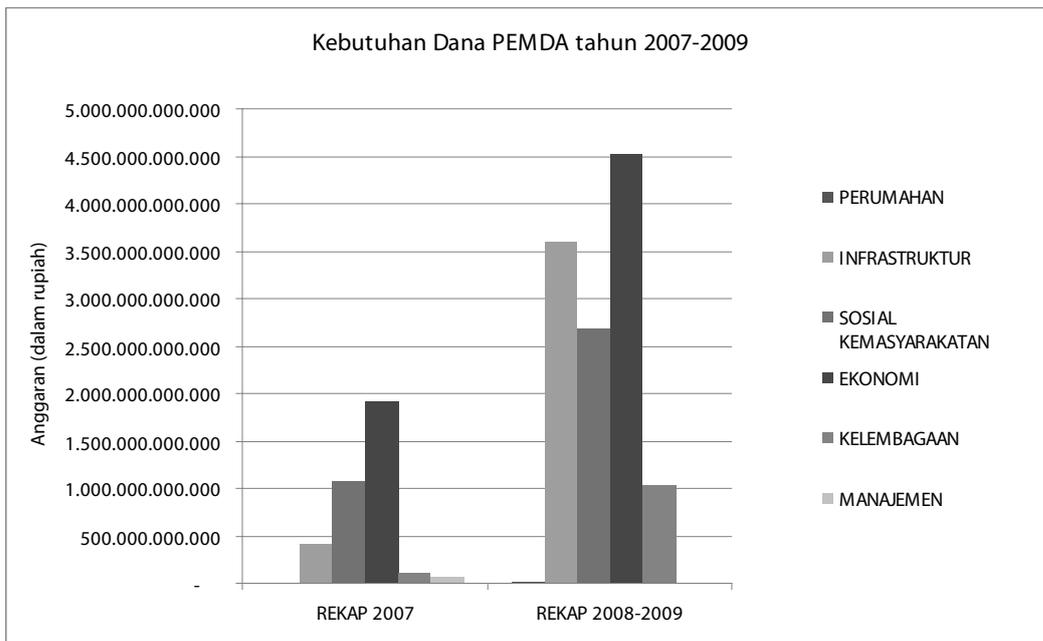
Disamping dana yang bersumber dari On budget dan Off budget, juga terdapat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana APBD dan APBN Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.80 Total Kebutuhan Pendanaan Pemda NAD Tahun 2007-2009**

BIDANG/ PROGRAM		2007	2008	2009
<b>PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>		<b>6.277.900.000</b>	<b>7.339.900.000</b>	<b>7.842.900.000</b>
1	Perumahan	0	0	0
2	Tata Ruang	6.277.900.000	7.089.900.000	7.562.900.000
3	Pertanahan	0	250.000.000	280.000.000
4	Lingkungan Hidup			
<b>INFRASTRUKTUR</b>		<b>415.918.032.700</b>	<b>1.528.809.148.800</b>	<b>2.066.586.707.500</b>
1	Jalan dan Transportasi	346.444.010.500	1.260.639.872.000	1.850.390.680.000
2	Energi & Telekomunikasi	52.333.090.900	232.269.239.500	152.507.470.000
3	Sumber Daya Air	1.126.023.000	1.274.350.000	1.322.759.000
4	Air dan Sanitasi	6.013.178.000	10.815.149.000	12.062.422.000
5	Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan	10.001.730.300	23.810.538.300	50.303.376.500
6	Kawasan Percontohan			
7	Bangunan Gedung Negara dan Rumah	0	0	0
8	IREP	0	0	0
<b>SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>		<b>1.926.253.811.000</b>	<b>1.249.569.384.000</b>	<b>1.433.298.320.500</b>
1	PKPP	0	852.532.832.000	924.003.513.300
	- Pendidikan	0		
	- Kesehatan	0		
	- Pemberdayaan Perempuan	0		
2	AGSOSBUDPORA	1.926.253.811.000	397.036.552.000	509.294.807.200
	- Agama	0		
	- Sosial	0		
	- Budaya	0		
	- Pemuda dan Olahraga	1.926.253.811.000		
<b>PEREKONOMIAN</b>		<b>1.632.767.279.500</b>	<b>2.269.851.017.300</b>	<b>2.246.404.235.300</b>
1	Pertanian**	1.438.147.010.100	1.602.922.155.400	1.733.104.407.500
2	Perikanan	-	124.960.000.000	119.000.000.000
3	Pengembangan Usaha	194.620.269.400	541.968.861.900	394.299.827.800
<b>KELEMBAGAAN DAN HUKUM</b>		<b>3.650.893.671.500</b>	<b>475.662.716.600</b>	<b>553.456.407.500</b>
1	Kelembagaan Daerah	62.925.317.000	418.372.279.400	491.164.007.900
2	Hukum	3.587.968.354.500	8.002.813.500	9.219.180.500
3	K3M	0	49.287.623.700	53.073.219.100
<b>BIAYA MANAJEMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>7.632.110.694.700</b>	<b>5.531.232.166.700</b>	<b>6.307.588.570.800</b>

Sumber: APBD Prov. NAD

Kebutuhan pendanaan Rehab-rekon yang berasal dari APBD pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 7,6 triliun, Rp 5,5 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun untuk 2009. Adapun grafik kebutuhan pendanaan pada tahun 2007 – 2009 untuk masing – masing bidang pemulihan dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 3.3 Grafik Kebutuhan Pendanaan Pemda NAD Tahun 2007-2009**

# **BAB 4**

## **PRINSIP, KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD- NIAS 2007 - 2009**

Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana Tsunami pada tanggal 26 Desember 2007 dan gempa bumi tanggal 28 Maret 2005, yang selama ini dikoordinasikan pelaksanaannya oleh BRR NAD-Nias, pada dasarnya mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005.

Pada bab ini diuraikan prinsip-prinsip, kebijakan umum, kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias per bidang pemulihan untuk periode tahun 2007-2009. Kebijakan dan strategi pemulihan di provinsi NAD dibagi ke dalam 5 (lima) bidang pemulihan yaitu: (1) Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; (2) Infrastruktur; (3) Sosial Budaya; (4) Perekonomian; (5) Kelembagaan dan Hukum. Sementara itu, kegiatan pemulihan di kepulauan Nias dibagi ke dalam 4 (empat) bidang atau pilar pemulihan, yaitu (i) perumahan dan permukiman, (ii) infrastruktur, (iii) kelembagaan dan sosial kemasyarakatan dan (iv) ekonomi. Pembagian bidang ini ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap kinerja manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbedaan kelompok bidang di kedua wilayah tersebut pada dasarnya telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, tetapi tidak mengurangi jumlah sektor yang ditangani. Bab ini juga menjelaskan mengenai mekanisme pendanaan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme transisi dan pelimpahan tanggung jawab rekonstruksi dalam rangka menjaga keberlanjutan rekonstruksi pasca masa tugas BRR.

## 4.1. PRINSIP-PRINSIP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2009 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada partisipasi masyarakat (Community participation), yaitu mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
2. Holistik, yaitu pembangunan kembali yang mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan pada strategi yang bersifat komprehensif .
3. Membangun lebih baik (Build back better), yaitu membangun kembali wilayah dan kehidupan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias menjadi lebih baik dari kondisi semula.
4. Prioritas, yaitu mengutamakan kegiatan dan tindakan rekonstruksi yang bersifat urgent, mendahulukan kegiatan pemulihan pada daerah-daerah terkena bencana tsunami dan gempa, serta daerah konflik.
5. Terintegrasi, yaitu memadukan kegiatan inter dan lintas sektor untuk memperoleh manfaat yang optimal, dan koordinasi dan strategi yang efektif untuk menjamin konsistensi dan efektivitas program sektoral dan regional di tingkat nasional maupun daerah.
6. Koordinatif, yaitu senantiasa mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksanaannya sehingga tercapai tingkat sinergi yang optimal.
7. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang efektif.
8. Mendorong peningkatan kapasitas lokal (promoting local autonomy), yaitu memupuk kapasitas otonomi lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proses rehabilitasi-rekonstruksi.
9. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yaitu mendorong dan memfasilitasi tercapainya tata pemerintahan yang baik dalam setiap aspek dan tatanan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi.
10. Memperhatikan aspek Jender, yaitu menyadari dan peduli terhadap pengarusutamaan jender dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Memperhatikan kualitas, yaitu mengutamakan kualitas pada setiap kegiatan dan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Efisien, transparan, dan akuntabel, yaitu mengupayakan efisiensi dalam setiap kegiatan, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan.
13. Pembangunan berkelanjutan, yaitu membangun kembali dengan memperhatikan pengelolaan sumberdaya alam yang ada dan direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan (carrying capacity).

## 4.2. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 2007-2009 tetap mengacu pada kebijakan yang tertera dalam Perpres 30/2005, yaitu yang terbagi ke dalam 4 (empat) kebijakan utama berikut ini:

1. Pembangunan kembali masyarakat; dengan cara memulihkan aspek-aspek kehidupan keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, hukum dan kelembagaan agama serta adat.

2. Pembangunan kembali ekonomi; dengan cara penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah, pembangunan kembali sektor-sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi (pasar, tempat pelelangan ikan, gudang, dll.).
3. Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan serta permukiman ;dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara beserta fasilitasnya, prasarana dan sarana pos dan telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan.
4. Pembangunan kembali pemerintahan dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, merancang kembali (redesign) kota-kota dan pusat kegiatan baru.

Membangun kembali Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menuju keadaan yang lebih baik (*build back better*), secara fisik dapat dimaknai sebagai rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang lebih tahan terhadap gempa. Sedangkan dalam konteks pembangunan nonfisik dapat dimaknai sebagai usaha rehabilitasi kehidupan dan penghidupan sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dengan kata lain, peluang membangun Provinsi NAD dan Kepulauan Nias secara komprehensif diwujudkan sebagai pembangunan yang tidak saja mengembalikan keadaan seperti semula, namun dimaknai sebagai peluang pembangunan ekonomi-sosial kemasayarakatan dan pengembangan wilayah yang lebih maju.

Dalam proses rekonstruksi yang sedang berlangsung saat ini, keterkaitan antara kebijakan umum dengan pengelompokan bidang atau pilar pemulihan kembali wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias yang lebih baik adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Keterkaitan Kebijakan Umum dengan Bidang atau Pilar Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias**

Komponen Bidang	Bidang atau pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009				
	Perumahan, Tata Permukiman, Tata Ruang, Pertanian dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur	Sosial Kemasayarakatan	Perekonomian	Kelembagaan dan Hukum
Pembangunan kembali masyarakat	þ		þ	þ	þ
Pembangunan kembali ekonomi		þ	þ	þ	
Pembangunan kembali infrastruktur dan perumahan serta permukiman	þ	þ		þ	þ
Pembangunan kembali pemerintahan		þ	þ	þ	þ

Sumber : Tim P3B Bappenas, April 2007.

Catatan:

1. Bidang pemulihan di NAD meliputi (i) perumahan dan permukiman, (ii) infrastruktur, (iii) sosial kemasayarakatan, (iv) perekonomian dan (v) kelembagaan dan hukum
2. Bidang Pemulihan di Nias meliputi (i) perumahan dan permukiman, (ii) infrastruktur, (iii) Ekonomi dan (iv) kelembagaan dan sosial kemasayarakatan

## 4.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKTORAL

Kebijakan dan Strategi sektoral berikut ini menjadi acuan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang atau sektor yang disusun berdasarkan permasalahan sektor yang ada.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu: 1) masalah yang timbul pada manusia sebagai individu; 2) manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya; dan 3) masalah yang timbul pada aspek pendukung kehidupan manusia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perumusan kebijakan dan strategi serta Rencana Aksi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada periode 2007 dan sesudahnya memperhatikan skenario keseluruhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 2005-2009 sebagaimana disajikan pada Gambar Iv-1 (untuk NAD) dan Gambar Iv-2 (untuk Nias). Walaupun demikian, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi periode 2007 dan sesudahnya akan difokuskan pada 3 (tiga) strategi berikut ini:

1. Penyelesaian (rounding-up) kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah direncanakan sebelumnya dan pembangunan serta fungsionalisasi semua asset yang telah dibangun selama tahun 2005-2006.
2. Pelaksanaan program-program strategis, untuk penguatan pondasi perekonomian, sistem kehidupan keagamaan, sosial dan budaya lokal pasca rekonstruksi termasuk program-program bantuan hibah yang memerlukan dana pendamping.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam rangka melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, juga dalam rangka memelihara keberlanjutan pembangunan pasca rekonstruksi.

**Gambar 4.1 Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD Tahun 2005-2009**



Keterangan: Analisis berdasarkan perkembangan 2 tahun BRR NAD-Nias.

Kegiatan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dimulai pada tahun 2006, diarahkan untuk menyelesaikan pembangunan perumahan, pengembangan sektor energi dan komunikasi, pengembangan ekonomi melalui pengembangan sentra-sentra produksi, peningkatan kapasitas UKM dan SDM untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi rakyat. Di samping itu, upaya-upaya pengembangan ekonomi juga dilakukan melalui pengembangan usaha pada level korporasi .

Berbeda dengan kegiatan di Provinsi NAD, kegiatan rekonstruksi di Kepulauan Nias (Gambar IV.2) diarahkan untuk membangun infrastruktur energi listrik dan telekomunikasi, meneruskan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana permukimannya, perkuatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat pada tingkat korporasi.

**Gambar 4.2 Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias- Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2009.**



Sumber: Analisis Tim P3B Bappenas, Mei 2007 (Berdasarkan skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD- Nias Tahun 2005-2009).

Kegiatan yang dimulai pada tahun 2006 di kedua wilayah tersebut, pada dasarnya sudah termasuk kategori rekonstruksi. Pembangunan Nias difokuskan pada pengembangan infrastruktur, perumahan, permukiman, kelembagaan dan sosial masyarakat dan menumbuhkan perekonomian di Kepulauan Nias yang dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

#### 4.3.1. BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran pokok kegiatan pemulihan bidang perumahan, permukiman, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup adalah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan hunian penduduk. Hal itu berarti bahwa hunian atau tempat tinggal dan tempat untuk mendukung kehidupan dan penghidupan pasca bencana harus lebih aman dari keadaan sebelum bencana sehingga korban jiwa dapat dicegah apabila terjadi bencana serupa.

Selain itu, permukiman yang berfungsi sebagai hunian tersebut harus memiliki prasarana dan sarana skala kawasan yang meliputi prasarana akses masuk dan keluar dari kawasan, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, prasarana dan sarana lingkungan kawasan atau ruang terbuka hijau (taman kota, kawasan tepian air dll), fasilitas sosial (taman kanak-kanak, balai pertemuan warga dll) dan fasilitas umum (balai desa, lahan parkir dll).

## PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Untuk mencapai sasaran pemulihan tersebut, kebijakan dan strategi di bidang ini untuk wilayah Provinsi NAD adalah:

- 1. Melanjutkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi para korban bencana.**
  - a. Menetapkan standar atau model lokasi percontohan yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat setempat dengan fasilitasi sistem pendampingan dari Pemerintah daerah, BRR dan pemangku kepentingan terkait.
  - b. Membuat panduan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat Kabupaten/Kota yang menjadi model pemberdayaan, model pelayanan kesehatan dan pendidikan serta model kelembagaan dan koordinasi lintas Departemen.
  - c. Membantu korban yang ingin kembali ke tempat asal dan melengkapi infrastruktur fasilitas penyelamatan diri.
  - d. Membantu korban yang tidak memiliki lahan (penyewa) untuk memiliki rumah permanen.
  - e. Menyelesaikan penyediaan perumahan dan prasarana serta sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana yang berkeinginan pindah ke tempat baru (*resettlement*) yang lebih aman, termasuk sertifikat kepemilikan lahan.
- 2. Memfungsikan sistem pelayanan prasarana dan sarana perumahan, permukiman dan lingkungan hidup yang telah dibangun.**
  - a. Memprioritaskan pembangunan kembali sistem air minum, sanitasi, drainase dan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya yang memenuhi standar pelayanan minimal pada skala komunal.
  - b. Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana akses masuk (*entry point*), antara lain jaringan jalan pendukung antar perumahan dan permukiman.
- 3. Memperbaiki rumah dan perumahan yang belum memenuhi syarat teknis minimal.**
  - a. Memetakan kembali rumah dan perumahan yang tidak tahan gempa dan yang **letaknya** berada di bawah permukaan genangan.
  - b. Melakukan perbaikan rumah (*retrofit*) sesuai kebutuhan teknis.
- 4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan lingkungan permukiman.**
  - a. Memetakan kembali kawasan-kawasan permukiman yang belum aman terhadap bencana yang ditinjau dari aspek lokasi, keberadaan infrastruktur penyelamatan diri.
  - b. Menambah kekurangan infrastruktur penyelamatan diri atau menyediakan lokasi yang lebih aman terhadap bencana.
  - c. Menyelesaikan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL atau SOP) pengembangan kawasan permukiman untuk acuan pelaksanaan mitigasi dampak pasca rekonstruksi.

## KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Kebijakan dan strategi rekonstruksi pada bidang Perumahan dan permukiman di Kepulauan Nias – Sumatera Utara meliputi :

1. Membantu dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana.
2. Melakukan pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat, terutama milik masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya serta pada kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.
3. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman melalui peningkatan pelayanan air bersih, sanitasi dan drainase skala komunal.
4. Menerapkan mekanisme pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat, termasuk mekanisme distribusi material bahan bangunan serta sistem informasi pembangunan perumahan dan permukiman.
5. Melaksanakan strategi pengendalian dengan penentuan penerima yang tepat sasaran; meningkatkan mutu (*quality*) rumah yang dibangun dan kualitas bahan material yang digunakan; serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi.
6. Melakukan peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi masyarakat untuk membangun perumahan termasuk mendukung proses rehabilitasi rumah berbasis kebutuhan serta prakarsa masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat terutama informasi tentang hak dan tanggung jawab.
8. Menerapkan sistem pengawasan dan pemantauan terhadap bantuan perumahan, berbasis komunitas.

### 4.3.2. BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

Sasaran pokok kegiatan pemulihan infrastruktur, pada dasarnya adalah untuk memulihkan kembali kegiatan yang dapat mendukung perekonomian skala lokal maupun skala kawasan dan skala regional. Selain itu, sasaran untuk pengurangan resiko bencana termasuk ke dalam sasaran pemulihan infrastruktur pasca bencana. Infrastruktur yang dibangun kembali meliputi infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal dll); infrastruktur energi (PLTA, PLTM, PLTG, PLTU dll); infrastruktur pertanian (saluran irigasi, bendungan, waduk); infrastruktur pengurangan risiko bencana (pengaman pantai, pengaman sungai, kolam-kolam retensi dll).

Infrastruktur dalam rangka penguatan pondasi pembangunan ekonomi pasca rekonstruksi masih belum diimplementasikan secara memadai. Oleh karena itu, rencana aksi rekonstruksi periode 2007-2009 mulai diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi.

## PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Untuk mencapai sasaran pemulihan infrastruktur di provinsi NAD, kebijakan dan strategi bidang pemulihan infrastruktur ini adalah sebagai berikut:

1. **Menyelesaikan pembangunan sistem transportasi dan telekomunikasi** yang memadai dan terpadu untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah di dalam

propinsi dan antar propinsi, serta dengan luar negeri, misalnya (i) membuka *entry point* dan jalur jalan utama (nasional) yang baru dalam rangka pengembangan wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang efisien, (ii) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/atau membangun fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nirkabel untuk meningkatkan akses ke daerah perdesaan, baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI

2. **Melanjutkan pembangunan fasilitas distribusi energi dan kelistrikan** sebagai upaya mendukung lancarnya aktivitas sosial dan perekonomian, misalnya dengan cara (i) memprioritaskan pembangunan pembangkit dan penyalur energi listrik di daerah bencana, (ii) mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis sumberdaya terbarukan (misalnya PLTA-mikro hidro, tenaga surya dll).
3. **Menyelesaikan pembangunan sarana pendukung ketersediaan pangan** dengan memprioritaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi (teknis dan non teknis), pada wilayah di mana petani penggarapnya telah siap, tetapi lebih diutamakan di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemukiman.
4. **Memulihkan rasa aman bagi penduduk terkena bencana** melalui peningkatan infrastruktur penunjang upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana misalnya (i) saluran drainase alami, (ii) sistem drainase mikro dan makro untuk kawasan perkotaan (iii) bukit penyelamatan (*escape hill*) dan jalur penyelamatan (*escape road*) (iv) kantong-kantong air (*retention basin*), tanggul, pintu-pintu air termasuk penyelesaian penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL atau SOP) bidang infrastruktur untuk acuan pelaksanaan mitigasi dampak lingkungan pasca rekonstruksi.
5. **Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi** yang didasarkan pada kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama, misalnya dengan cara (i) melakukan investasi berdasarkan hasil studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama (ii) memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru, (iii) menerapkan keterpaduan intramoda, (iii) menetapkan jadwal pelaksanaan berdasarkan tingkat kepentingan (*urgency*) dan tingkat kesiapan (*readiness*), (iv) menerapkan metode pelaksanaan dan sistem logistik yang efisien serta (v) melakukan konsultasi publik, yang antara lain ditujukan untuk menggali dan mengakomodasikan nilai budaya lokal dan agama

## KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Kebijakan dan strategi pemulihan infrastruktur di Kepulauan Nias ditujukan pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik, handal dan efektif melalui:

1. Memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar serta prasarana untuk memperlancar logistik.
2. Membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah kecamatan, kecamatan dan desa, serta menuju sentra-sentra produksi misalnya dengan cara (i) membuka *entry point* dan jalur utama untuk pengembangan wilayah, (ii) merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan/atau membangun fasilitas baru melalui teknologi nirkabel untuk memberikan kemudahan akses telekomunikasi secara lokal, SLJJ, maupun SLI.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jalan pada wilayah-wilayah terpencil dan sangat terpencil, terutama pada wilayah-wilayah yang terkait dengan sentra-sentra produksi dan pemasaran dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
4. Merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembali aktivitas sosial dan perekonomian, misalnya dengan cara (i) memprioritaskan rehabilitasi

jaringan distribusi kelistrikan dan (ii) mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversifikasi sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berbasis sumberdaya terbarukan.

### 4.3.2. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sasaran pokok pemulihan bidang sosial budaya pada dasarnya adalah pulihnya pelayanan prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemuda dan olah raga serta terwujudnya kesetaraan gender di semua aspek kehidupan masyarakat di wilayah propinsi NAD dan Nias.

Indikator pulihnya pelayanan prasarana dan sarana sosial budaya tersebut antara lain adalah meningkatnya rasio prasarana dan sarana kesehatan terhadap penduduk, rasio dokter dan para medis terhadap penduduk, rasio jumlah guru terhadap murid, rasio jumlah murid dalam kelas dan sebagainya.

Sampai dengan akhir tahun 2006, masih banyak prasarana dan sarana yang dibangun belum dimanfaatkan secara optimal akibat kekurangan guru, paramedis dan fasilitas yang berhubungan dengan pemanfaatan prasarana dan sarana tersebut. Oleh karena itu, rencana aksi pemulihan sosial budaya diprioritaskan pada upaya pemanfaatan (utilisasi) prasarana dan sarana yang telah dibangun dan pelatihan - pelatihan yang terkait dengan optimasi pemanfaatan prasarana dan sarana serta fasilitas.

### PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategi rekonstruksi bidang sosial dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- (1) **Meningkatkan peran serta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya ditingkat mukim dan gampong dalam pemanfaatan prasarana dan sarana dayah (pesantren) yang telah dibangun,** misalnya dengan cara (i) melibatkan Tuha Peut dan Tuha Lapan (Unsur Tokoh Masyarakat) beserta perangkat mukim dan gampong, (ii) penguatan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana alam;
- (2) **Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya di tingkat mukim dan gampong,** misalnya dengan menyelesaikan pembangunan *meunasah* dan *bale gampong* (tempat musyawarah);
- (3) **Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** dengan cara mengembangkan dan memfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Women Crisis Center, Children Center, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak;
- (4) **Meningkatkan mutu kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat** dengan cara (i) memetakan kembali keberadaan nilai-nilai budaya, warisan seni dan budaya masyarakat yang perlu dilestarikan serta (ii) membangun kembali atau memperbaiki atau memugar sarana dan prasarana serta warisan budaya yang rusak;
- (5) **Peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga** dengan menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan dan memperkuat kapasitas kelembagaannya;
- (6) **Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pengurangan resiko bencana misalnya** melalui

(i) peningkatan pengetahuan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana gempa bumi dan gelombang tsunami dengan memperhatikan kearifan budaya lokal, (ii) penyelesaian pembangunan pusat peringatan dini (*early warning system*) dan (iii) memanfaatkan teknologi tepat guna dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan pendidikan masyarakat;

## KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Menjadikan sebuah sistem sosial kemasyarakatan yang kokoh dalam masyarakat Kepulauan Nias yang termasuk di dalamnya sektor pendidikan dan kesehatan dapat dilaksanakan melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan penunjang kehidupan social budaya lainnya dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas tersebut.
2. **Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, misalnya dengan (i)** melakukan pendataan kebutuhan khusus perempuan dan anak, (ii) mengembangkan dan memfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) serta memfasilitasi *women crisis center*, (iii) memfasilitasi *children center*, reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak, (iv) memberdayakan perempuan khususnya kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi;
3. **Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, misalnya dengan (i)** melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya, (ii) memperkuat nilai-nilai budaya, melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat, (ii) membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana budaya serta memugar warisan budaya yang rusak;
4. **Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat korban bencana yang rentan, misalnya dengan (i)** memberikan bantuan dan jaminan sosial (ii) meningkatkan mutu pelayanan maupun manajemen pendidikan, kesehatan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana, (iii) membangun dan memfungsikan *trauma center*, dan (iv) memberdayakan keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil;
5. **Peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga**, misalnya dengan (i) menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan serta memulihkan fungsi kelembagaannya, (ii) mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan dan keolahragaan.
6. **Pencegahan terjadinya wabah penyakit dan kekurangan gizi**, misalnya melalui (i) penilaian kebutuhan cepat (*rapid health assessment*), (ii) imunisasi, *vector control*, disinfeksi dan penyediaan air minum, (iii) memperkuat *surveillance epidemiologi* (iv) pemberian bantuan makanan bagi bayi, balita dan ibu hamil, (v) pemberian paket pertolongan gizi seperti vitamin A, tablet besi, sirup besi, (vi) penyuluhan gizi dan memperkuat *surveillance* gizi.

Kebijakan dan Strategi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. **Memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan**, melalui: (i) rekrutmen, pelatihan dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal, (ii) penyelesaian masalah administrasi kepegawaian dan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa), (iii) pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan, (iv) penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan, (v) kerjasama dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya.

2. **Melanjutkan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik dalam jangka menengah**, melalui: (i) penataan, penyediaan dan peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah daerah, (ii) menata sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan), (iii) menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM), (iv) menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.
3. **Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi**, dengan melanjutkan rekonstruksi prasarana pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (*Detail Engineering Design*) serta penyediaan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.

#### 4.3.4. BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

Sasaran pokok kegiatan pemulihan perekonomian, pada dasarnya adalah untuk mengembalikan sendi-sendi perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

#### PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Kebijakan dan strategi pemulihan bidang perekonomian di Provinsi NAD dalam periode 2007-2009 ditujukan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan. Perhatian diberikan pada upaya peningkatan investasi swasta dan masyarakat dengan menyediakan iklim investasi yang kondusif berupa infrastruktur, pelayanan, regulasi, dan sumberdaya manusia. Di samping itu, usaha-usaha ekonomi masyarakat didukung secara teknis dan finansial agar mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan membuka akses kesempatan usaha seluas luasnya kepada masyarakat Aceh yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi secara umum, khususnya usaha ekonomi kecil dan menengah.
2. Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya investasi melalui promosi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah di bidang investasi dan perdagangan.
3. Meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan melalui pengembangan kawasan dan sentra produk-produk unggulan wilayah (pertanian, peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan kelautan, industri, dan perdagangan).
4. Menguatkan kapasitas kelembagaan pelaku kegiatan ekonomi melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan kewirausahaan.

#### KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemulihan perekonomian di kepulauan Nias bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di masa depan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Dalam mewujudkan hal tersebut kebijakan dan strategi bidang ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengorganisasian dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat** tentang pentingnya sebuah kohesi sosial dalam kegiatan ekonomi, penciptaan kemandirian dalam rangka memulihkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta kepariwisataan misalnya melalui peningkatan kemampuan (*skills*) yang baru.
2. **Pemberian bantuan modal kerja dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses finansial ke sumberdaya produktif.** Kebijakan ini diserahkan pengaturannya kepada kelompok-kelompok kerja yang telah dibentuk sebelumnya. BRR dan Pemda berperan menjadi fasilitator bantuan modal dan mengajak kerjasama lembaga-lembaga keuangan formal lainnya. Sementara itu, lembaga keuangan mikro dikembangkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan (i) penciptaan lapangan kerja, (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penanggulangan kemiskinan.
3. **Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat** untuk memenuhi standar pelayanan minimal seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya termasuk pengembangan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
4. **Meningkatkan upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup** untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan degradasi lingkungan hidup yang berdampak negatif pada keberlanjutan perekonomian jangka panjang.

#### 4.3.5. BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Sasaran pokok pemulihan kelembagaan dan hukum, pada dasarnya adalah pulihnya kembali sistem pelayanan kelembagaan pemerintah kepada masyarakat di seluruh bidang kehidupan yang meliputi sektor ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat (K3M) serta sektor hukum.

Sistem kelembagaan yang perlu dipulihkan kembali meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan kantor, pelatihan SDM junior yang dipromosikan untuk menggantikan seniornya yang menjadi korban, revitalisasi sistem dan prosedur pelayanan masyarakat, penyediaan perangkat-perangkat kerja dan lain sebagainya.

Sampai akhir tahun 2006, sistem kelembagaan yang telah direvitalisasi tersebut belum mampu mengimbangi penambahan beban tugas` rekonstruksi yang relatif besar. Oleh karena itu, rencana aksi di bidang penguatan kelembagaan diarahkan untuk peningkatan keterampilan aparat, khususnya di bidang perencanaan dan pemrograman serta penganggaran secara terintegrasi yang bertumpu pada kebijakan penataan ruang dan penataan lingkungan.

### PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran pemulihan bidang kelembagaan dan hukum di provinsi NAD adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan melalui pengembangan sistem dan prosedur, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, manajemen dan keterampilan lapangan;
2. Mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik yang dinamis dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi;

3. **Membangun dan memulihkan kembali infrastruktur pemerintahan** untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. **Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan di daerah dalam jangka menengah**, melalui (i) penataan kembali terhadap ketersediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah yang didasarkan pada beban tugas pasca rekonstruksi, (ii) pendidikan dan pelatihan dibidang kepemimpinan, manajemen profesional (perencanaan dan pemrograman serta penganggaran terintegrasi) berbasis penataan ruang dan penataan lingkungan, (iii) perbaikan sistem administrasi dan sistem manajemen pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (misal bencana alam);
5. **Melanjutkan penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan permanen**, melalui (i) penyiapan rencana induk dan rencana teknis (*Detail Engineering Design*), (ii) memfasilitasi penyediaan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik termasuk pusat pemulihan trauma, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi;
6. **Melanjutkan proses pematangan dan pendewasaan kehidupan sosial politik bagi masyarakat**, melalui: (i) peningkatan peran masyarakat sipil dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan, (ii) restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi, (iii) pengelolaan dampak bencana melalui kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural, (iv) membangun karakter dan kebangsaan (*nation and character building*) yang mandiri dan berkualitas;
7. **Melanjutkan program untuk menjaga rasa aman dan tertib** di masyarakat bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dengan melanjutkan refungsionalisasi lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban; pengamanan proses pembangunan, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah yang rawan (belum kondusif);
8. **Meningkatkan peran ulama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik**, khususnya dalam penerapan syari'at Islam berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), melalui : (i) pelibatan ulama dalam memberikan pertimbangan (menjadi *filter* dan *quality control*) terhadap materi-materi legislasi hukum, mulai dari tahapan perencanaan hingga pada tahapan sosialisasi di masyarakat, dan (ii) peningkatan kapasitas dan peran ulama sebagai mitra sejajar dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam pembentukan qanun-qanun dan pelaksanaan program-program yang terkait dengan penerapan syari'at Islam secara kaffah;

Pada Bab III dijelaskan pendanaan Rencana Aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2007-2009. Pada sub bab ini diuraikan secara umum tentang sumber-sumber pendanaan, mekanisme pengelolaan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana dalam rangka keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### 4.4. SUMBER-SUMBER PENDANAAN

Sebagaimana pada periode tahun 2005-2006 yang lalu, pendanaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD dan kepulauan Nias di provinsi Sumatera Utara selanjutnya berasal dari dana APBN, APBD, hibah (*grants*), serta dana yang berasal dari masyarakat (baik domestik maupun internasional). Walaupun demikian, pendanaan per bidang

pemulihan harus diatur berdasarkan ketersediaan dana, misi dan atau peran masing-masing lembaga penyedia dana.

### SUMBER DANA APBN (ON BUDGET)

Alokasi dana APBN dapat bersumber dari (i) dana rupiah murni, (ii) hibah luar negeri, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, (iii) realokasi atau pemrograman ulang (*reprogramming*) dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan, (iv) pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan); serta (v) penundaan dana pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri berdasarkan *moratorium* dari Paris Club.

1. **Dana rupiah murni** yang bisa digunakan antara lain berasal dari dana cadangan umum dan dana dari Departemen/Lembaga yang dapat disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan seperti bidang agama, bidang peradilan serta bidang keuangan tetapi tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelum terjadinya bencana.
2. **Hibah luar negeri** berasal dari negara-negara dan lembaga donor yang tergabung dalam *Consultative Group on Indonesia (CGI)*. Dana hibah tersebut akan disalurkan ke dalam APBN secara *on-budget* maupun secara *off-budget*. Potensi dana hibah yang penyerapannya relatif masih rendah adalah yang berasal hibah yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia (ADB). Selain itu, potensi dana hibah lainnya yang dapat dimanfaatkan antara lain yang berasal dari swasta/masyarakat yang bersumber dari perusahaan, *Non Government Organization (NGO)*, perorangan dan sumber lain.
3. **Realokasi dana pinjaman luar negeri** yang potensial digunakan misalnya berasal dari *Islamic Development Bank*, Bank Dunia. Dana yang dapat direalokasi adalah dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.
4. **Pinjaman Luar Negeri baru**, terutama pinjaman sangat lunak, dipertimbangkan sebagai alternatif sumber pendanaan yang potensial apabila ketersediaan dana dalam negeri dan hibah terbatas. Beberapa pinjaman sangat lunak yang sudah disepakati, diantaranya yang berasal dari Pemerintah Australia. Pinjaman lunak tersebut bunganya 0 %, masa pengembalian 40 tahun, tenggang waktu pembayaran (*grace period*) selama 10 tahun.
5. **Moratorium atau penundaan pembayaran hutang yang jatuh tempo** juga dipertimbangkan sebagai alternatif sumber pendanaan yang potensial.

### SUMBER DANA NON APBN (OFF BUDGET)

Sumber dana non APBN adalah sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias secara langsung tanpa melalui neraca anggaran Pemerintah RI. Pengalokasian dana *off budget* tersebut dilakukan secara langsung oleh lembaga donor internasional/ Nasional ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO).

## 4.5. MEKANISME PENGELOLAAN PENDANAAN

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengikuti Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait lainnya.

Mekanisme pendanaan yang menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (i) percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran; (ii) percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh (iii), kebijakan luncuran dan (iv) kebijakan pengelolaan dana rupiah murni melalui *'Trust Fund'*.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa anggaran APBN BRR sejak TA 2005 terus meningkat dengan kendala dan permasalahan pelaksanaan di lapangan yang kompleks, sehingga diperlukan kebijakan penganggaran secara khusus, misalnya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2005, adanya kebijakan luncuran sisa pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2006. Khusus DIPA tahun 2006, sampai dengan akhir tahun anggaran (Desember 2006) serapan mencapai sekitar 70 %, namun untuk menjamin agar program rehabilitasi dan rekonstruksi yang termasuk kategori kegiatan prioritas utama dapat mencapai sasaran/target dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan, maka diberikan dukungan kebijakan penganggaran melalui dana *"trust fund"*. Izin pembentukan dana trust fund ini didasarkan atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – Nias, Nomor : S-9255/PB/2006, perihal Izin Prinsip Pembentukan Rekening Trust Fund BRR-Nias, yang kemudian untuk pengelolaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS, no 32/PER/BP-BRR/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang Berasal Sisa DIPA TA 2006. Dilandasi oleh kebijakan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari DIPA Tahun anggaran 2006.

Kebijakan pengelolaan *'trust fund'* yang telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias tersebut diatas, meliputi seluruh sisa dana moratorium (rupiah murni) yang tertuang dalam DIPA tahun anggaran 2006 BRR NAD-Nias untuk Pembangunan Perumahan, Infrastruktur, Fasilitas Bangunan Pelayanan Publik, dan Pengadaan tanah, yang kemudian ditampung dalam rekening khusus pada bank pemerintah yang ditunjuk.

Untuk tahun 2007 dan 2008 kebijakan pengelolaan dana *'trust fund'* ini agar tetap dilakukan dan diperluas, bukan hanya untuk program utama, namun juga untuk program dan kegiatan lain yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta kegiatan dalam rangka percepatan fungsionalisasi sarana dan prasarana publik ataupun kegiatan usaha (seperti, agro-input tambak, dan lain-lain).

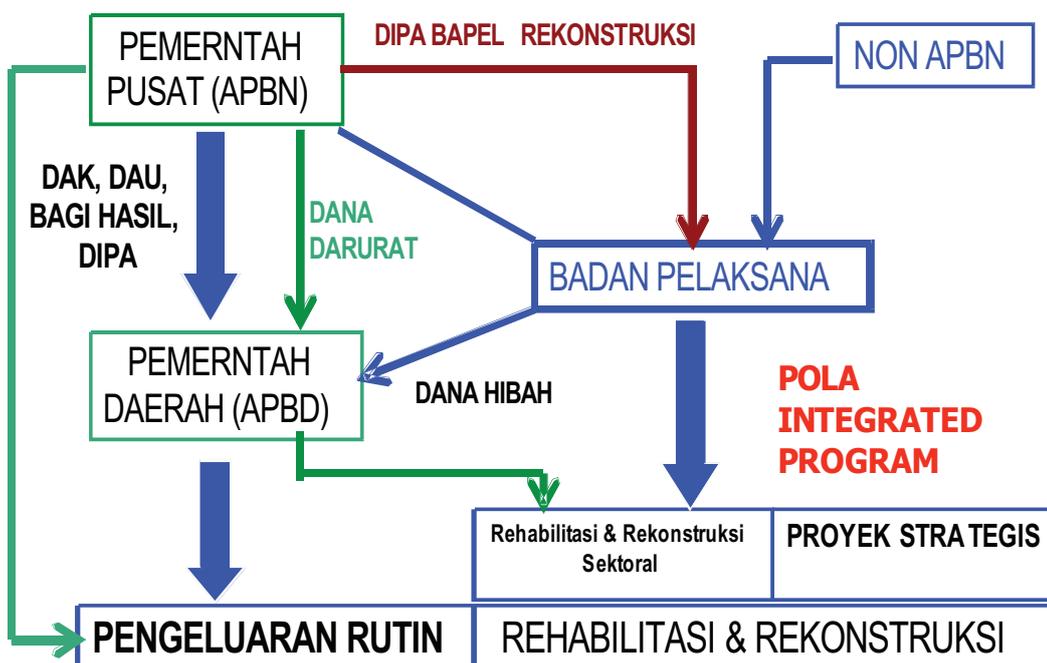
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berperan sebagai Satuan Kerja (Satker), dan menjadi instansi pengguna anggaran tersendiri, yang dengan demikian mempunyai dokumen anggaran (DIPA).

Sementara itu, kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada dalam APBD akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik oleh Provinsi NAD dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, Sumatera Utara. Perencanaan dan pemanfaatan dana tersebut tetap dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian untuk kegiatan tertentu yang sejenis dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi antara Badan dengan Pemerintah daerah.

## 4.2. MEKANISME PENYALURAN DANA

Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, baik yang bersumber dari rupiah murni meliputi dana Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, Desentralisasi dan pinjaman luar negeri periode 2008-2009 sesuai PP no 2 tahun 2006, di mana usulan pendanaan diajukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN kepada Kementerian Perencanaan untuk dilakukan penilaian dan disusun dalam DRPPHLN, kemudian Menneq PPN meneruskan ke Menkeu sebagai pihak yang berwenang melakukan pinjaman luar negeri ditampilkan dalam bentuk diagram alur (*flow chart*) berikut:

**Gambar 4.3 Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

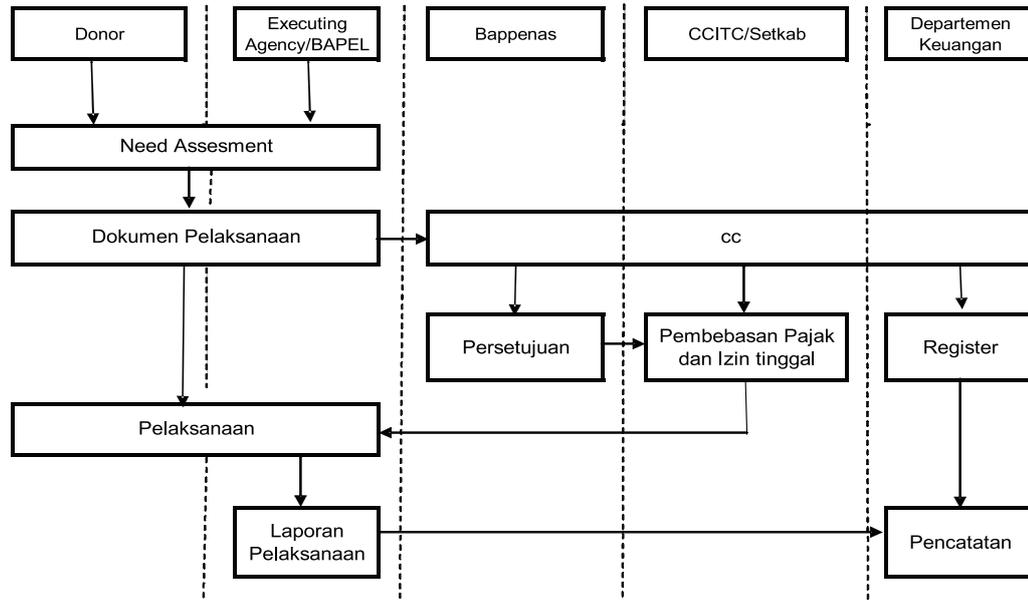


Sumber: Laporan monitoring dan evaluasi P3RIRRWANS, 2006, Bappenas

Sementara itu, untuk penyaluran dana hibah dalam rangka pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri. Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan dengan berbagai donor/lender untuk memperpendek prosedur dan mempercepat proses, sehingga dana hibah dapat segera dilaksanakan dengan lebih cepat. Para donor akan membuat dokumen kesepakatan, seperti: Grant Agreement atau Memorandum of Understanding, Exchange of Notes atau sejenisnya segera setelah diperoleh perkiraan kebutuhan pendanaan yang disusun oleh POKJA di bawah koordinasi Bappenas.

Berdasarkan dokumen kesepakatan tersebut, kegiatan dapat segera dilaksanakan secara langsung oleh pihak donor ataupun dikelola oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Badan Pelaksana BRR NAD-Nias). Namun demikian, dokumen kesepakatan yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dicatatkan (registered) kepada Departemen Keuangan, dan ditembuskan kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet (masuk dalam DIPA). Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi dan keselarasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan. Prosedur ini diuraikan pada gambar berikut :

**Gambar 4.4** Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri



Sumber : Bappenas, Pendanaan, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten Nabire Provinsi Papua Pasca Gempa, Agustus 2005, (Halaman 8, Bab VII)

Setiap instansi akan mengeluarkan persetujuan kerjasama dengan pihak donor sesuai dengan kewenangannya dan sejalan dengan pelaksanaan dilapangan. Khusus untuk pengadaan barang impor yang akan mendapatkan pembebasan pajak harus memperoleh ijin dari Departemen Keuangan dengan rekomendasi dari Sekretariat Negara. Terkait dengan pemanfaatan dana hibah tersebut, maka alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program adalah sebagai berikut:

1. Proposal proyek/program disiapkan oleh Pemerintah Indonesia;
2. Steering Committee mengevaluasi usulan proyek/program dan memberikan persetujuan;
3. Trustee melakukan penilaian (appraisal) dan akhirnya, perjanjian hibah dilakukan antara Trustee dan Pemerintah Indonesia.

Penampungan hibah dari swasta/masyarakat dilakukan sesuai dengan surat Menteri Keuangan No.S-24/MK.06/2005 tanggal 18 Januari 2005. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah membuka 4 (empat) rekening di Bank Indonesia untuk menampung hibah dari luar negeri dan masyarakat dalam negeri dalam mata uang Rupiah (No. Rek 510.000.272), Dollar Amerika Serikat (No. Rek 602.074.411), Japanese Yen (No. Rek. 602.075.111) dan Euro (No. Rek. 602.076.991). Apabila pihak swasta dalam negeri dan luar negeri yang bermaksud memberikan bantuan hibah berupa uang dapat disetorkan langsung ke rekening tersebut diatas.

Namun demikian, apabila pemberi hibah tidak bersedia untuk menyetorkan dananya, maka swasta/ masyarakat dapat melaksanakan sendiri, dengan ketentuan bahwa kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan harus sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Badan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Aksi.

Mengenai tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/ atau hibah luar negeri, acuannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006. Selanjutnya, juga perlu dirujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyaluran Dana Penguatan Modal Melalui Mekanisme Pinjaman.

## MULTI DONOR TRUST FUND (MDTF)

MDTF adalah suatu mekanisme di mana beberapa negara donor berkumpul dan bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan dalam isu yang sama. Kegiatan itu dapat dilaksanakan di dalam satu negara atau dilaksanakan secara global di banyak negara. Dasar pemikiran pembentukan trust fund adalah agar bantuan yang diberikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Hal lain yang mendasari bantuan di suatu negara adalah penilaian bahwa negara tersebut tidak mampu melakukan kegiatan secara bilateral.

Mekanisme trust fund dimulai dengan penunjukan sebuah lembaga sebagai Trust Fund Manager (TFM). Jika untuk kegiatan global penunjukan TFM dilaksanakan oleh sidang pertemuan negara-negara yang terlibat, biasanya lewat badan PBB atau organisasi regional. Sedangkan untuk trust fund pada satu negara TFM ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Penunjukan ini biasanya ditetapkan dalam kesepakatan Sidang atau MoU.

Bersama dengan negara penerima donor, TFM akan menyusun kebutuhan secara terperinci. Atas dasar perencanaan ini, TFM akan menghubungi negara donor untuk memberikan bantuannya. TFM bersama-sama dengan donor selanjutnya membuat perjanjian mengenai bantuan yang akan diberikan beserta kegiatan yang akan dibantuinya.

TFM akan menyampaikan total komitmen yang telah diterima kepada Negara penerima, beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta rincian uraian dana yang dijanjikan oleh para donor. TFM akan memberikan bantuan dalam bentuk Technical Assistance atau bantuan teknis sehingga bantuan diberikan dalam bentuk barang dan jasa. Untuk itu pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan aturan TFM. Untuk memenuhi asas APBN maka Badan Pelaksana (Executing Agency) yang ditunjuk wajib melaporkan besaran dana yang telah disalurkan untuk setiap kegiatan kepada Departemen Keuangan yang kemudian dicatatkan sebagai penerimaan negara.

Melihat kondisinya, maka bantuan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan mekanisme ini.

## 4.7. MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa (procurement) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan wilayah Kepulauan Nias, pada prinsipnya mengikuti Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Meskipun demikian, jika penyelenggaraan suatu kegiatan memperoleh pendanaan dari lembaga donor atau kreditor maka aturan yang digunakan akan mengacu kepada pedoman (guidelines) yang ditentukan oleh lembaga donor atau kreditor tersebut. PP no 2 tahun 2006 Pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2 & 3) mengatur tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui fasilitas kredit ekspor atau pinjaman komersial dilaksanakan setelah alokasi pinjaman Pemerintah ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif pinjaman, kemampuan penyerapan pinjaman serta resiko pinjaman bersangkutan. Menteri menetapkan alokasi pinjaman Pemerintah menurut sumber dan persyaratannya.

Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan/seleksi umum, pelelangan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung oleh aparat pemerintah (departemen/ lembaga) yang membawahi proyek tersebut. Agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang optimal,

proses pengadaan tersebut harus memenuhi dan mengikuti persyaratan dan prosedur tertentu serta dikelola menurut sistem manajemen proyek yang baik. Cara pengadaan barang dan jasa tersebut membuka secara luas peran serta dunia usaha. Satuan harga untuk setiap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proyek pada dasarnya berpedoman pada satuan harga yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Agar sesuai dengan perkembangan harga yang berlaku, pedoman satuan harga tersebut ditinjau ulang setiap tahun.

Pengadaan barang/jasa untuk setiap paket kegiatan pada prinsipnya dilaksanakan oleh pengguna anggaran atau diinstansi yang memegang dokumen anggaran. Penentuan instansi sebagai pengguna anggaran (pemegang dokumen anggaran) ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang telah digariskan oleh aturan perundangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kewenangan, maka penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berpartisipasi dalam berkompetisi melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan penyedia barang/jasa setempat dianggap mempunyai keunggulan komparatif yang diantaranya pengenalan medan, penggunaan tenaga dan sumber daya lokal, serta budaya setempat lainnya. Meskipun demikian apabila dianggap pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mungkin dapat dilakukan di daerah bencana, maka Menteri/Ketua Lembaga Pengguna Anggaran dapat menetapkan lokasi pengadaan barang/jasa di tempat lain.

Beberapa perubahan terhadap Keppres No.80 Tahun 2003 memberikan keleluasaan bagi para pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Peraturan-peraturan ini memberikan beberapa kemudahan dan fleksibilitas, dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, transparan, persaingan yang adil, serta akuntabel. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah;

1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Perpres 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Perpres 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Perpres Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selain itu, terdapat pula kemudahan perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa pengalaman pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan pada periode 2005-2006 yang lalu dapat pula dilakukan pada periode pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berikutnya yaitu:

1. Pemerintah mengidentifikasi sumber-sumber bahan bangunan pokok yaitu semen, besi dan kayu dan menyiapkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pengadaan bahan bangunan lokal untuk menjamin ketersediaan material bangunan.
2. Prosedur penunjukan langsung dapat dilakukan untuk proyek perencanaan dan pembangunan rumah serta pembangunan prasarana publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 jo. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Keringanan pajak diberikan bagi pengadaan barang dan jasa untuk rehabilitasi dan

rekonstruksi terutama bagi komponen pembangunan perumahan dan prasarana publik.

4. Anggota panitia pengadaan dapat berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana (berdasarkan Peraturan Presiden no.8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Perubahan ketentuan juga diberikan untuk meningkatkan peran pemantauan dan pengawasan dalam rangka mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Upaya juga dilakukan dalam rangka penyederhanaan beberapa prosedur dan mempersingkat waktu dengan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang seragam untuk berbagai sumber pendanaan, baik pendanaan yang berasal dari luar negeri maupun pendanaan yang berasal dari dalam negeri. Dalam mempersiapkan penyeragaman dokumen tersebut, dijalin koordinasi dengan beberapa pemberi pinjaman/donor, diantaranya Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JBIC.

Dalam bidang ketenagakerjaan, sudah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing dalam Rangka Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

## **4.8. MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat menimbulkan kompleksitas hubungan antar lembaga, mengingat cakupannya dimobilisasi secara masif dan cepat. Untuk itu diperlukan pengaturan hubungan antar lembaga agar proses pelaksanaannya tetap dapat terkoordinasi secara baik sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang yang ada pada masing-masing lembaga/instansi terkait berdasarkan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Beberapa hal yang diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan dengan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.
2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan TP (tugas pembantuan) merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Kementerian/Lembaga/SKPD, di mana pendanaan yang bersumber dari TP (Tugas Pembantuan) dari Kementerian/Lembaga terkait dapat dialokasikan langsung pada tingkat Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana.
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
4. Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
5. Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

6. Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemantauan dan pengendalian, digunakan 5 (lima) indikator penilaian yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan. Penjelasan mengenai makna ke lima indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1. Konsistensi yaitu proses penelaahan kesesuaian: (a) antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh para pelaksana kegiatan (b) antara Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh pelaksana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan; serta (c) antar kegiatan pelaksanaan
2. Koordinasi yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Konsultasi yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Kapasitas yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Keberlanjutan yaitu proses kesinambungan dan saling keterkaitan antara pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Badan Pelaksana BRR kepada Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan pelaksana pembangunan.

Indikator-indikator pemantauan dan evaluasi yang dapat digunakan adalah seperti tertera pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Kerangka Pemantauan dan Indikator Evaluasi**

NO	RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI	INDIKATOR
1	<b>Konsistensi</b>	1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 2. Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan 3. Konsistensi antara pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi
2	<b>Koordinasi</b>	1. Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan 2. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan
3	<b>Konsultasi</b>	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dalam koordinasi Bapel BRR, K/L, Pemda/SKPD, Donor/NGO/ Swasta 2. Media partisipasi masyarakat secara langsung
4	<b>Kapasitas</b>	1. Kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 2. Sumber Daya Manusia
5	<b>5. Keberlanjutan</b>	1. Sistem dan manajemen peralihan aset kepada Pemerintah Daerah 2. Konsep tentang exit strategy pasca keberadaan BRR

#### 4.8.1. KERANGKA PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pemantauan dan pengendalian yang dilanjutkan dengan analisis kebijakan dapat dipergunakan untuk penyusunan bahan arahan kebijakan oleh Dewan Pengarah kepada Badan Pelaksana BRR. Perumusan kebijakan ini sangat signifikan karena mengingat bahwa tugas Dewan Pengarah adalah memberikan arahan dan saran kepada Badan Pelaksana sebagai pelaksana teknis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatra Utara.

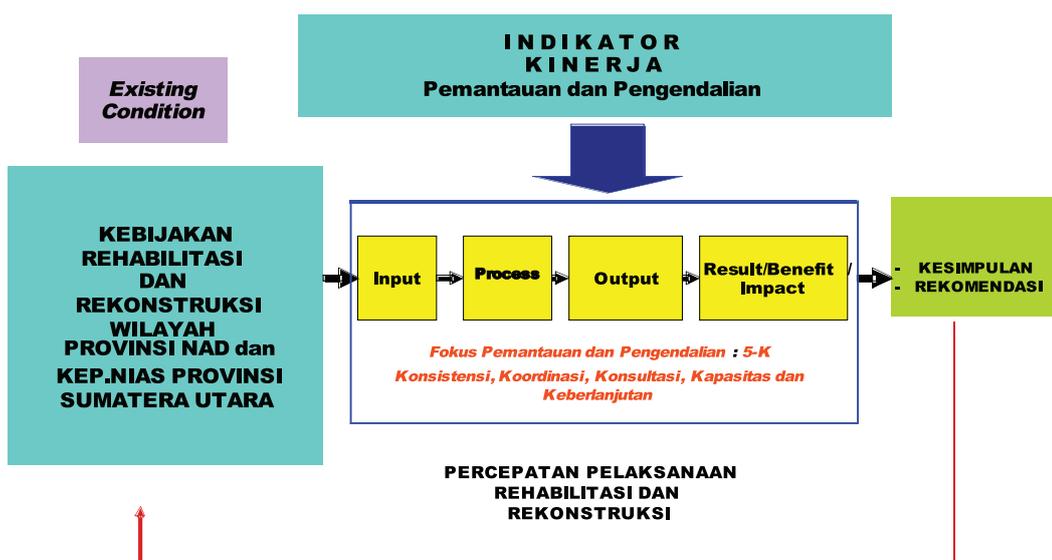
Di dalam mendukung operasionalisasi kegiatan pemantauan dan pengendalian, terhadap kelima indikator penilaian (5K), dilakukan pengukuran kinerja input, proses, output dan outcome yang dirumuskan dalam suatu kerangka kerja logis (*logical framework*) secara makro dan komprehensif berikut ini:

- a. **Input**, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, baik *program dan kegiatan, sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan informasi*, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. **Proses**, yaitu upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan *keterlibatan pemangku kepentingan* termasuk penerima manfaat, serta dikaitkan dengan *mekanisme pelaksanaannya*, termasuk *koordinasi dan hubungan kerja* antar unit organisasi.
- c. **Output**, yaitu *pencapaian sasaran* dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa nonfisik.
- d. **Outcome**, yaitu *dicapainya maksud dan tujuan* dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan*.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem atau keterkaitan, di mana dalam setiap tahapan evaluasi difokuskan pada 5 indikator (5K) yang tidak terpisah satu dengan lainnya.

Mekanisme evaluasi melalui kerangka kerja logis adalah sebagaimana digambarkan pada Gambar berikut.

**Gambar 4.5 Kerangka kerja logis kegiatan pemantauan dan pengendalian**



Sumber: Laporan monitoring dan evaluasi P3RIRRWANS, 2006, Bappenas

## 4.8.2. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian meliputi:

1. *Pengumpulan data dan informasi* tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
2. *Pemantauan pelaksanaan* rencana pembangunan yang terdiri dari Rencana Kerja BRR NAD-Nias, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi.
3. *Penyusunan laporan triwulan* dalam rangka analisa, rekomendasi serta laporan pemantauan dan pengendalian.
4. *Penyampaian laporan hasil* guna menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

## 4.8.3. KEGIATAN PENDUKUNG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Kegiatan-kegiatan pendukung pemantauan dan pengendalian meliputi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyiapan *perumusan kebijakan rencana aksi tahunan*, dan koordinasi atas data, informasi, dan penyusunan laporan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan atas pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. *Koordinasi data dan informasi* perencanaan, pemantauan dan pengendalian pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. *Pemutakhiran data dan informasi* pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta penyusunan basis data dan informasi, data dan informasi spasial, melalui *Situs Web on line* dan *off line* mencakup data Kementerian/Lembaga.
4. *Penyusunan dan sosialisasi indikator sasaran kinerja* untuk kegiatan pokok dan sasaran hasil (*outcome*) serta kerangka legal kebijakan, perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh semua pemangku kepentingan terkait.

Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana (Dewan Pengawas) adalah kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana. Lembaga Dewan Pengawas adalah pengawas internal di lingkungan BRR dan bertugas

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Pengawas bersifat independen dan dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Presiden.



# BAB 5

## RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2007 – 2009

### 5.1. PENYESUAIAN PROGRAM 2007

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias telah berjalan selama 2 (dua) tahun. Sisa paruh waktu kedua yaitu tahun 2007-2009 merupakan kesempatan BRR maupun pemangku kepentingan lain terkait untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen masing-masing. Evaluasi realisasi program tahun anggaran 2005-2006 menunjukkan perbedaan, penambahan, maupun pengurangan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Untuk itu perlu penyesuaian/pemantapan program/kegiatan tahun 2007-2009 melalui klasifikasi menurut prioritas kebutuhan. Klasifikasi tersebut digambarkan kuadran penilaian program berikut ini.

**Gambar 5.1 Kuadran Penilaian Program Tahun 2007-2009**

<p><b>Yang dikerjakan (harus dikerjakan) I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian target program prioritas</li> <li>• Penyempurnaan program sebelumnya</li> <li>• Dampak jangka panjang</li> <li>• Berkelanjutan</li> <li>• Strategis</li> <li>• Daerah bencana dan terkena dampak langsung</li> <li>• Tercantum dalam Rencana Induk dan Renstra</li> <li>• Dapat meningkatkan kinerja BRR</li> </ul>	<p><b>II Baik untuk dikerjakan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak jangka panjang</li> <li>• Berkelanjutan</li> <li>• Strategis</li> <li>• Dapat meningkatkan kinerja BRR</li> <li>• Mendukung program yang tercantum dalam Renstra</li> </ul> <p><b>TETAPI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan pada daerah bencana/tidak terkena dampak langsung</li> <li>• Tidak tercantum dalam Rencana Induk</li> </ul>
<p><b>Kurang Relevan IV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak jangka pendek</li> <li>• Program sporadis (tidak berkelanjutan)</li> <li>• Biaya tinggi</li> <li>• Bukan daerah bencana</li> <li>• Tidak tercantum dalam Rencana Induk dan Renstra</li> <li>• Tidak dapat meningkatkan kinerja BRR</li> <li>• Program tumpang tindih</li> </ul>	<p><b>III Tambahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bermfaat namun hanya berdampak jangka pendek</li> <li>• Program sporadis (tidak berkelanjutan)</li> <li>• Biaya tinggi</li> <li>• Tercantum dalam Renstra</li> <li>• Mungkin tidak dapat meningkatkan kinerja BRR</li> </ul> <p><b>WALAUPUN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah bencana</li> <li>• Tercantum dalam Rencana Induk</li> </ul>

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyesuaian tahun 2007 adalah 8,2 Triliun berasal dari dana APBN (DIPA BRR).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penyesuaian program dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdapat dalam DIPA BRR tahun anggaran 2007, Donor/NGO, Kementrian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah dianggap perlu sehingga dapat merespon kondisi tersebut.

### 5.1.1. BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dana tahun 2007 yang digunakan untuk bidang pemulihan perumahan, permukiman, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup sebesar 2,9 triliun.

#### I. PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Pada sub bidang pemulihan perumahan dan permukiman, arahan penyesuaian program 2007 sebagai berikut :

- a. Pemantapan sasaran lokasi dari program pembangunan rumah melalui inventarisasi secara lebih rinci hingga ke tingkat desa berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Penyesuaian program lebih berfokus kepada penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang masih belum selesai serta rencana kegiatan yang menjadi komitmen antara BRR dan Donor/NGO.
- b. Memantapkan kepastian *beneficiaries* kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan rumah dengan prasarana dasar permukiman yang memadai, agar rumah yang selesai dibangun dapat segera ditempati.
- c. Percepatan realisasi target fisik dan peningkatan mutu perumahan.

Prioritas kegiatan perumahan dan permukiman yang dilakukan BRR adalah :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan. Pembangunan perumahan secara keseluruhan, baik yang ditangani BRR maupun lembaga Donor/NGO, perlu diupayakan secara maksimal agar dapat diselesaikan pada tahun 2007
- b. Pembangunan PSD Lingkungan (air bersih, drainase, jalan lingkungan dan sanitasi) terutama pada rumah rekonstruksi.
- c. Upgrading rumah bantuan terbengkalai yang belum layak huni

Kegiatan lain BRR yang mendukung pemerataan bidang perumahan adalah:

- a. Program Pengembangan Kecamatan (KDP)
- b. Penyusunan DED & perencanaan lain untuk dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya pada tahun 2008

Komitmen Donor/NGO terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan sangat besar dan kegiatan tersebut tetap menjadi prioritas sepanjang tahun 2007. Pemerintah daerah Provinsi NAD maupun Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan dana APBD untuk program perumahan dan permukiman. Keterlibatan Pemerintah daerah hanya pada pelaksanaan dan pengawasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## 2. TATA RUANG

Konsep tata ruang wilayah harus dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi guna pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sangat diperlukan pengaturan tujuan yang jelas dari tata ruang, termasuk di dalamnya **pengurangan resiko bencana** (*Disaster Risk Reduction*). Disamping itu, harus jelas pula aturan pemakaian ruang agar tidak disalahgunakan.

Arahan penyesuaian program tata ruang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian penyusunan RTRW yang belum disahkan.
- b. Kegiatan perencanaan yang berbasis *Village Planning* didukung dengan perencanaan yang terintegrasi dan pelaksanaan yang konsisten. Apabila dianggap perlu maka dilakukan “*plan as you proceed*” yang benar-benar implementatif.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- b. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- c. Sosialisasi Produk Penataan Ruang untuk mendukung upaya transisi aset

## 3. PERTANAHAN

Penyesuaian kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan 2007 diarahkan kepada :

- a. Mengoptimalkan RALAS (*Reconstruction of Aceh Land Administration System Project*) untuk mempercepat penyelesaian administrasi pemilikan hak atas tanah.
- b. Penyediaan lahan yang memenuhi syarat kelayakan untuk *resettlement* (program relokasi) korban tsunami serta kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi lainnya.

Prioritas kegiatan pertanahan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Penyelesaian sertifikasi tanah untuk Relokasi/RALAS. Penyelesaian permasalahan sertifikasi dilakukan dengan semua cara pendekatan, baik teknis maupun non teknis, sehingga keseluruhan sertifikasi dapat diselesaikan
- b. Penyelesaian masalah penyediaan tanah pada dasarnya sudah tidak diperlukan lagi, karena tinggal memanfaatkan lahan/tanah yang sudah dikuasai, kecuali untuk hal-hal yang khusus dalam jumlah terbatas.

## 4. LINGKUNGAN HIDUP

Masalah lingkungan perlu diprioritaskan selama proses rekonstruksi yang sedang berlangsung dan harus menjadi perhatian utama dalam rencana kerja para pemangku kepentingan yang terlibat dalam rekonstruksi. Sebelum proses rekonstruksi dilaksanakan perlu dilakukan analisis dan pengkajian dampak lingkungan di semua daerah bencana dan sekitarnya yang berpengaruh.

Masalah lingkungan utama yang perlu menjadi perhatian dan arahan program dalam tahun 2007 antara lain:

- a. Penataan kembali wilayah yang memiliki permukaan tanah lebih rendah dari muka air sungai maupun laut.
- b. Rehabilitasi dan perlindungan terhadap ekosistem daerah pesisir yang telah rusak karena

- tsunami dan/atau gempa bumi.
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan lingkungan dan pemantauan atas dampak lingkungan.
- d. Penanaman hutan bakau guna mitigasi bencana tsunami.

### 5.1.2. BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

Bidang pemulihan infrastruktur mencakup : 1) jalan dan transportasi; 2) energi dan telekomunikasi; 3) infrastruktur sumber daya air; 4) air minum dan sanitasi, dan 5) fasilitas dan bangunan publik.

Pada tahun 2007, pemeliharaan infrastruktur merupakan kegiatan penting yang sebaiknya dipersiapkan untuk peralihan aset kepada pemerintah daerah, termasuk penyediaan semua peralatan yang diperlukan dengan koordinasi penanganan oleh BRR dan Donor/NGO. Ringkasan Program berkelanjutan 2005-2009 untuk 5 sektor Infrastruktur dan jasa konsultasi IREP dapat dilihat pada Tabel lampiran rencana rinci.

Pemeliharaan aset bidang infrastruktur merupakan kegiatan yang penting pada tahun 2007, sehingga perlu dipersiapkan untuk dialihkan kepada pemerintah daerah, termasuk semua alat berat dan permesinan yang diperlukan dan masih di bawah koordinasi penanganan BRR dan Donor/NGO.

#### I. JALAN DAN TRANSPORTASI

Penyesuaian program tahun 2007 pada sub bidang jalan dan transportasi, yaitu :

- a. Penyesuaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan/jembatan yang telah dikontrak melalui optimalisasi kontrak. Apabila diperlukan dapat mengubah ruas jalan (terutama jalan Kabupaten/Kota) yang langsung mendukung akses menuju perumahan dan permukiman. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan amandemen kontrak yang sudah dibuat.
- b. Melakukan revisi terhadap kegiatan jalan yang belum dikontrak dengan pengalihan sasaran lokasi/ruas jalan sebagaimana di sebutkan dalam butir (a).
- c. Penyiapan perangkat peralatan maupun sarana-prasarana transportasi yang diperlukan untuk meningkatkan akses ke lokasi sentra produktif dan perumahan.
- d. Penyiapan perangkat kebijakan, standar kelayakan operasional, kelembagaan, SDM dan biaya operasional khusus untuk pengoperasian sarana-prasarana bandara atau pelabuhan laut yang telah selesai dibangun. Upaya ini dilakukan untuk mendukung peralihan aset kepada pemerintah daerah/pusat.

Bila butir (a) dan (b) masih belum mencukupi maka pengalihan dari program infrastruktur yang dinilai kurang prioritas, termasuk kegiatan pada sub bidang infrastruktur lainnya, pada pembangunan jalan/jembatan yang lebih prioritas.

#### **TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP (ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN)**

Program pada sub bidang transportasi laut dan ASDP yang sudah dibangun oleh BRR maupun Donor/NGO pada dasarnya sudah cukup. Namun untuk meningkatkan akses dan kelayakan pelabuhan yang tersebar di Provinsi NAD dan Nias, maka pada tahun 2007 BRR akan melaksanakan pembangunan dermaga dan pelabuhan laut serta pengadaan kapal. Donor/NGO terlibat dalam pengadaan kapal ferry dalam sub bidang ini.

## **TRANSPORTASI UDARA**

Pembangunan bandar udara menjadi prioritas oleh BRR, sedangkan Donor/NGO tidak terlibat dalam pembangunan di sub bidang transportasi udara.

Pemerintah daerah dalam alokasi anggaran APBD telah merencanakan pemulihan pembangunan Bandara Singkil, Bandara SIM, Bandara Alas Leuser, dan Bandara Kuala Batee.

## **TRANSPORTASI DARAT, JALAN DAN JEMBATAN**

Prioritas kegiatan yang dilakukan BRR adalah

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan dan jalan, baik berupa jalan nasional (jalan lintas timur, jalan lintas barat, jalan lintas tengah), jalan provinsi, dan jalan kabupaten
- b. Pembangunan terminal, serta pengadaan bus
- c. Pengadaan peralatan SAR dan pengadaan *rescue boat*.
- d. Pembuatan sistem aplikasi bencana alam (mitigasi)

Kegiatan Pemerintah daerah pada sub bidang transportasi darat antara lain pembangunan yang berskala kecil seperti pembangunan jalan kecamatan. Donor/NGO juga berperan besar dalam pemulihan di sub bidang transportasi darat seperti rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan, dimana lokasi kegiatannya saling melengkapi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR.

## **2. ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI**

Prioritas penyesuaian program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang energi dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh BRR lebih difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut.

### **ENERGI DAN KELISTRIKAN**

Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 yaitu

- a. Pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun.
- b. Pembangunan pembangkit listrik (mikro), antara lain PLTS dan PLTMH.

PT. Pertamina dan PT. PLN sebagai badan usaha milik negara, masing-masing mempunyai kewajiban penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tenaga listrik. Selain itu Donor/NGO juga membantu dalam rehabilitasi jaringan distribusi listrik.

### **TELEKOMUNIKASI**

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2007 antara lain :

- a. Pada sub bidang telekomunikasi akan dilaksanakan peningkatan pelayanan akses dan distribusi informasi yang berfokus kepada masyarakat dan pemerintahan serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (target *e-government dan e-community*), migrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2008.
- b. Penyelesaian bangunan Kantor Pos yang sedang direhabilitasi dan rekonstruksi, serta pengadaan peralatan operasional.

Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang harus segera dipenuhi, sisa prasarana telekomunikasi publik yang belum tertangani BRR akan diselesaikan oleh PT. Telkom Tbk. Donor/NGO berperan dan kegiatan rehabilitasi jaringan distribusi telepon di tahun 2007.

### 3. INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIR

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi NAD dengan adanya program tahun 2007 telah melebihi sasaran Rencana Induk. Sedangkan capaian rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Kepulauan Nias masih terdapat beberapa fasilitas yang belum terbangun. Untuk meningkatkan capaian target pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dalam sub bidang ini, perlu dilakukan penyesuaian dengan upaya pengalihan program irigasi, pengamanan pantai dan pengendalian banjir yang kurang prioritas ke lokasi yang lebih prioritas dan mendesak.

#### **IRIGASI**

Kegiatan prioritas di tahun 2007 oleh BRR dan Donor/NGO meliputi rehabilitasi daerah irigasi yang rusak akibat bencana.

#### **SUNGAI DAN PENGENDALIAN BANJIR**

Perkuatan tebing dan normalisasi sungai adalah kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh BRR. Selain itu juga akan dilakukan pengendalian banjir dan pembuatan tanggul untuk mencegah bencana banjir terjadi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

#### **PENGAMANAN PANTAI**

Pengamanan pantai dan pembuatan tanggul laut pasang surut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR sedangkan Donor/NGO dan Pemda tidak terlibat dalam pengamanan pantai.

### 4. AIR MINUM DAN SANITASI

#### **AIR BERSIH**

Banyak perumahan yang dibangun belum dilengkapi dengan prasarana dasar yang memadai. Suplai air bersih masih menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, oleh karena itu pembangunan sarana dan prasarana air bersih berupa pembangunan jaringan air minum dan jaringan pipa air bersih adalah kegiatan prioritas di tahun 2007 oleh BRR dan Donor/NGO.

#### **PERSAMPAHAN**

Pembangunan sistem persampahan serta peningkatan sarana dan prasarana persampahan seperti TPA, pengadaan *amroll* truk, kontainer serta gerobak sampah merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh BRR.

#### **SANITASI**

BRR dan Donor/NGO melaksanakan kegiatan pembangunan sarana sanitasi berupa MCK. Kegiatan prioritas tahun 2007 oleh BRR di sub bidang air limbah adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

#### **DRAINASE**

Prasarana drainase yang dibangun di bawah peil banjir atau jalan/salurannya menimbulkan permasalahan pada kawasan permukiman sekitarnya. Oleh karena itu kegiatan tahun 2007 diprioritaskan untuk membangun saluran drainase primer, agar genangan air ketika hujan dapat dihindari.

## 5. FASILITAS DAN BANGUNAN PUBLIK

Fasilitas dan bangunan publik yang dilaksanakan oleh BRR meliputi pembangunan gedung khusus berupa pembangunan *escape building*, serta gedung laboratorium uji mutu struktur, serta Pusat Pelatihan Mitigasi Bencana Tsunami NAD dan Museum Tsunami.

### 5.1.3. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

#### I. PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

##### **PENDIDIKAN**

Dalam penyesuaian program pendidikan, upaya yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan penyelesaian target pembangunan prasarana dan sarana fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional, diantaranya adalah kelengkapan bangunan fisik pendidikan untuk meningkatkan fungsi dan manfaatnya, sekolah kejuruan (*vocational schools*), peralatan laboratorium dan komputer, pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SDM, beasiswa, perguruan tinggi dan asrama. Disamping itu untuk memperkuat proses pengalihan kepada dinas terkait nantinya maka kegiatan peningkatan mutu SDM pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik di bidang pendidikan sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di NAD dan Nias.

Secara umum kerangka program pendidikan 2007, meliputi:

- a. Revitalisasi, penyempurnaan dan pelengkapan sarana fisik
- b. PAUD dan sekolah kejuruan
- c. Kapasitas pendidikan dan manajemen sekolah
- d. Perpustakaan dan peralatan laboratorium
- e. SDM pendidikan
- f. Beasiswa
- g. Program penunjang peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah, lanjutan sampai perguruan tinggi

Komitmen NGO untuk sektor pendidikan pada tahun 2007 dalam merealisasi program fisik bangunan dan sarana sangat tinggi. Namun untuk program penyempurnaan fisik dan non-fisik seperti program peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan dari tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi masih minim dan bersifat partial sehingga dukungan dari pendanaan on budget masih sangat diperlukan. Disisi lain, program pemerintah daerah bagi sektor pendidikan selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

##### **KESEHATAN**

Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pada perbaikan manajemen dan peningkatan dan standarisasi pelayanan kesehatan.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a. Penyediaan peralatan medis guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Pemberian program bantuan beasiswa dan/atau pengadaan tenaga medis dan tenaga spesialis

kesehatan, terutama di rumah sakit kabupaten.

- c. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- d. Revitalisasi sarana fisik kesehatan

Terkait dengan program pemerintah daerah bagi sektor kesehatan selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sama seperti halnya pendidikan, masih sangat terbatas pada program-program strategis.

### **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Pada program pemberdayaan perempuan difokuskan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru agar menjadi fungsional. Disamping itu program terkaitan dengan upaya peningkatan peran perempuan dan pemberdayaan perempuan dan anak akan dilanjutkan.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah :

- a) Pemantapan program pemberdayaan perempuan
- b) Perlindungan dan kesejahteraan anak
- c) Workshop dan pelatihan Peningkatan Peran Perempuan
- d) Penyempurnaan dan pemanfaatan gedung pusat pemberdayaan perempuan

## **2. AGAMA, SOSIAL, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dalam melakukan pemantapan program sub bidang agama, sosial, budaya, serta pemuda dan olahraga, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, kepada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

Untuk sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga, dukungan program dari donor/NGO sangat kurang dan terbatas sehingga diperlukan dukungan yang besar dari sumber dana on budget. Di sisi lain, program pemerintah daerah baik bagi sektor agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga selama kurun waktu rehabilitasi dan rekonstruksi sangat terbatas pada program-program strategis.

### **AGAMA**

Arah kebijakan pembangunan sub bidang agama untuk tahun 2007 – 2009 adalah meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan rumah ibadah, pembangunan gedung pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan kehidupan beragama, pengembangan lembaga pendidikan keagamaan serta pengembangan kapasitas aparatur dan petugas agama.

Hingga pertengahan tahun 2007 masih terdapat lebih 1.000 unit rumah ibadah yang belum tertangani secara maksimal. Lembaga pendidikan keagamaan juga menjadi fokus dalam kegiatan 2007 di Aceh, beberapa diantaranya adalah dayah/pesantren, TPA, dan asrama.

Arah kebijakan pembangunan agama tahun 2007 adalah meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan rumah ibadah, pembangunan gedung pemerintah, pengembangan lembaga pendidikan keagamaan serta pengembangan kapasitas aparatur dan petugas agama. Disamping masih diperlukan revitalisasi rumah ibadah, gedung kantor, lembaga pendidikan keagamaan, rehabilitasi mental spritual & Pengembangan Kapasitas Aparatur/Masyarakat.

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah:

- a. Bantuan pembangunan rumah ibadah dan dayah

- b. Pembangunan *escape building* di sekitar masjid
- c. Pembangunan gedung/kantor Kantor Urusan Agama (KUA), Kadepag, rumah dinas, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Baitul Mal, asrama haji, dan gedung observasi hilal
- d. Bantuan pengembangan lembaga pendidikan dan kapasitas aparatur agama

### **SOSIAL**

Pada sub bidang sosial, arahan program untuk tahun 2007 yaitu meningkatkan pelayanan sosial untuk kelompok rentan dan pengungsi, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pengungsi di pemukiman baru; pembangunan pusat kegiatan sosial masyarakat; serta pembangembangan sistem kesejahteraan sosial.

Upaya penyesuaian program dan kegiatan pada sub bidang kebudayaan adalah:

- a. Pemberian bantuan kebutuhan pokok (beras, lauk pauk dan sandang) untuk pengungsi yang masih tersisa tinggal di barak, sekitar 1.500 pengungsi
- b. Pemberian bantuan pengembangan usaha produktif desa-desa yang belum mendapatkan bantuan (*filling gap*), yakni sekitar 45 desa
- c. Penyelesaian rehabilitasi yayasan/panti yang belum diselesaikan pada tahun 2006, sekitar 5 unit di Provinsi NAD
- d. Revitalisasi kelembagaan dengan berfokus pada pengutamaan gender dan *survey assessment* kebutuhan khusus perempuan
- e. Program perlengkapan sarana kantor pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah:

- a. Pelayanan Sosial Kelompok Rentan, Pengungsi dan Anak
- b. Pemberdayaan pengungsi di pemukiman baru dan masyarakat pedesaan
- c. pembangunan pusat kegiatan sosial masyarakat
- d. pembangembangan sistem kesejahteraan sosial

### **BUDAYA**

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana, prasarana, serta situs/ benda cagar budaya, pemetaan potensi budaya dan pengembangan data base, ensiklopedi seni kebudayaan Aceh dan Nias dalam tatanan kebudayaan nasional menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan, mengingat khasanah kebudayaan tersebut tidak berdiri sendiri dalam khasanah budaya nasional. Salah satu yang menjadi fokus kegiatan dalam tahun 2007 adalah pembangunan Gedung Galeri Museum yang representatif untuk menyimpan benda-benda kuno.

Adapun titik berat program budaya 2007, antara lain:

- a. Program Strategis Keragaman Budaya
- b. Program Strategis Nilai Budaya
- c. Program Strategis Kekayaan Budaya

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah:

- a. Pembangunan gedung museum adat dan seni budaya di Provinsi NAD
- b. Di Kepulauan Nias, pembangunan gedung nasional Nias, sebagai pusat studi seni, budaya dan bahasa Nias

- c. Pembangunan gedung budaya Nias (*community centre*) dan pengembangan wisata budaya di Kepulauan Nias

### PEMUDA DAN OLAHRAGA

Arah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemuda dan olah raga di tahun 2007 untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias adalah melanjutkan program pemulihan dan peningkatan partisipasi pemuda, program pembinaan dan pemasyarakatan kegiatan olahraga, dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Kerangka program pemuda tahun 2007-2009 meliputi:

- a. Program pemulihan dan peningkatan partisipasi pemuda
- b. Program pembinaan dan pemasyarakatan kegiatan olahraga
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- d. Program fisik

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan adalah:

- a. Di Provinsi NAD, fokus terhadap program non fisik seperti pembinaan, pengadaan peralatan olah raga dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas pemuda. Sedangkan kegiatan fisik adalah melanjutkan penyelesaian fasilitas, sarana dan prasarana olah raga
- b. Untuk Kepulauan Nias, melanjutkan pembangunan stadion serta pengadaan sarana dan prasarana olah raga

### 5.1.4. BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

Bidang pemulihan perekonomian terdiri dari sub bidang pertanian (tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan), perikanan, dan pengembangan usaha (industri, perdagangan, tenaga kerja, Koperasi dan UKM, serta pariwisata). Fokus arahan penyesuaian kegiatan tahun 2007 menitikberatkan pada pembangunan kembali perekonomian ekonomi masyarakat terutama pada sentra-sentra produktif yang potensial dan berpengaruh terhadap daerah sekitarnya.

#### I. PERTANIAN

##### TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Mengingat kegiatan ekonomi telah dilakukan dengan cukup luas, dan output yang dihasilkan belum memberikan gambaran akan manfaat, maka diperlukan studi sebagai penilaian terhadap *outcomes*.

Penyesuaian program dan kegiatan sub bidang pertanian pada tahun 2007 mengarah kepada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan kegiatan seperti pembangunan lining irigasi, pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI), gudang alsintan, gedung Balai Pertemuan Petani dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*)
- b. Rehabilitasi lahan sawah dan lahan kering (tegalan)
- c. Pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura serta terminal agribisnis
- d. Untuk kegiatan non fisik, berupa pelatihan bagi petani palawija dan hortikultura

Prioritas kegiatan yang harus diselesaikan terkait dengan tanaman pangan dan hortikultura adalah:

- a. Untuk Provinsi NAD: melanjutkan pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan gedung pendukung program pertanian, rehabilitasi lahan serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi para petani
- b. Sedangkan untuk Kepulauan Nias: program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta melanjutkan program pemberian bantuan bibit unggul

### **PERKEBUNAN**

Perkebunan produktif di Provinsi NAD adalah kelapa sawit, sedangkan di Kepulauan Nias memiliki potensi pada kakao dan karet. Pengembangan produktifitas pertanian akan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Hal ini dianggap penting untuk mendukung kemampuan daerah dalam pengembangan ekonomi pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, program dan kegiatan pada tahun 2007 difokuskan pada:

- a. Penyelesaian penyiapan lahan berupa bantuan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan perkebunan komoditi utama masing-masing wilayah
- b. Penyediaan bibit kelapa sawit, khusus untuk Provinsi NAD
- c. Dukungan peratalan terhadap kegiatan operasional produksi dan pengolahan hasil perkebunan
- d. Pengadaan pelatihan budidaya dan pendampingan kelompok tani, khusus untuk Kepulauan Nias

### **PETERNAKAN**

Orientasi peningkatan sub bidang peternakan tahun 2007 untuk Provinsi NAD dan Kepulauan Nias yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. *Restocking* ternak (BSRR, KCL, unggas)
- b. Pengembangan sarana-prasarana peternakan yaitu pembangunan Poskeswan, hewan, rumah potong hewan, pengembangan Kebun HMT dan stasiun riset peternakan
- c. Penyebaran hewan ternak dan pengembangan kawasan tenak
- d. Pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas teknik budidaya dan pemberantasan penyakit ternak
- e. Pengembangan kawasan peternakan dan pusat *breeding* ternak, khusus untuk ternak potong

### **KEHUTANAN**

Pada tahun 2007 yang menjadi fokus untuk sub bidang kehutanan untuk wilayah NAD dan Kepulauan Nias meliputi pada:

- a. Rehabilitasi sarana dan prasarana kantor kehutanan, mencakup pada pengembangan database kehutanan, peningkatan usaha masyarakat di kawasan hutan dan restorasi kawasan *bufferzone*
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan, peningkatan dalam penyediaan bibit unggul, serta pengembangan kawasan ekowisata

## **2. PERIKANAN**

Perikanan merupakan potensi SDA yang cukup menonjol bagi NAD dan Kepulauan Nias, karena itu perlu ditangani secara komprehensif dan terfokus sehingga memudahkan integrasi kegiatan, mulai dari penangkapan/budidaya, pengolahan hingga pemasaran. Produk yang dihasilkan umumnya masih

terbatas pada konsumsi lokal, dan belum ditingkatkan nilai tambahnya menjadi komoditi ekspor, keluar daerah dan/atau keluar negeri.

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2007 adalah :

- a. Pembangunan pabrik es, *cold storage*, dan *hatchery*, baiknya langsung dikerjasamakan dengan swasta dan/atau koperasi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- b. Peningkatkan kesiapan manajemen dan dukungan finansial untuk koperasi.
- c. Pelatihan dan pembinaan untuk pengolahan pasca produksi yang dapat memberikan nilai tambah. Pengolahan ini terkait dengan kegiatan pemasaran, baik menyangkut kualitas, kuantitas dan kontinuitas .
- d. Pembangunan pelabuhan perikanan PPI Lampulo dan sentra pengolahan ikan.
- e. Peningkatan manajemen dan pengelolaannya untuk Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), dan dilengkapi dengan pengadaan peralatan tangkap ikan, perahu dan kapal motor.
- f. Pelatihan dan pembinaan untuk memberikan nilai tambah bagi nelayan/petambak, disamping meningkatkan pendapatan asli daerah.
- g. Penyelesaian rehabilitasi tambak.

### 3. PENGEMBANGAN USAHA

#### INDUSTRI

Pada sub bidang industri, prioritas untuk tahun 2007 di fokuskan untuk menjadikan salah satu sektor industri sebagai *pilot project*; peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam penguatan perajin sentra dan non sentra industri; dan termasuk pada pengembangan ekonomi produktif.

#### PERDAGANGAN

Pembangunan pasar telah dilakukan di beberapa lokasi, demikian pula pembinaan keterampilan dan sebagian usaha industri. Namun upaya untuk mengembangkan industri kerajinan rakyat masih dilakukan secara sangat terbatas dan belum konseptual. Upaya penanganan ini juga dapat dilakukan pada tahun 2007. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pedagang pasar (*revolving*), sampai dengan akhir program tahun 2007, juga menjadi target penyelesaian kegiatan di tahun ini. Disamping tetap melanjutkan penyelesaian pembangunan pasar induk/ grosir/ tradisional; pengadaan *cold storage* ; dan pembangunan halte-halte pendukung distribusi.

#### TENAGA KERJA

Upaya diarahkan bagi pematapan kegiatan tenaga kerja yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006, yang diarahkan pada penduduk korban bencana. Pada aspek tenaga kerja, dapat menjadi tenaga kerja siap pakai dan/atau mampu menciptakan kerja/usaha mandiri. Koperasi yang telah dibina semakin dimantapkan secara selektif, agar mampu menjadi koperasi yang maju. Memantapkan hubungan kerja dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam memberikan kredit mikro. Pada tahun 2007, prioritas yang akan dilakukan untuk wilayah NAD dan Kepulauan Nias adalah:

- a. Pelatihan-pelatihan agar dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai melalui Balai Latihan Kerja yang telah dibangun
- b. Pelatihan keterampilan dan penyediaan fasilitas/peralatan penunjang industri (*home industry*)

## KOPERASI DAN UKM

Pemberdayaan Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan salah satu fokus arahan penyesuaian program dan kegiatan pada tahun 2007. Selain itu, melanjutkan pemberian bantuan modal usaha masyarakat (aset produktif); pelatihan pengelolaan dan pendampingan; bantuan teknis dan manajemen LKM menjadi *stimulan* bagi unit koperasi dan UKM agar dapat lebih berkembang secara mandiri yang diikuti dengan pengembangan pusat distribusi koperasi dan pasar ekspor.

## PARIWISATA

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial karena mampu menciptakan kesempatan kerja yang sangat besar karena sektor ini mempunyai keterkaitan yang cukup besar dengan sektor lainnya. Kegiatan pariwisata di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, belum ditangani dengan baik. Untuk itu diperlukan arah penanganan yang jelas dan komprehensif, studi yang sudah dilakukan perlu dikaji ulang, dan upaya ini dapat dilakukan pada tahun anggaran 2007 melalui program revisi.

Penyesuaian untuk pengembangan potensi lokasi pariwisata di tahun 2007 adalah:

- a. Penataan lokasi wisata kota Sabang untuk Provinsi NAD. Termasuk daerah-daerah wisata lainnya dengan memprioritaskan pada studi pengembangan wisata dan pengembangan usaha ekonomi wisata.
- b. Pemugaran kawasan wisata dan pengembangan sarana/prasarana objek wisata.
- c. Penataan lokasi-lokasi wisata, seperti Muara Indah di Gunungsitoli Utara untuk Kepulauan Nias ditambah dengan pengembangan wisata-wisata budaya dan cagar alam yang ada di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.
- d. Peningkatan kualitas SDM dibidang keparawisataan

### 5.1.5. BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Bidang pemulihan kelembagaan dan hukum terdiri dari bidang kelembagaan daerah, hukum dan ketertiban, keamanan, dan ketahanan masyarakat. Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru terhadap kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

#### I. KELEMBAGAAN

Sasaran pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga akhir 2006 menghasilkan bangunan fisik pemerintah daerah di masing-masing lokasi. Pada tahun 2007 banyak direncanakan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Penyelesaian kegiatan fisik 2006 seperti pemulihan sarana dan prasarana pemerintah seperti kantor kepala daerah, Dinas/Badan, Pendopo/Meuligo, Kantor camat, rumah dinas camat, Kantor Kelurahan, meusanah dan/atau Balee. Pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik dari pemda terhadap masyarakat
- b. Peningkatan profesionalisme aparat Pemda, seperti pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalani fungsi pemerintahan, penanganan masalah administrasi kepegawaian dan wilayah pemerintah, peningkatan kapasitas kelembagaan dan keuangan Pemda, peningkatan kerjasama antar daerah, serta kapasitas pemerintah untuk mitigasi bencana
- c. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial melalui penguatan dan fasilitasi lembaga adat, sosial dan adat pada tingkat kecamatan/mukim/gampong

Donor/NGO membantu pada sub bidang kelembagaan ini dalam hal pembangunan gedung pemerintahan berupa kantor kecamatan, kelurahan dan desa. Selain itu juga dilaksanakan *capacity building* untuk meningkatkan kapasitas Pemda.

## 2. HUKUM

Pemulihan sub bidang hukum perlu lebih dimaksimalkan kembali pada tahun 2007 untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan hukum. Sasaran kegiatan penyesuaian yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Pembangunan beberapa gedung fasilitas perkantoran yang belum dilaksanakan seperti
  - Kejaksaan Agung (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri)
  - Dirjen Pemasyarakatan (Lapas/Rutan)
  - Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah)
- b. Pemberdayaan dan pengembangan institusi hukum antara lain penelitian dan pengembangan hukum, pengembangan hukum adat, pengembangan pusat studi hukum, dan pendidikan dan pelatihan teknis hukum dan HAM.
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM sebagai aparat penegak hukum

Kegiatan tahun 2007 yang menjadi prioritas Donor/NGO disub-bidang hukum adalah pelatihan (*workshop*) terhadap aparat hukum.

## 3. KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)

Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) harus diupayakan secara penuh untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Provinsi NAD. Penyesuaian program dan kegiatan prioritas tahun 2007 yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- a. Refungsionalisasi kelembagaan serta prasarana pendukungnya, antara lain
  - Kominfo (Gedung kantor Dinas Kominfo, Stasiun RRI, Stasiun Transmisi TVRI, dan Gedung PWI)
  - Polri (Mapolda, Brimobda, Dit. Polair, Polsek)
  - TNI AD (Korem/Kodim, Kompi)
  - TNI AL (RS Sabang)
  - TNI AU (Bidang Faskon, Lanud, Paskhas AU dan Satrad)
- b. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah terutama pada mobilisasi pasukan Polri
- c. Perencanaan dan sosialisasi kegiatan ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat untuk masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Selain itu juga dilaksanakan dialog antar komponen masyarakat.

## 5.2. PEMANTAPAN PROGRAM TAHUN 2008

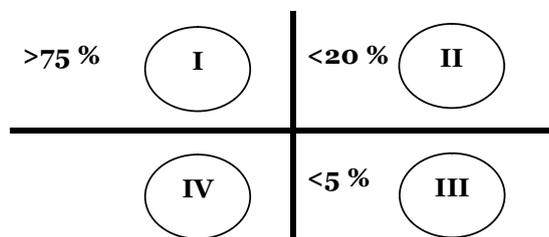
Prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2008 adalah:

1. Penuntasan target dan penyempurnaan dengan upaya tindak lanjut penyelesaian kegiatan fisik tahun 2007 yang belum tuntas
2. Kegiatan yang berbasis Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan fokus utama adalah

memaksimalkan pengalokasian ADB-ETESP karena batas akhirnya pada tahun 2008

3. Kegiatan yang terkait dengan pengakhiran masa tugas dan *capacity building* dan pada tahun 2008 ini akan diterapkan pola dekonsentrasi.

#### Bagan V. 2 Distribusi Alokasi Indikatif Tahun 2008 Menurut Kuadran



Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyesuaian tahun 2008-2009 adalah 13,9 Triliun berasal dari dana APBN (DIPA BRR).

### 5.2.1. BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

#### 1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang perumahan dan permukiman tahun anggaran 2007 yang tidak dapat dilaksanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008. Namun khusus untuk rehabilitasi rumah tidak akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008-2009, khusus di Provinsi NAD, melainkan akan diselesaikan pada tahun 2007.

Prioritas kegiatan yang dilakukan BRR pada tahun 2008-2009 sebagian besar merupakan lanjutan kegiatan tahun 2007, yaitu :

- a. Rekonstruksi rumah,
- b. *Upgrading* rumah bantuan terbengkalai
- c. Penertiban dan penghunian rumah bantuan
- d. Penyiapan/pematangan/pembersihan lahan
- e. Penyusunan DED dan perencanaan lainnya serta program pengembangan kecamatan.

Kegiatan Donor/NGO tahun 2008-2009 terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan serta penyediaan bahan bangunan (kayu) terus berlangsung di Kepulauan Nias. Namun mengingat pada tahun 2008 kegiatan lembaga Donor/NGO tidak lagi mengalokasikan anggarannya di Provinsi NAD, maka BRR menyelesaikan sisa tugas, baik dalam menyelesaikan rumah dan PSD (pada tahun 2009 sudah tidak ada lagi kegiatan perumahan dan permukiman).

#### 2. TATA RUANG

Permasalahan tata ruang semula mempunyai peran yang strategis, oleh karena itu arahan untuk program dan kegiatan tahun 2008-2009 oleh BRR adalah penyelesaian penyusunan RDTR Kabupaten/

Kota, penyusunan RDTR/RTBL Kawasan Khusus, serta penguatan kelembagaan penataan ruang. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan pembangunan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

### 3. PERTANAHAN

Program tahun 2008-2009 di sub bidang pertanahan yang dilaksanakana oleh BRR merupakan lanjutan kegiatan tahun 2007 yaitu penyelesaian sertifikasi untuk relokasi tanah (RALAS) dan penyediaan cadangan pengadaaan tanah untuk hal-hal khusus dalam jumlah terbatas.

### 4. LINGKUNGAN HIDUP

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tahun 2008-2009 di sub bidang lingkungan hidup yaitu penyelesaian dokumen pengelolaan lingkungan kawasan permukiman dan penyediaan kawasan percontohan untuk ruang terbuka hijau di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

## 5.2.2. BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR

Sasaran bidang pemulihan infrastruktur tahun anggaran 2008 sampai dengan 2009 perlu didasarkan pada alternatif dan asumsi sebagai berikut :

1. Dengan adanya perubahan volume sasaran dalam program dan kegiatan tahun anggaran 2007, maka untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2008 -2009 perlu disesuaikan
2. Bila tidak ada perubahan volume sasaran pada program tahun 2007, maka program tahun 2008 - 2009 dilaksanakan untuk mengisi selisih sasaran penajaman yang telah ditetapkan setelah dikurangi realisasi program tahun 2005-2006 dan program 2007, dengan asumsi seluruh program tahun 2007 dapat terlaksana

Tahun 2008-2009 untuk pemulihan infrastruktur merupakan kegiatan yang sangat penting terutama dalam pemeliharaannya untuk tahun yang akan datang.

### I. JALAN DAN TRANSPORTASI

#### **TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP**

Program tahun 2008-2009 untuk transportasi laut adalah lanjutan pembangunan pelabuhan laut dan dermaga agar dapat segera berfungsi secara optimal.

#### **TRANSPORTASI UDARA**

Pelabuhan udara di tahun 2008-2009 lebih terfokus pada lanjutan pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan, gedung operasi, bengkel, dan lain-lain.

#### **TRANSPORTASI DARAT, JALAN DAN JEMBATAN**

Program tahun 2008-2009 di sub bidang transportasi darat adalah lanjutan pembangunan di tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut adalah :

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan dan jalan,

- b. Pembangunan terminal, serta pengadaan bus
- c. Pengadaan peralatan SAR dan pengadaan *rescue boat*.
- d. Pembuatan sistem aplikasi bencana alam

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan diatas dapat memperlancar arus lalu lintas antar kota antar provinsi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

## 2. ENERGI DAN TELEKOMUNIKASI

### ENERGI DAN KELISTRIKAN

Program dan kegiatan pada sub bidang energi dan kelistrikan dilakukan melalui kerjasama dengan PLN dan Kementerian/Lembaga ESDM, sedangkan BRR lebih menekankan pada sambungan listrik Rumah Tangga korban bencana, dan memberikan percontohan dam penyediaan listrik alternatif (tenaga surya) bersama dengan lembaga Donor/NGO. Salah satu program 2008-2009 adalah pembangunan gardu induk.

### TELEKOMUNIKASI

Untuk sub bidang telekomunikasi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta, misalnya oleh PT Telkom Tbk. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2008-2009 lebih banyak dilakukan untuk mengisi kekurangannya, misalnya lanjutan pembangunan kantor pos, serta peralatan dan perlengkapan untuk gedung kantor BMG dari kegiatan tahun 2007.

## 3. INFRASTRUKTUR SUMBERDAYA AIR

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan banjir dan pengamanan pantai di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias masih terus berlangsung yaitu melalui kerjasama dengan Departemen PU dan Pemda. Tahun 2008-2009 perlu ditetapkan prioritas kegiatan penanganan untuk sub bidang infrastruktur sumberdaya air. Mayoritas program yang akan dilaksanakan adalah lanjutan program dan kegiatan tahun 2007.

### IRIGASI

Kegiatan prioritas di tahun 2009 oleh BRR dan Donor/NGO meliputi lanjutan kegiatan rehabilitasi daerah irigasi yang rusak akibat bencana.

### SUNGAI DAN PENGENDALIAN BANJIR

Perkuatan tebing dan normalisasi sungai adalah kegiatan prioritas lanjutan tahun 2005-2007 yang akan dilaksanakan oleh BRR. Selain itu juga akan dilakukan pengendalian banjir dan pembuatan tanggul untuk mencegah bencana banjir terjadi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

### PENGAMANAN PANTAI

Pengamanan pantai dan pembuatan tanggul laut pasang surut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR sedangkan Donor/NGO dan Pemda secara fisik tidak terlibat dalam pengamanan pantai.

## 5. AIR MINUM DAN SANITASI

### AIR BERSIH

Program sub bidang air minum di tahun 2008-2009 adalah pembangunan sistem air bersih dan jaringan air minum baik di Provinsi NAD maupun di Kepulauan Nias. Program sub bidang air bersih ini sangat perlu untuk dikerjasamakan dengan PDAM

### PERSAMPAHAN

Program pada sub bidang persampahan adalah pengadaan peralatan kebersihan berupa dump truk, amroll, container dan landasan. Program ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun 2007.

### SANITASI

Di tahun 2008-2009, program pada sub bidang sanitasi yaitu supervisi pelaksanaan kegiatan sektor air bersih dan air limbah di Provinsi NAD dan *water supply and environmental sanitation modul development and training*. Selain itu pembangunan sarana sanitasi berupa MCK tetap dilaksanakan.

Pengolahan air limbah untuk tahun 2008-2009 yaitu pada program pembangunan sarana dan prasarana air limbah serta pengadaan truk tinja.

### DRAINASE

Prioritas kegiatan tahun 2008-2009 pada sub bidang drainase juga merupakan program lanjutan dari tahun 2007, yaitu pembangunan sistem drainase. Kegiatan ini diharapkan dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.

## 6. FASILITAS DAN BANGUNAN PUBLIK

Untuk fasilitas dan bangunan publik di tahun 2008-2009 merupakan lanjutan dari kegiatan pada tahun 2007, antara lain *central and training mitigation of tsunami NAD disasater Area, escape building, center of tsunami musem development*, serta koordinasi dan konsultasi rencana kerja

### 5.2.3. BIDANG PEMULIHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bidang sosial kemasyarakatan terdiri dari 2 (dua) sub bidang besar yaitu : 1) pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, dan 2) agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga.

#### I. PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

##### PENDIDIKAN

Disamping itu untuk memperkuat proses pengalihan kepada Dinas Terkait nantinya maka kegiatan peningkatan mutu SDM pendidikan dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi akan terus dilanjutkan agar terjadi keseimbangan antara rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik di bidang pendidikan sehingga akan dapat memacu percepatan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di NAD dan Nias. Secara umum kerangka program pendidikan 2007-2009, meliputi:

- a. Penyempurnaan dan pelengkapan sarana fisik

- b. Kelanjutan implementasi program PAUD dan sekolah kejuruan
- c. Kapasitas pendidikan dan manajemen sekolah serta SDM pendidikan
- d. Perpustakaan dan peralatan laboratorium
- e. Peningkatan sarana pelayanan pendidikan tinggi dan mutu akademis
- f. Beasiswa
- g. Program penunjang peningkatan mutu pendidikan

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008-2009 adalah :

- a. Operasionalisasi dan lanjutan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dibangun, antara lain SD, SMP, SMU, laboratorium, buku-buku, perpustakaan, serta perguruan tinggi
- b. Peningkatan kualitas tenaga guru dan dosen perguruan tinggi
- c. Upaya mendukung pemenuhan wajib belajar 9 tahun, PAUD dan sekolah kejuruan
- d. Mengembangkan pendidikan yang bersifat khusus bagi anak-anak jenius/berkemampuan lebih perlu dikembangkan dan sekolah binaan
- e. Pemberian beasiswa dan bimbingan karir bagi pelajar, mahasiswa dosen

Adapun kebijakan pembangunan pendidikan menurut Pola Dasar Pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 - 2012 adalah:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi serta peningkatan anggaran pendidikan.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional kepada tenaga kependidikan serta kesejahteraannya;
- c. Meningkatkan kelangsungan proses belajar mengajar pada seluruh jenjang pendidikan melalui penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi yang berprestasi dan mengalami hambatan pendanaan;
- d. Peningkatan operasional pendidikan pencegahan anak putus sekolah, mendukung upaya pendidikan luar sekolah, penyiapan tenaga terampil pendidikan serta kegiatan bidang kecakapan hidup dan ketrampilan lainnya.

Secara garis besar, pemantapan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini sejalan dan selaras dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

### **KESEHATAN**

Pelayanan kesehatan pada tahun 2008-2009 dilakukan melalui lanjutan pembangunan sarana kesehatan berupa puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, sekolah perawat, rumah dinas dokter dan paramedis serta penyediaan peralatan medis dengan tujuan agar pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk kegiatan non fisik di tahun 2008-2009 akan dilaksanakan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan. Hal penting lainnya yang harus dilaksanakan pada tahun 2008-2009 khususnya dalam rangka menekan tingkat kematian ibu dan anak yaitu peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan terjadinya wabah penyakit.

### **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Arahan program sub bidang peran perempuan di tahun 2008-2009 adalah peningkatan peran perempuan dalam segala bidang kehidupan dan ekonomi terkait dengan pengembangan peran perempuan dengan memperhatikan adat istiadat dan tata nilai lokal yang ada yang terus digali.

Disamping program perlindungan dan pemberdayaan anak-anak tsunami dan terlantar perlu diperkuat dan dilaksanakan.

## 2. AGAMA, SOSIAL, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

### AGAMA

Program sub bidang agama di Provinsi NAD tidak lagi diarahkan pada upaya pembangunan fisik, sedangkan di Kepulauan Nias program 2008-2009 masih banyak diperlukan pembangunan lanjutan sarana peribadatan di beberapa lokasi. Sarana pendidikan keagamaan berupa dayah/pesantren, TPA, asrama, juga dibangun pada tahun 2008-2009 yang diikuti dengan penambahan fasilitas-fasilitas pendukung dalam sosialisasi program-program keagamaan. Selain itu juga diarahkan dalam pembinaan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, sehingga masyarakat dapat menjalankan perilaku dan akhlak, hidup damai dan saling menghormati di antara para pemeluk agama.

### SOSIAL

Program sub bidang sosial difokuskan pada meningkatkan pelayanan sosial bagi anak cacat, yatim-piatu dan orang jompo, dengan mendayagunakan prasarana dan sarana yang telah di rehabilitasi dan di rekonstruksi melalui peningkatan mutu pelayanan yang terkait dengan pembinaan dan melatih para pendidik/pemberi pelayanan sosial.

Upaya untuk mengatasi kelompok masyarakat yang hidupnya terasing dan terpencil juga perlu dilakukan dengan memberikan bimbingan ekonomi dan sosial. Pembangunan trauma center dan pembangunan/rehabilitasi taman makan pahlawan juga dibangun pada tahun 2008-2009.

### BUDAYA

Program tahun 2008-2009 pada penelolan keragaman budaya yaitu perlunya pemantapan situs dan cagar budaya. Selain itu pengembangan tata nilai dan tradisi serta adat istiadat Aceh dan Nias juga perlu ditingkatkan.

Untuk mengembangkan kekayaan budaya yang ada di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias di tahun 2008-2009 salah satunya adalah menyelenggarakan festival dan pameran seni budaya secara rutin. Selain itu perlunya pemberdayaan pengrajin tradisional agar kebudayaan di NAD dan Nias tetap terpelihara.

### PEMUDA DAN OLAHRAGA

Arahan program sub bidang pemuda dan olahraga di Kepulauan Nias yaitu pembangunan stadion olahraga dan prasarana pendukung lainnya. Selain kegiatan fisik, juga dilaksanakan kegiatan non fisik berupa peningkatan prestasi dan peran serta pemuda dalam kegiatan olahraga maupun kegiatan lain yang sehat dan bermartabat.

## 5.2.4. BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

### I. PERTANIAN

#### TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pada sub bidang pertanian, upaya yang perlu diarahkan untuk tahun 2008-2009 yaitu :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Utama (BBU), Balai Benih Induk (BBI) dan BPP Plus
- b. Penyediaan alsintan (alat mesin pertanian).
- c. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian melalui pembinaan usaha tani, pemberian dana bergulir dan pembinaan pasca panen/agro industri dan pemasaran.
- d. Pengembangan terminal agribisnis untuk menunjang pemasaran dan peningkatan kualitas produk
- e. Pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura

### **PERKEBUNAN**

Program tahun 2008-2009 untuk sub bidang perkebunan antara lain :

- a. Rehabilitasi lahan perkebunan
- b. Peremajaan tanaman perkebunan serta terbangunnya sentra produksi hasil perkebunan.
- c. Pelatihan budidaya dan teknologi tanaman perkebunan.
- d. Penyelesaian kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan 2007.

### **PETERNAKAN**

Program sub bidang peternakan untuk tahun 2008-2009 adalah :

- a. Penyediaan alsinak (alat mesin peternakan)
- b. Lanjutan pengembangan kawasan produksi peternakan

### **KEHUTANAN**

Mengingat masalah kehutanan di Aceh cukup kritis dan banyak wilayah yang merupakan hutan lindung dan suaka (Gunung Leuser), maka pengelolaan hutan perlu ditingkatkan melalui hutan kemasyarakatan, sehingga penduduk dapat mengelola hutan secara lestari, termasuk memanfaatkan hasil hutan dengan tepat sehingga tidak mengganggu ekosistem.

## **2. PERIKANAN**

Arahan untuk sub bidang perikanan di tahun 2008-2009 yaitu

- a. Lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan Lampulo dan sentra pengolahan ikan.
- b. pengadaaan peralatan tangkap ikan, pembangunan pabrik es pada setiap tempat pendaratan ikan, tempat pengolahan ikan serta lanjutan penyelesaian pembangunan dermaga PPI.

## **3. PENGEMBANGAN USAHA**

### **INDUSTRI**

Kegiatan di sub bidang insudtri tahun 2008-2009 yaitu pengembangan sarana pengolahan komoditi.

### **PERDAGANGAN**

Arahan program tahun 2008-2009 yaitu perlunya peningkatan pembinaan UKM melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu pemberian kredit mikro. Selain itu untuk industri kerajinan rakyat dari berbagai jenis komoditi harus dilakukan secara terstruktur dan terpadu

## TENAGA KERJA

Program tahun 2008-2009 untuk sub bidang ketenagakerjaan adalah bantuan modal kerja, pengembangan pusat pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, BLM industri rumah tangga. Selain itu perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja baik melalui BLK maupun kerjasama dengan swasta. Tujuan program ini yaitu yaitu meningkatkan lapangan kerja mandiri atau tenaga kerja siap pakai.

## KOPERASI DAN USAHA

Pembinaan koperasi dan UKM pada tahun 2008-2009 harus dilakukan secara terintegrasi sehingga memungkinkan kemampuan bersaing dengan perusahaan menengah dan besar sejenis. Koperasi harus ditumbuh-kembangkan dari bawah, baik melalui usaha hilir terus ke hulu, dan akan lebih baik bila melalui usaha hulu baru ke hilir dalam bentuk Usaha Bersama (UB) baru secara bertahap dijadikan koperasi yang telah lebih mapan. Selain itu juga dilaksanakan lanjutan pembangunan pasar atau Waserda; penguatan IOO (*Investor Outreach Office*); dan penguatan lembaga *micro finance* dan perwakilannya.

## PARIWISATA

Pariwisata adalah salah satu aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh karena itu di tahun 2008 dan seterusnya sangat diperlukan kegiatan penataan lokasi pariwisata dengan tujuan meningkatkan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara agar mengunjungi kawasan wisata di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

### 5.2.5. BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Secara umum, bidang pemulihan kelembagaan dan hukum untuk tahun 2008-2009 menitikberatkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan pelayanan hukum terhadap masyarakat guna mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya pelaksana dan pengawasan secara berkelanjutan terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Alokasi anggaran yang diperlukan untuk pemantapan program dan kegiatan bidang pemulihan kelembagaan dan hukum pada tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut.

#### 1. KELEMBAGAAN

Fokus program bidang pemulihan kelembagaan tahun 2008-2009 adalah

- a. Lanjutan pembangunan kantor berskala besar seperti kantor Bupati, DPRD dan kantor Dinas, dan lain sebagainya. Pembangunan gedung kantor dengan skala kecil seperti kantor desa, dan kecamatan akan dimaksimalkan pembangunannya di tahun 2007.
- b. Upaya peningkatan kapasitas Pemda akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi kegiatan peralihan/fungsionalisasi aset kepada Pemerintah Daerah

Donor/NGO membantu pada sub bidang kelembagaan ini dalam hal pembangunan gedung pemerintahan berupa kantor kecamatan, kelurahan dan desa. Selain itu juga dilaksanakan *capacity building* untuk meningkatkan kapasitas Pemda.

#### 2. HUKUM

Kegiatan prioritas di sub bidang hukum untuk tahun 2008-2009 adalah

- a. Fungsionalisasi aset-aset bidang hukum
- b. Peningkatan kapasitas aparatur hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat
- c. Kegiatan lanjutan tahun 2007 yaitu pengembangan hukum adat dan pengembangan pusat studi hukum

### 3. KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)

Kegiatan prioritas di sub bidang ketertiban, keamanan, dan ketahanan masyarakat untuk tahun 2008-2009 adalah :

- c. Refungsionalisasi sarana dan prasarana kelembagaan yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan kantor dan asrama
- d. Mobilisasi pasukan POLRI untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah
- e. Upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

## 5.3. KEBIJAKAN PENGANGGARAN BAGI KEBERLANJUTAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Sebagaimana telah disinggung pada Bab IV, mengenai pengelolaan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui mekanisme APBN, baik yang bersumber dari rupiah murni maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya sebagian pekerjaan pembangunan fisik tidak dapat memenuhi jadwal dan mekanisme sistem penganggaran tahunan yang berlaku normal, Pencapaian program pembangunan fisik tersebut baru dapat diselesaikan pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya (N+1).

Dalam kaitan tersebut diatas, untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam mencapai sasaran dan percepatan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, perlu dilakukan terobosan sistem penganggaran melalui mekanisme luncheon dan 'trust fund' untuk mengimbangi pemberian izin kontrak tahun jamak ('multi years contract') yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka memenuhi ketepatan waktu pencapaian pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2005, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias mendapat fasilitas luncheon DIPA tahun 2005 sampai dengan April 2006. Sedangkan yang terkait dengan pekerjaan prioritas utama program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2006, yakni: penyelesaian pembangunan rumah, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik dan pengadaan tanah, mendapat fasilitas "trust fund". Izin pembentukan dana trust fund ini didasarkan atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – Nias, Nomor : S-9255/PB/2006, perihal Izin Prinsip Pembentukan Rekening Trust Fund BRR- Nias, yang kemudian untuk pengelolaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS, no 32/PER/BP-BRR/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang Berasal Sisa DIPA TA 2006. Dilandasi oleh kebijakan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari sisa DIPA Tahun anggaran 2006.

Dukungan kebijakan pengelolaan Trust Fund yang diberlakukan terhadap sisa DIPA-TA 2006 tersebut, terbukti merupakan 'instrument' yang sangat membantu dan efektif dalam rangka mewujudkan capaian target sasaran perumahan dan infrastruktur serta bangunan pelayanan publik, baik secara kuantitas (target jumlah) maupun kualitas. Dengan demikian, kebijakan Trust Fund ini dapat dilanjutkan untuk tahun anggaran 2007 dan 2008, sampai dengan mandat pemulihan masyarakat dan wilayah pasca bencana tsunami dan gempa bumi selesai. Pola trust fund ini dapat pula dijadikan model dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah lain.

Untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Nias tahun 2007 dan 2008, kebijakan Trust Fund ini agar diperluas tidak hanya untuk program perumahan, infrastruktur dan bangunan publik, melainkan juga untuk prasarana produksi masyarakat seperti irigasi, rekonstruksi lahan pertanian maupun tambak, dan sarana ekonomi seperti pasar, pelabuhan ikan dan lainnya. Begitu pula untuk kegiatan dalam rangka memfungsionalisasikan dan mengefektifkan pemanfaatan (outcome) sarana publik juga perlu dukungan kebijakan Trust Fund ini.

## 5.4 TAHAPAN TRANSISI PASCA 2009 DAN PERSIAPAN PENGAKHIRAN TUGAS

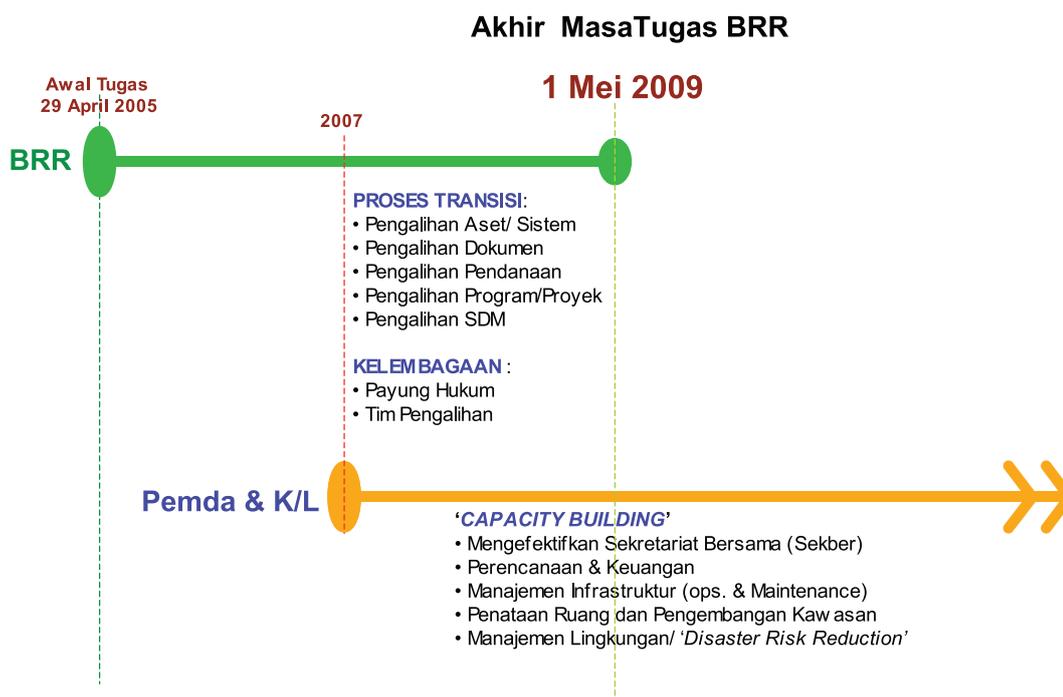
Tahun 2009 merupakan fase terakhir dari proses rekonstruksi di Kepulauan Nias. Oleh karenanya, dimulai pada tahun 2008, perlu diperhatikan aspek peralihan yang mendukung proses peralihan program dan kegiatan dari BRR dan pemangku kepentingan lain kepada Pemerintah Daerah di Kepulauan Nias. Beberapa kriteria untuk program pengakhiran tugas ini adalah:

1. Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan
2. Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah
3. Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009
4. Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi
5. Program yang bertujuan untuk melembagakan mekanisme pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah

### 5.4.1 PERSIAPAN PENGALIHAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya persiapan yang optimal dalam rangka pengakhiran tugas BRR. Pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias dalam rangka melanjutkan proses pembangunan dapat terlihat pada bagan di bawah ini yang menjadi strategi masa tugas BRR dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Provinsi NAD dan Nias.

## Bagan 5.3 Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR



Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Strategi pengakhiran tugas BRR adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat proses pembangunan sehingga pencapaian sasaran program lebih besar daripada yang tertera pada sasaran baru yang ditetapkan dalam rencana aksi ini.
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin dukungan dana yang berasal dari lembaga nasional dan lembaga internasional untuk meningkatkan kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharaannya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
3. Meningkatkan program penguatan kapasitas lembaga dan perilaku masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Untuk itu, perlu dibangun kapasitas kelembagaan dalam manajemen risiko bencana ke dalam proses pembangunan dan kebudayaan.

Implementasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan sebagai strategi transisi dan pengalihan tanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4 Kegiatan Pengalihan Tugas BRR**

No.	Kegiatan	2006	2007	2008	2009
1.	Pembentukan Regionalisasi dan peningkatan efektivitas Sekretariat Bersama	þ	þ	þ	
2.	Pelatihan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah	þ	þ		
3.	Perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan rekonstruksi yang dilakukan antar pemangku kepentingan	þ	þ	þ	þ
4.	Pembiayaan gabungan terhadap: § Pemeliharaan dan operasi fasilitas § Pembangunan wilayah			þ	þ
5.	Manajemen dan peralihan aset BRR			þ	þ

No.	Kegiatan	2006	2007	2008	2009
6.	Institusionalisasi skema pengurangan resiko bencana			β	β

Sumber: Action Plan 2007-2009 BRR Nias dan Hasil Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

Tahun 2009 merupakan fase terakhir dari proses rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, mulai tahun 2008 perlu disiapkan suatu mekanisme peralihan program dan kegiatan dari BRR dan *pemangku kepentingan* lain kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam strategi transisi dan pengalihan tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi beberapa hal dapat dilaksanakan antara lain:

1. Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan.
2. Mengintegrasikan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi dan program reintegrasi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah .
3. Mengadakan program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009.
4. Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan dengan tahapan penilaian, persiapan dan pelaksanaan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Mengadakan program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi.
6. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta instansi terkait lainnya memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun.
7. Mengadakan program yang bertujuan untuk melembagakan mekanisme pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

Kriteria-kriteria kegiatan di atas dilakukan pada jangka waktu hingga 2009 dan pada fase selanjutnya Pemerintah Daerah maupun Kementerian/lembaga terkait melanjutkan kegiatan-kegiatan rekonstruksi dengan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

Untuk penguatan kelembagaan dalam rangka pengakhiran tugas BRR, tahapan proses yang akan dilalui adalah:

**Pertama**, proses membangun untuk menjadi lebih baik membutuhkan lebih banyak upaya dari apa yang tercantum di rencana induk yang telah ada, karena membangun NAD-Nias tidak hanya sampai pada tingkat kerusakan dan kerugian tanpa menyelesaikan permasalahan keterbelakangan pembangunan di Nias.

**Kedua**, selama 4 (empat) tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, lembaga nasional dan internasional telah menginvestasikan proyek-proyek dalam jumlah besar, lebih besar dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharannya. Dalam ketiadaan dukungan dari donor, pertanyaan kritis yang dihadapi adalah, tanggung jawab apa yang perlu diemban lembaga yang memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Daerah dalam masa pasca rekonstruksi.

**Ketiga**, perubahan lembaga dan perilaku masyarakat agar lebih siap apabila bencana melanda di masa mendatang dan tidak dapat dilakukan dalam satu generasi.

Dengan demikian, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menyongsong pencapaian pengakhiran tugas BRR NAD-Nias, yaitu :

1. Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan.
2. Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan.
3. Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah

### **JENIS- JENIS ASET**

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan. Sedangkan Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara, dapat dinilai/dihitung/diukur/ ditimbang dengan satuan tertentu. Sehingga sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat diklasifikasikan jenis-jenis aset yang dimaksudkan disini adalah:

1. Aset Lancar dan Aset Tetap
2. Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
3. Beban APBN Belanja Barang (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53) atau Belanja Bantuan Sosial (MAK 57)
4. Perolehan lain yang sah merupakan hibah dari NGO atau Negara Donor

#### **5.4.1.1 PEMANTAPAN SEKRETARIAT BERSAMA**

Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang lancar dari fase rekonstruksi adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan Pemda dalam kegiatan rekonstruksi dan mendukung koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Sejak Mei 2006, BRR Nias telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan BRR melalui pendirian Sekretariat Bersama (Sekber). Adapun Sekber ini mengemban fungsi-fungsi sebagai berikut:

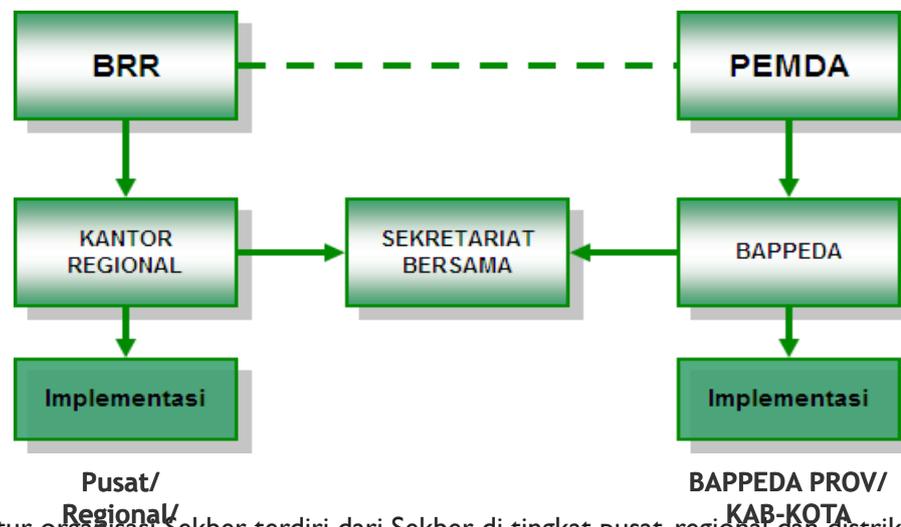
1. Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sekretariat Bersama akan mendukung perencanaan satu atap antara Pemda Kabupaten Nias dan BRR. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terukur.
- Melakukan langkah-langkah khusus termasuk penetapan kriteria, evaluasi rencana program, pemrioritasan, penentuan program tahunan dan tahun jamak dan pembagian penanggungjawab program
- Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama

- Melakukan monitoring dan evaluasi terkoordinasi antara Pemda dan BRR yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik,
- Mendukung perencanaan kecamatan atau pembangunan kecamatan sebagai unit perencanaan rekonstruksi yang akan memperbaiki implementasi kegiatan di tingkat bawah, dan
- Mempromosikan peranan koordinasi dan integrasi antar tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

**Bagan 5.4 Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama**



Struktur organisasi Sekber terdiri dari Sekber di tingkat pusat, regional dan distrik. Sekber Pusat berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi, Sekber regional berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten/kota yang ada di wilayah tersebut dan Sekber distrik berkoordinasi dengan Bappeda kabupaten/kota.

2. Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.  
Sekretariat akan menjadi pintu untuk data/informasi yang tepat dan akurat tentang semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas-tugas khusus termasuk:
  - Mendukung Pemda melalui pengelolaan RAND, database sektor dan lain lain yang mencatat data/informasi tentang semua program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh pemerintah, BRR dan LSM di Nias, dan
  - Mengintegrasikan semua data/informasi dari instansi-instansi pemerintah, BRR dan LSM sehingga database Sekretariat Bersama dapat menjadi sumber utama informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.
3. Memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan melalui strategi komunikasi yang jelas.  
Sekretariat Bersama akan mensosialisasikan data/informasi tersebut kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan dan masyarakat, dan juga untuk memperkuat hubungan antar stakeholder pada umumnya. Tugas-tugas khusus Sekretariat Bersama meliputi:
  - Membangun strategi komunikasi untuk menyampaikan data/informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemda dan masyarakat melalui seminar, pembuatan brosur dan penyiapan bahan press release konferensi pers (*press release*) dan lain lain
  - Bekerjasama dengan Humas, Pemda. Kab. Nias, Pusat Informasi Publik BRR dan UNORC untuk membuat pendekatan terpadu dalam penyampaian informasi kepada para stakeholder.

4. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada masa pembentukan Sekretariat Bersama, staf pegawai di Sekretariat Bersama memerlukan bimbingan dan bantuan dari stakeholder yang lain untuk berbagai tugas, misalnya:

- Mengintegrasikan perencanaan antara pemerintah daerah, BRR dan LSM
- Mengerti dan menguasai database operasional dan cara cara pengumpulan data dan informasi untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagaimana yang terlihat dalam struktur organisasi Sekretariat Bersama di atas, setiap wakil koordinator bidang dipegang oleh staf Pemerintah Daerah. Wakil-wakil koordinator ini dalam tugasnya hingga tahun 2009, bekerjasama dengan staf BRR sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Diharapkan pasca tahun 2009, Pemda sudah dapat meneruskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai. Secara rinci proses seleksi program di Sekretariat Bersama dapat dilihat pada bagan berikut :

**Bagan 5.5 Proses Seleksi Program Sekretariat Bersama**



Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Skema proses seleksi kegiatan di atas menjelaskan bagaimana alur proses dari usulan-usulan kegiatan yang berasal dari berbagai pihak seperti masyarakat, Pemda, BRR, NGO, dan lainnya, akan melalui rangkaian proses di Sekretariat Bersama. Proposal kegiatan yang diajukan merupakan kebutuhan rencana pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan. Kegiatan yang diusulkan dikaji berdasarkan prioritasnya, hasil evaluasi, dampak lingkungan dan rekayasa. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diintegrasikan dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Pada tahap selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang terpilih akan dikembalikan lagi kepada pihak terkait untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunannya.

#### 5.4.1.2 PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH

Pengembangan kelembagaan dan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai aparatur pemerintah termasuk badan-badan Pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi, Kepolisian

Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia. Usaha ini dilakukan melalui penyediaan bangunan fisik, peralatan, dukungan dari perusahaan konsultan independen untuk membantu dalam pengalihan keahlian teknis dan manajemen, serta mendukung pengembangan kelembagaan secara umum dan penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan.

Selain itu, berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, BRR juga telah memberikan dukungan untuk membantu proses rekrutmen pegawai negeri. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan prosedur pendaftaran pegawai negeri dan apabila diperlukan, dapat menyelenggarakan lokakarya dan kursus pelatihan untuk memastikan dipenuhinya standar kompetensi. Serangkaian program yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dan sepanjang 2006 adalah melatih para pegawai Pemerintah Daerah, termasuk Program Aksi Pemerintahan Daerah Aceh EU/GTZ, Program Dukungan Pemerintah Daerah USAID, dan pelatihan lainnya melalui YIPD. Dukungan yang berasal dari JICA, AusAid, GTZ, dan Pemerintah Negara Perancis, BRR juga melakukan pelatihan untuk para bupati dan kepala desa. Dukungan untuk pemerintah provinsi juga sedang dilakukan kajian mengenai kebutuhan sumber daya manusia untuk selanjutnya melakukan pelatihan dan pengembangan staf dalam waktu yang lebih panjang.

#### 5.4.1.3 PEMANTAPAN TIM PENGALIHAN 2008-2009

Tim pengalihan aset perlu dibentuk oleh BRR, dalam rangka melakukan persiapan pengalihan aset termasuk melakukan inventarisasi dan pengumpulan aset, dan mempersiapkan penyerahan aset. Baik yang dilakukan antar lembaga maupun dimasukkan melalui "Clearing House".

Clearing house yang dimaksud adalah semacam wadah untuk mempertemukan tiga unsur, yaitu mereka yang memiliki dan memegang aset yang akan diserahkan, dan mereka yang akan menerima aset, serta mereka yang merupakan tim penyerahan, yang mempersiapkan barang yang akan diserahkan dan mempertemukan antara pemilik aset semula dan pihak yang akan menerima penyerahan. Hal ini dimaksudkan agar dengan demikian penyerahan aset dapat dilakukan secara transparan sehingga dapat mengatasi semua permasalahan sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

#### 5.4.1.4 PERSIAPAN PENYELESAIAN TUGAS BRR

Pada tahap persiapan penyelesaian tugas BRR pada April 2009, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam proses transisi aset dari BRR kepada pemda yakni P3D (Pendanaan, Peralatan, Personil (SDM) dan Dokumen.

### 5.4.2 PENGELOLAAN PENDANAAN

Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan dengan merujuk berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara umum pelaksanaan program proyek APBN yang dikelola BRR akan di akhiri hingga tahun anggaran 2008. Maka untuk itu, pendanaan sebagai salah satu bagian yang penting dalam proses transisi perlu dilakukan pengaturan dan pengolahan secara maksimal. Disamping sumber dana yang berasal dari DIPA BRR, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh Pemda. Pendanaan tersebut meliputi Dana Desentralisasi Kementerian/Lembaga, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum). Total dana yang bergulir untuk pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 sebesar Rp 19.2 triliun.

#### 5.4.2.1 DANA DESENTRALISASI KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dana desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada konteks realisasinya, dana ini merupakan dana kegiatan/program dari Kementerian lembaga yang bersifat partikal untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Pada tahun 2007 terdapat dana sebesar Rp 2.98 triliun. Dana ini didistribusikan pada semua bidang sektor rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendanaan dan kegiatan yang ber sumber dari dana ini, perlu dikelola secara baik terutama pasca keberadaan BRR di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias.

#### 5.4.2.2 DANA DEKONSENTRASI

Dana Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Dana ini bersifat reguler yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sampai tahun 2007, dana dekonsentrasi yang bergulir di Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 601.8 miliar.

BRR sebagai lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, peranannya sudah disejajarkan dengan Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, pada tahun 2008 diharapkan sebagian DIPA 2008 sudah dapat didekonsentrasikan kepada Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara.

#### 5.4.2.3 DANA TUGAS PEMBANTUAN

Dana Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah. Pada tahun 2007, dana Tugas Pembantuan yang didistribusikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 391 miliar.

#### 5.4.2.4 DANA PERIMBANGAN (DAU DAN DAK)

Secara defenitif Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi 2 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai DAU tahun 2007 di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam sebesar Rp 5.6 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAUK di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 sebanyak 800 miliar.

### 5.4.3 PENGALIHAN PERALATAN DAN PERANGKAT (ASET)

#### 5.4.3.1 TAHAP PENGALIHAN ASET

Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada deputi sektornya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

1. Satker yang bersangkutan
2. Deputi Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR
3. Direktorat Manajemen Aset
4. Instansi Pengguna Akhir

Adapun tahapan peralihan aset BRR NAD-Nias dapat dilihat pada bagan berikut :

**Bagan 5.6 Tahapan Peralihan Aset BRR NAD-Nias**

Januari-September 2007	September-Desember 2007	Januari-April 2008	April 2008-April 2009
Informasi	Penilaian	Persiapan	Pelaksanaan
<b>ASET DAN TANGGUNG JAWAB</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas dan Tanggung Jawab (Biaya, akuntan, pengadaan, administrasi kontrak, pemeliharaan, dll)</li> <li>2. Aset               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bergerak tidak bergerak (Bangunan, kendaraan, meubeuler, peralatan, computer, kredit berjalan, software, barang-barang, konsumsi, mesin fotocopy, dll)</li> <li>b. Dokumen dan Database (Dokumen kontrak, laporan, audit, database, website, dll)</li> <li>c. Seluruh Aset Program dan Operasional Kedeputan dilingkungan BRR NAD-Nias</li> </ol> </li> </ol>	Identifikasi Aset pusat, provinsi, kabupaten/kota yang akan menerima aset	Menyiapkan Memoranda of Agreement (MOA) antara BRR dan instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota	Pelaksanaan berdasarkan MOAs
<b>PENGUATAN LEMBAGA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan manajemen untuk tingkat senior</li> <li>2. Perencanaan strategis dan programming</li> <li>3. Manajemen fiskal dan pembiayaan</li> <li>4. Audit dan akuntabilitas</li> <li>5. Lingkungan dan keamanan sosial</li> <li>6. Pengadaan/pelelangan</li> <li>7. Manajemen konstruksi dan supervisi</li> <li>8. Quality Assurance dan Quality Control</li> <li>9. Operasi dan pemeliharaan</li> <li>10. Hal-hal lain yang akan di identifikasi kemudian</li> </ol>	Perencanaan dan program Penguatan Kapasitas, dengan berkonsultasi dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota. Dan pelaksanaan program dan biaya pelaksana	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas yang akan dimulai pada kwartal ke empat 2007	

Sumber: Bapel BRR NAD- Nias, 2007

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi (BAI). Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

Sebagai bentuk pengendalian, apabila pada saat dilakukannya inventarisasi dijumpai permasalahan (antara lain : barang tidak dijumpai, rusak, belum selesai pembangunannya dll), maka dilakukan klarifikasi kepada deputi sektor terkait untuk ditindaklanjuti. BAI tidak akan ditandatangani, sebelum ada kejelasan posisi aset yang bermasalah tersebut. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meyakinkan pihak penerima akhir, bahwa aset yang diserahkan tidak bermasalah dari segi keberadaan, kecukupan dan pemanfaatan.

Prosedur serah terima aset Non-APBN tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun hibah.

Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah deputi sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggung jawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk satker yang ada di daerah.

Pada akhir masa tugas BRR NAD-Nias, seluruh aset termasuk yang digunakan untuk operasional diserahkan kepada Pemda dan Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karenanya, dukungan administrasi yang baik sangat diperlukan demi menjaga dan menjamin akuntabilitas organisasi.

#### 5.4.3.2 JENIS- JENIS PENGALIHAN ASSET

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan. Sedangkan Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara, dapat dinilai/dihitung/diukur/ ditimbang dengan satuan tertentu. Sehingga sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat diklasifikasikan jenis-jenis aset yang dimaksudkan disini adalah:

1. Aset Lancar dan Aset Tetap
2. Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
3. Beban APBN Belanja Barang (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53) atau Belanja Bantuan Sosial (MAK 57)
4. Perolehan lain yang sah merupakan hibah dari NGO atau Negara Donor

## **ASET BRR**

Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias – Provinsi Sumatera Utara perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

Dalam proses pemindahan aset BRR ini ada beberapa hal penting yaitu :

### **a. Kerangka Manajemen Aset BRR**

1. Tersedianya database tentang jumlah, keberadaan dan besaran nilai aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias yang *realible* dan mudah di *update*
  - a. Penyediaan aplikasi manajemen aset
  - b. Pelaksanaan proses inventarisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 kali dalam 1 tahun anggaran
  - c. Proses validasi dan rekonsiliasi dengan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mendapatkan kepastian nilai perolehan aset sesuai dengan realisasi belanja barang yang telah di keluarkan dan memenuhi asersi manajemen tentang keberadaan aset
2. Adanya kepastian administrasi fisik dan kepastian hukum atas penguasaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias termasuk nilainya
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan proses serah terima aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Percepatan proses penetapan status kepemilikan atas aset yang di hibahkan atau dialihkan status penggunaannya ke instansi vertikal pemerintah pusat
3. Pemanfaatan terhadap aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias sehingga secara ekonomis maupun sosial dapat ditetapkan mana yang perlu di optimalkan dan yang akan dihapuskan.  
 Penelitian dan identifikasi terhadap seluruh aset yang berada di bawah tanggungjawab BRR NAD-Nias agar penggunaannya dapat di optimalkan sesuai dengan TUPOKSI

### **b. Prosedur Pengelolaan Aset di BRR**

1. Penyerahan Aset dari Satker ke BRR  
 Pada setiap akhir tahun anggaran, satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada deputy sektor-nya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan Inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :
  - a. Satker yang bersangkutan,
  - b. Deputy Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
  - c. Direktorat Manajemen Aset,
  - d. Instansi Pengguna Akhir.
 Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi. Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara

lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

2. Penyerahan aset dari NGO/ Negara Donor ke BRR  
Tidak jauh berbeda dengan tata laksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana BRR, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.
3. Penyerahan aset dari BRR ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai pengguna akhir. Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end user*) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun.

Untuk mempercepat proses penyerahan aset dari Satker kepada BRR (BAST) dan dari BRR ke Pengguna Akhir (BASP) dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah deputi sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggung jawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk Satker yang ada di daerah.

## ASET DONOR DAN NGO

Aset Non APBN berasal dari perolehan lainnya yang bersumber dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN. Aset-aset tersebut untuk selanjutnya diterima oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia. Aset yang diterima baik berupa barang jadi atau siap pakai.

Aset Non APBN terdapat di beberapa sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pasca gempa dan tsunami, diantaranya pada sektor infrastruktur (jalan dan transportasi, energi dan telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air), sektor perumahan dan pemukiman (perumahan, air minum dan sanitasi), sektor kelembagaan & pengembangan manusia (kepemerintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan), sektor pengembangan ekonomi dan administrasi.

Realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sumber pembiayaan dari Off-Budget tahun 2005-2006 adalah sebesar Rp. 14,8 triliun atau sebesar 44,5% dari total kebutuhan dana.

## 5.4.4 PENGALIHAN PERSONIL (SDM)

### 5.4.4.1. STATUS PERSONIL DAN SDM BRR NAD-NIAS

Setelah pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2005 jo. Nomor 76 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Kerja serta Hak Keuangan BRR NAD-Nias, maka masing-masing kelembagaan BRR yang terdiri dari Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas telah menindaklanjuti penyempurnaan organisasi dengan pemenuhan personil sesuai kebutuhan.

Personil Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias terdiri dari berbagai unsur dan jenjang jabatan yang berbeda-beda. Disamping itu, pada masing-masing kelembagaan BRR NAD-Nias (Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas) memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut data SDM BRR per Mei 2007, jumlah pegawai dari ketiga lembaga BRR NAD-Nias mencapai 1543 orang, sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.1 Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias Tahun 2007**

No	Subject	Jumlah	Keterangan
1	Badan Pelaksana BRR NAD-Nias	1,355	
	• Ka Bapel / Wakil	2	
	• Deputi	10	
	• Direktur	65	
	• Manager	230	
	• Asst. Manager	280	
	• Senior Staff	198	
	• Staff	208	
	• Staf Ahli	21	
	• Driver	142	
	• Security	90	
	• Pramubakti/Office Boy	26	
	• Tim Komunikasi & Jaringan Wilayah	83	
2	Dewan Pengawas BRR NAD-Nias	111	
	• Pejabat	8	
	• Staff Ahli	9	(Tim Ahli Wanwas Belum Terdaftar)
	• Staff	13	
	• Pelaksana	4	
	• Tim Ahli Dewan Pengawas :	77	
	o Tenaga Ahli Muda	50	
	o Tenaga Ahli Utama	10	
	o Staff	11	
	o Pelaksana	6	
3	Dewan Pengarah BRR NAD-Nias	75	
	• Ketua & Anggota	26	
	• Pejabat Penghubung	14	
	• Anggota Sekretariat	18	
	• Staff	15	
	• Pelaksana	2	
Total Pegawai		1.541	

Sumber : Bapel BRR NAD-Nias, 2007

Jumlah personil di atas belum termasuk Satker dan PPK dan stafnya. Jumlah personil yang merupakan tugas perbantuan atau direkrut dari PNS. Sisanya berasal dari berbagai asal dan latar belakang pengalaman, seperti LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, dan langsung masuk BRR.

#### 5.5.4.2. KEBIJAKAN PENYESUAIAN ORGANISASI DAN PERSONIL BRR NAD-NIAS TAHUN 2007-2009

Dengan memperhatikan jumlah personil yang cukup besar, maka diperlukan proses pentahapan penyesuaian organisasi hingga saat tugas BRR berakhir, termasuk pengakhiran hubungan kerja (*lay off*) yang tepat, agar tidak menimbulkan masalah. Disamping itu, menuju proses pengakhiran tugas BRR, aspek personalia yang penting perlu diantisipasi adalah terhadap pengunduran diri yang tidak terkendali, terutama dari personil kunci dan berkemampuan. Karena diperkirakan pada akhir tahun 2007, personil yang berkualitas justru telah mempersiapkan diri dengan melakukan pengunduran diri.

Karena itu diharapkan adanya kepastian kontinuitas pekerjaan/ promosi bagi personil yang berprestasi sangat diperlukan, dengan demikian mereka akan tetap tinggal di BRR, sehingga sampai akhir tugas BRR akan tetap dikelola oleh para personil yang berkualitas. Pentahapan manajemen yang telah ditentukan oleh SDM BRR terhadap keberadaan personil adalah sebagai berikut:

##### **I. TAHUN 2008**

Kebijakan penanganan proyek akan diserahkan kepada Kantor Regional, artinya Kantor Pusat BRR tidak lagi mempunyai kegiatan penanganan proyek. Dengan demikian, organisasi kedeputian Bapel BRR juga perlu disesuaikan bahkan diusulkan untuk ditiadakan. Personil BRR yang mempunyai keahlian dan pengalaman menangani proyek dialihkan ke Kantor Regional. Disamping itu, pada tahun 2008 sebagian program/ proyek/ kegiatan mulai diserahkan ke pemerintah Daerah, maka tugas yang ditangani Kantor Regional juga akan berkurang. Kalau nilai kegiatan yang dialihkan sekitar 40%, maka akan terjadi pengurangan staff BRR dalam jumlah yang sebanding. Sedangkan staf satker dan PPK akan dapat langsung dialihkan. Upaya persiapan ke arah ini harus telah dilakukan pada akhir tahun 2007.

##### **2. TAHUN 2009**

Dengan berakhirnya masa tugas BRR pada April 2009, maka keseluruhan personil BRR telah diakhiri. Dengan demikian pada akhir tahun 2008, telah dilakukan persiapan dalam menetapkan lebih rinci tahapan/ proses pengakhiran tugas terkait dengan masalah personil. Kantor Regional sebagai organisasi Bapel BRR di ujung tombak, akan selesai tugasnya.

Bagi personil PNS secara bertahap, menjelang akhir tahun 2008 hingga April 2009, sesuai dengan tingkat kebutuhannya dikembalikan ke instansinya masing-masing. Sedangkan personil non PNS juga akan dilepas dan mengakhiri kontraknya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu jumlah personil yang dipertahankan dan secara bertahap dilepas perlu dirancang dengan seksama.

Mulai pertengahan tahun 2008 sampai awal tahun 2009, adalah saat-saat yang paling kritis dan krusial bagi BRR, di satu pihak harus menyelesaikan tugas dengan baik, di lain pihak juga melakukan pelepasan personil. Secara teoritis dapat dirancang dengan mudah, namun pada pelaksanaannya sangat sulit karena menyangkut dengan sumber daya manusia yang dinamis dan menjadi subyek / asset kegiatan BRR.

### 5.4.5 PENGALIHAN DOKUMEN

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, maka kegiatan pengalihan dokumen merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses peralihan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. BRR NAD-Nias sampai dengan paruh waktu masa tugasnya telah menerapkan Sistem Manajemen Dokumen (selanjutnya disingkat SMD) sebagai sistem pengelolaan dokumen melalui teknologi informasi, termasuk pengaturan proses pergerakan dan isinya.

Beberapa fungsi SMD yang telah dijalankan oleh BRR NAD-Nias adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perpustakaan;
2. Fungsi pengelompokan (Indeks) dokumen sesuai dengan klasifikasinya;
3. Fungsi pencarian dan pengambilan dokumen yang mudah dan cepat, sesuai teks aslinya, kata petunjuk, judul dan profilnya;
4. Fungsi keamanan terhadap dokumen;
5. Kontrol terhadap versi dokumen, dan perubahan isi dokumen;
6. Fungsi administrasi surat masuk dan keluar
7. Fungsi menjalankan secara otomatis aplikasi yang sesuai dengan dokumennya dan kemampuan melihat isi dokumen tanpa membuka aplikasinya.

Beberapa katagorikan yang masuk dalam proses pengalihan dokumen BRR NAD-Nias setelah masa tugasnya adalah sebagai berikut :

#### 5.4.5.1 DOKUMEN ADMINISTRASI

Secara umum terdapat beberapa administrasi yang menjadi perhatian khusus adalah:

1. Pengalihan Administrasi Proyek  
Merupakan dokumen proyek/paket kegiatan, mulai dari proses pelelangan/penunjukkan langsung (terdiri dari dokumen lelang/penunjukkan langsung dan proses lelang hingga penetapan pemenang lelang/penunjukkan langsung), hingga pada seluruh proses kegiatan pelaksanaan dan supervisi, beserta inventarisasi barang dan jasa yang tidak habis pakai. Penyerahan pengelolaan proyek ke pengguna akhir (*end user*) yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP).
2. Pengalihan Regulasi/Peraturan  
Hal ini terkait dengan semua penetapan/ keputusan yang berkaitan dan membawa akibat pada pembiayaan. Peraturan-peraturan yang telah dihasilkan antara lain, mencakup Surat keputusan dan pengaturan; kepegawaian, kebijakan operasional, penetapan standar dan prosedur dan lain sebagainya.

#### 5.4.5.2 HASIL STUDI

Hasil studi adalah segala bentuk penelitian, survei, studi kelayakan, studi banding yang dilaksanakan untuk keperluan perencanaan, penyelesaian masalah atau pengambilan kebijakan. Tujuan pengalihan hasil studi dapat diserahkan ke Departemen atau Instansi terkait di Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang yang diteliti. Disamping itu hasil studi tersebut dapat ditempatkan di tempat khusus seperti di Perpustakaan Nasional, Wilayah, Daerah, Kantor Pemerintah Daerah, Universitas, Sekolah, LSM, dan lain sebagainya.

### 5.4.5.3 SISTEM

Sistem adalah bentuk perangkat lunak yang dilengkapi dengan perangkat keras serta dukungan keahlian tertentu untuk mengoperasionalkannya. Karena itu proses pengalihan dilakukan secara utuh dan lengkap, dalam arti meliputi perangkat keras dan perangkat lunak serta pengalihan keahlian (kalau perlu dengan personil) atau pelatihan serta bila dimungkinkan juga dialihkan pembiayaannya. Beberapa hal yang termasuk dalam sistem antara lain database, data spatial/sistem pemetaan, sistem kependudukan (SISDUK), pelayanan satu atap (keimigrasian), dan lain sebagainya.



# BAB 6

## KEBERLANJUTAN PEMULIHAN WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Keberlanjutan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca bencana bukan hanya berfokus semata-mata pada bagaimana membangun kembali rumah-rumah dan infrastruktur yang hancur dan rusak akibat bencana gempa dan tsunami, namun lebih penting dari itu adalah bagaimana merekonstruksi dan merehabilitasi sektor-sektor sosial budaya.

Sementara itu, masa tugas BRR NAD-Nias akan berakhir pada akhir April 2009 sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk keberlanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Program penguatan institusi dan kapasitas lokal harus secara sistematis disiapkan dan dilaksanakan secara bertahap yang dimulai dari sekarang. Penguatan institusi daerah ini harus muncul melalui peningkatan peran institusi daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditingkatkan dari tahun ke tahun. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya di tingkat kabupaten dan kota serta program-program lainnya harus ditingkatkan agar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan bisa mencapai tingkat yang diharapkan. Seiring dengan itu, penguatan institusi daerah ini juga diharapkan memberikan dampak positif pada upaya melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada akhirnya seluruh pihak yang terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berperan secara optimal.

Upaya penguatan institusi daerah ini juga diperlukan dalam rangka memastikan terjadi keselarasan dan kesinambungan pembangunan NAD dan Nias pasca rekonstruksi, baik dalam memelihara dan merawat seluruh kemajuan yang ada, maupun dalam melanjutkan dan mengembangkan program-program yang bersifat strategis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan akan terdapat permasalahan dan hambatan dalam rangka kegiatan lanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca mandat BRR berakhir.

## **6.1. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Secara umum, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam kaitannya dengan keberlanjutan pembangunan jangka menengah meliputi antara lain: belum terselesaikannya penanganan korban bencana secara total; belum berjalan baiknya program pemberdayaan masyarakat korban bencana; masih rendahnya kualitas pelayanan publik; masih belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah bencana; serta belum terselesaikannya masalah penataan ruang dan hukum serta perangkat peraturan lainnya yang terkait dengan masalah pertanahan.

Sejak dimulainya masa tanggap darurat hingga tahap rekonstruksi saat ini, penanganan korban bencana tsunami belum sepenuhnya berjalan optimal. Permasalahan yang sangat mendasar dan penting adalah menyangkut percepatan pembangunan rumah untuk para korban, disamping penyelesaian sejumlah pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Termasuk besarnya kesenjangan antar wilayah karena bervariasinya dampak bencana dan kemampuan Pemda dalam menangani korban bencana. Dengan demikian, penting untuk memberikan perlakuan dan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Kondisi infrastruktur yang hancur akibat amukan badai tsunami, terutama pada bagian infrastruktur yang terkait dengan sektor perhubungan, seperti jalan raya, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara. Perbaikan dan peningkatan dalam bidang infrastruktur utama tersebut terkendala oleh sulitnya penyediaan material, terutama pada wilayah yang memiliki kesulitan akses dan penataan ruang yang belum terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian masalah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan sekaligus meningkatkan mobilitas, interaksi sosial, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bencana alam tersebut selain mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan kerusakan yang luar biasa juga menimbulkan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hak keperdataan, perwalian, pertanahan, serta perbankan. Permasalahan hukum tersebut sangat mendesak untuk ditangani guna mengembalikan kondisi psikologis masyarakat, kehidupan sosial-ekonomi, dan normalisasi pemerintahan melalui usaha rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat menyeluruh.

Selain itu, permasalahan yang juga patut diperhatikan adalah kondisi psikologis masyarakat korban bencana. Sebelum bencana alam menyapu hidup mereka, masyarakat Aceh telah memiliki rekam jejak penderitaan yang panjang akibat konflik selama tiga dasawarsa. Kondisi ini berpotensi memicu munculnya situasi psikososial berupa perasaan tidak aman, kecurigaan, bahkan keengganan bekerjasama dengan warga pendatang. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, semua itu akan bermuara pada hilangnya kepercayaan diri, identitas, bahkan harapan akan masa depan.

Berdasarkan apa yang telah dilakukan selama ini, berbagai macam kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum sepenuhnya melibatkan komunitas dalam arti pemberdayaan. Padahal pada dasarnya segala bentuk kegiatan atau program yang telah direncanakan dan disusun akan bermuara pada masyarakat. Dengan demikian posisi masyarakat dapat bertambah kuat dan berdaya dalam menatap kehidupannya. Beberapa kegiatan yang mendukung keberdayaan masyarakat adalah penguatan pada sektor pengembangan perekonomian rakyat.

## 6.1.1. PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

### PERMASALAHAN

Secara lebih spesifik bidang/sector, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jangka menengah tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut:

#### **BIDANG PEMERINTAHAN, POLITIK DAN HUKUM**

Dalam bidang pemerintahan permasalahan yang dihadapi ke depan adalah ketidakjelasan pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada Aceh yang jelas sehingga menimbulkan multi tafsir dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah. Dalam bidang politik, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya perhatian partai politik pada aspirasi bawah dikarenakan akan berlangsungnya pemilihan umum pada tahun 2009 yang mana partai-partai politik akan lebih fokus pada menarik simpati pemilih. Dalam bidang hukum penyelesaian qanun-qanun yang menjadi prioritas belum mempunyai komitmen yang jelas dari para anggota dewan dan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari masih sangat sedikitnya produk qanun yang disahkan.

#### **BIDANG EKONOMI**

Dalam bidang ekonomi masalah pemberdayaan ekonomi rakyat masih menjadi hambatan utama pembangunan di Aceh. Namun apabila kondisi keamanan masih berjalan normal seperti sekarang maka kita harus optimis pembangunan ekonomi akan berjalan semakin baik dan perekonomian masyarakat akan meningkat. Kita tentu tidak melupakan bagaimana terpuruknya ekonomi Aceh selama darurat militer beberapa tahun yang lalu sehingga menjadikan Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin.

#### **BIDANG INFRASTRUKTUR**

Di bidang infrastruktur, permasalahan jalan dan energi listrik masih menjadi isu sentral dalam pembangunan jangka menengah ekonomi Aceh. Pembangunan jalan yang menjangkau seluruh Aceh dalam rangka menghilangkan keterisoliran akan memakan waktu yang lebih dari lima tahun ke depan. Hal ini mengingat begitu panjangnya jalan yang harus dikerjakan untuk menembus keterisoliran Aceh dan dalam rangka pengembangan kawasan pedalaman. Listrik juga menjadi hambatan utama karena berdampak langsung terhadap aktivitas rutin segala lini kehidupan warga.

#### **BIDANG PENDIDIKAN**

Permasalahan pembangunan dalam bidang pendidikan akan mengalami kesenjangan apabila perhatian pemerintah tidak ditujukan kepada para mantan anggota GAM untuk diberikan beasiswa pendidikan guna melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka akan dapat berperan lebih banyak di segala sektor kehidupan. Hal ini dikarenakan salah satu kelemahan mantan anggota GAM itu adalah minim dan rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

#### **BIDANG KESEHATAN**

Permasalahan pembangunan di bidang kesehatan akan berkisar pada belum meratanya penempatan tenaga medis ke seluruh penjuru Aceh karena keterbatasan jumlah tenaga dokter, bidan maupun perawat. Hal ini bisa diselesaikan apabila pemerintah mengupayakan tenaga dokter yang lebih banyak dengan mengirimkan lulusan terbaik terutama yang berasal dari daerah yang belum memiliki tenaga medis sehingga mereka akan termotivasi untuk kembali ke daerah asalnya. Solusinya adalah menyekolahkan putra/putri yang berasal dari daerah terpencil tersebut dan mengikat mereka dengan perjanjian akan kembali berkarya di kampung halamannya.

## **BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Hambatan pembangunan dalam bidang agama, sosial dan budaya akan berkisar pada hambatan penerapan syari'at Islam dengan menerapkan kehidupan islami di seluruh Aceh. Penerapan syari'at Islam akan berimbas pada kondisi sosial budaya masyarakat. Kondisi kemajuan global yang meninggalkan nilai-nilai agama akan menjadi salah satu masalah utama dalam rangka melestarikan nilai-nilai islami masyarakat Aceh yang ada. Hambatan itu akan dapat diatasi dengan meniru model pembinaan umat yang dilakukan oleh Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dengan segala kegiatannya. Hal itu baik untuk dilakukan oleh seluruh pengurus masjid di Aceh guna pembinaan umat yang Islami.

## **TANTANGAN**

Tantangan pembangunan jangka menengah di Provinsi NAD secara umum dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: (1) Aspek politik, (2) Aspek geografis dan tata ruang, serta (3) Aspek pendanaan.

### **ASPEK POLITIK**

Kondisi perdamaian sosial masyarakat Aceh pasca konflik berkepanjangan yang sudah mulai stabil dan kondisi pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana tsunami yang membaik perlu dijaga selalu agar dapat mempercepat keberlanjutan pemulihan wilayah. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Pilkada Provinsi yang berlangsung dengan baik dapat memperlancar proses demokrasi.

### **ASPEK GEOGRAFIS DAN TATA RUANG**

Kondisi geografis wilayah Aceh yang sangat menyebar, maka pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah. Untuk aspek tata ruang, perencanaan desa (*village mapping*) yang telah dilakukan di sebagian wilayah terkena bencana sebagai instrumen operasionalisasi rencana tata ruang semestinya mengacu kepada rencana yang lebih tinggi, dalam hal ini rencana tata ruang wilayah. Sementara itu, status dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi NAD yang saat ini masih berupa *draft* menimbulkan tantangan dalam bidang perencanaan untuk memastikan perencanaan desa yang ada sejalan dengan arahan makro yang terdapat dalam rencana tata ruang wilayah.

### **ASPEK PENDANAAN**

Dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka adanya alokasi dana otonomi khusus yang ditujukan untuk akselerasi pembangunan provinsi menjadi tantangan sendiri agar Provinsi NAD dapat mempergunakan dana tersebut seefisien dan seefektif mungkin.

## **6.1.2. KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **PERMASALAHAN**

Secara lebih spesifik bidang/sector, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam jangka menengah tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:

### **BIDANG INFRASTRUKTUR**

Minimnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas transportasi menuju daerah-daerah terisolir serta kondisi geologi yang sangat labil masih akan menjadi hambatan utama pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Selain itu, faktor mutu konstruksi dan partisipasi masyarakat masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan dimasa mendatang.

## **BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Potensi SDA yang belum diolah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat, letak geografis yang relatif jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan kerusakan lingkungan akibat struktur batuan dan susunan tanah yang relatif labil, kawasan lindung (sempadan pantai dan sungai) yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan permukiman, perambahan hutan, kerusakan bakau, kerusakan DAS, menurunnya diversifikasi flora dan fauna, gangguan dan kerusakan ekosistem terumbu karang merupakan masalah yang akan dihadapi pada pembangunan kedepan.

## **BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**

Angka pengangguran yang sangat besar dari tahun ke tahun akibat laju pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi dan tidak seimbang dengan lapangan kerja serta minimnya keterampilan sebagian besar angkatan kerja menyebabkan rendahnya perkembangan ekonomi skala lokal. Selain itu, persebaran penduduk yang kurang merata juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi tersebut.

## **PEREKONOMIAN**

Permasalahan perekonomian berkisar pada masih rendahnya PDRB per kapita terendah, potensi unggulan yang tidak dapat dikembangkan (pertanian: kelapa sawit dan karet) dan akses permodalan yang sangat rendah serta SDM Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang kurang memiliki keterampilan yang memadai.

## **KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan di bidang kelembagaan dan pengawasan berkisar pada upaya penyempurnaan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan pembangunan. Khusus untuk kabupaten Nias Selatan, nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat dalam semboyan *Lakhōmi Sebua Wahasaradōdō* serta nilai-nilai perjuangan pemekaran Kabupaten tersebut diharapkan menjadi dasar moral pembentukan produk-produk hukum dalam rangka menjawab kebutuhan pembangunan kedepan.

## **TANTANGAN**

Tantangan utama yang ditemui pasca kejadian gempa bumi 28 Maret 2005 kemungkinan masih akan ditemui di masa mendatang. Tantangan tersebut adalah morbiditas beberapa penyakit menular, yang kemungkinan di masa mendatang akan meningkat. Faktor lingkungan dan sanitasi lingkungan perumahan yang belum terpelihara adalah sebab utamanya. Sektor infrastruktur juga perlu mendapat perhatian yang cukup, karena kondisi yang kurang memadai sudah terjadi sebelum gempa bumi. Pembangunan sektor infrastruktur erat kaitannya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias.

### **KABUPATEN NIAS SELATAN**

Di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memiliki banyak kawasan terumbu karang, tantangan yang dihadapi adalah kerusakan akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun sianida, dan pukot harimau. Padahal bila dikelola dengan baik, kawasan terumbu karang ini dapat menjadi objek wisata yang sangat menarik dan menguntungkan daerah di sisi lain.

### **KABUPATEN NIAS**

Potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Nias belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang terdapat di Pusat Kawasan Pembangunan Moale yaitu objek wisata dengan pantai indah pasir putih sepanjang 25 km pantai, ternyata belum memiliki akses jalan menuju tempat tersebut.

Pada sektor pertanian, masih banyak lahan pertanian yang belum diusahakan dengan berbagai komoditi unggulan seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, ubi jalar, ubi kayu, pisang, serta berbagai jenis sayuran (hortikultura). Sektor peternakan umumnya dibudidayakan oleh masyarakat di seluruh wilayah dengan jenis ternak antara lain sapi, kambing, babi, kuda, ayam, dan sejenis unggas lainnya.

## 6.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Selama masa rekonstruksi, dilaksanakan kebijakan membangun kembali NAD-Nias lebih baik dari sebelum tsunami (*to build back better*). Kebijakan tersebut meliputi: (1) pembangunan kembali masyarakat, (2) pembangunan kembali ekonomi, (3) pembangunan kembali infrastruktur, perumahan, dan permukiman, serta (5) pembangunan kembali pemerintahan, seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.

Selanjutnya, pada proses pembangunan pasca masa tugas BRR bulan April 2009, selain tetap mengikuti prinsip membangun lebih baik, program-program pembangunan jangka menengah di Provinsi NAD maupun Kepulauan Nias akan mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah. RPJMD tersebut, pada dasarnya disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) atau Qanun. Pelaksanaan RPJMD termasuk pembiayaannya, adalah upaya pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan di dalam RTRW tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pasal 32 ayat-1 Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya” yang meliputi program pembangunan wilayah dan pembangunan sektoral.

Kebijakan RPJMD yang dijabarkan dari Visi dan Misi masing-masing daerah, diuraikan secara singkat pada bab berikut ini.

### 6.2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007-2012

#### 6.2.1.1 VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

**Visi** Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana tertuang dalam RPJMD No.21 Tahun 2007 adalah:

*“Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.”*

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **misi** pembangunan jangka menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang meliputi aspek-aspek : (1) Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif, dan intuitif; (2) Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; (3) Penegakan hukum; (4) Pengembangan sumberdaya manusia; (5) Perekonomian; (6) Politik, (7) Sumber daya alam; dan (8) Adat istiadat, kebudayaan, dan olahraga.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Adapun arah **kebijakan umum** pembangunan pemerintah Provinsi NAD selama jangka waktu tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut:

1. Di **bidang pemerintahan, politik, dan hukum** adalah: (1) Menciptakan dan meningkatkan aparatur pemerintah yang bersih, profesional, dan Islami; (2) Melakukan upaya pro-aktif memfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran; (3) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan terluar; (4) Melaksanakan pendidikan politik yang sehat; (5) Merevitalisasi fungsi partai politik; dan (6) Melakukan pemetaan kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.
2. Di **bidang ekonomi** adalah: (1) Meningkatkan kesempatan kerja, peluang usaha serta kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); (2) Mendorong pengembangan kluster-kluster industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; (3) Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas melalui perluasan jaringan pasar regional, nasional dan internasional; (4) Penyederhanaan prosedur perizinan usaha; dan (5) melindungi aset daerah dan masyarakat dari resiko bencana.
3. Di **bidang infrastruktur** adalah: (1) Penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air; (2) Meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir, perbatasan dan kepulauan; (3) rehabilitasi rumah korban bencana/dhuafa; (4) Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota; (5) Mengendalikan pencemaran lingkungan; (6) Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan; dan (7) Pengamanan hutan secara intensif.
4. Di **bidang pendidikan** difokuskan pada empat aspek, yaitu: (a) Pemerataan dan perluasan akses; (b) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing lulusan; (c) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; dan (d) Pengembangan sistem pendidikan yang bernuansa Islami.
5. Di **bidang kesehatan** adalah: (1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus; (2) Pengembangan tenaga kesehatan; (3) Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (4) Pengembangan fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran.
6. Di **bidang agama, sosial, dan budaya** adalah: (1) Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai; (2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang Syari'at Islam; (3) Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syari'at Islam; (4) Memperbaiki dan menyempurnakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; (5) Meningkatkan kesejahteraan para penyandang cacat dan komunitas dhu'afa; (6) Meningkatkan peran lembaga kemanusiaan dalam penanggulangan bencana; (7) Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (8) Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan; dan (9) melaksanakan program dan kegiatan untuk pengembangan nilai seni budaya.

### 6.2.1.2. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH

Berdasarkan draft RTRW Provinsi NAD tahun 2007-2022, wilayah wilayah yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

1. Lhokseumawe sebagai pintu gerbang pengembangan perindustrian.
2. Aceh Barat sebagai pintu gerbang pengembangan pertanian.
3. Banda Aceh sebagai basis perindustrian dan perdagangan.
4. Sabang sebagai pusat kepariwisataan.

Pembangunan wilayah tersebut menekankan pada pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan prioritas pemulihan kegiatan ekonomi serta kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan.

Pencegahan pemanfaatan daerah-daerah rawan bencana yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan pemulihan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana adalah bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan infrastruktur diarahkan untuk mengurangi kesenjangan wilayah antara wilayah Timur dengan wilayah Tengah dan Barat.

IMT-GT (*Indonesian-Malaysia-Thailand Growth Triangle*) sebagai bentuk kerjasama regional tiga negara di bagian Utara Indonesia telah digunakan pula sebagai landasan pembangunan wilayah tersebut.

Sejalan dengan rencana pengembangan wilayah tersebut, secara hirarki ditetapkan pula pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah. Tabel VI-1 menjelaskan tentang lokasi kawasan yang akan dikembangkan, struktur pusat-pusat kegiatan dan lokasi pelabuhan maupun bandara yang ditetapkan sebagai pintu keluar dan masuk hasil-hasil kegiatan wilayah.

**Tabel 6.1 Rencana Struktur Ruang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

KAWASAN ANDALAN	KOTA DALAM KAWASAN			PELABUHAN	BANDAR UDARA
	PKN	PKW	PKL		
Kaw. Banda Aceh, dsk.	Banda Aceh - Sabang		Jantho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Sabang dan Malahayati</li> <li>• Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Ulee Lheue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara Sultan Iskandar Muda</li> <li>• Bandara Maimun Saleh</li> </ul>
			Sigli		
Kaw. Lhokseumawe, dsk.	Lhokseumawe	Langsa	Idi Rayeuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Krueng Geukeuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara Malikul Saleh</li> <li>• Bandara Rembele</li> <li>• Bandara Point "A"</li> </ul>
			Bireun		
			Blangkejeren		
			Karang Baru		
		Takengon	Simpang Tiga Redelong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Kuala Langsa</li> <li>• Pelabuhan Kuala Idi</li> </ul>	
			Lhoksukon		

KAWASAN ANDALAN	KOTA DALAM KAWASAN			PELABUHAN	BANDAR UDARA
	PKN	PKW	PKL		
Kaw. Meulaboh, dsk.	Meulaboh		Blang Pidie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Meulaboh</li> <li>• Pelabuhan Tapaktuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandara Cut Nyak Dhien</li> <li>• Bandara Cut Ali</li> <li>• Bandara Kuala Batu</li> <li>• Bandara Alas Leuser</li> <li>• Bandara Lasikin</li> <li>• Bandara Hamzah Fansyuri</li> </ul>
			Jeuram		
			Calang		
		Tapaktuan	Kutacane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Calang</li> <li>• Pelabuhan Sinabang</li> <li>• Pelabuhan Singkil</li> <li>• §Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Meulaboh dan Labuhan Haji</li> </ul>	
			Subulussalam		
			Sinabang		
			Singkil		

Sumber : draft RTRW Provinsi NAD 2007-2022

Pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan selama periode 2007-2012 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan PKN Kawasan  
Banda Aceh-Sabang dikembangkan sebagai PKN kawasan sesuai dengan kecenderungan integrasi yang terjadi. Implementasi PKN Kawasan yaitu pada distribusi sarana dan prasarana pendukung PKN. Pengembangan PKN di wilayah Bagian Timur Provinsi NAD (Lhokseumawe) berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan wilayah Bagian Timur Provinsi NAD. Pengembangan PKN di wilayah Bagian Barat Provinsi NAD (Meulaboh) berfungsi sebagai pendorong percepatan pertumbuhan wilayah Bagian Barat Provinsi NAD.
2. Pengembangan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)  
Tapaktuan, Takengon dan Langsa dikembangkan sebagai PKW. Pengembangan PKW di wilayah Bagian Barat-Selatan, Bagian Tengah dan Bagian Timur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pada kawasan-kawasan sekitarnya, terutama yang berada di dalam wilayah pelayanan masing-masing PKW.
3. Pengembangan PKL (Pusat Kegiatan Lokal)  
Pada setiap kabupaten akan dikembangkan minimal satu kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai PKL, yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi seluruh wilayah kabupaten yang bersangkutan..

### 6.2.1.3.RENCANA PEMBANGUNAN SEKTORAL

Program-program pembangunan sektoral di Provinsi NAD yang tertuang dalam RPJMD tahun 2007-2012 terbagi ke dalam enam bidang yaitu (1) Infrastruktur; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Agama, Sosial, Budaya; (5) Ekonomi; dan (6) Pemerintahan dan Hukum.

Program ini diklasifikasikan ke dalam 5 bidang pemulihan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD yaitu: (1) Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup; (2) Infrastruktur; (3) Sosial Budaya; (4) Perekonomian; dan (5) Kelembagaan dan Hukum. Hal ini ditujukan untuk melihat program-program pembangunan jangka menengah yang sejalan dengan bidang-bidang pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel 6-2 adalah rangkuman program pembangunan sektor di provinsi NAD tahun 2007-2012.

**Tabel 6.2 Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi - Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012**

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			07	08	09	10	11	12
Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Infrastruktur	Perumahan dan Permukiman						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan pada kawasan terisolir serta infrastruktur perdesaan</li> <li>• Pengembangan Rumah Sehat Sederhana</li> <li>• Pembangunan perumahan bagi masyarakat korban tsunami</li> <li>• Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan</li> <li>• Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong di areal permukiman</li> <li>• Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, air minum, dan air limbah</li> <li>• Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
		Tata Ruang						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Revisi Perda RTRWP NAD</li> <li>• Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah-Wilayah Provinsi</li> <li>• Revisi Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten/Kota</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
		Lingkungan Hidup						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>• Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup melalui Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengkajian Dampak Lingkungan, Koordinasi Penyusunan AMDAL.</li> <li>• Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
Infrastruktur		Jalan dan jembatan						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan pengawasan teknis jalan/ jembatan di Provinsi NAD</li> <li>• Pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi NAD</li> <li>• Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi NAD</li> <li>• Penanganan jalan perkotaan di Provinsi NAD</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
		Perhubungan Udara						
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan di antaranya pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan di :</li> <li>• Bandara SIM, Cut Nyak Dien-</li> <li>• Meulaboh, T.Cut Ali-Tapaktuan, Lasikin-</li> <li>• Sinabang, Leuser-Kutacane, Maimun Saleh-</li> <li>• Sabang, Rembele-Takengon, Kuala batee-Blang</li> <li>• Pidie</li> </ul>		√	√	√	√	√

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			07	08	09	10	11	12
		Perhubungan Laut <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut di : Pelabuhan Malahayati, Sabang, Meulaboh, Calang, Sinabang</li> <li>• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau &amp; Penyeberangan melalui pembangunan pelabuhan penyeberangan lamteng, dermaga balohan, fasilitas dermaga Ulee Lheue, Meulaboh, Sinabang, dan Calang</li> </ul>	- √	√ -	√ -	√ -	√ -	√ √
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhubungan Darat</li> <li>• § Pembangunan gedung terminal tipe A Banda Aceh</li> <li>• § Peningkatan terminal Tipe C menjadi Tipe A di Meulaboh</li> <li>• § Pembangunan Kantor Damri di Meulaboh</li> <li>• § Pembangunan sarana prasarana pos dan stasiun telekomunikasi serta penyediaan radio dinas perhubungan</li> </ul>		√ √	√			√ √
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energi dan Listrik</li> <li>• § Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan melalui pengembangan listrik perdesaan, pembangunan PLTMH, pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya</li> </ul>	√	√	√	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Air</li> <li>• § Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>• § Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</li> <li>• § Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>• § Pengendalian banjir pada daerah tangkapan sungai dan badan-badan sungai</li> <li>• § Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> </ul>	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dan informasi</li> <li>• § Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi termasuk sumberdayanya</li> <li>• § Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, melalui media pers</li> </ul>	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
Sosial Budaya	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § Program pendidikan anak usia dini melalui pengadaan alat praktek, dan pengembangan kurikulum</li> <li>• § Program pendidikan non formal</li> <li>• § Program manajemen pelayanan pendidikan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, peltihan, dan seminar</li> </ul>	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √

5 Bidang Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD	Bidang Pembangunan RPJMD tahun 2007-2012	Program Jangka Menengah Tahun 2007-2012	Tahun Pelaksanaan					
			07	08	09	10	11	12
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>§ Program Perbaikan Gizi Masyarakat mencakup penanggulangan KEP, Anemia dan Gizi Besi.</li> <li>§ Program pengembangan lingkungan sehat</li> <li>§ Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak</li> </ul>	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
	Agama, Sosial, Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kependudukan</li> <li>§ Program transmigrasi lokal</li> <li>§ Pembinaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi melalui pengembangan wilayah tertinggal</li> <li>§ Pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi</li> </ul>	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosial</li> <li>§ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li> <li>§ Pembinaan Anak Terlantar</li> <li>§ Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</li> <li>§ Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</li> </ul>	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemuda dan Olah Raga</li> <li>§ Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</li> <li>§ Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</li> <li>§ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</li> </ul>	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan dan Anak</li> <li>§ Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan memfasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)</li> <li>§ Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT</li> </ul>	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √

**Catatan:**

- Uraian kegiatan di atas mencakup kegiatan di RPJMD NAD tahun 2007-2012 yang selaras dengan keberlanjutan pemulihan di wilayah NAD
- Kegiatan yang belum ada checklistnya dari tahun 2007-2012 merupakan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD namun

## 6.2.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH WILAYAH KEPULAUAN NIAS TAHUN 2006-2011

### 6.2.2.1 VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### KABUPATEN NIAS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2006-2011 adalah:

**‘Mewujudkan Nias Baru yang Maju, Beriman, Mandiri dan Sejahtera’.**

Sedangkan visi dan misi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Kabupaten Nias adalah:

**“Membangun Nias Lebih Baik”.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan pokok pembangunan (*Grand Policies*) Kabupaten Nias 2006-2011 yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber tertinggi dalam penataan kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kehidupan berpemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui kebijakan, sikap, tindakan dan perilaku pemerintahan.
3. Mendorong penegakan hukum secara konsisten, meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat serta pemberantasan KKN.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif, memiliki etos kerja serta mampu berkompetensi dalam ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi melalui pendidikan formal dan informal.
5. Membangun fondasi perekonomian daerah melalui akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal melalui sarana dan prasarana/infrastruktur daerah.
6. Mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah, pembenahan manajemen kepegawaian dan pembinaan aparatur dengan mengoptimalkan keberadaan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
7. Membina hubungan kerjasama dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak termasuk lembaga legislatif, lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan (lokal, regional, nasional) dan NGO-NGO, dunia usaha dan institusi lainnya guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat.
8. Mendorong percepatan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan berdemokrasi.
9. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu pilar kemandirian daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
10. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

## KABUPATEN NIAS SELATAN

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nias Selatan 2006-2011 adalah:

**”Mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin dalam Kabupaten Nias Selatan yang terus berkembang, maju, mantap dan mandiri”.**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan yang meliputi aspek-aspek : (1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME; (2) Aparatur pemerintah yang profesional, produktif, dan transparan; (3) Persatuan dan kesatuan; (4) Keadilan pembangunan; (5) Pembangunan infrastruktur; (6) Pembangunan berbasis potensi unggulan, (7) Koordinasi, keterpaduan, dan keselarasan fungsi lembaga daerah; (8) Supremasi hukum; (9) Penciptaan situasi yang kondusif, (10) Peningkatan kualitas SDM; (11) Sistem ekonomi kerakyatan; (12) Otonomi daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, beberapa kebijakan pembangunan jangka menengah dirumuskan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 meliputi :

1. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya
2. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan
3. Peningkatan pembangunan daerah
4. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik
5. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kehidupan demokrasi

### 6.2.2.2. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH

Sesuai dengan rekomendasi penataan ruang Rencana Induk Rehabilitasi-Rekonstruksi Nias, identifikasi potensi bencana yang dalam rencana tata ruang dan point-point mitigasi bencana dalam UU Penanggulangan Bencana, pengembangan wilayah Kepulauan Nias mengakomodasi manajemen penanggulangan bencana secara komprehensif, termasuk di dalamnya : pemetaan, pencegahan, peringatan dini, mitigasi, kesiapsiagaan, pemulihan dan rehabilitasi bencana.

Selanjutnya, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Nias dan Nias Selatan berdasarkan draft RTRW Kabupaten Nias 2006-2016 dan draft RTRW Kabupaten Nias Selatan 2004-2014 diuraikan pada bab berikut ini.

## KABUPATEN NIAS

Pembangunan wilayah di kabupaten Nias dibagi kedalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu:

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Utara, meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Utara dengan **Lahewa** sebagai pusat SWP. Pengembangan SWP ini diarahkan ke tenggara pada ketinggian di atas 20 m dpl. Kawasan pantai dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas.

Fungsi dan peran SWP ini adalah (i) kawasan kunjungan wisatawan, (ii) penyedia bahan baku dalam pengembangan agroindustri dan industri kecil dan (iii) kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut;

2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Timur, meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Timur atau sering disebut dengan Nias Utama atau Nias Induk dengan Gunungsitoli sebagai pusat SWP.  
Fungsi dan peran SWP ini adalah (i) Pusat Pelayanan Utama di Pulau Nias, (ii) kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan (iii) kawasan pengumpul hasil pertanian dan perkebunan dari daerah belakangnya kemudian didistribusikan ke daerah lain dengan memanfaatkan potensi pelabuhan
3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) untuk kawasan Barat, meliputi seluruh kecamatan yang termasuk kedalam kawasan Nias bagian Barat dengan Sirombu (Tetesua) sebagai pusat SWP. Pengembangan SWP ini diarahkan ke dalam, di atas ketinggian 20 m dpl. Kawasan pantai diarahkan sebagai kawasan pariwisata pantai, pertanian lahan basah, dan perkebunan yang di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas (yang dipersyaratkan disertai ketentuan-ketentuan teknis, misalnya: bangunan tahan gempa atau rumah panggung disertai escape road dan escape hill). Dan apabila masih bisa dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata maka perlu dilakukan suatu tindakan khusus dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan early warning system.  
Fungsi dan peran SWP ini adalah (i) Pemasok bahan baku untuk kegiatan agroindustri, terutama bahan baku karet, coklat dan kelapa, (ii) kawasan budidaya perikanan dan produksi hasil tangkap laut, (iii) kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan (iv) penggerak pembangunan untuk wilayah Kabupaten Nias bagian barat;

### **KABUPATEN NIAS SELATAN**

Mengacu pada draft RTRW Kabupaten Nias Selatan 2004-2014, pembangunan wilayah di Kabupaten ini dibagi kedalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu:

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Telukdalam**), berpusat di Telukdalam dengan wilayah Kecamatan Telukdalam.  
SWP ini dikembangkan ke arah utara pada ketinggian 20 m dpl, sedangkan di kawasan pantai dikembangkan sebagai kawasan perkebunan dan nelayan dengan di dalamnya terdapat permukiman desa terbatas.
2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Boronadu**), berpusat di Boronadu yang meliputi Kecamatan Gomo, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Hibala.
3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP – **Moale**), berpusat di Moale dengan wilayah Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Amandaraya.  
Pengembangan SWP yang berfungsi sebagai kawasan wisata ini diarahkan ke timur dengan pertimbangan aspek mitigasi bencana dan *early warning system*.

### **6.2.2.3. RENCANA PENGEMBANGAN SEKTORAL**

#### **KABUPATEN NIAS**

Program pembangunan sektor di Kabupaten Nias untuk jangka waktu 2006-2011 terbagi atas 3 (tiga) bagian:

1. Program sektoral/program SKPD  
Program sektoral terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun urusan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan

perempuan, keluarga bencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah [KUKM], penanaman modal daerah, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan dan komunikasi dan informatika. Sementara urusan pilihan meliputi: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

## **2. Program lintas sektoral**

Program ini meliputi pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan, pembukaan daerah terisolir, peningkatan dan pengawasan kinerja aparatur dan pengendalian penduduk

## **3. Program kewilayahan**

**Program ini** merupakan program yang harus dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi atau dengan instansi vertikal di daerah. Program ini meliputi: pencegahan penyebaran flu burung dan penyakit menular yang sangat berbahaya, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif, pengembangan agrobisnis wilayah pesisir dan kepulauan, pengawasan dan pengamanan perairan dan pulau-pulau terluar, pertukaran pemuda dan pelajar antar kabupaten/kota

### **KABUPATEN NIAS SELATAN**

Program-program pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2006-2011 terbagi ke dalam sembilan bidang: pembangunan wilayah, infrastruktur, ekonomi, pemerintahan, hukum dan politik, sumber daya manusia, kemasyarakatan dan kebudayaan, agama, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tabel 6-3 dan Tabel 6-4 berikut ini adalah ragkuman RPJM Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan (2007-2011) yang disusun berdasarkan bidang pembangunan dan 4 (empat) pilar rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dimasukkannya pilar rehabilitasi dan rekonstruksi Nias kedalam matriks RPJM diharapkan menjadi pondasi awal bagi pengembangan potensi daerah selanjutnya. Rencana program pembangunan jangka menengah (2006-2011) Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan kemudian diklasifikasikan berdasarkan 4 pilar rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias untuk melihat kesesuaiannya dengan bidang pembangunan RPJMD. Secara paralel, program-program tersebut juga dibandingkan dengan Rencana Aksi (*Action Plan*) BRR Nias yang sudah terealisasi pada tahun 2005 dan 2006. Hal ini bertujuan untuk memilah, program-program jangka menengah mana yang sudah pernah dilakukan oleh BRR Nias dan mana yang belum, agar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah selanjutnya.

**Tabel 6.3 Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias**

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			06	07	08	09	10	11	
INFRASTRUKTUR YANG EFEKTIF	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jalan dan jembatan dari ibukota Kabupaten ke ibukota Kecamatan dan antar ibukota Kecamatan</li> </ul>	√						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan desa yang menghubungkan kota kecamatan, antara lain:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Dekha -Lahemo ke Kota Kecamatan Lolofitu Moi melalui Tuhemberua -Lewa-lewa</li> <li>Desa Sihare'o ke kecamatan Ma'u</li> </ul> </li> </ul>							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun jaringan listrik</li> <li>Membangun irigasi, sungai, pengendalian banjir</li> </ul>	√						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan sarana perhubungan ke pulau-pulau kecil yang potensial</li> <li>Mendorong peningkatan pelayanan perhubungan laut dan udara ke dan dari Kabupaten Nias</li> </ul>	√						
	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi bandara dan pelabuhan</li> </ul>	√						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak mengeluarkan sertifikat hak milik pada kawasan konservasi seperti sempadan sungai, pantai dan daerah perlindungan lainnya</li> </ul>							
	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pengembangan jaringan pelayanan dan kualitas layanan para penyedia jasa layanan telekomunikasi</li> <li>Memastikan adanya sarana telekomunikasi dari pemerintah kabupaten ke kecamatan dan dari setiap kecamatan ke desa-desa di wilayahnya.</li> </ul>	√						
	Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan peralatan komunikasi sistem radio</li> </ul>							

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			06	07	08	09	10	11
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kerjasama dengan pihak PT Perum Perumahan untuk penyediaan rumah keluarga miskin yang belum tertangani oleh BRR</li> </ul>	√					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan sarana air minum dan drainase</li> </ul>	√					
	Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat penyusunan RUTR-IKK Kecamatan yang baru</li> <li>Monitoring dan pengendalian tata ruang yang lebih ketat</li> </ul>						
KELEMBAGAAN DAN SOSIAL MASYARAKAT YANG KOKOH	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendekatkan pelayanan pendidikan khususnya pembangunan gedung baru SLTP dan SLTA dengan memperlonggar persyaratan teknis</li> <li>Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah</li> <li>Membebaskan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar</li> </ul>	√					
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan khususnya di pusat-pusat wilayah pengembangan</li> <li>Mempercepat revitalisasi posyandu</li> <li>Membebaskan keluarga miskin dari biaya pengobatan di Puskesmas dan RSU</li> </ul>	√					
	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan mulai tahap perencanaan dan pelaksanaan</li> <li>Pencegahan kepunahan biota langka</li> </ul>						
	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi</li> </ul>						
	Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong GOW untuk mampu merealisasikan program kerjanya</li> </ul>	√					

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			06	07	08	09	10	11
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membebaskan segala biaya penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang bagi pasangan usia subur di Puskesmas, RSUD milik Pemda</li> <li>• Penghargaan kepada laki-laki yang melakukan operasi vasektomi</li> </ul>						
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin ketersediaan panti bagi anak yatim</li> <li>• Mendorong partisipasi masyarakat</li> </ul>						
	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi tenaga kerja dari Kabupaten Nias sehingga tidak menjadi korban trafficking</li> </ul>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan tenaga kerja</li> <li>• Bantuan Modal kerja</li> </ul>	√					
	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong organisasi sanggar budaya</li> <li>• Penghargaan bagi budayawan yang berdedikasi</li> </ul>	√					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan kehidupan beragama</li> </ul>	√					
	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertukaran pemuda dan pelajar</li> </ul>						
	Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong partai politik untuk senantiasa memberikan pendidikan politik</li> <li>• Mengupayakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD</li> </ul>						
	Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghematan anggaran aparatur negara</li> <li>• Reformasi birokrasi</li> </ul>						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah</li> <li>• Rehabilitasi bangunan khusus</li> </ul>	√					
	Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberhentikan sementara dari jabatannya bagi PNS yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus TIPIKOR</li> <li>• Bantuan hukum bagi PNS yang didakwa melakukan TIPIKOR</li> </ul>						

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			06	07	08	09	10	11
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama program dan pembiayaan kepada LSM/organisasi untuk melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat di lokasi terisolir</li> </ul>						
	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kearsipan daerah yang memadai</li> </ul>						
EKONOMI YANG BERSAING	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar dari luar daerah</li> </ul>	√					
	Penanaman Modal Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan pemberian izin usaha satu atap</li> <li>Melakukan penyertaan modal daerah</li> </ul>	√					

Sumber: RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011 & Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006

Keterangan: Program yang digarisbawahi adalah program yang telah terealisasi dalam Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006 namun tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias 2006-2011, sedangkan Checklist [√] menandakan program yang sudah dilaksanakan oleh BRR Nias

**Tabel 6.4 Klasifikasi Program Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan 4 Pilar Rehabilitasi-Rekonstruksi dan Bidang Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan**

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan					
			06	07	08	09	10	11
Infrastruktur yang efektif	Infrastruktur	<p>Prasarana Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas wilayah pedesaan, wilayah perbatasan maupun kepulauan</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana alat-alat berat</li> <li>• Pembangunan jalan desa yang menghubungkan kota kecamatan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Bawolatow (Kecamatan Lahusa) ke Desa Golambanua I (Kecamatan Lahusa) ✓</li> <li>• Desa Golambanua I (Kecamatan Lahusa) ke Desa Hilinawalo (Kecamatan Teluk Dalam) ✓</li> </ul> </li> <li>• Lalu lintas Angkutan Jalan</li> <li>• Peningkatan keterpaduan antar kota</li> <li>• Peningkatan keterjangkauan pelayanan transportasi umum ✓</li> <li>• Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan darat</li> <li>• Peningkatan kualitas angkutan jalan darat</li> </ul> <p>Transportasi Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pelayanan angkutan laut</li> <li>• Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan transportasi laut</li> <li>• Pembangunan prasarana transportasi laut</li> </ul> <p>Transportasi Udara (bandara)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi dan Informasi</li> <li>• Pengadaan peralatan komunikasi sistem radio</li> </ul>						

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			06	07	08	09	10	11	
Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana kesepakatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang, dan evaluasi</li> <li>Koordinasi antara kecamatan/ desa dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam penataan ruang</li> <li>Penyusunan norma, standard, pedoman, manual</li> <li>Penyusunan arahan pengembangan kawasan perbatasan</li> <li>Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah</li> <li>Jaringan pipa air bersih</li> <li>Pembangunan tempat penampungan air</li> <li>Normalisasi air bersih</li> <li>Rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih</li> </ul>	√   √ √ √ √ √						
Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan yang kokoh	Pemerintahan, Hukum, dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya Good Governance</li> <li>Penyusunan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</li> <li>Peningkatan partisipasi masyarakat</li> <li>Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah Provinsi</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan</li> <li>Pemekaran Kecamatan, Desa, dan Kelurahan</li> <li>Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa</li> <li>Tapal batas wilayah pemerintahan Kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan yang permanen di Nias Selatan</li> <li>Pemetaan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan</li> </ul>	√  √	√					
	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan wajib belajar dan pembinaan pendidikan dasar 9 tahun dan pra sekolah</li> </ul>							

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			06	07	08	09	10	11	
	Kemasyarakatan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat</li> <li>Peningkatan kerukunan masyarakat</li> <li>Bantuan Gedung Kursus Wanita</li> <li>Pengelolaan situs budaya dan rumah adat</li> <li>Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</li> <li>Pembangunan panti asuhan</li> </ul>	√ √ √ √						
	Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan, pengajaran, penyuluhan keagamaan</li> <li>Pelaksanaan toleransi antar umat beragama</li> <li>Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik</li> <li>Membantu pembangunan sarana ibadah</li> <li>Membantu kegiatan pembinaan keagamaan</li> <li>Menciptakan kerjasama pembangunan sarana dan prasarana keagamaan</li> </ul>	√ √						
	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisir potensi SDA dan lingkungan hidup</li> <li>Pengendalian kawasan ekosistem rawan kerusakan</li> <li>Peningkatan akses informasi SDA dan lingkungan</li> <li>Rencana pengelolaan SDA secara berkelanjutan</li> <li>Peningkatan kegiatan perlindungan SDA</li> <li>Peningkatan penghijauan melalui kegiatan reboisasi</li> <li>Penurunan pelanggaran hukum terhadap SDA dan LH</li> <li>Konservasi dan pemanfaatan lahan kritis</li> <li>Peningkatan pengendalian sampah kota</li> <li>Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup</li> <li>Penyediaan Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</li> </ul>	√						

4 Pilar Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kepulauan Nias	Bidang Pembangunan RPJMD 2006-2011	Program Jangka Menengah Tahun 2006-2011	Tahun Pelaksanaan						
			06	07	08	09	10	11	
Ekonomi yang bersaing	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan struktur ekonomi berbasis pertanian</li> <li>• Pengembangan hasil pertanian berorientasi pasar</li> <li>• Pengembangan produk olahan (agro industri)</li> <li>• Pengembangan balai penyuluhan (BPP) produk lokal regional</li> <li>• Meningkatkan pengawasan mutu pupuk pestisida</li> <li>• Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian</li> <li>• Publikasi metode maupun paket usaha pertanian</li> <li>• Bantuan modal kerja industri rumah tangga</li> <li>• Pengadaan peralatan tangkap ikan</li> <li>• Pembentukan kelompok nelayan</li> <li>• Pengadaan peternakan</li> </ul>	√						

Sumber: RPJMD Nias Selatan 2006-2011 & Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006

Keterangan: Program yang digarisbawahi adalah program yang telah terealisasi dalam Action Plan BRR Nias di tahun 2005-2006, namun tidak tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan, sedangkan Checklist [√] menandakan program yang sudah dilaksanakan oleh BRR Nias

### 6.3 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB STAKEHOLDERS DALAM KEBERLANJUTAN PEMULIHAN WILAYAH PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Beberapa program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga bulan April 2009 mungkin saja belum selesai dilaksanakan pada saat itu. Keberlanjutan dari program dan kegiatan berikutnya akan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten. Pembagian kewenangan ini berdasarkan fungsi dari aset-aset yang telah ditransfer oleh BRR, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada tabel berikut diuraikan mengenai pembagian peran tersebut secara sistematis berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

**Tabel 6.5 Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias**

PIHAK	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pemerintahan Provinsi	<p>Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi</p> <p>Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</li> <li>• penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</li> <li>• penyediaan sarana dan prasarana umum;</li> <li>• penanganan bidang kesehatan;</li> <li>• penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;</li> <li>• penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;</li> <li>• pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;</li> <li>• fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>• pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>• pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>• pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;</li> <li>• pelayanan administrasi umum pemerintahan;</li> <li>• pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota</li> </ul>

PIHAK	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pemerintahan Kabupaten/Kota	<p>Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan pemkab/ Pemkot</p> <p>Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/ kota adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;</li> <li>• penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;</li> <li>• penyediaan sarana dan prasarana umum;</li> <li>• penanganan bidang kesehatan;</li> <li>• penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>• penanggulangan masalah sosial;</li> <li>• pelayanan bidang ketenagakerjaan;</li> <li>• fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;</li> <li>• pengendalian lingkungan hidup;</li> <li>• pelayanan pertanahan;</li> <li>• pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;</li> <li>• pelayanan administrasi umum pemerintahan;</li> <li>• pelayanan administrasi penanaman modal;</li> <li>• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya</li> </ul>
Pemerintah Pusat	<p>Melaksanakan kegiatan-kegiatan pusat di daerah melalui kementerian/lembaga terkait</p> <p>Urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah bidang : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal nasional</p> <p>Dalam menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.</p>
Hubungan Antar Pemerintah Daerah	<p>Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;</li> <li>• pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;</li> <li>• pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan</li> <li>• pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.</li> </ul> <p>Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;</li> <li>• kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan</li> <li>• pengelolaan perijinan bersama bidang pelayanan umum</li> </ul> <p>Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;</li> <li>• kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan</li> <li>• pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.</li> </ul>

PIHAK	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Hubungan Antar Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah	<p>Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;</li> <li>• pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan</li> <li>• pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.</li> </ul>
	<p>Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;</li> <li>• pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan</li> <li>• fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.</li> </ul>
	<p>Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;</li> <li>• bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan</li> <li>• penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.</li> </ul>

Sumber : UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007



# GLOSSARY

ACT International	Action by Churches Together Alliances
Action Plan	Rencana Aksi
ADB	Asian Development Bank
AIPRD	Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development
ALGAP	Aceh Local Governance Action Program
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AMF	Aceh Micro Finance
AMM	Aceh Monitoring Mission
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ARC	American Red Cross
ASDP	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
AUSAID	Australian Agency for International Development
Bakornas	Badan Koordinasi Nasional
Bapel	Badan Pelaksana
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappedalda	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
Blueprint	Rencana Induk
BMG	Badan Meteorologi dan Geofisika
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BRA	Badan Reintegrasi-Damai Aceh
BRR	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
Bufferzone	Daerah penyangga

Capacity Building	Pengembangan kapasitas kelembagaan
CARE International	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International
CBDRM	Community Based Disaster Risk Management
CBM	Confidence Building Measure
CFAN	Coordination Forum for Aceh and Nias
CIDA	Canadian International Development Agency
CORDAID	Catholic Organization for Relief and Development Aid
CRC	Canadian Red Cross
CSR	Corporate Social Responsibility
DAK	Dana Alokasi Khusus
Dana Dekonsentrasi	Dana pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dinas-dinas/sektor
DAU	Dana Alokasi Umum
DEC UK	Disaster Emergency Committee United Kingdom
DED	Detail Engineering Design
DIPA	Daftar Isian Penggunaan Anggaran
DRM	Disaster Risk Management
DRPPHLN	Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri
DRR	Disaster Risk Reduction
EC	European Commision
ECHO	European Commision Humanitarian Aid Office
EDAM	Economic Development Association of Minnesota
EDC	Education Development Center
EE	Environmental Education (Pendidikan Lingkungan)
ESA	European Space Agency
Escape Hills	Bukit penyelamatan dari air bah tsunami
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETESP	Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ADB)
Exit Strategy	Program pengalihan dari BRR ke Pemda
FAO	Food and Agriculture Organization
FBU	Fasilitas Bangunan Umum
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
Good Governance	Tata pemerintahan yang baik
GTZ	German Technical Cooperation
IDB	Islamic Development Bank
IDLO	International Development Law Organization
ILO	International Labour Organization
IOM	International Organization for Migration
IREP	Infrastructure Reconstruction Enabling Program
IRFF	Infrastructure Reconstruction Financing Facility
JBIC	Japan Bank for International Cooperation
JICA	Japan International Cooperation Agency
JICS	Japan International Cooperation System
K3M	Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
MDF	Multi Donor Fund
MDTF	Multi Donor Trust Fund
Midterm Review	Evaluasi Paruh Waktu (EPW)
NGO	Non Government Organizatiom

NISM	Nias Islands Stakeholder Meeting
NZAID	New Zealand Agency for International Development
Off-Budget	Dana bersumber dari non-APBN (donor)
On-Budget	Dana bersumber dari APBN
P3RIRRWANS	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatra Utara
PDCS	Planning, Design, & Construction Supervision
Pemda	Pemerintah Daerah
PHLN	Pinjaman dan Hutang Luar Negeri
PHO	Provinsional Hand Over
PMI	Palang Merah Indonesia
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PSD	Prasarana dan Sarana Dasar
Qanun	Peraturan Daerah NAD
RALAS	Rehabilitation of Aceh Land Administration System
RAN-D	Recovery Aceh Nias - Database
RANTF	Recovery Aceh Nias Trust Fund
RAPKD	Rencana Aksi Pengembangan Kapasitas Daerah
RCRC	Red Cross/ Red Crescebt ( Palang Merah / Bulan Sabit Merah)
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
REA	Renewable Energy Association
Regionalisasi	Pembagian wilayah operasional
Renaksi	Rencana Aksi
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKA/KL	Rencan Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RR	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SAK	Satuan Anti Korupsi
SAR	Search and Rescue
Satker	Satuan Kerja
SDA	Sumber Daya Air
SEA	System Engineering & Assesment
Sekber	Sekretariat Bersama
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	Standar Operating Procedure
TPA	Tempat Pembuangan Akhir
Trust Fund	Dana yang diluncurkan ke tahun berikutnya
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UN	United Nation
UNDP	United Nation Development Program
UNEP	United Nations Environment Programme
UNFPA	United Nations Fund for Population Activities
UNHCR	United Nation High Commissioner for Refugees
UNICEF	United Nation Childern's Fund
UNOPS	United Nation Office for Project Services
UNORC	United Nations Recovery Coordinator for Aceh and Nias

Unsyiah	Universitas Syiah Kuala
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
USAID	United State Agency for International Development
UUPA	Undang-undang Pemerintahan Aceh
Wanrah	Dewan Pengarah
Wanwas	Dewan Pengawas
Watsan	Water and Sanitation
WB	World Bank